

BMP.UKI: IN-01-TKP-IPOL-VI-2024



**BUKU MATERI PEMBELAJARAN
KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Indah Novitasari, M.Si (Han)

Gaston Otto Malindir, M.I.P

Editor:

Indah Novitasari, M.Si (Han)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



**BUKU MATERI PEMBELAJARAN
KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Indah Novitasari, M.Si (Han)
Gaston Otto Malindir, M.I.P

Reviewer:

Indah Novitasari, M.Si (Han)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peran dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan politik berperan sebagai penopang system politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan.

Buku Materi Pembelajaran (BMP) ini dibuat dengan tujuan membantu mahasiswa untuk dapat memahami tentang Kekuatan Politik di Indonesia baik yang bersifat individu maupun kelembagaan. Di Indonesia infrastruktur politik utama terdiri dari (1) Partai politik (*Political Party*), (2) Kelompok Kepentingan (*Interest group*), (3) Kelompok penekan (*pressure group*), dan(4) Media Komunikasi Politik. Melalui modul ini, mahasiswa akan diberikan pendalaman terkait dengan kekuatan politik di Indonesia dan perkembangannya yang dimulai pada zaman penjajahan, era kemerdekaan, sampai pasca reformasi. Beberapa organisasi atau kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers, Gerakan Mahasiswa dan Buruh, Militer, Birokrasi dan Parlemen, Militer, serta Gerakan Feminisme & *Buzzer* yang diyakini sebagai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang lahir dari proses dan era yang berbeda akan secara spesifik dipelajari oleh mahasiswa dalam BMP ini.

Pada akhirnya harapan kami bahwa mahasiswa mampu menggunakan BMP ini sebagaimana mestinya, serta menjadi panduan utama dalam setiap proses pembelajaran pada Matakuliah Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia.

Jakarta, 29 Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Singkatan	iv
Daftar Lampiran	v
Petunjuk Penggunaan BMP	v
Rencana Pembelajaran Semester	vi
Modul 1 Ideologi, Elit dan Aktor Politik	1
Kegiatan Pembelajaran 1: Ideologi Politik	3
Kegiatan Pembelajaran 1 : Elite dan Aktor Politik	62
Modul 2 Budaya, Partisipasi dan Kekuatan Politik	76
Kegiatan Pembelajaran 1: Budaya Politik dan Partisipasi Politik	78
Kegiatan Pembelajaran 2: Konsep Kekuatan Politik	83
Modul 3 <i>Civil Society</i> dan Pekerkembangannya di Indonesia	112
Kegiatan Pembelajaran 1: Perkembangan <i>Civil Society</i> di Indonesia	114
Modul 4 LSM dan PERS	165
Kegiatan Pembelajaran 1: Peran dan Perkembangan LSM di Indonesia	167
Kegiatan Pembelajaran 2: Pers Dalam Proses Demokrasi di Indonesia	188
Modul V Gerakan Mahasiswa dan Buruh.....	209
Kegiatan Pembelajaran 1: Gerakan Mahasiswa di Indonesia ..	211
Kegiatan Pembelajaran 2: Keterlibatan Buruh Dalam Politik	

Indonesia	233
Modul VI Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik di Indonesia	262
Kegiatan Pembelajaran 1: Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik	264
Modul VII Kekuatan Politik Lembaga Negara.....	302
Kegiatan Pembelajaran 1: Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	304
Kegiatan Pembelajaran 2: Parlemen Sebagai Lembaga Perwakilan	337
Modul VIII Kekuatan Politik Militer.....	353
Kegiatan Pembelajaran 1: Militer Sebagai Kekuatan Politik di Indonesia	355
Modul IX Kekuatan Politik Baru: Feminisme dan Buzzer .	401
Kegiatan Pembelajaran 1: Gerakan Feminisme Dalam Politik Indonesia	403
Kegiatan Pembelajaran 2: Keterlibatan Buzzer Dalam Politik Indonesia	431
Lampiran BMP	432

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Dimensi Hubungan NGO Dengan Pemerintah	121
Tabel 2. Suara Partai Yang Memiliki Basis Buruh Dalam Pemilu	164
Tabel 3. Dimensi Pelembagaan Partai Politik	186
Tabel 4. Implikasi Perubahan UU Pemilu Terhadap Parpol	197
Tabel 5. Model-Model Orientasi Militer Politik	253

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Relasi Kuasa Elit Politik	30
Gambar 2. Piramida Partisipasi Politik.....	49
Gambar 3. Hiaerarki Partisipasi Politik	50

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
NGO	Organisasi non pemerintah
Pemilu	Pemilihan Umum
TNI	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Penulisan Makalah	313
Lampiran 2. Struktur Penulisan Paper atau Artikel Ilmiah	317

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU MATERI PEMBELAJARAN

Buku Modul Pembelajaran (BMP) ini menjadi panduan pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami kekuatan-kekuatan politik baik secara konsep maupun penerapannya yang berkaitan dengan individu, lembaga, atau kelompok. Secara garis besar BMP ini akan menguraikan secara spesifik mengenai berbagai kelompok atau organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang diyakini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses politik di Indonesia. Beberapa kelompok organisasi yang dimaksud meliputi; Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers, Gerakan Mahasiswa dan Buruh, Militer, Birokrasi dan Parlemen, Militer, serta Gerakan Feminisme & *Buzzer*. Kelompok organisasi ditersebut memiliki sajarah Panjang mulai dari pra kemerdekaan, kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, serta memiliki kekuatan secara kelembagaan untuk mempengaruhi proses politik di Indonesia.

Mahasiswa akan sangat terbantu jika mempelajari BMP ini dalam kegiatan perkuliahan tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Oleh karena itu maka mahasiswa dapat menggunakan BMP ini sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran selama satu semester ke depan. BMP ini nantinya akan dibaca dan direview oleh mahasiswa yang hasilnya akan disampaikan pada saat perkuliahan untuk didiskusikan bersama.

Harapannya semoga BMP ini dapat membantu memudahkan proses perkuliahan, dan implementasi *student centered learning* berdasarkan kurikulum KKNI yang berlaku.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

B. Keterampilan Umum

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;

3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;
4. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya.

C. Keterampilan Khusus

1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
2. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;
3. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan darah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu;
4. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian; dan
5. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.

D. Pengetahuan

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat;
2. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat;
3. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat;
4. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris;
5. Menguasai substansi fatwas politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH KEKUATAN KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA

	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK						
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN		
Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia	731241044	Mata Kuliah Prodi	3	6	29 Januari 2024		
Otorisasi	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi		
	Indah Novitasari, M.Si (Han)		Indah Novitasari, M.Si (Han) Gaston Otto Malindir, M.I.P		Indah Novitasari, M.Si (Han)		
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap <ol style="list-style-type: none"> a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, danetika; c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 					

		<p>g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</p> <p>j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>2. Keterampilan Umum</p> <p>a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;</p> <p>c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;</p> <p>d. Mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>e. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>3. Keterampilan Khusus</p> <p>a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;</p> <p>b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;</p> <p>c. Mampu membandingkan praktik politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu;</p> <p>d. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian; dan</p>
--	--	---

		<p>e. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.</p> <p>4. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; c. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; d. Menguasai substansi fakta politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah;
		CPMK
		<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik; b. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia; c. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada; d. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

Deskripsi Singkat MK	<p>Matakuliah ini akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok atau organisasi yang diyakini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses politik di Indonesia. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik tersebut berasal dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Namun, dari sekian banyak kelompok-kelompok kekuatan politik dan organisasi di Indonesia, maka dikategorikan menjadi empat infrastruktur politik saja yang antara lain yaitu; (1) Partai politik (<i>Political Party</i>), (2) Kelompok Kepentingan (<i>Interest group</i>), (3) Kelompok penekan (<i>pressure group</i>), dan(4) Media Komunikasi Politik. Pada matakuliah ini mahasiswa akan diberikan pendalaman terkait dengan kekuatan politik di Indonesia dan perkembangannya yang dimulai pada zaman penjajahan, era kemerdekaan, sampai pasca reformasi yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers, Gerakan Mahasiswa dan Buruh, Militer, Birokrasi dan Parlemen, Militer, serta Gerakan Feminisme & <i>Buzzer</i>. Berbagai kekuatan politik tersebut akan memberikan penjelasan utuh tentang kekuatan-kekuatan politik dalam penyelenggaraan politik di Indonesia.</p>
Referensi Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrinaldi. (2014). <i>Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia</i>. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2. Budiardjo, Miriam. (2008). <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 3. Christenson et al. (1971). <i>Ideologies and Modern Politics</i>. New York: Dodd, Mead, and Company, Inc. 4. Cohen, Jean L., and Andrew Arato. (1992). <i>Civil Society and Political Theory</i>. Cambridge, Mass: MIT Press. 5. Crouch, Harold. (1999). <i>Militer dan Politik Di Indonesia</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 6. Hikam. (1999). <i>Demokrasi dan Civil Society</i>. Jakarta: LP3ES. 7. Humm, Maggie. (2007). <i>Ensiklopedia Feminisme</i>, Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 8. Katz, Richard S., & William Crotty. (2014). <i>Handbook Partai Politik</i>. Bandung: Nusa Media 9. Surjomihardjo, Abdurachman. (2002). <i>Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia</i>. Jakarta: Kompas. 10. Sumaryadi, I., Nyoman. (2016). <i>Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</i>. Bogor: Ghalia Indonesia.

Media Pembelajaran		Perangkat lunak:		Perangkat keras:				
		MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer		Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD				
Matakuliah syarat		Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, teori Politik						
Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan sumber belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya MK ini serta ruang lingkup MK dan Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan RPS 2. Diskusi perumusan bersama tata tertib dan etika perkuliahan 3. Diskusi kekuatan-kekuatan politik secara konsep dan garis besar 	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa mampu merumuskan kembali pentingnya MK ini serta ruang lingkup kekuatan-kekuatan politik di Indonesia	Mahasiswa mengenal dosen dan isi matakuliah serta mampu membuat rencana tugas selama satu semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dosen dan mahasiswa di kelas 2. Latar belakang dan tujuan matakuliah 3. Pembahasan RPS 4. Penjelasan sistem penilaian 5. Pembuatan kontrak belajar untuk satu semester 6. Ruang lingkup MK dan konsep kekuatan-kekuatan politik di Indonesia 	
2	Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang ideologi, aktor, dan elit politik.	<p><i>Ideologi, Aktor, dan Elit Politik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hakekat, karakteristik, dimensi, fungsi, dan jenis-jenis ideologi 	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; 2. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang ideologi, aktor dan elit politik. 	

		b. Elit dan aktor politik serta hubungan antar keduanya						
Mahasiswa/i mengetahui dan mampu memahami tentang konsep Civil Society dan perkembangannya dalam proses demokrasi di Indonesia	<i>Civil Society dan Perkembangannya di Indonesia</i>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses belajar berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan; 2. Mahasiswa mampu, menjelaskan tentang <i>civil society</i> 		

4	Mahasiswa/i mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai Kekuatan Politik LSM serta perannya dalam proses demokrasi di Indonesia	<p><i>Kekuatan Politik LSM: Peran dan Fungsi Dalam Proses Demokrasi di Indonesia</i></p> <p>a. Pengertian LSM b. Peran LSM c. Hubungan LSM dan Pem d. Ruang politik untuk NGO e. Perkembangan LSM dalam demokrasi</p>	Paparan dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama diskusi berlangsung	<p>1. Mahasiswa menjelaskan hasil bacaan modul dan mengelaborasi dengan sumber lainnya.</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang peran LSM dalam proses demokrasi di Indonesia.</p>	
5	Mahasiswa mampu menganalisa dan menjelaskan tentang Pers sebagai kekuatan politik di Indonesia.	<p><i>Peran dan Fungsi Pers Dalam Proses Demokrasi di Indonesia:</i></p> <p>a. Pengertian Pers b. Peran Pers c. Fungsi Pers</p>	Paparan dan tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses belajar berlangsung	<p>-Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan terhadap modul;</p> <p>-Mahasiswa mampu mampu menjawab pertanyaan terkait dengan topik yang dipaparkan</p>	

		Perkembangan Pers di Indonesia						
6	Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang gerakan mahasiswa dan proses politik di Indonesia	<p><i>Gerakan Mahasiswa dan Proses Politik di Indonesia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsep Gerakan Mahasiswa b. Peran dan fungsi. c. Prinsip d. Pekembangan Gerakan ekstra parlementer 	Paparan dan tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses belajar berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> -Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang gerakan mahasiswa; -Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan. 	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gerakan Buruh dalam politik Indonesia	<p><i>Gerakan Buruh Dalam Proses Politik di Indonesia</i></p>	Paparan, dan tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses belajar berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> -Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang gerakan mahasiswa. -Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan. 	

	Mahasiswa mampu menjelaskan dalam satu konsep yang mengaitkan materi-materi bahasan yang telah dipelajari sejak awal pertemuan	EVALUASI TENGAH SEMESTER	Tugas dan Essay	3 x 50 menit	Mahasiswa menjelaskan tentang beberapa materi perkuliahan yang telah dipelajari dalam satu konsep utuh atau berkaitan secara terstruktur	Kemampuan mahasiswa dalam menguraikan materi-materi yang telah dipelajari menjadi satu rangkaian/konsep berupa tulisan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman mahasiswa tentang materi-materi pertemuan sebelumnya - Uraian tertulis tentang beberapa konsep (yang telah dipelajari) yang saling berkaitan. 	30%
	Mahasiswa mampu menganalisis partai politik sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.	Kekuatan Sosial Politik Parpol <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Partai Politik. b. Peran dan Fungsi Partai Politik. c. Klasifikasi Partai Politik d. Sistem Kepartaian e. Rekrutmen Politik f. Pelembagaan Partai politik 	Paparan dan Tanya Jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar di kelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang Partai politik sebagai gerakan sosial politik. - Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan. 	

		g. Sejarah parpol di Indonesia. h. Demokrasi Parpol.						
10	Mahasiswa mampu memahami tentang Birokrasi sebagai kekuatan lembaga negara.	<i>Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	Paparan dan Tanya Jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan selama proses diskusi berlangsung	-Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. -Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan.	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuatan politik Parlemen sebagai lembaga perwakilan.	<i>Kedudukan Parlemen Sebagai Lembaga Perwakilan</i>	Paparan dan Tanya Jawab	3 x 50 menit	a. Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan selama proses diskusi berlangsung	Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang kedudukan Parlemen. Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan kelompok	2 %

12	Mahasiswa mampu menganalisa tentang kekuatan politik Militer.	Kekuatan Politik Militer Politik Militer. Orientasi politik Militer Kekuatan politik militer di Indonesia dari masa ke masa	Paparan dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses diskusi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang kekuatan politik Militer - Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan 	4%
13	Mahasiswa mampu menganalisa dan menjelaskan tentang Feminisme sebagai kekuatan politik baru	Gerakan Feminisme Dalam Politik Indonesia Sejarah Pengertian Gerakan Feminisme di Indonesia Keterlibatan perempuan dalam politik	Paparan dan Tanya Jawab	3 x 50 menit	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam proses belajar dikelas	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses diskusi berlangsung	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang Gerakan Feminisme dalam politik Indonesia</p> <p>Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan</p>	
14	Mahasiswa menganalisa dan menjelaskan tentang Buzzer sebagai	Keterlibatan Buzzer Dalam Politik Indonesia	Paparan dan Tanya Jawab	3 x 50	Mahasiswa memaparkan hasil bacaan terhadap Modul dan menjadi sentral dalam	Penilaian kualitatif berupa keaktifan mahasiswa selama proses	<p>a. Mahasiswa dapat menjelaskan hasil bacaan tentang keterlibatan Buzzer dalam politik Indonesia</p>	

	Kekuatan politik baru yang hadir di Indonesia pada tahun 2000an			Proses belajar.	Diskusi yang berlangsung di kelas	Mahasiswa mampu menjawab berbagai pertanyaan terkait paparan yang disampaikan	
	Mahasiswa memahami secara utuh mengenai materi yang telah dipelajari sejak pertemuan awal.	Review Keseluruhan Materi dan Pemantapan Karya Tulis Mahasiswa	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab	3 x 50 menit	Mendengarkan penjelasan dosen dan mengajukan pertanyaan	Mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh dari seluruh proses pembelajaran selama 1 semester	-Mahasiswa memiliki landasan yang cukup untuk memahami materi serta membuat karya tulis ilmiah.

Mahasiswa memahami dan mampu menyampaikan pemahaman terhadap materi perkuliahan melalui karya tulisa ilmiah	EVALUASI AKHIR SEMESTER	Tugas terstruktur	3 x 50 menit	Mahasiswa membuat karya tulis ilmiah yang mengacu pada salah satu topik pertemuan mingguan	Mahasiswa menjabarkan pemahaman terkait materi yang telah diperlajari dalam bentuk karya ilmiah	Ketepatan dalam menyajikan tulisan Penyajian materi yang terstruktur pada karya tulis ilmiah	30%
---	--	-------------------	--------------	--	---	--	-----

SISTEM PENILAIAN

A. Persyaratan Umum

1. Kehadiran:
 - a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
 - b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
 - c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
 - d. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

2. Perkuliahan:
 - a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.
 - b. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
 - c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
 - d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
 - e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
 - f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
 - g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.
 - h. Pada saat perkuliahan dengan metode daring, mahasiswa wajib menampilkan video dan mengisi form absensi secara online yang diberikan pada awal perkuliahan.

3. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasi terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

B. Persyaratan Khusus

1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut

- a. Post test: mahasiswa wajib mengikuti post test yang diadakan pada akhir perkuliahan baik secara individu atau kelompok. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
- b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
- c. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS. Review mata kuliah dapat berbentuk poster maupun infografis terkait dengan isu tertentu.
- d. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.

2. Gaya Selingkung Pengerajan Tugas

- a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:

- i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.

- iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
- iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
- b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
 - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
 - iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

C. Bentuk Evaluasi

1. Makalah
2. Artikel

Kriteria Penilaian Makalah dan Artikel

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Isi	60 %		
2	Referensi	15 %		
3	Jumlah Halaman	10 %		
4	Pengutipan	15 %		
Jumlah				

3. Seminar

No	Indikator	Bobot (B)	Nilai (N)	B X N
1	Simulasi	20 %		
2	Topik Dan Penyajian Jelas Dan Menarik	40%		
2	Kontekstual	20%		
3	Sumber Data Yang Valid Dan Mutakhir	20%		
Jumlah				

4. Aturan Untuk Presentasi Seminar:

- a. Dibuat dalam bentuk *power point*.
- b. Jumlah slide power point 15-20 slide, boleh menyertakan gambar jika diperlukan (maksimal 3 slide).
- c. Pada setiap slide mencantumkan sumber data dari mana anda mengutip (jika pada slide itu anda mengutip).
- d. Materi *power point* dikirimkan kepada dosen by *email* paling lambat satu minggu sebelum presentasi dilakukan.

D. Skala Nilai Akhir Dalam Huruf Dan Angka

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80, 0-100, 0	A	4, 0
75, 0-79, 0	A-	3, 7
70, 0-74, 9	B+	3, 3
65, 0-69, 9	B	3, 0
60, 0-64, 9	B-	2, 7
55, 0-59, 9	C	2, 3
50, 0-54, 9	C-	2, 0
45, 0-49, 9	D	1, 0
<44, 9	E	0

Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

Kehadiran : 10 %

Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah) : 30 %

Ujian Tengah Semester (UTS) : 30 %

Ujian Akhir Semester (UAS) : 30 %

Jakarta, 29 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik

Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han)

Dosen Pengampu



Gaston Otto Malindir, S.I.P., M.I.P

MODUL 1

IDEOLOGI, AKTOR DAN ELIT POLITIK

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam kegiatan mempelajari berbagai teori mengenai ideologi, actor, dan elit politik, mahasiswa terlebih dahulu memahami konsep atau teori tentang ideologi, aktor, dan elit politik serta kaitannya dalam konteks relasi kuasa. Konsep mengenai ideologi menjadi penting sebelum mahasiswa lebih jauh dikenalkan dengan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Konsep ideologi yang akan dipelajari inilah yang kemudian diadopsi oleh para aktor dan elit politik yang nantinya akan membentuk suatu kelompok, komunitas atau organisasi sebagai satu kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya maka mahasiswa juga perlu untuk diperkenalkan mengenai elit dan aktor politik, serta kaitanya dengan ideologi dalam konteks relasi kuasa. Adapun pokok-pokok bahasan pada modul 1 ini meliputi; hakekat ideologi, karakteristik ideologi, dimensi ideologi, fungsi ideologi, jenis-jenis ideologi, elit & aktor politik, dan relasi kuasa. Ketujuh pokok bahasan ini menjadi gambaran serta pengantar bagi mahasiswa untuk nantinya lebih dalam mempelajari mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang akan dibahas pada modul berikutnya.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 1 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan

- mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.
 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
 7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
 8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 1 ini adalah:

1. Mahasiswa mampu memahami tentang konsep ideologi, aktor dan elit politik serta hubungannya.
2. Dapat menjelaskan konsep ideologi, aktor dan elit politik, serta relasi yang terbangun antar ketiganya.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5) Kegunaan Modul 1

Kegunaan atau manfaat dari Modul 1 ini adalah membantu mahasiswa memahami mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dibangun atas dasar landasan ideologi yang kuat.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dalam modul ini adalah Konsep ideologi, elit dan actor politik yang dibagi ke dalam tujuh sub materi yang meliputi; (1) Hakekat ideologi, (2) Karakteristik Ideologi, (3) Dimensi ideologi, (4) Fungsi ideologi, (5) Jenis-jenis ideologi, (6) Elit dan Aktor politik, dan (7) Relasi kuasa

b. Kegiatan Pembelajaran**1) Kegiatan Pembelajaran 1**

- a) Ideologi, Elit dan Aktor Politik
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang definisi, hakikat, karakteristik, fungsi dan jenis Ideologi Politik.

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi**Hakikat Ideologi**

Setiap bangsa memiliki sistem nilai atau ideologi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, bahkan individu warga negara pun memiliki ideologi yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan dalam interaksinya dengan individu lainnya dalam suatu negara. Ideologi terlihat juga pada sikap politik para politisi dari partai politik. Hal itu terutama terlihat pada sistem nilai politisi yang partainya berkuasa dan politisi yang partainya sedang tidak berkuasa.

Ideologi memengaruhi kehidupan individu maupun sosial (Sargent, 1993). Setiap program televisi, berita surat kabar, informasi di media sosial, buku, bahkan film baik secara langsung maupun tidak langsung menghadirkan ideologi. Pemahaman terhadap berbagai ideologi akan membantu individu memahami sistem nilai yang dianut oleh individu lain terutama dalam suatu interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok.

Ideologi berubah menjadi ideologi politik manakala diimplementasikan dalam bidang politik. Ideologi politik berarti gagasan etis bagaimana suatu negara diselenggarakan untuk

mewujudkan tertib politik dan kesejahteraan masyarakat. Makna gagasan etis tersebut adalah sesuai dengan karakteristik ideologi. Sebagai contoh, individualisme-liberalisme memandang bahwa tertib politik akan terwujud manakala setiap individu diberi kebebasan dalam menentukan siapa yang dikehendaki menjadi pemimpin.

Dalam ideologi Pancasila, tertib politik akan terwujud apabila individu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sistem politik Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kesejahteraan akan terwujud jika individu diberi kebebasan tanpa ada hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ini adalah pandangan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ideologi Pancasila memandang bahwa kesejahteraan akan tercapai ketika individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak mematikan aktivitas ekonomi individu lainnya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi yang dikehjor oleh ideologi Pancasila agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ideologi politik hanya akan menjadi kajian teoretis belaka manakala tidak diikuti oleh perencanaan dan program yang jelas. Sebagaimana diungkapkan Carl J. Friedrich (dalam Christenson et al., 1971) bahwa ideologi merupakan system ide yang berhubungan dengan tindakan. Itulah sebabnya ideologi politik memerlukan tindakan pendukung yang loyal dan fanatik untuk menjadikan ideologi sebagai sistem nilai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa dalam mengelola berbagai aspek kehidupan nasional.

Istilah pertama yang muncul sebelum berkembang konsep ideologi politik adalah ideologi. Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ideologi adalah filsuf Perancis yaitu Antoine de Tracy pada tahun 1796 (Eatwell, 2004). Dia adalah seorang bangsawan yang bersimpati pada revolusi Perancis 1789. Karena pandangan dan keberpihakan tersebut, dia dipenjara oleh kelompok Jacobin yaitu kelompok revolusioner

sayap kiri yang dipimpin oleh Robespierre.

Setelah keluar dari penjara, de Tracy mencerahkan perhatian pada apa yang mengakibatkan tindakan barbar (teror) dan sikap tidak toleran yang berpengaruh terhadap tindakan brutal yang dilakukan kelompok Jacobin yang mengatasnamakan rakyat. De Tracy adalah pengikut rasional gerakan abad 18 yang dikenal sebagai penganut pencerahan yang bersikap kritis terhadap otoritas tradisional dan mistifikasi ajaran agama serta prihatin terhadap tindakan menyimpang dari gerakan Robespierre dan kelompok Jacobin lainnya.

- Secara etimologis, kata ideologi berasal dari kata idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea dalam *Webster's New Calligate Dictionary* berarti "Something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like" (sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana). Sedangkan logis berasal dari kata logos yang berarti word. Kata ini berasal dari *legein* yang berarti *to speak, logia berarti science* teori Sobur (2004:64). Secara terminologis, istilah ideologi didefinisikan oleh banyak kalangan secara berbeda-beda.
- Dalam pengertian yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang mengungkapkan, nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi Sobur (2004:64).
- Basley (1991:5) menegaskan bahwa ideologi dituliskan dalam wacana dalam makna bahwa ia secara literer ditulis atau diomongkan di dalamnya ia bukanlah elemen terpisah yang eksis secara independent dalam beberapa ranah bebas mengambang dari ide-ide dan sesudah itu menubuh dalam kata-kata, melainkan sebuah cara berpikir, berbicara, dan mengalami.

- David Miller (dalam Kusumohamidjojo, 2015) merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respons praktis kita terhadapnya.
- Ideologi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, dan emosi-emosi yang menentukan tindakan kolektif (Rejai, 1991).
- Steger (2005) mendefinisikan ideologi sebagai sistem gagasan yang sangat luas diikuti keyakinan yang terpola, norma dan nilai pemandu serta gagasan regulatif yang diterima sebagai kenyataan atau kebenaran oleh sejumlah kelompok.
- Ideologi dalam implementasinya tidak hanya menawarkan gambaran yang koheren mengenai dunia sebagaimana adanya, namun juga dunia bagaimana seharusnya. Pengalaman umat manusia yang sangat kompleks oleh ideologi dibuat gambaran yang sederhana dan mudah dipahami yang memberikan orientasi normatif dalam ruang dan waktu serta dalam alat dan tujuan (Steger, 2005).
- Ideologi dipahami de Tracy sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan (Eatwell, 2004).

Berdasarkan pandangan tersebut, de Tracy hendak menunjukkan arah yang benar kepada masyarakat Perancis yang saat itu dipandang tersesat. De Tracy ingin menunjukkan ide-ide mana yang salah dan ide-ide mana yang benar agar masyarakat dapat diperbaiki. Salah satu usulan de Tracy adalah mengembangkan sistem pendidikan sekuler yang diyakini mampu menghasilkan manusia yang lebih baik.

Pengaitan ideologi dengan ilmu sebagaimana dilakukan de Tracy tidak bertahan lama. Istilah ideologi berangsur menjadi istilah negatif yang mengacu pada objek, bukan sebagai kajian ilmiah. Tokoh pertama yang menggunakan istilah ideologi sebagai istilah negatif adalah Napoleon Bonaparte. Pada awalnya

Napoleon tertarik dan bersimpati pada pemikiran de Tracy, tetapi setelah menjadi kaisar Perancis, ia mengolok-olok ide de Tracy dan kelompoknya sebagai ideologue. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan Napoleon untuk memperoleh dukungan dari kelompok tradisional terutama gereja Katolik. Ideologi dalam konotasi negatif ini dipahami sebagai sistem ide yang palsu dan salah secara moral yang didesain untuk menipu, merusak, dan memperbudak (Christenson et al., 1971).

- Makna ideologi dalam pengertian negatif digunakan oleh Karl Marx. Ideologi negatif dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyelubungi kepentingan masyarakat kapitalisme. Marx mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat sasaran dan gagasan yang mengarahkan citacita seseorang, harapan-harapannya, serta tindakan-tindakannya (Kusumohamidjojo, 2015).
- Marx memahami ideologi bukan dalam pengertian ide besar yang memengaruhi masyarakat. Bersama Engels, Marx percaya bahwa ide-ide kelas penguasa berada dalam setiap masa ide-ide yang berkuasa, yakni kelas yang merupakan kekuatan material dalam masyarakat sekaligus merupakan kekuatan intelektual yang berkuasa (Eatwell, 2004). Bagi Marx, kelas yang memiliki alat produksi material yang berkuasa mengontrol alat produksi mental. Ide sebagai sesuatu yang sangat penting dalam sejarah kehidupan sosial ditentang oleh Marx. Menurut Marx, keberadaan sosial yang menentukan kesadaran. Kekuatan ekonomi bukan pemimpin atau ide besar yang menentukan dan membawa kemajuan masyarakat. Karenanya, ideologi menjadi prinsip legal, politis, estetis, filosofis, bahkan religius yang memperkuat masyarakat kapitalis.
- Ideologi merupakan kesadaran palsu, demikian ungkap Engels (Eatwell, 2004). Contohnya adalah negara demokrasi liberal adalah negara yang netral, tetapi kenyataannya negara tersebut tidak netral, tetapi berpihak kepada kaum kapitalis atau pemodal. Hukum yang dibuat pun bukan untuk

menciptakan keadilan bagi semua, tetapi realitasnya disusun untuk memenuhi kepentingan penguasa atau kapitalis.

Setiap tindakan seseorang atau pun kelompok selalu dipengaruhi atau digerakkan oleh sistem nilai tertentu. Sistem nilai atau keyakinan itu disebut ideologi. Ideologi bagai cermin, yakni bagaimana kita melihat diri seperti apa adanya. Ideologi juga bagai jendela bagi pihak lain untuk meneropong kehidupan kita, sehingga diharapkan mereka memahami apa prinsip hidup kita dan apa yang kita lakukan, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan kita. Ideologi juga seperti kamera, yakni bagaimana kita memotret kehidupan secara detil, utuh dan jelas.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami kehidupan secara utuh dan komprehensif, kehadiran ideologi sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak akan ada arah yang jelas. Ideologi selalu berkaitan dengan politik.

- Mengacu pendapat Carver, Steger (2005) menyatakan bahwa ada ruang khusus bagi ideologi dalam politik. Politik dipahami sebagai arena publik tempat berbagai agenda pembicaraan dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan dari kelompok atau kelas tertentu. Ideologi selalu memiliki dimensi politik, sebab pada akhirnya ideologi menyoal cara-cara penerapan, pemberian, dan perubahan kekuasaan dalam masyarakat (Steger, 2005).
- Heywood (2016) mengemukakan bahwa ideologi memengaruhi kehidupan politik dengan cara: (1) menstrukturkan pemahaman politik sehingga dapat menetapkan tujuan dan menginspirasi tindakan, (2) membentuk hakikat sistem politik, dan (3) bertindak sebagai sejenis semen sosial. Namun demikian, tidak semua pemikir politik menerima ideologi sebagai variabel penting bagi politik. Berbagai ide atau ideologi kadang hanya dilihat sebagai tirai jendela yang digunakan untuk menyembunyikan realitas politik yang lebih dalam (Heywood, 2016).

- Ideologi memiliki arti positif, yakni memiliki peran etis dalam mengarahkan tindakan politik. Kusumohamidjojo (2015) memandang ideologi politik sebagai gagasangagasan etis mengenai bagaimana suatu negara harus diselenggarakan.
- Christenson, et al. (1971) mendefinisikan ideologi politik sebagai sistem keyakinan yang menjelaskan dan menjustifikasi tertib politik terpilih dalam masyarakat baik yang sudah ada maupun yang diusulkan, dan menawarkan strategi (proses, keteraturan institusional, dan program) untuk mencapainya.
- Ideologi politik adalah bentuk pemikiran politik yang memberikan akses langsung yang penting memahami bentuk dan sifat teori politik, kekayaan, ragam, dan rincianya (Eatwell, 2004).
- Suatu ideologi politik merupakan sekumpulan kepercayaan dan pemikiran empiris dan normatif yang relatif koheren yang terfokus pada masalah hakikat manusia, proses sejarah dan pengaturan sosiopolitik. Ideologi tersebut biasanya berkaitan dengan suatu program untuk persoalan tertentu dalam jangka pendek. Ideologi politik merupakan hasil pemikiran kolektif, seperti halnya ideologi Pancasila yang merupakan pemikiran kolektif para founding fathers Indonesia dan karena merupakan tipe ideal, maka menurut Eatwell tidak boleh dicampuradukkan dengan gerakan, partai, atau rezim tertentu yang menggunakan nama itu.

Pandangan Eatwell tersebut tidak tepat, karena suatu ideologi akan efektif apabila ideologi tersebut dilekatkan dengan gerakan dari suatu kelompok, partai, bahkan rezim pemerintahan. Tanpa wadah, sarana, atau organisasi yang mengimplementasikan ide-ide besar, maka ideologi hanya menjadi kajian teoretis yang melayang di langit tidak pernah membumi selamanya.

Dalam perspektif politik, ideologi dipandang berguna

setidaknya karena dua hal:

- Pertama, hakikat ideologi yang berlaku di masyarakat memengaruhi cara kerja pemerintah. Ideologi akan memengaruhi cara rakyat berpartisipasi dan bagaimana pemerintah mengambil keputusan (Ethridge dan Handelman, 2016).
- Kedua, tingkat konsensus ideologi dalam sistem politik berpengaruh penting terhadap kadar stabilitas. Jika masyarakat mengalami konflik ideologi yang sangat parah, seperti yang dialami Nikaragua tahun 1980-an, maka kehidupan politik tidak stabil dan sering diwarnai kekerasan. Konflik ideologi yang pernah dialami Indonesia pada masa Orde Lama menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan pemerintahan.

Ideologi politik berbeda dengan teori politik dan filsafat politik, namun memiliki kaitan dengan kedua konsep tersebut. Teori politik merujuk pada teori ilmiah atau generalisasi tentang politik dan masyarakat yang didasarkan pada data. Bagi Christenson et al. (1971) teori politik merupakan penyelidikan tentang pengetahuan politik dan realitas sosial. Teori politik bebas nilai. Filsafat politik tidak bebas nilai, karena filsafat politik berfungsi evaluatif dan normatif. Filsafat politik berisi seperangkat ide tentang bagaimana pemerintahan dan rakyat seharusnya berperilaku. Christenson memandang filsafat politik sebagai penyelidikan tentang prinsip-prinsip mengenai negara dan masyarakat yang baik.

Setiap ideologi politik berisi teori dan filsafat politik tentang bagaimana rakyat dan pemerintah bertindak dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Ideologi politik menyerap teori dan filsafat politik sebagai suatu sistem keyakinan (*beliefs system*) yang memiliki sifat empiris sekaligus juga mengandung analisis normatif dalam perilaku.

Karakteristik Ideologi

Berkaitan dengan karakteristik Ideologi maka Christenson, et al. (1971) merinci setidaknya terdapat sembilan karakteristik yang meliputi:

1. Ideologi muncul dari kondisi krisis. Ideologi muncul manakala orang memiliki persepsi yang kuat dan merasa hidupnya terlantar atau dieksplorasi di bawah tertib politik sebelumnya atau diancam statusnya oleh perubahan fundamental yang terjadi di masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kehidupan masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan melahirkan ideologi agar rakyat dapat menemukan kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, ideologi liberal muncul ketika masyarakat mengalami suasana kehidupan yang tidak memuaskan dalam sistem konservatif dan feudal. Demikian pula, para pengagas sosialisme percaya bahwa ketidakberhasilan ideologi liberalisme-kapitalisme dalam menciptakan keadilan, menyebabkan lahirnya ideologi sosialis marxsisme.
2. Ideologi memiliki ruang lingkup yang luas dan bervariasi. Dalam dimensi horisontal, ideologi memiliki pandangan dunia (*weltanschauung*) yang menyeluruh. Ideologi totalitarisme misalnya, memerlukan otoritas publik untuk mengatur berbagai aspek signifikan dalam kehidupan. Dalam dimensi vertikal, ideologi mengandung beberapa strata pemikiran dan keyakinan, dari ide-ide yang sederhana hingga simbol yang kompleks yang mengekspresikan ide-ide dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ideologi eksis dalam berbagai basis dan menghasilkan berbagai derajat pemahaman dan penerimaan.
3. Ideologi merupakan pola sistematik dari pemikiran politik. Ideologi yang dipasarkan dalam arena politik bukanlah ide yang serampangan dan terserak, tetapi terpola dan teratur sebagai ide yang menawarkan penjelasan dan visi dari nasib

umat manusia.

4. Ideologi merupakan pola ide-ide yang terintegrasi dalam satu atau beberapa premis dasar yang berisi aturan perubahan dan pengembangan. Mengutip pandangan George Orwell (dalam Christenson et al. 1971), ideologi merupakan sesuatu ide yang abstrak, bukan gambaran realitas, tetapi merupakan model yang diturunkan dari persepsi realitas.
5. Ideologi memiliki elemen empiris dan normatif. Elemen empiris menegaskan bahwa kondisi kondisi tertentu eksis, sedangkan elemen normatif menegaskan bahwa tertib politik tertentu telah dipilih. Ideologi sebagai sistem keyakinan memuat sejumlah nilai yang berhubungan dengan penerimaan terhadap proposisi deskriptif tertentu. Ideologi memuat sesuatu yang ada dan sesuatu yang seharusnya terjadi dalam politik.
6. Ideologi cenderung ekslusif, absolut, dan universal. Setiap ideologi memiliki logika dan bukti sendiri yang secara ekslusif mengandung prinsip-prinsip kemajuan dan keadilan yang benar. Ideologi bukan subjek untuk bargaining dan kompromi, tetapi merupakan aturan dan standar tingkah laku yang tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun ideologi muncul dari dan diterapkan dalam konteks politik yang unik, tetapi memiliki cakupan universal. Sebagai contoh, ideologi liberalisme-kapitalisme yang pada awalnya berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, dalam perkembangannya memengaruhi kehidupan ekonomi dan politik negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
7. Ideologi adalah argumen persuasif yang didesain untuk memotivasi keterlibatan aktif. Ideologi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membujuk dan menggerakkan emosi. Ideologi mampu menginspirasi dan memelihara sistem keyakinan dan tindakan yang mentransformasikan kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ide-ide yang ditransformasikan.

8. Ideologi bersifat personal, memiliki pahlawan, seperti bapak pendiri bangsa, pemimpin karismatis, dan para martir, memiliki dokumen suci yang memuat manifesto, deklarasi, dan konstitusi, serta sejumlah ritual seperti janji-janji, lagu kebangsaan, salam hormat, dan hari libur nasional. Kedelapan, memerlukan pembangunan, tetapi juga resisten terhadap perubahan fundamental.
9. Para ideologis menawarkan ide-ide bagi barang-barang yang komplet dan otoritatif, tetapi juga resisten terhadap revisi terhadap hasil ciptaannya. Jikalau ada perubahan terhadap sistem keyakinan tersebut, perubahan tersebut cenderung datang perlahan dan menyakitkan serta perubahan itu tergantung pada sifat tertutup atau terbuka dari struktur ideologi.
10. Ideologi terjalin dalam gerakan politik. Ideologi memerlukan organisasi, karena melalui organisasi itu ideologi didiseminasi dan diimplementasikan.

Dimensi Ideologi

Rejai (1991) mengemukakan 5 dimensi ideologi yang memungkinkan suatu ideologi dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu (1) *cognition* meliputi pengetahuan dan keyakinan, (2) *affect* mencakup perasaan dan emosi, (3) *valuation* berupa norma dan penilaian, (4) program berwujud rencana dan tindakan, serta (5) *social base*, yakni adanya kelompok pendukung dan kolektivitas.

1) Dimensi kognitif (*cognition*)

Dimensi ini merujuk pada ideologi sebagai pandangan dunia, pandangan tentang masyarakat dan politik, dan persepsi tentang realitas sosial dan politik. Pandangan dunia memuat elemen pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan memuat aturan-aturan logik agar ideologi memiliki konsistensi internal. Ideologi yang berisi pengetahuan tersebut juga seperti ilmu dapat diuji replikabilitas dan

verifiabilitasnya.

Sementara itu, keyakinan atau beliefs tidak memerlukan koherensi logika atau dibangun secara saintifik. Keyakinan tentang sesuatu diterima begitu saja sebagai basis sosialisasi, kebiasaan atau repetisi tindakan. Dengan kata lain, ideologi sebagai beliefs tidak memerlukan konsistensi antara keyakinan (*beliefs*) dan realitas. Ideologi sebagai beliefs bisa saja mengandung elemen ilusi atau mitos. Bahkan ideologi mungkin memiliki mitos besar atau mitos kecil. Sebagai contoh, ideologi komunis memiliki mitos masyarakat tanpa kelas dan kesatuan kelas pekerja. Nazi pada era Jerman mempunyai mitos ras super dan pemimpin superhuman. Amerika Serikat dalam setengah abad yang lalu memiliki Presiden Kennedy dengan mitos *New Frontier*, Presiden Johnson dengan *Great Society*, Presiden Nixon dengan *Generation of Peace*, Presiden Carter dengan *Human Rights*, Presiden Reagan dengan Counterterrorism, dan Presiden Bush dengan *Thousand Points of Light*.

Indonesia di bawah Presiden Soekarno memiliki mitos Revolusi Belum Selesai. Soeharto mempunyai mitos Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya, dan Presiden Joko Widodo dengan slogan Membangun Dari Pinggiran. Mitos memerlukan penyederhanaan. Banyak sistem pemikiran tergantung pada penyederhanaan dan interpretasi terhadap suatu realitas (Rejai, 1991).

Terkait hal ini, ilustrasi Plato dapat dijadikan sebagai referensi. Ketika kita melihat lanskap alam, misalnya pepohonan, maka di sana terdapat banyak jenis pohon, namun kita tidak melihat seluruh pohon. Demikian pula, begitu banyak kuda dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melihat semua kuda. Persepsi kita terhadap pohon dan kuda adalah sesuatu yang parsial dan sederhana. Pendek kata, fungsi mitos adalah menyederhanakan realitas kepada kita dan mengkomunikasikannya seketika.

Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan

simbol. Seluruh ideologi politik terkait dengan persepsi simbolik dan komunikasi simbolik (Rejai, 1991). Simbol mengambil dua bentuk, yaitu linguistik dan nonlinguistik. Simbol linguistik digunakan dalam bentuk kata-kata dan ungkapan agar penyampaian pesan dapat berlangsung cepat dan efisien. Misalnya, kita menyampaikan simbol “*law and order*”, mengandung makna bahwa kita tidak mentoleransi tantangan terhadap status quo, kenyamanan, keamanan, dan kepemilikan. Contoh simbol linguistik adalah FLAG kepanjangan dari *Family, Life, America*, dan *God*. Hal itu menandakan bahwa di Amerika, keluarga itu penting dalam hidup masyarakat Amerika dan mereka percaya Tuhan. Ideologi ini berpengaruh terhadap kebijakan Amerika yang prokehidupan dan antiaborsi.

Simbol nonlinguistik sebagaimana praktik di Amerika adalah pembangunan Washington Monument dan Statue of Liberty. Simbol nonlinguistik ini hendak menjelaskan kepada publik mengenai sejarah bangsa Amerika dan perhatian Amerika kepada nilai kebebasan. Indonesia mempunyai simbol nonlinguistik yang sangat terkenal yaitu Monumen Nasional atau Monas yang dibangun Presiden Soekarno, yang menunjukkan kepada masyarakat dunia, khususnya di Asia bahwa Indonesia bukan negara kecil yang diremehkan kemampuannya dalam pembangunan.

- 2) **Ideologi memiliki dimensi afektif (*affect*),** yaitu mempunyai konten atau elemen emosi dan/atau rasional. Ideologi fasisme dan nazisme dominan pada konten emosional. Ideologi komunis memiliki konten rasional. Ideologi liberalisme-kapitalisme memiliki konten rasional dan kalkulasi. Ideologi demokrasi cenderung berkonten rasional. Ideologi Pancasila memuat dua-duanya baik emosional maupun rasional. Rejai (1991) menjelaskan bahwa suatu ideologi pada suatu saat bisa bersifat rasional dan pada saat lainnya dapat menunjukkan watak emosional.

Suatu ideologi bersifat rasional manakala berada pada kondisi dan waktu normal; sedangkan pada saat krisis nasional, ideologi akan memperlihatkan watak emosional. Karakter emosional ini tampak sekali pada ideologi Pancasila ketika bangsa Indonesia mengalami perpecahan karena konflik etnis dan sosial serta konfrontasi dengan negara lain. Simbol “Pancasila Rumah Kita” yang dikumandangkan pada 3 tahun pertama pemerintahan Jokowi merupakan contoh dari upaya penguatan ideologi Pancasila dalam konteks emosi.

- 3) **Dimensi afektif (valuation)** dari ideologi dapat digunakan untuk melihat apakah suatu ideologi bersifat terbuka atau tertutup. Ideologi dikatakan terbuka apabila mengakui adanya informasi dan bukti baru serta mengalami modifikasi dan perubahan dalam prosesnya. Sebaliknya, ideologi bersifat tertutup jika tidak mengakomodasi adanya bukti dan informasi baru. Ada kalimat klise, “*my mind's made up*,” pikiran saya sudah terbentuk. Itulah yang sering menjadi alasan mengapa pikiran-pikiran baru tidak bisa diterima dalam ideologi yang memiliki sifat tertutup. Dimensi evaluatif dari ideologi menunjukkan adanya penilaian dua cara, yaitu secara negatif, yaitu dengan mencela sistem sosial dan politik terdahulu sebagai sistem yang korup, tidak bermoral, serta menyuarakan propaganda yang menarik dengan prinsip-prinsip moral baru, dan secara positif, yakni menata seperangkat norma yang sesuai dengan rekonstruksi sosial dan politik, seperti kasus di Amerika dengan norma kebebasan, kesamaan, persaudaraan, dan humanitas (Rejai, 1991). Ideologi dalam sisinya yang positif mengajukan arah yang jelas tentang masyarakat yang baik. Ideologi memberikan nilai tertinggi (posit an ultimate value) berupa kebaikan final, sebuah utopia. Ide Karl Marx tentang masyarakat tanpa kelas merupakan ilustrasi yang tepat terkait hal ini.

- 4) **Dimensi program (program)** dari ideologi mengandaikan bahwa nilai-nilai dan tujuan diwujudkan dalam sedikit atau banyak dari program kegiatan yang komprehensif. Ideologi telah menunjukkan sistem keyakinan yang berhubungan dengan tindakan serta juga mencari pola-pola tindakan spesifik untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Tindakan atau program dari ideologi diarahkan untuk memelihara dan mengabadikan status quo atau menuju perubahan dari tatanan sosial yang ada. Perubahan diperlukan baik oleh kaum reformis maupun kaum radikal dengan cara membujuk dan mengedukasi rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan terbatas. Perubahan yang radikal, cepat, dan penuh kekerasan merupakan cara yang ditunjukkan ideologi totalitaria, seperti Nazi dan Komunis.
- 5) **Dimensi basis sosial (social bases)** mengandaikan bahwa ideologi memerlukan kelompok sosial, kelas, kolektivitas, atau bangsa (Rejai, 1991). Untuk menjadi ideologi harus memiliki basis massa. Kehadiran populasi dalam jumlah besar sebagai pendukung ideologi adalah dalam rangka memperoleh pemahaman dan komitmen untuk bertindak dari mereka agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Marxisme merupakan contoh dari ideologi potensial yang memobilisasi massa dan menjadi dorongan utama untuk melakukan tindakan kolektif. Fungsi mobilisasi ini tidak akan terjadi manakala tidak ada organisasi. Organisasi inilah yang menjembatani hubungan antara sistem keyakinan dengan tindakan (Rejai, 1991). Dalam organisasi ini membutuhkan fungsi elit. Pada ideologi komunis, fungsi ini dijalankan oleh sebuah Diktator Proletariat. Dalam ideologi Pancasila, fungsi ini dilakukan oleh sebuah Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat BP7 (masa Orde Baru) atau sekarang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ideologi memiliki beberapa level fungsional, yaitu (1) ideologi sebagai distorsi, (2) legitimasi, dan (3) integrasi (Steger, 2005).

- Ideologi sebagai distorsi adalah produksi citra-citra yang menyimpang dari realitas sosial. Proses distorsi menyembunyikan pertentangan antara penggambaran sesuatu dalam teori dengan perwujudannya pada tataran realitas material.
- Legitimasi merupakan level fungsional kedua dari ideologi. Dalam kaitan legitimasi, terdapat klaim legitimasi yang dibuat oleh otoritas yang berkuasa dan kepercayaan pada legitimasi otoritas diberikan oleh mereka yang tunduk pada pihak yang berkuasa. Contoh dari legitimasi klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur khususnya di daerah pinggiran dan terpencil. Klaim tersebut diharapkan diakui oleh kekuatan politik dan masyarakat khususnya yang berseberangan dengan Jokowi.
- Level fungsional ketiga dari ideologi adalah integrasi. Dalam level yang paling dalam, menurut Riceour, ideologi memainkan peran mediasi atau integratif. Ideologi memberikan stabilitas kepada masyarakat saat ia menciptakan, mempertahankan, dan melindungi identitas sosial pribadi dan kelompok. Dalam fungsi ini, ideologi juga menawarkan berbagai simbol, norma, dan citra yang merangkai dan mempertautkan identitas individu dengan identitas kelompok (Steger, 2005).

Pancasila sebagai contoh fungsi integratif merupakan ideologi yang memberi identitas kepada bangsa Indonesia, sekaligus juga mampu mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia untuk Bersatu membangun Indonesia mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Fungsi Ideologi

Orang menggunakan sistem keyakinan untuk membantu mereka dalam memahami kehidupan dan agar dapat hidup

dalam lingkungan alam dan sosial mereka. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam kehidupan sosial, ideologi memiliki sejumlah fungsi. Christenson et al. (1971) menyebutkan 5 fungsi ideologi:

- Sebagai sistem keyakinan, ideologi menyediakan struktur kognitif yakni sebuah formula ide-ide melalui mana kehidupan dipersepsi, dipahami, dan diinterpretasikan. Orientasi kognitif dari ideologi politik membantu orang untuk menghindari ambiguitas dalam kehidupan mereka dan merasakan adanya kepastian dan keamanan.
- Ideologi menyediakan formula preskriptif atau sebagai panduan bagi tindakan individu dan sosial serta penilaiannya. Ideologi tidak hanya menyediakan alternatif sejumlah tindakan politik, tetapi juga menyediakan justifikasi diri untuk mengevaluasi perilaku politik bagi pihak lain dan memberikan dasar bagi legitimasi politik.
- Ideologi sebagai sarana pengelolaan konflik dan integrasi. Pada level personal, ideologi membantu individu dalam mengatasi konflik dalam dirinya dan dengan pihak lain serta memberikan rasa penyatuan dalam hidupnya melalui integrasi berbagai aspek kehidupan individu. Dalam aspek sosial, ideologi mengeliminasi berbagai konflik dan rutinitas lainnya di sepanjang jalur persaingan yang tidak mengganggu. Pendek kata, masyarakat tidak hanya memerlukan bagaimana konflik dikendalikan, tetapi juga bagaimana anggota-anggotanya terintegrasi secara politik.
- Ideologi melakukan identifikasi diri, dalam hal mana ideologi tidak hanya merupakan lensa melalui mana orang melihat dunia, tetapi juga merupakan cermin di mana mereka melihat dirinya dan jendela melalui mana yang lain melihatnya. Ideologi merupakan cara orang-orang dan bangsa mendefinisikan dan melihat dirinya dan harapan bagi yang lain untuk melihatnya dan menginterpretasikan tindakan mereka. Secara khusus, ideologi merupakan instrumen penting untuk identifikasi diri bagi anak-anak

muda.

- Ideologi sebagai kekuatan dinamis bagi kehidupan individu dan kolektif dan menyediakan misi dan tujuan yang sama serta menghasilkan komitmen untuk bertindak bersama. Preskripsi ideologi tidak hanya merupakan standar perilaku, tetapi juga merupakan tujuan bersama yang harus dikejar, karena setiap ideologi menjanjikan kehidupan dan masyarakat yang baik. Dostoevsky berucap, “tanpa ideologi, orang tidak akan hidup dan juga tidak dapat mati”.

Jenis-Jenis Ideologi

Menurut Sobur (2004: 66) ideologi di sini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak nyata, wajar, dan alamiah, dan tanpa sadar kita menerima sebagai kebenaran proses umum produksi makna dan ide. Ideologi di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna.

1. Ideologi Liberalisme

Menurut Hamid (2009:3), Aliran ini bermula pada abad ke-16 melalui tulisan Francis Bacon dan Hobbes. Mana kala di Perancis munculnya Rene Descartes yang memberi penekanan baru terhadap logik akal. Di Jerman pula, muncul tokoh falsafah kritis Immanuel Kant. Kebebasan intelektual yang berusaha untuk bebas dari agama dan Tuhan itu kemudian tumbuh secara rasional menjadi liberalisme dalam pemikiran keagamaan. Peringkat pertama pada abad ke-17 ahli falsafah Perancis Rene Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau *Enlightenment* yang berakhir pada pertengahan abad ke-18. Doktrin utamanya adalah percaya pada akal manusia, keutamaan kepada individu, berpikir dengan diri sendiri atau subjektif terhadap tuhan dan percaya manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan.

Liberalisme pada zaman ini bermula dengan revolusi tidak berdarah pada tahun 1688 yang kemudian dikenali dengan *The Glorious Revolution of 1688*. Revolusi ini berjaya menjatuhkan

Raja James II dari England dan Ireland (James VII dari Scotland) serta menaikan William II dan Mary II sebagai raja. Tahun seterusnya, parlemen Inggris meluluskan sebuah undang-undang hak rakyat (*bill of right*) yang mengandungi beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan masyarakat Inggris.

Pada waktu yang sama, ahli falsafah Inggris menekankan hak asasi manusia dengan dakwaan setiap orang lahir di muka bumi ini mempunyai hak-hak dasar natural right yang tidak boleh dirampas. Hak-hak asasi itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat pandangan, beragama, dan berbicara. Semenjak tahun 1700, ahli falsafah Perancis dalam bukunya, *The Spirit of the Laws* berpendapat, pemisahan kekuasaan negara *separation of powers* kepada pelaksana eksekutif, pemantau yudikatif dan lembaga pembuat dasar legislatif merupakan kemajuan untuk mengurangi kekuasaan politik yang mutlak.

Manakala di dalam bukunya *The Social Contract* pemerintahan itu melambangkan refleksi dari harapan rakyat yang diperintah. Kekuasaan bukan milik raja atau penguasa tetapi milik rakyat. Begitu menentang pemerintah yang terlalu campur tangan dalam kebebasan individu. Ketiga tulisan ahli falsafah tersebut pada teorinya menyatakan hak-hak dan kebebasan individu.

Kandungan utama dari *Bill of Rights* adalah jaminan hak-hak asasi seperti kebebasan berbicara, media massa, beragama, dan sebagainya. Peringkat kedua pada akhir abad ke-18 dengan doktrin Romantisisme yang menekankan pada individualisme di mana individu menjadi sumber nilai terhadap sesuatu. Kesedaran kendiri *self consciousness* mengambil tempat kesedaran bertuhan *God consciousness* dalam pengertian agama. Tokoh yang memperkenalkannya adalah Jean-Jacques, Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher dan lain-lain. Benih ideologi liberalisme dibesarkan di Perancis pada abad ke-18 kesan pemikiran dan institusi-institusi di Inggeris. Namun para pemikir

pencerahan Perancis berlainan dari guru-guru Inggeris mereka. Kecenderungan anti agama terhadap aliran Katolik tradisional lebih tinggi jika dibanding penentangan terhadap aliran Protestantisme.

Manakala di Inggris doktrin Deisme yang merupakan kepercayaan tentang pengetahuan, akal dan pikiran seseorang boleh menentukan bahawa Tuhan adalah wujud. Di mana pada asalnya kepercayaan ini cenderung dimasukkan dalam kelompok Unitarianisme yang merupakan salah satu sub dominasi Protestan dalam teologi Kristian.

Unitarian adalah suatu ajaran yang menekankan keesaan Allah. Ia menjadi salah satu alternatif yang jauh lebih radikal bagi gereja yang kukuh di Perancis. Ketika teori pencerahan mendapat kuasa dalam revolusi 1789, yang diperoleh adalah sebuah agama baru liberalisme yang sekular dengan pusatnya di Catedral Notre Dame. Dalam bidang ekonomi, liberalisme berkembang melalui strategi *Laissez Faire* oleh seorang ahli ekonomi Scotties bernama Adam Smith di bukunya bertajuk *The Wealth of Nations*. Gagasan-gagasan ekonomi Adam Smith ini dijadikan ukuran untuk mendirikan sistem ekonomi kapitalis yang mempromosikan liberalisasi bagi kegiatan ekonomi bagi setiap orang. Strategi ini membataskan negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi rakyat.

2. Ideologi Kapitalisme

Kapitalisme layak disebut sebagai ideologi paling kuat dan berjaya dalam beberapa abad terakhir. Kejayaan ideologi ini tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan jangkauannya pada wilayah dan berbagai bidang kehidupan, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan ketahanannya dalam kontestasi ideologi dunia. Kehadiran ideologi ini dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya dalam bidang makro seperti pengelolaan ekonomi negara, kapitalisme juga memengaruhi bidang mikro seperti kehidupan pribadi orang per orang. Untuk memahami dialektika yang mengiringi lahir dan tumbuhnya kapitalisme,

diperlukan perspektif historis dan sosiologis yang mendalam terhadapnya. Namun demikian, ideologi kapitalisme juga memiliki kelemahan yang dalam praktiknya menimbulkan persoalan besar khususnya dalam aspek ekonomi.

Kelahiran kapitalisme tidak bisa dipisahkan dengan berkembangnya moral individualisme (Ebenstein dan Fogelman, 1990:148). Sebagai gerakan moral, individualisme berpijakan pada kepercayaan dasar bahwa manusia merupakan makhluk yang independen. Kepercayaan terhadap independensi manusia diikuti keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas menentukan berbagai pilihan. Pilihan politik, ekonomi, agama, dan bidang lain seyogyanya diserahkan kepada masing-masing individu.

Individualisme sebagai gerakan moral berkembang menjadi gerakan sosial menimbulkan sejumlah dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang keagamaan, gerakan individualisme menimbulkan reformasi yang berorientasi terwujudnya kebebasan beragama. Dalam bidang penalaran, individualisme turut mendorong aneka eksperimen yang melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, individualisme menimbulkan ilmu-ilmu sosial. Adapun dalam bidang ekonomi, individualisme melahirkan sistem ekonomi baru yang disebut sebagai kapitalisme.

Kapitalisme merujuk pada sistem ekonomi dan ideologi, yang didefinisikan berdasarkan ketergantungannya kepada pertukaran ekonomi dan kepemilikan swasta dalam mengalokasikan sumberdaya masyarakat (Ethridge dan Handelman, 2016). Dalam ideologi kapitalisme ini terdapat dua unsur yang bersifat komplementer, yaitu (1) kapitalisme memberi penekanan yang besar pada individualisme dan (2) pemikiran kapitalis seringkali diasosiasikan dengan ketidakpercayaan kepada kontrol pemerintah terhadap sumberdaya sosial.

Kapitalisme dipahami sebagai sebuah sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak

kepemilikan atas kekayaan secara privat (AlJihad, 2018). Kapitalisme juga dimaknai sebagai sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran dalam hal mana kekayaan terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan terus-menerus. Dalam kamus *The Macmillan Dictionary of Modern Economics*, kapitalisme diartikan sebagai sistem politik, sosial, dan ekonomi di mana hak milik, termasuk aset kapital dimiliki dan dikontrol oleh individu (Al-Jihad, 2018).

Sistem kapitalisme bukan hanya dipahami sebagai sistem ekonomi semata, melainkan merupakan sistem sosial yang menyeluruh yang memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 dan menyebar luas ke seluruh kawasan Eropa Barat-laut dan Amerika Utara (Ebenstein dan Fogelman, 1990:148). Masyarakat kapitalis tumbuh dan berkembang berkat adanya perkembangan kapitalisme. Masyarakat kapitalis memiliki ciri sebagai berikut: (1) tatanan ekonominya memiliki ciri pasar kompetitif dan perusahaan ekspansionis, (2) ekonominya berbeda dan terlindungi dari arena sosial lainnya (institusi politik), (3) pemisahan politik dari ekonomi didasarkan atas dominasi hak milik pribadi dalam sarana produksi, (4) otonomi negara dikondisikan meskipun tidak ditentukan secara kuat oleh ketergantungannya kepada akumulasi modal (Giddens, 2005).

Kapitalisme berkembang bersamaan dengan perkembangan tatanan masyarakat Eropa terutama di Inggris. Peradaban masyarakat Eropa diyakini memengaruhi perkembangan peradaban dunia hingga kini. Pertumbuhan masyarakat internasional, baik dalam konteks negara bangsa maupun organisasi nonpemerintah, juga berawal dari Eropa. Bahkan titik awal dari masyarakat internasional dapat juga dikatakan sebagai titik awal bagi berdaulatnya negara nasional sebagaimana diakui dalam perjanjian West Phalia pada tahun 1648 (Samekto, 2008:2).

Kapital merupakan kunci penting dari konsep kapitalisme. Kapital merupakan salah satu dari hal-hal yang dipakai untuk

mengerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital sebagai uang menjadi kapital sebagai komoditi, diikuti oleh retransformasi dari kapital sebagai komoditi menjadi kapital sebagai uang yang bertambah (Heilbroner, 1991:21). Inilah rumus money capital money atau MCM yang terkenal dari Marx atas metamorfosis yang berulang dan meluas yang dijalani oleh kapital. Proses yang berulang dan ekspansif tersebut diarahkan untuk membuat barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu pengorganisasian niaga dan produksi. Adanya kenyataan fisik, yaitu komoditi berupa benda-benda kemewahan, tidak dinilai sebagai prestasi pencarian kekayaan dalam kapitalisme jika benda dan jasa tersebut masih berada di tangan kapitalis.

3. Ideologi Sosialisme

Kelahiran sebuah ideologi seringkali merupakan jawaban bagi ideologi lain. Sudah menjadi kelaziman jika para ilmuwan saling berdebat mempertarungkan gagasan ideologisnya. Ideologi yang lebih tua dan mapan dipertanyakan dan diserang oleh ilmuwan dengan gagasan baru. Perdebatan dialektis itu menunjukkan proses tarik ulur panjang antara aliran pemikiran satu dengan pemikiran lain. Pertarungan gagasan terjadi terus-menerus sehingga salah satu dari ideologi yang bersengketa menjadi lebih dominan. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak tampak betul di antara dua ideologi itu yang menang dibandingkan lainnya.

Kemunculan sosialisme sebagai ide baru dalam panggung ideologi dunia juga tidak dapat dipisahkan dengan dialektikanya dengan ideologi lain yang lebih tua, bahkan secara historis dapat dilihat bahwa sosialisme mendudukkan diri secara berhadapan dengan kapitalisme. Perbedaan orientasi ideologis membuat kedua ideologi ini menempuh perseteruan ideologis yang panjang. Filsuf-filsuf beraliran kiri berusaha menentang dan meruntuhkan kapitalisme yang pada saat itu menjadi arus utama dalam panggung ideologi dunia.

Sosialisme dan liberalisme memiliki akar yang sama di abad

pencerahan dan berbagi keyakinan yang sama, seperti rasionalitas dan kemajuan, namun sosialisme muncul sebagai kritik terhadap masyarakat pasar bebas (Heywood, 2016). Sebagai sebuah ideologi, sosialisme lahir sebagai respons atas ketimpangan sosial ekonomi yang dipicu oleh perkembangan industrialisasi di Eropa Barat, sebagai dampak dari revolusi industri pada abad 18 (Al-Jihad, 2018). Sosialisme pertama kali dikenal pada tahun 1827 untuk menyebut gagasan yang diperkenalkan Robert Owen, pemikir berkebangsaan Inggris. Owen merupakan sosialis utopis. Sebagai pemikir dan aktivis, Owen resah dengan kondisi masyarakat Inggris dan Eropa Barat pada umumnya yang tersegmentasi dengan demikian kuat dalam dua kelompok sosial, yaitu masyarakat majikan dan masyarakat buruh.

Kapitalisme yang dipicu oleh Revolusi Industri membuat modal-modal terakumulasi di tangan para pemilik modal yang terus-menerus berusaha memperkaya diri dan kelompoknya dengan mempekerjakan buruh secara kurang adil. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat sebagai dampak kapitalisme di Inggris, Owen membentuk komunitas eksperimental yang berbasis kehidupan berbagi bersama dan bekerja sama.

Sosialisme sebagai sebuah ideologi dibentuk oleh oposisinya terhadap kapitalisme dan upayanya untuk menyediakan alternatif yang lebih manusiawi yang secara sosial bernilai (Heywood, 2016). Sosialisme adalah sebuah sistem sosio-ekonomi dengan ciri kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi serta pengelolaan bersama atas bidang ekonomi (Al-Jihad, 2018). Sosialisme merupakan sistem ekonomi dan politik yang menekankan pada keadilan sosial yang diselenggarakan oleh negara (Wilczynski, 1981).

Sosialisme merupakan penghilangan setiap usaha pribadi, kepemilikan pribadi, atas sarana-sarana produksi dan penciptaan sistem ekonomi terencana yang di dalam pewiraswasta yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan digantikan oleh badan perencana pusat (Hayek, 2011). Dalam pengertian sempit, sosialisme dipahami sebagai labourisme, yaitu sebuah kendaraan

untuk memajukan kepentingan para pekerja atau buruh terorganisasi (Heywood, 2016).

Sosialisme memiliki sejumlah prinsip pokok yang membedakan dengan ideologi lainnya. Karl Marx menyebutkan 3 prinsip pokok sosialisme, yaitu (1) kesamaan, (2) komunalisme, dan (3) kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan (Rejai, 1991).

Nilai utama dari sosialisme adalah kesamaan. Hal ini berbeda dengan nilai utama dari kapitalisme yaitu kebebasan. Kutub tersebut tidak absolut. Dalam realitasnya, sosialisme juga mengizinkan adanya kebebasan, seperti halnya kapitalisme mengakui pula prinsip kesamaan. Prinsip kedua dari sosialisme adalah komunalisme. Hal ini membawa implikasi bahwa sosialisme menekankan pada kesejahteraan komunitas sebagai keseluruhan dan kerjasama anggota-anggota individual dalam pencapaian tujuan komunal. Prinsip ketiga dari sosialisme adalah kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan. Kepentingan komunitas sebagai keseluruhan hanya dapat dijamin melalui kontrol komunitas terhadap kesejahteraan bersama.

4. Ideologi Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ali dkk (1994: 89), kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri, (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.

Beberapa makna kata bangsa diatas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan,

budaya, pemerintahan, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang keluarga yang seturunan golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar menurut Ali (1994: 970). Beberapa suku atau ras dapat menjadi pembentuk sebuah bangsa dengan syarat ada kehendak untuk bersatu yang diwujudkan dalam pembentukan pemerintahan yang ditaati bersama.

Kata bangsa mempunyai dua pengertian-pengertian antropologis sosiologis dan pengertian politis. Menurut pengertian antropologis-sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat.

Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah negara dan sebaliknya satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara. Kasus pertama terjadi pada negara yang memiliki beragam suku bangsa, seperti Amerika Serikat yang menaungi beragam bangsa yang berbeda. Kasus kedua adalah sebagaimana yang terjadi pada bangsa Korea yang terpecah menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan.

Sementara dalam pengertian politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa atau nation dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme menurut Nur dalam Yatim (Yatim, 2001: 57-58).

Nasionalisme adalah sebuah konsep politik dan konsep bernegara. Nasionalisme juga dianggap sebagai salah satu ideologi politik dalam sejarah peradaban dunia modern. Secara umum, pengertian nasionalisme adalah sebuah gerakan untuk mengukuhkan kedaulatan sebuah bangsa atas tanah airnya. Konsep ini sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa tokoh, sehingga tidak memiliki satu gagasan tunggal yang mutlak. Salah satu rujukan pengertian lain yang bisa diambil

untuk menjelaskan konsep nasionalisme adalah definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.

Koentjaraningrat (1993:20) dalam konteks Indonesia, nasionalisme adalah perasaan cinta dan taat, setia kepada tanah air dan ingin membebaskan negara dan bangsanya dari penguasaan dan cengkeraman kuasa asing. Selanjutnya dikatakan bahwa nasionalisme juga ada kaitan dengan negara dan bangsa.

d) Rangkuman

1. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari kata idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea dalam Webster's New Calligate Dictionary berarti "*Something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like*" (sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana). Sedangkan logis berasal dari kata logos yang berarti word. Kata ini berasal dari legein yang berarti *to speak*, *logia* berarti *science* *teori* Sobur (2004:64).
2. Berkaitan dengan karakteristik Ideologi maka Christenson, et al. (1971) merinci setidaknya terdapat sembilan karakteristik yang meliputi; (1) Ideologi muncul dari kondisi krisis, (2) Ideologi memiliki ruang lingkup yang luas dan bervariasi, (3) Ideologi merupakan pola sistematik dari pemikiran politik, (4) Ideologi merupakan pola ide-ide yang terintegrasi dalam satu atau beberapa premis dasar yang berisi aturan perubahan dan pengembangan, (5) Ideologi memiliki elemen empiris dan normatif, (6) Ideologi cenderung ekslusif, absolut, dan universal, (7) Ideologi adalah argumen persuasif yang didesain untuk memotivasi keterlibatan aktif, (8) Ideologi bersifat personal, memiliki pahlawan, seperti bapak pendiri bangsa, pemimpin karismatis, dan para martir, memiliki dokumen suci yang memuat manifesto, deklarasi, dan konstitusi,

- serta sejumlah ritual seperti janji-janji, lagu kebangsaan, salam hormat, dan hari libur nasional, dan (9) Ideologi terjalin dalam gerakan politik.
3. Rejai (1991) mengemukakan 5 dimensi ideologi yang memungkinkan suatu ideologi dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu (1) cognition meliputi pengetahuan dan keyakinan, (2) *affect* mencakup perasaan dan emosi, (3) valuation berupa norma dan penilaian, (4) program berwujud rencana dan tindakan, serta (5) *social base*, yakni adanya kelompok pendukung dan kolektivitas.
 4. Christenson et al. (1971) menyebutkan 5 fungsi ideologi yaitu; (1) Sebagai sistem keyakinan, (2) Ideologi menyediakan formula preskriptif atau sebagai panduan bagi tindakan individu dan sosial serta penilaianya, (3) Ideologi sebagai sarana pengelolaan konflik dan integrasi, (4) Ideologi melakukan identifikasi diri, dalam hal mana ideologi tidak hanya merupakan lensa melalui mana orang melihat dunia, tetapi juga merupakan cermin di mana mereka melihat dirinya dan jendela melalui mana yang lain melihatnya, dan (5) Ideologi sebagai kekuatan dinamis bagi kehidupan individu dan kolektif dan menyediakan misi dan tujuan yang sama serta menghasilkan komitmen untuk bertindak bersama.
 5. Menurut Sobur (2004: 66) ideologi di sini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak nyata, wajar, dan alamiah, dan tanpa sadar kita menerima sebagai kebenaran proses umum produksi makna dan ide. Ideologi di sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna.

e) Latihan

- a. Jelaskan tentang definisi ideologi, dan bagaimana ideologi dapat bergerak menjadi ideologi politik!
- b. Terdapat empat jenis ideologi *mainstream* di dunia sebagaimana penjelasan di atas. Apakah Ideologi Pancasila

sebagai landasan dan cara pandang Bangsa Indonesia menjadi bagian dari Ideologi *mainstream tersebut*? Jelaskan!

f) Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali definisi, hakikat, jenis dan fungsi ideologi, serta relevansi ideologi pancasila sebagai ideologi politik di Indonesia

g) Umpang balik

Umpang Balik diberikan secara langsung dalam kegiatan diskusi/menjawab latihan soal.

2. Kegiatan Pembelajaran 2

a) Elit dan Aktor Politik

b) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan Elit dan Aktor politik, serta relasi kuasa elit politik.

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Dalam struktur politik terdapat berbagai komponen dan elemen didalamnya, salah satunya adalah Elit ataupun aktor politik yang merupakan subjek Politik. Aktor Politik merupakan orang-orang atau individu yang berpengaruh dan dapat mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya sedangkan elit politik merupakan kumpulan-kumpulan aktor yang berpengaruh.

➤ Menurut Brian McNair dalam Ardhita (2017) mendefinisikan aktor politik adalah *“those individual who aspire through organizational and institutional means, to influenc the decision making process. They may seek to do this by attaining institutional political power, in goverment or concsistuent assemblies, through which preffered politicies can be implemented”* aktor politik merupakan individu-

individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan berupaya melakukan dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga eksekutif ataupun legislatif dalam kebijakan yang akan diimplementasikan (Yuliana, 2017).

- Menurut Mosca dalam Sudijono (1995: 142-143) dengan karyanya *The Rulling Class* bahwa dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah di mana jumlah yang kecil selalu dapat menjalankan fungsi politik dan mendapatkan kekuasaan serta menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan tersebut, sedangkan kelas yang kedua dengan jumlah yang lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas yang pertama.
- Sedangkan Menurut Pareto, elit merupakan Variasi dari bakat dan kemampuan individu yang berbeda dalam lapisan masyarakat, kelas elit terbagi menjadi dua bagian yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah, kelas elit yang pertama adalah mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang memegang peranan penting dalam kehidupan pemerintahan dan politik dan yang kedua adalah mereka yang tidak memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan politik.
- Elit dan aktor politik sangat berkaitan erat dengan Kekuasaan. Kekuasaan merupakan batasan wilayah yang dapat dijalankan sesuai perintah orang yang paling berpengaruh dalam wilayahnya yaitu elit politik. Jika wilayah merupakan bagian dari komponen-komponen dari sebuah negara, Maka elit aktor politik juga menyertai pembagian wilayah tersebut tidak hanya elit aktor yang ada di wilayah pusat tetapi juga muncul elit aktor politik yang ada di daerah atau elit aktor local.

Selanjutnya elit aktor lokal terbagi dalam beberapa macam (Halim, 2014:33) yaitu:

- a. Elit birokrasi atau elit pemerintahan daerah merupakan elit

yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Seperti elit yang berada di tingkat Desa yang berkewajiban menjalankan Birokrasi yang ada di Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa dan pembangunan di Desa.

- b. Elit partai lokal adalah elit yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Selain itu elit partai juga berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat setempat.
- c. Elit ekonomi di daerah merupakan elit yang memiliki peran yang strategis dalam politik lokal. Elit ekonomi daerah merupakan elit yang kaitannya erat dengan urusan bidang perekonomian dan aset-aset yang dimiliki daerah dan berkeinginan untuk menguasainya.
- d. Elit agama di daerah merupakan elit yang berperan aktif dalam setiap aktivitas sosial. Elit agama pada umumnya memiliki pengaruh yang kuat, yaitu hubungan saling menghargai satu sama lain, dan nilai-nilai kebaikan yang di percayai. Pada umumnya elit agama menggunakan sarana dakwah sebagai strategi mempengaruhi masyarakat lokal.
- e. Elit sipil adalah orang-orang yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital ataupun modal lain dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintahan desa, namun elit sipil memiliki modal sosial dan kepentingan masyarakat akar rumput. Sehingga elit sipil mampu untuk menggerakkan masyarakat akar rumput untuk memperjuangkan kepentingannya.
- f. Selanjutnya adalah Elit golongan putih (Golput) yang memiliki pengaruh yang kuat. Perilaku elit golput mampu mempengaruhi masyarakat sesuai keinginan elit

Pada hakikatnya kekuasaan merupakan komponen utama dalam konsep elit sedangkan wilayah merupakan objek kekuasaan dan elit sebagai subjek politiknya (Hidajat, 2012). Elit merupakan aktor-aktor yang memegang kendali dalam setiap keputusan politik. Pada Prinsip-Prinsipnya menurut Pareto,

Mosca, dan Michels bahwa kekuasaan politik merupakan sebuah barang yang di distribusikan secara tidak merata seperti kekayaan, status sosial dan kekuasaan politik. Secara internal elit politik cenderung bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran berkelompok.

Kelompok elit terbentuk berdasarkan lata belakang perseorangan atau individu yang memahami nilai-nilai dan tujuan yang sama sehingga selalu terbentuk keutuhan dan kesatuan. Selain itu elit juga cenderung mengatur kelangsungan kehidupannya sendiri (*self perpetuating*) yang memilih sendiri anggotanya yang berasal dari lapisan masyarakat yang terbatas seperti pemimpin yang memilih penerusnya dari kalangan yang istimewa dan juga elit bersifat otonom, kebal terhadap gugatan dari luar kelompok terhadap keputusan yang dibuatnya, sehingga segala persoalan politik dapat diselesaikan dengan tindakan kelompok dan sesuai kepentingan (Sudijono, 1995: 144).

Konsep elit dalam kekuasaan adalah di mana kemampuan elit dalam mempengaruhi kebijakan umum dalam setiap keputusan politik. Dalam hubungannya kekuasaan politik tidak hanya mencangkup kekuasaan dalam memperoleh ketaatan dari masyarakat tetapi menyangkut pengendalian orang lain guna mempengaruhi tidakan dan aktivitas negara di bidangn administratif, legisatif, dan yudikatif (Budiardjo, 1998:37).

Sama halnya seperti elit, Aktor Politik adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam proses politik secara langsung maupun tidak langsung. Aktor Politik pada umumnya merupakan orang yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat ataupun meyakinkan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Aktor merupakan bagian elit dari Politik. Pada hakikatnya aktor politik adalah individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan politik seperti pada pemilu.

Pada Pemilu hal penting yang terjadi adalah kompetisi diantara masing-masing calon pemimpin. Ketika seorang pemimpin mencalonkan dirinya untuk dipilih dalam pemilu maka

akan membutuhkan dukungan yang banyak untuk memenangkan kompetisi sehingga membutuhkan bantuan dari individu-individu yang berpengaruh untuk menggalang dukungan untuk memenangkan salah satu calon. Individu tersebut yang dinamakan aktor politik.

Dalam konsep elit yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca bahwa konsep elit dan kekuasaan di dasarkan pada permasalahan pada kekuasaan politik dalam membahas tentang elit. Gambaran konsep elit dengan kekuasaan adalah permasalahan distribusi kekuasaan semata. Bahwa kekuasaan sebagai sebuah kemampuan dalam mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif dengan batasan dan arahan mengenai kekuasaan itu sendiri yaitu (Budiardjo, 1998:38) pertama menetapkan ruang lingkup dari kekuasaan seperti kegiatan yang dilakukan, kedua di kalangan kelompok yang memerintah hanya sedikit dari elit yang secara langsung menetapkan kebijaksanaan, ketiga pembuat keputusan harus memperhatikan actor lain mengenai reaksi terhadap keputusan politik. Sehingga pada akhirnya elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain.

Relasi Kuasa Elit Politik

Relasi kuasa (*Power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Relasi kuasa juga merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Oleh karena itu relasi kuasa tidak terlepas dari konsep kekuasaan itu sendiri. Menurut Max Weber sendiri yaitu orang yang mempunyai kuasa bisa mendesakkan kehendak atau gagasan-gagasannya kepada orang lain bahkan ketika mereka tidak sepakat dengannya (Yamin 2019: 53). Weber sendiri mendefinisikan desakkan tersebut sebagai dominasi.

Pola relasi kuasa berdasarkan Weber tak lepas dari pola hubungan dominasi yaitu pola tradisional, pola relasi kekuasaan

karismatik dan pola rasional-legal (Yamin 2019: 54). Pola tradisional berdasarkan kekuasaan pada aturan turun temurun yang dipercaya oleh sebagian besar pendukungnya. Aktornya biasanya merupakan orangtua yang pengetahuannya sudah mencapai tingkat yang lebih matang dibandingkan masyarakat lainnya yang mampu meresapi kearifan lokalnya.

Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*), artinya bahwa ada pihak yang memerintah dan ada yang diperintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu ada yang lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Sedangkan konsep kekuasaan menurut Michel Foucault merupakan relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang memiliki ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017:118).

Menurut Foucault, kekuasaan hadir dimana-mana karena kekuasaan adalah dimensi dari suatu relasi yang terpadu. Artinya bahwa dimana ada sebuah relasi, maka ada sebuah kekuasaan di dalamnya (Khatami, Muh. Iqbal dkk. 2020: 104). Semua kekuatan dari kuasa itu dapat ditemukan dari berbagai aspek relasi antar manusia, contohnya manusia dengan manusia atau manusia lainnya dan relasi antar manusia dan lingkungannya atau situasi mereka Bertens, K. (dalam Khatami, Muh. Iqbal dkk. 2020: 105). Foucault berpandangan bahwa kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang represif melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Kekuasaan menurut Foucault dalam Mudhoffir (2013: 79), dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan dianggap sebagai suatu yang melengangkan relasi kekuatan. Oleh karena itu kekuasaan merupakan strategi dan relasi kekuatan adalah efeknya. Kekuasaan hadir karena selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi.

Dalam sistem politik demokratis dan negara pluralis, negara hanyalah sekedar wahana politik dimana kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat saling bersaing untuk menguasai negara.

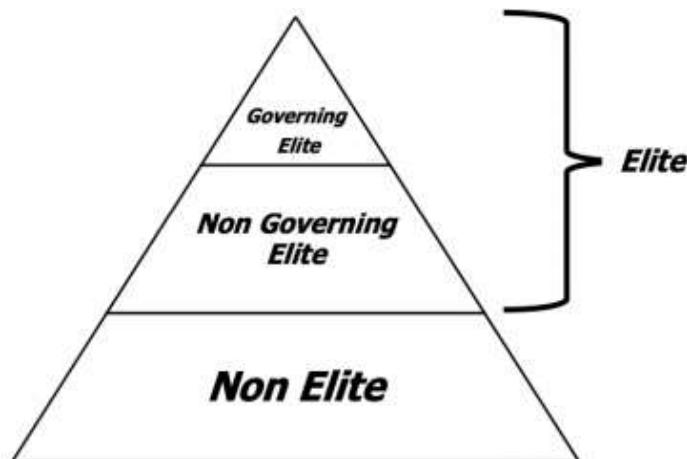
Kadang-kadang negara dikuasai kelompok tertentu, namun juga kadang dikuasai oleh kelompok lain yang berhasil menguasai negara (AS Hikam, 2000:30). Untuk menghindari ketegangan antara masyarakat dan negara dari perbedaan kepentingan antar kelompok, perlu adanya hubungan kemitraan antara negara dan masyarakat yang saling mengontrol. Maka negara tidak mendominasi masyarakat dan sebaliknya.

Dalam politik dan sistem demokrasi juga tentunya setiap lapisan masyarakat memiliki perannya sendiri-sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit menemukan sekelompok individu yang memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar dari kelompok individu lainnya dengan menggunakan keunggulan keunggulan tertentu yang menyebabkan kelompok individu dapat mengendalikan cabang kehidupan tertentu, individu-individu tersebut disebut Elit. Keunggulan tertentu tersebut dilandasi oleh perbedaan yang bersifat alamiah dan tidak dapat terelakkan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pareto dan Mosca dalam Buku Haryanto “Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar (2017: 7) berpendapat bahwa di setiap masyarakat baik itu tradisional maupun modern, pasti ditemukan elit yang sedang memerintah (*governing elite*) dan tidak sedang memerintah (*non governing elite*). Mereka yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatanjabatan politis. Dan mereka yang sedang tidak memerintah terdiri dari orang-tang yang tidak menduduki jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.

Jika digambarkan maka pernyataan tersebut dapat seperti gambar dibawah diatas yaitu si gambarkan sebuah piramida.

Gambar 1.
Relasi Kuasa Elit Politik



Dari gambar di atas maka dapat dilihat bahwa hubungan yang terbangun dalam konteks relasi kuasa menempatkan para elit pemerintah pada kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok non elit governing maupun kelompok non elit. Relasi kuasa yang ini juga menunjukkan bahwa kepentingan kelompok ditentukan berdasarkan kedudukannya, sehingga tentunya kelompok elit pemerintah memiliki kepentingan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok lainnya.

d) Rangkuman

1. Menurut Brian McNair dalam Ardhita (2017) mendefinisikan aktor politik adalah *“those individual who aspire through organizational and institutional means, to influence the decision making process. They may seek to do this by attaining institutional political power, in government or constituent assemblies, through which preferred policies can be implemented”* aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan berupaya melakukan dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga

eksekutif ataupun legislatif dalam kebijakan yang akan diimplementasikan (Yuliana, 2017).

2. Selanjutnya elit aktor lokal terbagi dalam beberapa macam (Halim, 2014:33) yaitu; (a) Elit birokrasi atau elit pemerintahan daerah merupakan elit yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, (b) Elit partai lokal adalah elit yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri, (c) Elit ekonomi di daerah merupakan elit yang memiliki peran yang strategis dalam politik lokal, (d) Elit agama di daerah merupakan elit yang berperan aktif dalam setiap aktivitas sosial, (e) Elit sipil adalah orang-orang yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital ataupun modal lain dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintahan desa, dan (f) Selanjutnya adalah Elit golongan putih (Golput) yang memiliki pengaruh yang kuat.
3. Kelompok elit terbentuk berdasarkan lata belakang perseorangan atau individu yang memahami nilai-nilai dan tujuan yang sama sehingga selalu terbentuk keutuhan dan kesatuan.
4. Konsep elit dalam kekuasaan adalah di mana kemampuan elit dalam mempengaruhi kebijakan umum dalam setiap keputusan politik. Dalam hubungannya kekuasaan politik tidak hanya mencangkup kekuasaan dalam memperoleh ketaatan dari masyarakat tetapi menyangkut pengendalian orang lain guna mempengaruhi tidaikan dan aktivitas negara di bidangn administratif, legisatif, dan yudikatif (Budiardjo, 1998:37).
5. Relasi kuasa (*Power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu.
6. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*), artinya bahwa ada pihak yang memerintah dan ada yang diperintah.

d) Latihan

1. Jelaskan relasi kuasa diantara aktor dan elit politik di Indonesia sebagaimana ideologi politik yang dianut bangsa Indonesia !

e) Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali definisi dan klasifikasi aktor serta elit politik, dan relasi diantara aktor/elite berdasarkan ideologi politik yang dianut sebagai bagian kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

f) Umpulan balik

1) Penutup

b) Rangkuman

Ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respons praktis kita terhadapnya. Ideologi hampir dianut oleh seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Ideologi inilah yang kemudian diadopsi oleh kelompok melalui aktor dan elit politik yang kemudian membentuk kekuatan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan disuatu negara, relasi aktor dan elit politik sangat berkaitan erat dan memegang peran penting. Aktor yang berkedudukan sebagai elit government biasanya yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan baik ditingkat nasional maupun lokal.

c) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

1. **Definisi Ideologi dan proses ideologi menjadi ideologi politik**

Ideologi merujuk pada seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk pandangan dunia seseorang atau kelompok tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan berfungsi. Ini melibatkan pandangan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan dunia serta memberikan dasar bagi tindakan politik dan keputusan.

Ketika ideologi digabungkan dengan aspek politik, itu menjadi apa yang disebut sebagai ideologi politik. Ideologi politik mencakup pandangan atau filosofi tentang bagaimana kekuasaan politik harus diorganisir, bagaimana kebijakan publik seharusnya dibuat, dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur. Ideologi politik seringkali mencakup pandangan tentang peran pemerintah, kebebasan individu, distribusi kekayaan, dan nilai-nilai sosial.

Beberapa contoh ideologi politik yang terkenal termasuk liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, libertarianisme, dan fasisme. Masing-masing ideologi politik memiliki penekanan yang berbeda pada nilai-nilai tertentu, seperti kebebasan individu, kesetaraan sosial, peran pemerintah, atau kepentingan kolektif.

Ideologi politik dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan politik, pembentukan kebijakan, serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Mereka juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan partai politik dan gerakan politik yang berusaha mewujudkan visi ideologis tertentu melalui tindakan politik dan pengaruh dalam proses politik.

2. Apakah Ideologi Pancasila tergolong dalam salah satu jenis ideologi *Mainstream*?

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar: Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila merupakan pandangan yang diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi mainstream di Indonesia. Ideologi ini dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, sosial, dan budaya.

Pancasila juga menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah, hukum, dan aturan yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Meskipun Pancasila menjadi ideologi utama di Indonesia, namun tetap ada ruang bagi keberagaman pandangan dan pendapat di dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung tinggi dan dianggap sebagai titik kesatuan yang mengikat berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia.

d) Daftar Istilah

Demokrasi	Sistem pemerintahan dimana pemegang keadaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Dominasi	Paham dalam sistem perpolitikian yang dilakukan dalam penyalinan atau penguasaan yang dapat terjadi melalui eksplorasi terhadap agama, ideologi, dan sifat kebudayaan terhadap wilayah lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan kekuasaan

Etimologis	Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata
Individu	Merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Ide	Rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita.
Implementasi	Pelaksanaan atau penerapan
Orientasi	Sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmoni di sebuah tempat baru

d) Referensi

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Abdi. I Mughis Mudhoffir. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *E Jurnal Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1).
- Abd. Halim. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Adams. (1993). *Sosiologi Anthropology and Development*. New York: World Bank.
- Alex Sobur. (2004). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Jihad, R. Saddam. (2018). *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet.
- Ardhita Yuliana N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Politik dan Aktor Politik terhadap Partisipasi Politik masyarakat desa trimurti. Srandonan, Bantul Pada Pilkada 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- A., S Hikam, Muhammad. (2000). *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Christenson et al. (1971). *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead, and Company, Inc.
- Eatwell, Roger. (2004). *Ideologi Politik Kontemporer*. Terjemahan RM. Ali. Yogyakarta: Jendela.
- Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. (1990). *Isme-isme Dewasa Ini Edisi Kesembilan*. Terjemahan Alex Jemadu. Jakarta: Erlangga

- Ethridge, Marcus E., & Howard Handelman. (2016). *Politik Dalam Dunia Yang Berubah*. Terjemahan Lita Yusron. Bandung: Nusamedia.
- Gunawan Setiardja. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 89-90.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, Dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Halim, Abdul. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. (2014). *Politik Lokal (Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya)*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B). hlm.33
- Hayek, Friedrich A. (2011). *Ancaman Kolektivisme*. Terjemahan Ioanes Rakhmat. Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung.
- Heilbroner, Robert L. (1991). *Hakikat dan Logika Kapitalisme*. Terjemahan Hartono Hadikusumo. Jakarta: LP3ES.
- Heywood, Andrew. (2016). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hidajat, Imam. (2009). *Teori-Teori Politik Islam*. Malang: Setara Press.
- Imam Hidajat (2012). *Teori-teori Politik*, Malang: SETARA Press.
- Kamahi, Umar. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Kitabah*, 3(1), hlm.118.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rejai, Mostafa. (1991). *Political Ideologies A Comparative Approach*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Samekto, FX., Adji. (2008). *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: GENTA PRESS.
- Sarbini. (2005). *Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Steger, Manfred B. (2005). *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*. Terjemahan Heru Prasetya. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Sudijono Sastroatmodjo. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wilczynski, Josef. (1981). *An Encyclopedic Dictionary of Marxism, Socialism, and Communism*. London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.

MODUL 2

BUDAYA POLITIK, PARTISIPASI POLITIK, DAN KEKUATAN POLITIK

1) Pendahuluan

a) Deskripsi Singkat

Dalam kegiatan mempelajari mengenai konsep kekuatan politik, namun mahasiswa terlebih dahulu memahami budaya politik dan partisipasi politik sebagai landasan terbentuknya kekuatan politik baik yang bersifat individu maupun kelompok. Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan berbangsa yang erat kaitannya dengan aktivitas politik. Pola perilaku individu dan orientasi individu inilah yang kemudian akan menentukan keterlibatan atau partisipasi politik tiap individu warga negara. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan juga ikut dalam menentukan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keterlibatan individu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan inilah yang akan dimaknai sebagai kekuatan politik, baik secara individu maupun organisasi. Oleh karena itu maka adapun pembahasan dalam modul ini mencakup Budaya politik, Partisipasi politik, dan Konsep kekuatan politik.

b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 2 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan

- mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.
 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di indonesia.
 7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
 8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

c) **Kemampuan Akhir**

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 2 ini adalah: Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa budaya politik, partisipasi politik, dan konsep kekuatan politik.

d) **Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)**

Mahasiswa telah lulus mata kuliah teori Politik dan Perbandingan Politik

e) **Kegunaan Modul 2**

Kegunaan atau manfaat dari modul ini adalah membantu mahasiswa memahami mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang diawali dengan kerangka dasar yang dibangun melalui budaya politik dan partisipasi politik oleh tiap-tiap individu warga negara. Modul ini juga berguna bagi mahasiswa untuk dapat membedakan antar kekuatan politik yang terdiri dari berbagai unsur dengan kekuasaan politik.

f) **Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Budaya politik, Partisipasi politik, dan Kekuatan politik.
2. pengertian, orientasi dan tipe-tipe budaya politik, pengertian,

3. tipe-tipe dan hierarki dari partisipasi politik
4. konsep kekuatan politik dengan sejarah perkembangannya di Indonesia dari masa ke masa.

1) Kegiatan Pembelajaran I

- a) Budaya Politik dan Partisipasi Politik
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mengetahui tentang konsep budaya politik, dan partisipasi politik, serta mampu menjelaskan tentang budaya politik dan partisipasi politik.

- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Budaya Politik

Masyarakat dari suatu negara pasti memiliki budaya politik begitu pula individu-individu yang memiliki orientasi dan persepsi terhadap sistem politiknya. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat modern dan masyarakat tradisional, atau bahkan pada masyarakat primitif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. (Sudijono, 1995: 36-37).

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah Perang Dunia II selesai. Di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai *Behavioral Revolution*, atau ada juga yang menamakannya dengan Behavioralism.

Behavioral revolution yang terjadi dalam ilmu politik

adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial termasuk ilmu politik, seperti halnya ilmu-ilmu alam mampu memberikan penjelasan tehadap gejala-gejala alam. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim (Afan Gaffar, 2006: 97).

Paham positivisme merupakan pendapat yang sangat kuat di Amerika Serikat semenjak Charles E. Merriam mempeloporinya di Universitas Chicago, yang kemudian dikenal sebagai *The Chicago School* atau Madzhab Chicago, yang memulai pendekatan baru dalam ilmu politik (Somit and Tannenhaus, 1967; Almond and Verba, 1963; Almond, 1990 dalam Afan Gaffar, 2006: 97).

Salah satu dampak yang sangat mencolok dari *behavioral revolution* ini adalah munculnya sejumlah teori, baik yang bersifat grand maupun pada tingkat menengah (*middle level theory*). Kemudian, ilmu politik diperkaya dengan sejumlah istilah, seperti misalnya *sistem analysis*, *interest aggregation*, *interest articulation*, *political socialization*, *politic culture*, *conversion*, *rule making*, *rule dan application* (Afan Gaffar, 2006: 98).

- Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
- Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David

Easton, yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel Almond, hal ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan diantara kalangan teoritis dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture. Civic Culture* inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi (Afan Gaffar, 2006: 99).

- Almond (1965:20) menunjukkan bahwa “tiap sistem politik mewujudkan dirinya didalam pola orientasi-orientasi dan tindakantindakan politik tertentu”. Dalam pengertian yang hampir sama, Lucian W. Pye (1965:24) mendefinisikan budaya politik sebagai “*the ordered subjective realism of politic*”, yaitu tertib dunia subjektif politik”. Definisi budaya politik menurut Verba (1965:31) merupakan yang paling jelas. Bahwa “budaya politik”, demikian katanya, “menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik (dalam A. Rahman H.I, 2007: 268).
- Almond dan Verba (1984: 14) menunjuk bukan pada apa yang diyakini orang tentang kejadian-kejadian tersebut dan kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud dapat mengenai beraneka jenis, berupa kepercayaan-kepercayaan empirik mengenai situasi kehidupan politik, dapat berupa keyakinan-keyakinan mengenai tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang harus dihayati di dalam kehidupan politik dan semuanya itu dapat memiliki perwujudan atau dimensi emosional yang sangat penting. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan

warga negara yang ada di dalam sistem tersebut”.

- Miriam Budiardjo (2008: 58-59) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.
- Kegiatan politik warga negara, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan.
- Dengan kata lain, budaya politik suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat itu. Lebih jauh dinyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
- Menurut Rusadi Kantaprawira (2006: 25), budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

- Pengertian budaya politik diatas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Konsep orientasi mengikuti pengertian Talcott Parsons dan Verba yang mendefinisikan orientasi sebagai aspek-aspek dari objek dan hubungan-hubungan yang diinternalisasikan di dalam dunia subjektif individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya, kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu, yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 21)

Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. Pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Kedua, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil (A. Rahman H. I, 2007: 269). Budaya politik selalu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian

memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (1984: 16) mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu:

- Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara.
- Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpilah-pilah tetapi saling terkait atau sekurangkurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.

Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara

keseluruhan (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 22).

Pada hakekatnya kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 23).

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekolompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap, dan tingkah laku politik (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 24).

Alfian (1986: 244-245), menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian, nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu

orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.

Mar'at (1984: 25-26), menetapkan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan dalam berperilaku yang merupakan produk dari proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi politik, tak pernah hadir di kehampaan budaya. Budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti; kebutuhan, SINA (Sitem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Senso Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa yang dimilikinya, biasanya akan bercampur baur dengan prestasi di bidang peradaban.

Almond dan Powell mencatat, bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*). Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya rasa permusuhan akan mendorong seseorang atau suatu kelompok pada konflik politik (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991: 22-23). Dengan demikian, kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya atau budaya politiknya, Almond dan Verba membaginya dalam tiga tipe budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa, aktor politik individual yang berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam dalam pembuatan kebijaksanaan yang bersifat ke atas atau dalam arus pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat ke bawah (Almond & Verba, 1984: 18). Hasilnya adalah klasifikasi tiga tipe ideal budaya politik, yaitu sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial (*parochial political culture*)

Dalam budaya ini, peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan/spiritual. Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasi oleh sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem

politik (Almond & Verba, 1984: 20).

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik yang terdapat di negaranya (Budi Winarno, 2008: 19). Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya ini hidup dalam masyarakat dimana orang-orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Selain itu, mereka juga tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.

2. Budaya politik subjek/kaula (*subject political culture*)

Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif.

Masyarakat meyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apaapa terhadap perubahan politik (Almond & Verba, 1984: 21). Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan

rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubahubah, dikoreksi apalagi ditentang. Budaya politik ini ditemukan dalam masyarakat yang orangorangnya secara pasif patuh terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan.

Dalam budaya ini tidak dikembangkannya kapabilitas responsif, sehingga masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Budaya politik subjek muncul jika orientasi afektif saja yang kuat (Budi Winarno, 2008: 18). Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masingmasing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

3. Budaya politik partisipan (*participant political culture*)

Adalah suatu budaya politik dimana warga masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat itnggi. Dalam budaya politik ini partisipasi masyarakat atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik (Almond & Verba, 1984: 22). Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Budaya politik partisipan hidup

dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang (Budi Winarno, 2008: 18).

Dengan budaya politik partisipan, maka kerja sistem politik demokrasi dapat dikembangkan karena pada budaya politik ini warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya sikap saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Kombinasi antara tiga tipe budaya politik diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran. Secara konseptual menurut Almond dan Verba (1984: 27-31) terdapat tiga tipe budaya politik campuran, yaitu:

- a) Budaya subjek-parokial: Adalah tipe budaya politik yang Sebagian besar penduduknya menolak tuntutan-tuntutan ekslusif (khusus) pada masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Bentuk budaya campuran ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial (parokialisme lokal) menuju pola budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis).
- b) Budaya subjek-partisipan: Merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis) menuju budaya partisipan (demokratis). Cara-cara yang berlangsung dalam proses peralihan dari budaya parokial menuju budaya subjek turut berpengaruh pada proses ini. Dalam proses peralihan ini, pusat kekuasaan parokial dan lokal turut mendukung pembangunan

infrastruktur demokratis.

- c) Budaya parokial-partisipan: Banyak terdapat pada negara-negara berkembang yang melaksanakan pembangunan politik. Di sejumlah negara ini pada umumnya budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Sedangkan norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan. Klasifikasi budaya politik ke dalam tiga tipe ideal sebagaimana diungkapkan oleh Almond dan Verba, sama sekali tidak mengasumsikan bahwa tipe yang satu meniadakan tipe yang lain. Klasifikasi itu tidak harus disimpulkan bahwa orientasi yang satu akan menggantikan orientasi yang lain (Almond & Verba, 1984: 22).

Model-model budaya politik di atas kaitannya dengan studi tentang budaya politik dirasakan penting karena dapat menunjukkan karakteristik-karakteristik khas serta orientasi-orientasi warga negara terhadap sistem dan proses politik. Karena budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik suatu bangsa. Perhatian terhadap budaya politik setidaknya dilandasi oleh dua hal. Pertama, sistem politik yang di dalamnya terdapat partai politik mempunyai keterkaitan yang kompleks antara budaya politik dengan aspek-aspek lain dalam sistem politik, baik formal maupun informal. Kedua, dilandasi oleh keyakinan bahwa budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik.

Dalam hal ini, terdapat hubungan yang dekat antara struktur dan budaya politik. Selain itu, budaya politik merupakan cerminan dari nilai, sikap, perilaku, dan orientasi individual terhadap politik atau sistem politik. Menurut David Easton, budaya politik merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang mereka anggap harus diterapkan untuk meraih tujuan-tujuan tersebut (Budi Winarno, 2008: 15).

Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku

individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari orientasi individu. Menurut Almond dan Verba (1984: 17), masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan. Orientasi dari tingkah laku individu tersebut terwujud dalam bentuk keterlibatan di bidang politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling di tekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127- 128).

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik itu terbagi dalam dua jenis yaitu, Pertama, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-

gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. (Rohaniah dan Efriza 2015:468).

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan juga ikut dalam menentukan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak anggota masyarakat dengan kata lain partai politik sebagai wadah partisipasi politik. (Subakti, 2010:151).

Adapun pengertian tentang partisipasi politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya:

- Menurut Herbert Mclosky dalam (Budiarjo. 2008:367) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah & Efriza 2015:471) Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
 - Menurut Kevin R. Hardwick dalam (Rohaniah & Efriza 2015:471) Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

- Menurut Tommi Legowo dalam (P. Anthonius Sitepu 2012:93) Yang merumuskan pengertian tentang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya.

Maka dengan demikian, partisipasi politik berkaitan erat dengan proses perumusan kebijakan negara. Dalam definisi ini memberikan gambaran mengenai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Pertama, kegiatan-kegiatan politik yang dapat menghasilkan adanya gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung adanya gagasan dan kebijaksanaan yang dihasilkan oleh sistem politik Indonesia.

Berbagai pendapat mengemukakan ketika partisipasi masyarakat rendah maka ada keresahan dalam sistem politik yang ada, dimana pemimpin dianggap kurang tanggap dalam memahami aspirasi serta tuntutan masyarakat hal tersebut menunjukkan legitimasi yang rendah. Asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik atau landasan politik menurut Samuel P. Huntington dan Nelson (Anggara : 2013) diantaranya:

- 1) Kelas merupakan individu yang memiliki latar belakang status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok atau komunal yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- 3) Lingkungan yaitu individu yang memiliki tempat tinggal berdekatan.
- 4) Partai berasal dari individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif

dan legislatif.

- 5) Golongan atau faksi berasal dari individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu dan lainnya, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat.

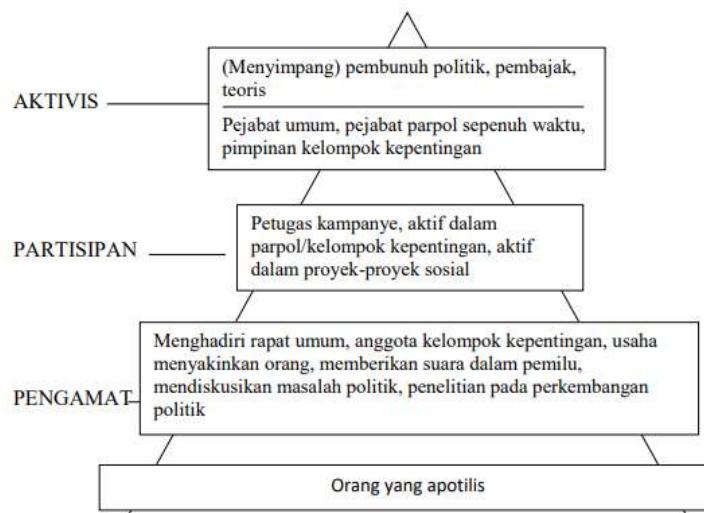
Adapun berbagai bentuk partisipasi politik, meliputi kegiatan-kegiatan politik yang bersifat mendukung atau menuntut, sebagai input yang diajukan masyarakat terhadap sistem politiknya yaitu bentuk partisipasi politik dan non konvensional. Bentuk partisipasi konvensional dikatakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik nonkonvensional misalnya seperti kekerasan petisi, revolusioner, ataupun petisi.

Mengenai bentuk partisipasi maka dapat dibedakan menjadi empat bentuk yang mencakup:

- a. Kelompok apatis : orang yang tidak ikut andil dalam kegiatan politik apapun.
- b. Spektator : orang yang setidaknya pernah ikut memilih.
- c. Gladiator : komunikator, aktivis partai, pekerja kampanye.
- d. Pengkritik : bentuk partisipasi tidak konvensional.

Tingakatan partisipasi politik. Secara prakteknya, partisipasi politik warga negara di antara negara-negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Namun secara umum tingkat partisipasi politik warga negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk piramida, seperti gambar dibawah ini:

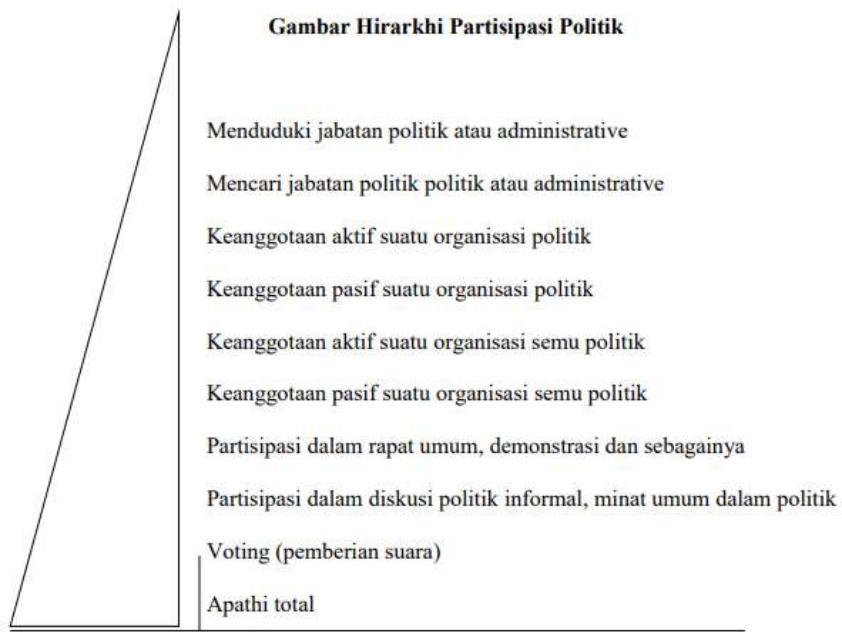
Gambar 2.
Piramida Partisipasi Politik



Sumber: Roth dan Wilson, 1980. Dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:136.)

Roth dan Wilson dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:137), menjelaskan bahwa membagi jenis partisipan ini berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya yang tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlah orangnya banyak. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Gambar 3.



Sumber: dalam buku (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si.
2007:139)

Pada puncak hirarkhi terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka dibedakan dari partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal.

d) Rangkuman

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat beberapa point yang menjadi garis besar yang meliputi:

- a. Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan berbangsa, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh

anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25).

- b. Miriam Budiardjo (2008: 58-59) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif.
- c. Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. Pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik, dan Kedua, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya (A. Rahman H. I, 2007: 269).
- d. Menurut Herbert Mclosky dalam (Budiarjo. 2008:367) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- e. Adapun berbagai bentuk partisipasi politik, meliputi kegiatan-kegiatan politik yang bersifat mendukung atau menuntut, sebagai input yang diajukan masyarakat terhadap sistem politiknya yaitu benntuk partisipasi politik dan non konvensional.

d) Latihan

1. Jelaskan definisi terkait dengan budaya politik dan bagaimana budaya politik dapat dibentuk?
2. Jelaskan berbagai jenis budaya politik, dan menurut anda bagaimana budaya politik yang ada di Indonesia?
3. Sebagai salah satu negara yang tergolong memiliki jumlah partisipasi politik terbesar di dunia dalam pemilihan umum, menurut anda apa yang menjadi alasan tingkat partisipasi politik yang tinggi ini? Jelaskan dan berikan data sebagai penunjang analisa

e) **Evaluasi Pembelajaran**

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali definisi, bentuk dan tipe serta kaitan antara budaya politik dengan sosialisasi dan partisipasi politik

f) **Umpang balik**

Umpang Balik diberikan secara langsung dalam kegiatan diskusi/menjawab latihan soal.

e) **Kegiatan Pembelajaran 2**

- 1) Konsep Kekuatan Politik
- 2) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kembali tentang bentuk dan sumber kekuatan politik di Indonesia

f) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

a) **Konsep Kekuatan Politik**

Pada masa orde baru, ketika ideologi *developmentalisme* menjadi pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital global. Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang dibawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya, strategi pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip *trickle down effect* atau menetes kebawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi

politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik (Mustain, 2007:16).

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan (Pitaloka, 2004:60).

- Miriam budiardjo (1993) mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.
- Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik sebagaimana yang di katakan oleh Bachtiar Effendiy, yakni apakah kekuatan ini bersifat formal atau nonformal. Kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*. Dalam hal ini dapat di maksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama

dan lain sebagainya (Septyaningsih, 2004:171).

- Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peran dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan politik berperan sebagai penopang system politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi *input* oleh infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik (Natsir,R., 2014).

Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Namun, apabila diklasifikasikan, maka dapat diperkecil menjadi empat kekuatan saja. Salah satunya adalah partai politik. Dari sekian banyak kelompok-kelompok kekuatan politik dan organisasi di Indonesia, maka dikategorikan menjadi 4 infrastuktur politik saja yang antara lain yaitu; (1) Partai politik (*Political Party*), (2) Kelompok Kepentingan (*Interest group*), (3) Kelompok penekan (*pressure group*), dan(4) Media Komunikasi Politik.

Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*); seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi (*manipulation*), peragaan ancaman kekuasaan (*coercion*), penggunaan tekanan fisik (*force*), dan kewenangan (*authority*). Dalam asosiasinya terhadap kekuatan politik, dapatlah ditarik benang merah bahwa tidak mungkin ada kekuatan dalam hal apapun, bukan hanya politik tanpa adanya kekuasaan. Maka dalam pembahasan mengenai kekuatan politik, pertama-tama kita perlu sedikit menguraikan konsep kekuasaan.

Begitu banyak pembahasan mengenai kekuasaan politik,

namun tiga masalah utama yang selalu diamati oleh ilmuwan politik berkenaan hal ini adalah bagaimana kekuasaan dilaksanakan, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan mengapa suatu pihak tertentu memiliki kekuasaan lebih besar dari yang lain dalam situasi dan kondisi tertentu.

Indonesia, dalam 79 tahun pasca kemerdekaan, telah mengenal kekuatan politik dalam berbagai bentuk, baik formal maupun anomie, yang telah menempati berbagai posisi kekuasaan seiring waktu yang berjalan, dari mulai Revolusi Kemerdekaan sampai periode Reformasi, yang kesemuanya layak dibahas demi mencapai sebuah tujuan bernama pemahaman, karena pemahaman adalah titik awal untuk dapat mengevaluasi suatu objek pengetahuan.

1. Kekuatan Politik Indonesia: Masa Kemerdekaan

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan memiliki komitmen yang sangat besar terhadap mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Terdapat beberapa hal fundamental yang menjadi peletakan dasar demokrasi di Indonesia, sekaligus dapat dikatakan sebagai kekuatan-kekuatan politik di awal terbentuknya NKRI.

- Pertama adalah *political franchise* yang menyeluruh, sejak kemerdekaan telah dinyatakan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang telah dianggap dewasa memiliki hal-hak politik yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan kedaerahan. Meskipun tidak berwujud konkret, hal ini merupakan suatu kekuatan politik di awal kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mendukung kehidupan berpolitik yang kondusif.
- Kedua adalah Lembaga Kepresidenan, yang pada awal terbentuknya dapat dikatakan bersifat mutlak dan berpeluang menjadi suatu kediktatoran, sebelum Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kemudian

dibentuk untuk menggantikan parlemen, dan meninggalkan Presiden sebagai personifikasi kekuasaan.

- Ketiga, adalah Maklumat Wakil Presiden nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945 atas usul KNIP yang menyatakan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR, yang kemudian berkelanjutan hingga membentuk sistem pemerintahan parlementer. Seperti halnya poin pertama, Maklumat yang tidak bersifat konkrit sebagaimana halnya Lembaga Kepresidenan, tetap menjadi kekuatan politik yang berpengaruh, dalam hal ini adalah mengendalikan kekuatan politik lainnya (baca: Presiden) dari kemungkinan kediktatoran.

2. Kekuatan Politik Indonesia: Masa Pemerintahan Parlementer dan Demokrasi Terpimpin

Pada masa pemerintahan parlementer (1950-1959) yang berlangsung dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dapat dikatakan sebagai simbolisasi kejayaan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, kita tidak bisa tidak menyebutkan parlemen sebagai salahsatu kekuatan politik di Indonesia, yang pada masa itu tengah jaya-jayanya. Kejayaan parlemen pada masa pemerintahan parlemen didukung oleh sejumlah kekuatan politik; seperti kekuasaan parlemen terhadap kabinet lewat sejumlah mosi tidak percaya yang mengakhiri kabinet, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi yang sangat tinggi karena lembaga perwakilan rakyat (parlemen) berfungsi dengan baik, adanya pers sebagai instrumen politik sekaligus alat kontrol sosial, dan masyarakat umum yang dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali dengan adanya berbagai kebebasan termasuk kebebasan berpendapat tanpa rasa khawatir akan resiko keselamatan diri. Namun dominasi politik aliran yang membawa konsekuensi

pengelolaan konflik, basis sosial-ekonomi yang masih sangat lemah, dan adanya persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang tengah berjalan saat itu, mengakibatkan berakhirnya masa pemerintahan parlementer, dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945, dan memberi kesempatan pada Kepala Negara untuk mewujudkan gagasan politiknya dan memainkan peranan publik yang selama masa pemerintahan parlementer tidak dapat dilakukannya berkaitan dengan posisinya yang hanya menjadi simbolisasi kekuasaan. Di samping itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya hanya berperan sebagai kekuatan politik oposisi, kemudian masuk dalam kekuasaan eksekutif dan menjadi salah satu aliansi yang sangat diperlukan oleh Soekarno.

Di lain pihak, Angkatan Darat juga muncul sebagai kekuatan politik yang sangat kuat karena didukung oleh keadaan, karena sejak awal AD telah mengamati bahwa PKI merupakan ancaman yang membahayakan NKRI. Politik pada masa Demokrasi Terpimpin diwarnai oleh tarik-ulur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik yang utama pada saat itu; yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat.

3. Kekuatan Politik Indonesia: Masa Orde Baru

Dalam model Modern Personal Rule yang diajukan William Liddle (1985) mengenai Indonesia Orde Baru, tampak bahwa kekuatan politik di Indonesia pada masa Orde Baru terbagi atas tiga jajaran utama: Presiden dengan segala atributnya, Angkatan Bersenjata, dan Birokrasi. Dalam analogi piramida kekuatan politik, Lembaga Kepresidenan atau Presidency di Indonesia menempati puncak kekuasaan secara

keseluruhan, menjadi primus inter pares yang utama diantara yang setara diantara lembaga tinggi negara yang lain seperti DPR, DPA, MA, dan BPK, sebagai konsekuensi kemampuan Presiden dalam mengontrol dan menggunakan *political resources*.

Presiden mengontrol rekrutmen politik dalam negara, termasuk untuk jabatan lembaga tinggi negara, anggota badan legislatif serta judikatif, dan di kalangan Angkatan Bersenjata berkaitan dengan posisinya sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu, Presiden juga memiliki sejumlah financial resources yang didalamnya mengatur proses perumusan budgeting dan pendistribusian dana pembangunan nasional. Oleh karenanya, tidak heran jika proses politik, berjalan dengan sedikit banyak ditentukan oleh persepsi dan orientasi Lembaga Kepresidenan.

Dalam perjalanan politik Orde Baru, lembaga kepresidenan menjadi pusat seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia, sebagai pembentuk dan penentu agenda sosial, ekonomi, dan politik nasional, dengan kekuasaan yang sedemikian besar dalam rekrutmen opolitik dan sumber daya keuangan yang tidak terbatas, dan sejumlah hak khusus yang dimiliki Presiden seperti Mandataris MPR, Pemegang Supersemar, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI.

Pada jajaran kedua adalah Angkatan Bersenjata terutama Angkatan Darat yang berperan penting terutama sebagai stabilisator dan dinamisator politik. Namun, prevalensi ABRI dapat juga ditemukan dalam berbagai bidang lain, seperti ekonomi, sosial-kemasyarakatan, termasuk olahraga dan kesenian. Dalam bidang politik, ABRI memainkan politik baik secara langsung maupun tidak, melalui organisasi sosial politik misalnya Golongan Karya. Peranan politik ABRI Orde Baru adalah sebagai pembentuk suasana yang baik, agar semua kebijaksanaan pemerintah dapat diwujudkan atau diimplementasikan dengan baik. Sebagai kekuatan politik yang berfungsi untuk merealisir Demokrasi Pancasila, ABRI perlu memenuhi persyaratan pokok yaitu penerimaan dan

kepercayaan masyarakat. Sementara itu, masalah utama yang berkenaan dengan penerimaan (legitimasi) masyarakat adalah bagaimana prosedur pengakuan itu berlangsung dalam proses kehidupan politik.

Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah birokrasi. Diungkapkan oleh William Liddle (1988), bahwa birokrasi Indonesia memiliki karakteristik khusus yaitu citra diri (*self image*) yang benevolence, sehingga birokrasi terdoktrinasi oleh persepsi diri sebagai pelindung, pengayom, pemurah, baik hati terhadap rakyatnya. Sementara itu, rakyat dianggap tidak tahu apa-apa alias bodoh, dan oleh karena itu, birokrasi berperan untuk “mendidik” masyarakat. Karena birokrasi adalah *benevolence*, maka sudah seharusnya bagi rakyat untuk patuh, taat, dan setia terhadap pemerintahnya. Pola hubungan benevolence-obedience ini menjadi dominan dalam mewarnai interaksi antara pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, perjalanan politik Indonesia juga menunjukkan kecenderungan kuat bahwa birokrasi sebagai instrumen politik suatu rezim tampak jelas sejak masa kolonial. Sedangkan pada masa pasca-kemerdekaan, birokrasi mengalami proses politisasi sekaligus fragmentasi. Sekalipun jumlahnya tidak terlalu besar, aparat pemerintah bukanlah suatu organisasi uang menyatu karena telah terbagi-bagi dalam partai politik yang bersaing dengan sangat intesif guna memperoleh dukungan. Hal itu tentu saja sangatlah tidak sehat karena peranan ideologi masing-masing partai meningkatkan proses fragmentasi yang sangat tinggi. Arah gerak birokrasi pun masih mengalami polarisasi yang sangat tajam dengan mengikuti arus polarisasi politik masyarakat, sementara partai-partai politik memiliki peranan politik yang sangat terbatas yang mengakibatkan politisasi birokrasi tidak mengalami intensitas yang tinggi dibanding masa sebelumnya.

Akan tetapi, secara keseluruhan kekuatan-kekuatan politik di masa Orde Baru dapat pula dikategorikan kedalam tiga golongan seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- Golongan radikal, yang menghendaki supaya kesempatan tidak diberikan kepada mereka yang berkolaborasi dengan Orde Lama. Pemuka-pemuka kelompok ini terutama dari kalangan yang condong ke Barat dalam mengambil contoh untuk mengatur kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, misalnya para pemuka partai yang dilarang oleh rezim Orde Lama seperti Masyumi dan PSI terhadap pembersihan Orde Baru dari pengaruh Orde Lama, yang intinya adalah penjauhan Orde Baru dari segala usaha yang telah dicoba oleh Soekarno.
- Sementara golongan konservatif, yang lebih diwarnai oleh politik sipil, juga menghendaki pembersihan sisa-sisa rezim Orde Lama, namun menghendaki peranan besar dalam politik Indonesia.
- Maka golongan moderat muncul dengan jalan tengah; melalui tradisi cara penyelesaian khas Indonesia, maka setahap demi setahap Soeharto memperkecil peranan politik Soekarno sampai munculnya Tap MPRS bulan Maret 1967 yang mengakhiri peranan Soekarno dalam kehidupan politik Indonesia.

4. Kekuatan Politik Indonesia: Pasca Orde Baru

Pasca Orde Baru, politik di Indonesia mendapati adanya tiga kekuatan raksasa yang, dengan posisi dan porsinya masing-masing, berperan penting dalam kehidupan politik di Indonesia.

- Kekuatan pertama adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejak lama ABRI merupakan kekuatan politik yang paling kuat karena dwifungsinya berhasil meneruskan karisma TNI sebagai pejuang kemerdekaan RI dan telah disinambungkan oleh Bung Karno dan Presiden Soeharto dan terpaksa dilanjutkan oleh Presiden Habibie. ABRI ini mempunyai kekuatan yang paling dahsyat karena historinya, karena sudah merupakan establishment yang tidak bisa digoyang-goyang, dan karena organisasi dan disiplinnya yang canggih. Tidak ada kekuatan politik lain

yang mempunyai kinerja a la ABRI yang modern. Di atas kesemuanya itu di Indonesia ini hanya ABRI mempunyai sistem kerjasama internasional baik dengan Israel secara tertutup dan dengan DIA (*Defense Intelligence Agency*) Pentagon secara terbuka, untuk tidak menyinggung CIA yang terlalu sensitif.

- Kekuatan kedua adalah Muslim. Dalam hal ini kita memerlukan sedikit pendalaman mengingat pluralisme Islam di Indonesia. Namun secara umum, masyarakat muslim Indonesia mengenal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU adalah gerakan ulama-ulama Islam di Indonesia yang dipelopori KH. Wahid Hasyim Asyari. Melalui lembaga pendidikan pondok pesantren, NU berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme dengan berpegang pada ajaran Islam, memelihara semangat ahlussunah wal jamaah, dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Dalam perjalanan sejarah, tampak jelas keikutsertaan NU dalam kancah politik formal. Sejak didirikan pada 1926, NU tampil sebagai organisasi sosial keagamaan, bahkan pada pemilu pertama tahun 1955, NU termasuk empat besar parpol pemenang pemilu. Karena kekuatan kharismatis kyai dalam organisasi ini sangatlah besar sehingga menjadi ketaatan yang sulit ditolak istilahnya “kami dengar dan kami taat” komando dikuasai oleh pimpinan organisasi. Pasca Orde Baru, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pengejawantahan partisipasi NU dalam kancah politik Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada 1912 telah menjadi organisasi keagamaan yang memberi saham secara nasional terutama karena ikut mendewasakan kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia. Peranannya dalam gerakan nasional sangat strategis mengingat pendidikan yang diembannya

memangun masyarakat dalam kultur, peradaban, dan akidah, kendati ketiganya merupakan hal monumental untuk dimodernisasikan. Muhammadiyah turut pula berperan dibalik eksistensi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimotori Amien Rais.

Sebagai “gerakan lama”, NU dan Muhammadiyah telah memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, reformasi di segala bidang turut mendorong tumbuhnya ormas-ormas Islam baru. Salahsatu diantaranya adalah paham Ikhwanul Muslimin (IM), yang dimulai oleh Imam Al Banna di Ismailiyah di awal abad ke-19. Bagi IM, partai politik apapun dapat berdiri dengan nuansa kedaerahan masing-masing namun harus tetap berpedoman pada Al Quran dan Al Hadis. Di Indonesia, idealisme ini kemudian diadopsi dan diimplementasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, muncul pula fenomena lain yang merupakan format baru dari gerakan politik Islam, yaitu munculnya kelompok Islam “garis keras” suatu istilah buatan Barat yang sebenarnya kurang tepat, tapi terpaksa digunakan disini untuk kepentingan identifikasi. Kelompok ini berada diluar partai politik (non partisan). Tapi mereka memiliki kesadaran dan kepedulian sosial-politik yang sangat tinggi. Mereka secara aktif menjadi *“pressure group”* untuk kepentingan politik Islam, terutama menyangkut penegakan syariat Islam. Yang paling populer dari kelompok ini adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam). Posisi mereka dianggap signifikan karena selain memiliki kader-kader yang cukup terdidik dan militan, juga karena terdapat kecenderungan rekruitmen anggota kelompok ini terus berjalan.

•Kekuatan ketiga adalah kekuatan baru yang laten (tersembunyi): Proletar. Mungkin istilah ini merupakan kejutan dahsyat bagi para anti komunis dan golongan allergis-

Marxist. Proletar Indonesia harus diakui merupakan mayoritas, namun mereka tidak mempunyai organisasi, tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai ideologi, tidak mempunyai apapun kecuali baju yang melekat di tubuhnya. Kita sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa peristiwa Mei yang hanya terjadi di satu kota, Jakarta, begitu menakutkan sehingga penduduk asing dan keturunan Cina berlarian ke luar negeri. Padahal ini baru sebagian kecil yang sporadis. Satu-satunya jalan untuk menenangkan Proletar adalah mencukupi sandang pangannya justru dalam masa kritik seperti sekarang ini. Inilah tugas mission impossible dari kekuatan politik formal yang lain, yang harus bahu membahu mencegah dan mengamankan potensi destruktifnya Proletar, tapi juga tidak menambah kekecewaan, menambah lapar mereka. Tampaklah bahwa di antara ketiga kekuatan itu ABRI yang paling unggul hingga diduga akan mampu memelihara keamanan dan ketertiban nasional. Namun menurut sejarah dan pengalaman kita, politik itu paling *unpredictable*. Dalam sekejap bisa terjadi yang selama ini dianggap *inconceivable* (mustahil). Kalau Muslim fundamentalis masih predictable karena para pemimpinnya masih bisa "dipegang", maka Proletar yang tidak berideologi dan tidak punya pemimpin akan menjadi massa yang tidak bisa di-tackle kalau sudah terlanjur bergerak bangun dari tidurnya.

5. Kekuatan Politik Indonesia: Kekuatan Politik Anomie

Membicarakan kekuatan politik anomie tidak bisa lepas dari mahasiswa dan angkatan muda, namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Angkatan muda disebut demikian karena kategori usia mereka tanpa memandang tingkat pendidikan, sementara mahasiswa merupakan bagian angkatan muda yang menempuh pendidikan tinggi.

Mahasiswa sebagai komponen universitas mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pemikiran, pembicaraan, dan penelitian tentang berbagai masalah, yang mana kesempatan

tersebut tidak dimiliki oleh angkatan muda pada umumnya, sehingga mahasiswa termasuk yang terkemuka dalam memberi perhatian pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara nasional. Bagaimanapun mahasiswa dijegal oleh beragam aturan dalam kampus, mereka tetap merupakan kekuatan politik yang besar, sehingga para elit kekuasaan memenfaatkan mahasiswa untuk menjatuhkan penguasa.

Beberapa karakteristik mahasiswa yang menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya peran mereka dalam kehidupan politik angkatan muda misalnya:

- Pertama, sebagai kelompok masyarakat dengan pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horizon yang luas diantara keseluruhan untuk lebih mampu bergerak diantara pelapisan masyarakat.
- Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda.
- Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik di kalangan mahasiswa, sehingga universitas kentara bermakna sebagai pembentukan akulturasi sosial dan budaya pada angkatan muda.
- Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat, dengan sendirinya merupakan elit dalam kalangan angkatan muda. Dan
- Kelima, meningkatnya kepemimpinan mahasiswa di kalangan angkatan muda tidak terlepas dari perubahan kecenderungan orientasi universitas.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses politik di Indonesia saat ini adalah bahwa selain sebagai saluran mengetengahkan situasi dan keinginan masyarakat, aktivitas politik mahasiswa yang terjun ke arena politik ketika terjadi

situasi anomie yang kuat di masyarakat dilihat pula sebagai salahsatu ukuran kepuasan masyarakat.

Dua kekuatan politik lain yang tak kalah besar adalah pers dan pengusaha.

- Pers, sebagai pembentuk opini publik lewat media-media yang mereka gawangi, juga dapat dikategorikan sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Pers dianggap sebagai kekuatan yang dianggap berpengaruh, saking kuatnya pengaruh pers sehingga di masa Orde Baru dikenal Departemen Penerangan yang menjegal kekuatan politik pers dan kebebasan mereka.
- Sementara pengusaha, sebagai pelaku pasar yang dapat memanfaatkan isu dan sebagai sumber utama pemungutan pajak, menjadi dekat dengan pemerintah. Dalam hal ini terjadi siklus dimana pengusaha menjadi *financial supporter* bagi bakal calon Gubernur, Walikota, atau Bupati, dengan cara mempengaruhi para aparatur legislatif dengan politik uang sebelum pemilihan diadakan.

g) Rangkuman

- Miriam budiardjo (1993) mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan.
- Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peran dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.
- Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Namun, apabila diklasifikasikan, maka dapat diperkecil menjadi empat kekuatan saja yang disebut dengan

infrastruktur politik yang antara lain yaitu; (1) Partai politik (*Political Party*), (2) Kelompok Kepentingan (*Interest group*), (3) Kelompok penekan (*pressure group*), dan (4) Media Komunikasi Politik.

- Indonesia, dalam 79 tahun pasca kemerdekaan, telah mengenal kekuatan politik dalam berbagai bentuk, baik formal maupun anomie, yang telah menempati berbagai posisi kekuasaan seiring waktu yang berjalan, dari mulai masa kemerdekaan (1945), Pada masa pemerintahan parlementer (1950-1959), Masa Orde baru (1966-1998), dan Pasca Orde Baru (1998-sekarang).

d) Latihan

1. Berdasarkan penjelasan terkait dengan sumber dan bentuk kekuatan politik di Indonesia dari masa ke masa. Sebutkan dan jelaskan berbagai bentuk kekuatan politik yang ada di Indonesia saat ini?
2. Salah satu bentuk kekuatan politik yang memiliki potensi besar namun masih bersifat sporadis adalah kekuatan politik buruh (*proletar*). Menurut anda berkaca pada sejumlah peristiwa politik di berbagai negara, apakah muatan kekuatan politik ini relevan ada di Indonesia dan mempengaruhi dimensi lainnya seperti relasi bisnis dan politik? Jelaskan.

e) Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali definisi, bentuk dan jenis kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Mahasiswa juga diharapkan dapat merumuskan dan membangun gagasan terkait dengan kekuatan-kekuatan politik yang baru sebagai bagian dari perubahan sosial misalnya kekuatan bisnis dalam politik atau teknokrat sebagai implikasi kemajuan teknologi.

f) Umpan balik

Umpan Balik diberikan secara langsung dalam kegiatan diskusi/menjawab latihan soal.

3) Penutup

a. Rangkuman

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun Lembaga-lembaga yang memainkan peran dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan politik berperan sebagai penopang system politik melalui pengaruh yang dilakukan terhadap pemerintahan. Kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan, begitupun dengan Indonesia. Kekuatan politik baik secara individu maupun kelompok/organiasi/ pembaga ini merupakan bagian dari partisipasi politik warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik sendiri kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan juga ikut dalam menentukan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung. Patisipasi politik dipengaruhi oleh budaya politik yang melekat pada individu warga negara yang dicirikan oleh aktivitas dan orientasinya dalam bernegara.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

1. Budaya politik di Indonesia mencakup beragam nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara orang Indonesia berinteraksi dengan politik, baik dalam konteks pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa ciri budaya politik di Indonesia meliputi:

- Pluralisme Politik: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Pluralisme politik tercermin dalam partisipasi politik yang melibatkan berbagai kelompok etnis, agama, dan kepentinga
- Religiositas: Agama memiliki peran yang kuat dalam budaya politik Indonesia. Nilai-nilai keagamaan sering kali memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat
- Patriarki: Budaya politik di Indonesia masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki, di mana keputusan dan peran politik seringkali dipegang oleh laki-laki. Namun, peran perempuan dalam politik semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.
- Nepotisme dan Klientelisme: Praktik nepotisme (pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga) dan klientelisme (pertukaran suara atau dukungan politik dengan imbalan jasa atau keuntungan) masih cukup umum dalam budaya politik Indonesia.
- Pola Hubungan dengan Pemerintah: Masyarakat Indonesia cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui perantara politik, seperti partai politik atau tokoh-tokoh lokal.
- Sentimen Nasionalisme: Nilai-nilai nasionalisme sering kali menjadi bagian penting dari budaya politik Indonesia, terutama dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional.
- Ketergantungan pada Figur Tokoh: Masyarakat Indonesia cenderung memperhatikan tokoh-tokoh politik dan memandang mereka sebagai pemimpin yang kuat dan berpengaruh dalam proses politik.
- Keterlibatan Masyarakat Sipil: Meskipun masih dalam tahap berkembang, keterlibatan masyarakat sipil dalam politik semakin meningkat, baik melalui gerakan sosial,

LSM, atau partisipasi dalam proses politik formal seperti pemilihan umum.

- Budaya politik di Indonesia terus berubah dan berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi dalam negeri. Perubahan ini tercermin dalam pergeseran nilai-nilai politik dan pola perilaku politik masyarakat Indonesia seiring berjalannya waktu.
- 2. Gerakan buruh memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Berikut adalah beberapa kekuatan politik buruh di Indonesia:
 - Organisasi Serikat Buruh: Serikat buruh adalah wadah utama di mana kekuatan politik buruh terorganisir. Organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan serikat-serikat buruh lainnya memiliki jutaan anggota dan sering menjadi suara penting dalam menuntut hak-hak pekerja.
 - Demonstrasi dan Aksi Mogok: Buruh sering menggunakan demonstrasi, aksi mogok, dan protes sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi-aksi ini dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah terkait dengan perburuhan.
 - Peran dalam Pemilihan Umum: Buruh dan serikat buruh juga memiliki pengaruh dalam pemilihan umum. Mereka dapat membentuk blok pemilih yang signifikan dan mendukung calon yang dianggap mendukung kepentingan pekerja.
 - Pengaruh dalam Kebijakan Buruh: Berkat tekanan dari gerakan buruh, pemerintah sering kali terdorong untuk mengeluarkan kebijakan pro-buruh, seperti kenaikan upah minimum, perbaikan kondisi kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja.
 - Hubungan dengan Partai Politik: Beberapa partai politik di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan gerakan

buruh dan memperjuangkan agenda-agenda buruh. Partai seperti Partai Buruh Indonesia (PBI) atau Partai Bulan Bintang (PBB) secara khusus mewakili kepentingan buruh dalam politik.

- Peran dalam Reformasi: Gerakan buruh memainkan peran penting dalam gerakan reformasi Indonesia pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Mereka menjadi salah satu kekuatan yang menekan rezim otoriter Orde Baru untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi.
- Meskipun kekuatan politik buruh di Indonesia cukup signifikan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk penindasan oleh pihak berwenang, pembatasan hak-hak serikat buruh, dan persaingan internal antara berbagai organisasi buruh.

c) Daftar Istilah

<i>Behavioral Revolution</i>	Merupakan perubahan perilaku individu secara cepat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek.
Dinamika Politik	Gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.
Hierarki	Urutan tingkatan atau jabatan (kedudukan).
Individualisme	Salah satu cabang ilmu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri.
Kebijakan Publik	Adalah apapun pilihan pemerintah baik baik untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.
Kapitalisme Global	Zaman kapitalisme keempat dan saat ini.
Orientasi Politik	Orientasi politik merupakan cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai

	yang dimiliki oleh masyarakat
<i>Trickle down effect</i>	Menetes ke bawah

d) Referensi

- A., Rahman, H., I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfian, & Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.
- Almond, Gabriel & Sydney Verba. (1965). *Civic Culture*. The United States: Little, Brown & Company (Canada) Limited.
- Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. (1965). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations: An Analytic Study*. Boston, Toronto: Little, Brown, cop.
- Almond, Gabriel A., & Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anthonius. P., Sitepu (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. (2007). *Sosiologi Politik. Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Buku Kita.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kantaprawira, Rusadi. (1990). *Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Cetakan ke-2 Bandung: Sinar Baru.
- Mustain. (2007). *Petani VS Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rieke Diah Pitaloka. (2004). *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rohaniah, Efriza, Yoyoh. (2015). *Pengantar Ilmu Politik (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*. Malang: Intrans Publishing.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- Septyaningsih, Dyan. (2004). Pemberdayaan Komunitas. *Jurnal Ilmu Kesejateraan Sosial*, 3(3), 119-176.
- Setiadi, Elly & Kolip, Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Subakti, Ramlan, Didik Supriyanto, & Hasyim Asy'ari. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta Selatan*.

MODUL 3 **CIVIL SOCIETY DAN** **PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA**

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai kekuatan politik di Indonesia, mahasiswa perlu diperkenalkan konsep *civil society* dan perkembangannya. *Civil society* atau yang dikenal dengan masyarakat madani di Indonesia ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dalam perkembangannya, *civil society* diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan non pemerintah yang ikut andil dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dari uraian tersebut maka pada modul ini akan membahas terkait dengan konsep *Civil Society* dan perkembangannya di Indonesia.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 3 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.

6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di indonesia.
7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari modul 3 ini adalah Mahasiswa mampu memahami tentang sejarah perkembangan, pengertian dan ciri, elemen-elemen serta perkembangan, prospek serta tantangan dari *civil society*.

4) Prasyarat Kompetensi (Tidak ada)

5) Kegunaan Modul 3

Kegunaan atau manfaat dari modul 3 ini adalah modul ini dapat membantu mahasiswa memahami mengenai *civil society* dari berbagai aspek baik sejarah perkembangan *civil society*, pengertian dan ciri-ciri *civil society*, elemen-elemen *civil society*, perkembangan *civil society* di Indonesia, serta peluang dan tantangan bagi *civil society* di Indonesia ke depannya.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- a. Aspek-aspek *civil society*
- b. Sejarah perkembangan *civil society*
- c. Pengertian dan ciri-ciri *civil society*
- d. Elemen-elemen *civil society*
- e. Perkembangan *civil society* di Indonesia
- f. Peluang dan tantangan bagi *civil society* di Indonesia ke depannya.

- b. Kegiatan Pembelajaran 1
 - 1. Kegiatan Pembelajaran 1
 - a) Civil Society dan Perkembangannya di Indonesia
 - b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami *civil society* dalam konteks konsep maupun perkembangan, tantangan dan peluangnya di Indonesia. Serta Mahasiswa mampu menjelaskan tentang *civil society* dan perkembangannya di Indonesia

- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sejarah Perkembangan Civil Society

Perkembangan sosial legal dan sosial kultural *civil society* sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran Barat (MD, 1999:3). *Civil society* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang tidak memiliki kaitan dengan ‘pemerintah militer’ seperti yang sering diperbincangkan masyarakat secara umum. Konsep ini, sebenarnya merupakan lawan dari konsep ‘masyarakat negara’ (*state society*) atau masyarakat politik (*political society*), konsep ini mulamula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena *civil society* tidak lahir dari suasana vakum. Sebaliknya, *civil society* merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat (Effendy, 2000:23).

Konsep ini pertama kali lahir dan dapat dilacak akar katanya sejak zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, gagasan *civil society* bukanlah wacana baru. Ernest Gellner, seperti yang disadur Adi Suryadi Culla, menyebutkan bahwa Gellner menelusuri akar

gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika) dan yang menjadi perhatiannya adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara serius oleh seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam sebuah karya klasiknya “*an Essay of Civil Society*” (1767) baru kemudian konsep *civil society* dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti John Locke, Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville sehingga upaya menghidupkan kembali di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer (Culla, 1999:30).

Selain Gellner, Jean L. Cohen dan Andreo Arato juga melacak akar muncul *civil society* sejak zaman Yunani kuno. Mereka mengungkapkan bahwa persepsi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles, ketika Aristoteles mengungkapkan istilah *politike koinonia* dalam bahasa Latin *societas civilis* yang berarti masyarakat politik/komunitas politik (*political society/community*) yang merujuk pada polis. Istilah *politike koinonia* dari Aristoteles ini dipergunakan untuk mneggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum (Cohan & Arato, 1992:70).

Hukum sendiri dianggap sebagai etos, yaitu sebarangkat norma dan nilai yang disepakati, tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virture*) dari berbagai bentuk interaksi diantara warga masyarakat (Noer, 1998:21). Dalam istilah *politike koinonia* ini Aristoteles, belum mengenal perbedaan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), negara adalah masyarakat begitu sebaliknya masyarakat adalah negara. Meskipun Aristoteles juga menyadari bahwa adanya dualitas polis (negara) oikos (masyarakat). Pandangan Aristoteles, oikos lebih merujuk pada keluarga atau rumah tangga (*household*) yang dianggap sebagai *background* atau kategori residual dari polis.

Koinonia yang utuh sempurna diatas oikos tidak hanya mencakup keluarga, tetapi juga bentuk-bentuk asosiasi secara

umum seperti komunitarian kekerabatan, pekerjaan, status dan jabatan yang dianggap sebagai representasi sistem sosial atau sistem politik keseluruhan. Oikos tidak dianggap sebagai bagian sistem resmi atau lembaga polis, tetapi hanya merupakan wadah komunikasi dan interaksi masyarakat yang secara teoritis melalui pimpinan masing-masing dalam berhubungan dengan polis (Cohen & Arato, 1999:21). Meskipun demikian, Jean L. Cohen dan Andreo Arato melihat bahwa gambaran konsep *politike koinonia* dari pemikir Yunani klasik tersebut, sesungguhnya telah menunjukkan adanya dua entitas yang berbeda yaitu: Pertama, ‘*community of society*’ yang bersifat homogen dalam arti kesatuan kolektif yang terorganisasi sebagai wadah negara (*polis*) dengan tujuan tunggal sebagai derivasi dari oikos disatu pihak. Kedua, ‘*society*’ dilain pihak yang meliputi bentuk-bentuk interaksi yang bersifat pluralistik berupa kelompok atau asosiasi yang tidak resmi (Culla, 1999:48).

- M. Dawam Rahardjo (2000:18-19) menyatakan bahwa secara harfiah, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah Latin (*civilis societas*) yang sudah ada Sebelum Masehi. Istilah ini mula-mula dicetuskan oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat yang tinggal di kota. Seperti yang dikutip Rahardjo, Cicero dalam filsafat politiknya memahami *civil society* identik dengan negara, maka kini difahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat yang berhadapan dengan negara, *civil society* lanjut Cicero adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Konsep kewargaan (*civility*) dan budaya kota (*urbanity*), maka kota dipahami

bukan sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

- Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Pemikiran ini berlanjut hingga abad pertengahan yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas.
- Thomas Aquinas terutama memahaminya dalam makna yang merujuk pada konsep negara kota (*city state*). Konsep ini berkembang yang dipadukan dengan persoalan kekuasaan (*sovereign*) guna menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai sebuah kesatuan yang terorganisasi, inilah yang kemudian melahirkan konsep Aquinas tentang *societas res publica* (Culla, 1999:48). Ketika lahirnya pemikiran mengenai negara modern (*commonwealth*) yang dipastikan bermakna sama dengan masyarakat madani atau *political society*, yang sesungguhnya telah dimulai dari Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya *Leviathan*. Buku ini pernah di terbitkan oleh Penguin London tahun 1968 (Stark, 2003).
- Hobbes memahami *civil* atau *political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik. Tetapi dalam pandangannya, bukan masyarakat yang menciptakan negara, melainkan melalui kontrak sosial kehadiran masyarakat disatukan dibawah kekuasaan negara. Hobbes memunculkan teori “*social contrac*” atau perjanjian masyarakat yang menyatakan sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat (Noer, 1998:105). Pemerintah sebagai mandataris perjanjian masyarakat dalam konteks pemahaman ini, memiliki kekuatan kuasa yang tidak

terbatas, artinya pemerintah dapat melakukan segala cara guna menjamin ketentraman dan stabilitas masyarakat.

- Pada era modern istilah *civil society* diambil alih dan dihidupkan kembali oleh John Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke mendefinisikan *civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*) pengertian tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (*pathernal authority*) atau keadaan alami suatu kelompok masyarakat (Raharjo, 2000:19).
- Locke membuat perbedaan antara pemerintah (*government*) dengan masyarakat (*society*), meskipun kedua unsur tersebut tetap dipersepsikan sebagai wujud politik negara yang lahir dari kontrak sosial (Culla, 1999:19). Konsep Locke berdiri diatas misi menghidupkan kembali peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.

Sementara Rousseau dengan teori *social contract* (1762) yang berbicara tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan masyarakat guna ikut serta menentukan masa depan hidupnya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan kaum elite yang berkuasa. Di perjanjian masyarakat tersebut, anggota masyarakat sesungguhnya telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama. Jikalau dicermati konsep Locke dan Rousseau sebenarnya belum dikenal perbedaan ‘masyarakat sipil’ dengan ‘negara’.

Negara atau lebih tepatnya pemerintah adalah bagian dari salah satu bentuk masyarakat sipil. Keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari masyarakat alami (Rahardjo, 1999:27). Selain dua pemikir itu, Montesquieu memandang pemerintah dan masyarakat sebagai dua entitas yang berbeda dengan mengacu pada dua bentuk hukum (Culla, 1999:49). Pertama, *civil law*, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang

diperintah. Kedua, public or political law, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat Melalui pemikiran Locke, Rousseau dan Montesquieu ini, pemikiran tentang konsep *civil society* mulai menjadi wacana pemikiran politik modern dan pemikiran mengenai negara serta eksistensi masyarakat mulai dipandang sebagai wacana utama.

Pemikir Amerika, Thomas Paine (1737-1809) dalam karyanya *Common Sense* terbit tahun 1776 seperti yang disadur Culla, menyatakan bahwa eksistensi masyarakat yang dianggap sebagai kumpulan individu dianggap memiliki hak-hak alami yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, termasuk negara sekalipun, sementara negara itu hanya sebagai legitimasi masyarakat (Culla, 1999:50). Tetapi, apa yang disebut “masyarakat politik” masih cenderung diidentikkan dengan negara (*state*) an sich. Pemikir-pemikir pencerahan dari Scotlandia seperti Ferguson, Hume dan Adam Smith, yang mulai mengidentikkan konsep *civil society* dengan masyarakat beradab (*civilizen society*) tidak lagi berasosiasi sebagai (*political society*) melainkan berorientasi pada organisasi material (*economic society*).

Kemudian konsep *civil society* juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman. Melalui pemikir-pemikir seperti Kant, Fichte dan Hegel, konsep *civil society* mulai mendapatkan pemaknaan yang lebih jelas sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari negara. Kant memandang *civil society* sebagai tujuan (*telos*) umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatukan sebagai bagian dari kekuasaan absolut. Fichte juga melihat adanya keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat disatu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di pihak lain (Culla, 1999:50). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kant dan Fichte memposisikan *civil society* dengan negara dalam posisi yang berlawanan.

Pemikiran ini dipertegas oleh Hegel yang memandang bahwa konsep *civil society* dan negara tidak hanya sebagai dua entitas

yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan. Tetapi, Hegel mencoba memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru (sintesa), dimana *civil society* diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara (Rahardjo, 1999:20).

Perbedaan antara *civil society* dengan state yang timbul dari pandangan Hegel, karena ia melihat *civil society* sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk kedalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dan berbagai kalangan bersaing. Sekali lagi oleh Hegel masyarakat sipil dihadapkan dengan negara, arti inti dari teorinya Hegel adalah menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen politik di bawah supremasi hukum.

Menurut Hegel, seperti yang disadur Dawam Rahardjo, *civil society* adalah perkumpulan merdeka orang-orang yang membentuk pada yang disebutnya ber-gerlische gesellschaft atau masyarakat borjuis (*bourgeois society*) (Rahardjo, 1999:27). Jika Locke, Rousseau dan Adam Smith, cenderung mengidealisasikan *civil society* sebagai hasil perkembangan masyarakat yang lebih maju yang memancarkan kekuatan dari dalamnya, berupa rasionalitas yang akan mampu menuntun masyarakat kearah kebaikan umum.

Formula akhir dari cara pandang Hegel mengenai konsep *civil society* yaitu menempatkan negara sebagai medium pemenuhan segala nilai kebaikan. Artinya *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. Hegel menyatakan mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam *civil society* karena dua pertimbangan; pertama, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidaksederajatan dalam masyarakat sehingga perlu diatasi oleh negara yang memiliki otoritas mengatur masyarakat. Kedua, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan.

Apabila dicermati perbedaan antara masyarakat dengan negara yang timbul dari pandangan Hegel, yang banyak mendapat perhatian dan mendapat dukungan kuat, termasuk diantaranya Karl Marx. Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari superstruktur, mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelaskelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Negara tidak mewujudkan kehendak universal tetapi kepentingan kelas borjuis.

Bagi Marx negara dianggap sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat sipil dan menyamakan masyarakat dengan masyarakat borjuis. Bagi Marx masyarakat borjuis mencerminkan sistem kepemilikan modern yang bermuatan nilai materialisme yang kasar, setiap orang mementingkan diri sendiri dan setiap orang melawan yang lain, sebab dalam masyarakat borjuis kedudukan individu menjadi yang utama. Marx telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok di dalam negara yang dikenal dengan *base superstructure*. Teori kelas sebagai satu pendekatan dalam Marxisme tradisional menempatkan perjuangan kelas sebagai hal sentral, faktor esensial dan menentukan perubahan sosial. Pendekatan ini cenderung melihat masyarakat kapitalis dari perspektif ekonomi dan masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu proletar dan borjuis. Berdasarkan perspektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar (*base*) dan superstruktur (*superstructure*). Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan mengarah kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi keduanya (Brewer, 1999:6).

Perbedaan yang tampak dengan pemikiran Hegel berangkat dari paradigma idealistik, dalam perspektif Marxian, posisi masyarakat sipil dipandang terletak pada basis material, atau biasa disebutnya *materiel of needs and necessity* dari hubungan produk kapitalis, kata Marx, civil society hanya merupakan fase transisi yang masih mengandung serangkaian kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis, yang pada akhirnya

akan hancur dari dalam. Menurut Marx sangat ironi, bahwa negara yang diidealisasikan sebagai wadah nilai-nilai universal, moral, cita-cita kemasyarakatan, ternyata hanya melayani kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum, maka menurut Marx, keberadaan borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus melepaskan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas (Gellner, 1990:59).

Konsep *civil society* mendapat pandangan yang positif sesungguhnya baru muncul sekitar abad ke 20 dari sejumlah tokoh antara lain Antonio Gramsci, John Kiane. Gramsci menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinasi ekonomi Marx. Suatu kelas sosial menurutnya mempertahankan dominasi bukan hanya cara menguasai modus produksi. Tetapi juga dengan mengembangkan suatu bentuk kekuasaan yang hegemonik. Gramsci melihat *civil society* tidak dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi politik dan kultural. Kesimpulannya, konsep kunci Gramsci adalah hegemoni (Wibowo, 2001). Pembentukan hegemoni terletak pada wilayah *civil society* bukan terletak di wilayah negara. Gramsci berpendapat, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat semacam kompromi dengan kelompok sosial lainnya didalam arena *civil society*. Oleh karena itu, *civil society* dipandang sebagai arena hegemoni, maka tujuan utama untuk melakukan penguatan *civil society* adalah sebagai instrumen guna melakukan counter terhadap negara (Hikam, 1999:19).

Sementara John Keane, seorang ahli ilmu sosial masa kini, terangterang menolak determinasi ekonomi ala Marx. Bagi Keane, *civil society* adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela dan keragaman pemerintah. Keane yang beraliran liberal, menyatakan bahwa berbagai macam bentuk kekuasaan dalam *civil society* tidak bersumber satu hal

seperti penguasaan sarana produksi, tetapi dari berbagai faktor yang beragam dan heterogen. John Keane juga melihat hubungan yang setara antara negara dan *civil society* mengandung distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik yang terdapat didalam dan diantara negara dan *civil society* (Hikam, 1999:65).

Kembali pada pandang Gramsci yang pandangannya berbeda dengan Hegel dan Marx. Penjelasan Gramsci *civil society* bukanlah semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi didalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. *Civil society* memiliki potensi untuk dapat mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan. Karena itulah Gramsci berbeda dengan Marx yang lebih menekankan adanya saling keterkaitan antara *civil society* dengan *state*. Memang masyarakat sipil bisa menjadi benteng dari hegemoni kelas borjuis dan akhirnya menjadi pendukung negara. Kendati demikian, negara juga memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil (Rahardjo, 1999:25).

Pengertian dan Ciri Civil Society

Masyarakat madani atau *Civil Society* adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari *civil society* sendiri bermacam-macam dan bervariasi. *Civil society* dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda diantaranya;

- Mansour Fakih menyebut Masyarakat Sipil, Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid menyebutnya dengan Masyarakat Kewargaan, dan Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, & M. Dawam Rahardjo dengan menyebut sebagai Masyarakat Madani (Parmudi, 2015:289).

- Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, *civil society* merupakan “sektor ketiga” masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dan sektor bisnis. Artinya, masyarakat sipil merupakan kelompok organisasi atau lembaga yang berdiri sendiri (*independen*) dari pemerintah dan sektor bisnis, bersifat sukarela, mandiri, mencakup organisasi non-pemerintah, media massa yang independen, think tank (gudang pemikir) dan kelompok keagamaan, serta *household*/ rumah tangga. (Karsidi, 2001).
- Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivele), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat (Suwarni, 2011:55). Yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feudal menuju masyarakat modern.
- Makna lain bagi istilah *civil society* yaitu adanya penekanan pada ruang (*space*) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami *civil society* sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat (Suryanto, 2018:125).
- Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral

kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian diantar berbagai kepentingan. (Suryanto: 2018, 127-128).

- Sementara itu, Nurcholis Madjid menekankan istilah *Civil society* sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata madinah, dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian *Civil society* yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik.
- Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto: 2018), dijelaskan bahwa *Civil society* sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus bawah, mereka lah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi, dibutuhkan juga *public sphere* atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun NGO (Parmudi, 2015:129).

Istilah *civil society* dewasa ini sering kali diartikan dengan banyak pengertian atau pun makna, diantaranya menurut Adi

Suryadi Gulla 1999 dalam Heri Herdiawanto, dkk (2019:271) menyatakan diantaranya adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya, juga masyarakat madani. “*Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilainilai hukum yang diikuti oleh warganya.” (Muhammad AS Hikam, 2015:3).

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh *civil society* yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam *civil society*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- 2) Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.
- 3) Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebijakan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.

- 4) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- 5) Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain: mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman.

Menurut Muhammad AS Hikam (dalam Heri Herdiawanto dkk., 2019:374), terdapat beberapa ciri pokok *civil society* atau yang biasa disebut masyarakat madani di Indonesia, diantaranya:

- 1) Kesukarelaan, masyarakat madani bukan suatu paksaan juga indoktrinasi. Keanggotaannya terdapat dari diri sendiri secara sukarela. Mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita yang dibangun bersama.
- 2) Keswasembadaan, keanggotaan dengan sukarela untuk hidup bersama, tidak akan menggantikan suatu kehidupan kepada individu lainnya. Hal tersebut tidak tergantung dari negara, lembaga atau oragnisasi lain. Setiap orang atau pun masyarakat memiliki harga diri tinggi, sehingga percaya terhadap suatu kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri juga

untuk membantu sesama yang mempunyai keterbatasan juga kekurangan yang ada. Keanggotan dengan percaya diri adalah anggota yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri atau pun orang masyarakat.

- 3) Kemandirian yang tinggi terhadap negara. Anggota masyarakat madani adalah manusia yang percaya diri sehingga tidak bergantung terhadap pemerintah orang lain juga negara. Baginya, negara merupakan kesepakatan bersama, sehingga tanggung jawab dari suatu kesepakatan adalah sebuah tuntutan serta tanggung jawab dari masing-masing anggota.
- 4) Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berdasarkan pada hukum bukan kekuasaan semata.

Civil society merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara (*political society*). Dengan adanya keseimbangan antara negara dengan *civil society*, maka negara tidak bisa berbuat sewenang-wenang, dia harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu yang ada dalam *civil society*” (Heri Herdiawanto, dkk 2019:267). *Civil society* juga berarti masyarakat yang anggotanya merupakan setiap warga negara. Sehingga, kesamaan sebuah status juga kedudukan setiap anggota masyarakat tersebut yaitu terletak pada kewarganegaraannya, bukan pada agama, suku, atau pun golongan. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:266).

Tugas dari *civil society* adalah melakukan pengawasan dan perimbangan dalam demokrasi dan menjadi jembatan masyarakat kepada pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan pemerintah (Hidayah & Bastomi, 2020). Adapun kinerja dari *civil society* tidak selamanya mulus, terdapat berbagai ancaman di bawah demokrasi seperti adanya undang-undang yang membatasi otonomi dan pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kurangnya kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia jika diperhadapkan dengan ekosistem yang rumit serta rendahnya kesadaran politik sosial warga negara (Wisnu, 2019: 45-47).

Pada *civil society* terdapat elemen *civilized society* yaitu sebuah masyarakat yang beradab dimana masyarakat tersebut patuh dan berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mutlak. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi keberadaan *civil society*, yaitu : (1) nilai dari *civil society* yang berupa partisipasi politik dan *state accountability*; (2) institusi dari *civil society* berupa forum yang representatif dan asosiasi sosial; (3) perlindungan dari *civil society* yang berhubungan dengan hak-hak individual secara umum; (4) anggota *civil society* adalah semua individu yang dilindungi secara hukum (Widyasari, dkk, 2019).

Elemen-Elemen Civil Society

Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari *civil society* itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari *social control* yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

a) Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya Masyarakat disingkat LSM adalah salah satu elemen dari masyarakat sipil (*Civil Society*) yang termasuk dalam kategori *NonGovernment Organization* (NGO), yaitu sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi. LSM didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela

memberikan pelayanannya kepada masyarakat. LSM berperan dalam memonitor atau mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara. LSM juga dapat berperan sebagai media analisis dan konsultasi bagi warga atau anggotanya terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, sosial atau politik serta berperan sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan. Baik itu dalam pembuatan kebijakan atau pada saat kebijakan telah di implementasikan (Hanifie & Azmy, 2018:38). LSM sebagai kepanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah mampu memberikan fungsi kontrol yang baik dengan memberikan masukan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

b) Pers dan Media Massa

Pers dan media massa merupakan salah satu institusi yang menjadi bagian dari social *control*. Pers dan media massa mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Pers juga menjadi salah satu sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. Bagi pemerintah, pers akan melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di lakukan, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi masyarakat, pers akan memberikan informasi, pendidikan dan wawasan yang diperlukan sehingga akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengoreksi dirinya demi kemajuan (Hanifie & Azmy, 2018:78).

c) Supremasi Hukum

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan

sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

d) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai *agent of change* diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Partai Politik Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasi dan pengagregasi kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik adalah salah satu struktur politik yang berada di posisi input dan sangat berperan dalam menggerakkan sistem politik (Hanifie & Azmy, 2018:48). Partai politik menjadi salah satu pilar penegak masyarakat madani karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Di kursi parlemen inilah partai-partai kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Perkembangan Civil Society di Indonesia

Hubungan antara negara dan *civil society* dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan

kekuatan negara. Dalam hal ini, *civil society* berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. *Civil society* harus memiliki sikap percaya diri (*self-reliance*), swasembada (*self-supporting*), sukarela (*voluntary*), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara (Damsar, 2015:143). Berdasarkan pengalamannya di Amerika, Tocqueville (dalam Damsar, 2015:143) juga merasakan bahwa *civil society* memiliki kekuatan politis yang berfungsi untuk mengontrol serta menekan dominasi negara.

Wacana *civil society* selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, tidak saja dalam bentuk semakin banyaknya buku, artikel, opini, forum diskusi, debat publik mengenai topik ini, tetapi juga semakin bertambahnya pihak-pihak yang berminat dan pro aktif dalam wacana tersebut. Bahkan kalangan pemerintahpun ikut terlibat. Terdokumentasi dalam bukunya A. S Hikam sebuah kegiatan seminar sehari mengangkat isu *civil society* yang dipersembahkan Lemhanas bersama aktivis LSM (Hikam, 2000:112). *Civil Society* kendati sangat penting, bukanlah satu-satunya syarat mutlak dalam proses menuju terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera. *Civil society* dalam konteks ini bukan sebuah gagasan dan praktik utopis yang didalamnya tidak mengandung kelemahan-kelemahan, kontradiksi dan persoalan-persoalan serius. Dua yang disebut terakhir merupakan proses terbuka dan bukan merupakan utopia yang harus dijadikan pegangan agar supaya tidak terperangkap oleh esensialisme dan dogmatisme.

Kenyataan ini khususnya berkaitan dengan perikehidupan modern yang ditandai oleh munculnya fenomena negara sebagai aktor yang memiliki kekuatan besar, sehingga apabila tidak dibatasi atau diimbangi akan menghancurkan atau sekurang-

kurangnya menghambat perkembangan dan cita-cita masyarakat demokratis dan sejahtera. Artinya, jika sebuah negara dengan segala totalitas kuasanya tidak diimbangi maka lambat laun sebuah negara itu akan mengalami penurunan tingkat kedewasaan. Oleh karena itu, *civil society* bukan saja menjadi kerangka konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, tetapi juga sebagai sebuah gerakan dan program aksi yang dapat dilaksanakan dalam realitas. Gerakan ini pernah dicoba lakukan oleh para aktivis pro demokrasi di negara Eropa Tengah dan Timur dan mereka berhasil dengan indikasi; pertama, mempercepat tumbangnya sistem politik totaliter demokratis di atas puing-puing reruntuhan. Keberhasilan inilah yang mengilhami para ilmuwan politik untuk melakukan pengkajian yang lebih serius dan mendalam mengenai *civil society* di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia guna melancarkan gerakan demokratisasi (Hikam, 2000:113-114).

Pemahaman mengenai apa itu *civil society* memiliki keragaman. Hal ini bukan saja karena *civil society* itu sendiri mengalami perkembangan, tetapi juga konteks dimana teori-teori itu dikembangkan mengalami perubahan-perubahan. Perdebatan mengenai *civil society* yang terjadi akhir-akhir ini, sebagian besar berada pada tingkatan perbedaan perspektif teori yang dipakai dan kemampuan dalam melakukan kontekstualisasi dalam sebuah ruang sejarah dan dinamika masyarakat tertentu. Gellner, Bobbio, Mardin dan beberapa pakar lainnya seolah menampakkan kesulitannya dalam pemecahan problematika konsep *civil society* pada berbagai konteks masyarakat.

Kendati demikian, adanya kesulitan dan problem itu, tidak mesti ditafsirkan dengan tertutupnya resolusi. Sebagaimana dikatakan oleh Heffner bahwa upaya untuk melaksanakan gagasan dan kiprah *civil society* bukanlah hal yang telah ditentukan lebih awal oleh sebuah insting peradaban lama. Justru sebaliknya, ia ditentukan oleh budaya dan lembaga yang senantiasa membutuhkan perubahan-perubahan, itu artinya

problem yang ada masih dalam jangkauan manusia guna dapat menyelesaiannya (Hafner, 1998:317).

Di Indonesia istilah *civil society* pada umumnya disamakan dengan istilah masyarakat sipil dan menjadi salah satu sorotan penting dalam banyak diskusi publik, bahkan pada saat pemerintahan Habibie telah membentuk satu tim dengan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998, tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut diberi tugas untuk membahas masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani yaitu diantaranya: pertama, menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Kedua, merumuskan rekomendasi pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani (Sanaky, 2003:56).

Pembahasan masyarakat madani (*civil society*) memperlihatkan konsep satu sama lain tidak sama, bahkan disana sini terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya, baik itu tingkatan agenda politik maupun ditingkatkan ideologi yang mendasarinya. Hal itu karena mengingat *civil society* itu sendiri merupakan sesuatu yang baru bahkan asing di Indonesia, dan ketika istilah ini muncul ada semacam hasrat untuk mewujudkan Indonesia Baru.

Fenomena yang cukup menarik misalnya ketika muncul istilah masyarakat madani di era reformasi, justeru dikehendaki oleh tokoh-tokoh negara, pemerintahan dan tokoh dari kalangan militer, tetapi menjadi sesuatu yang diragukan, dengan kata lain masyarakat memandang secara skeptis. Sebab, dalam pandangan masyarakat ‘masyarakat madani’ muncul sebagai luapan reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun rezim Orde Baru, dan ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan terhadap politik model rezim Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem

politik dan pembangunan menuju kearah terciptanya masyarakat madani atau *civil society*. Pada saat itulah masyarakat madani atau *civil society* mulai riuhan riau diperbincangkan dan dijadikan acuan dan agenda penting untuk membangun ‘Indonesia Baru’ yaitu terciptanya suatu sistem keadilan, demokratis dan menghargai adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, konsepsi yang ditawarkan dalam upaya membangun *civil society* di Indonesia berbeda dengan konsep *civil society* yang muncul pertama kali di Eropa.

Di Indonesia, *civil society* yang dimaksud adalah sebagai gagasan alternatif atas militerisme atau tandingan dari militer yang dalam praktiknya berbentuk dwifungsi ABRI yang dianggap model politik Orde Baru. Munculnya gagasan masyarakat madani (*civil society*) dianggap sebagai konsep alternatif dari gerakan oposisi kaum reformis terhadap rezim Orde Baru, yang diberi nama ‘gerakan masyarakat madani’. Dari gagasan tersebut masyarakat madani (*civil society*) dilawan dengan masyarakat negara yang dimotori oleh militer, sehingga lontaran pemikiran tersebut bertendensi pada keinginan untuk membersihkan pemerintahan dari dominasi militer (Mafud, 1999:2-3).

Jikalau ditelusuri munculnya istilah masyarakat madani di Indonesia pada tahun 1995, bermula dari gagasan Datuk Anwar Ibrahim yang mengulirkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan istilah *civil society* ke Indonesia, dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada sebuah acara festival Istiqlal 26 September 1995. Sebelumnya istilah masyarakat madani pernah dilontarkan oleh pemikir muslim Naquib al-Attas kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pemikir dalam negeri termasuk Nurcholis Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap konsep masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya “Menuju Masyarakat Madani”.

Sejak itulah istilah masyarakat madani semakin banyak disebut, sehingga muncul upaya untuk mewujudkan masyarakat

madani (*civil society*) yang menggoda dan memotivasi masyarakat dan bangsa Indonesia, walaupun sebenarnya disana sini secara skeptis ada yang meragukan keberhasilan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan *civil society*. Tampaknya pembahasan Anwar Ibrahim mengenai peradaban Islam dengan memakai istilah masyarakat madani mempunyai dampak tertentu dalam menggugah perhatian masyarakat, terkhusus masyarakat muslim di Indonesia.

Kenyataan itu, antara lain karena perhatian kalangan muslim terhadap konsep masyarakat (*society*), sebagai alternatif dari konsep tentang negara (*state*). Apabila memperhatikan diskursus di kalangan intelektual Indonesia, sebenarnya wacana masyarakat ini pernah mencuat kepermukaan, antara lain oleh gerakan Muhammadiyah yang telah cukup lama menggulirkan gagasan “masyarakat utama” yang diserap dari terjemahan kata khayru ummah. Seorang Profesor Amien Rais, mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan mantan Ketua MPR RI pernah membahas “masyarakat utama” dengan menyebut konsep *civil society*.

Almarhum Ahmad Azhar Basyir yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah pernah menulis tentang konsep *civil society* atau masyarakat madani, kendati dalam tulisan itu kerangka teoritis soal *civil society* tidaklah memadai. Dawam Rahardjo menyebut hal itu muncul sesungguhnya tidak lepas dari reaksi masyarakat muslim atas upaya masyarakat muslim yang lain (partai-partai Islam) dalam mengusung wacana “Negara Islam” yang hampir disebut gagal. Menurutnya wacana itu hendak menjelaskan bahwa Islam lebih merupakan konsep tentang masyarakat ketimbang tentang negara (Rahardjo:1999:7).

Seorang pengamat politik berkebangsaan Australia Daniel Liv, menyebutkan bahwa *civil society* akar-akarnya sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya masyarakat cukup solid dan bertanggungjawab, karena karakter itu cukup penting guna melahirkan sebuah masyarakat modern yang maju berpengetahuan dan beradab. Hal

serupa juga dikomentari A. S Hikam yang menyatakan bahwa secara historis kelembagaan masyarakat madani sudah muncul di Indonesia ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial yang baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional (Hikam, 2000:45).

Dengan demikian, akar *civil society* dapat ditelusuri secara historis semenjak terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan Belanda. A.S. Hikam, menunjukkan beberapa elemen dasar yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan andalan bagi landasan masyarakat madani, yaitu ekonomi modern, kapitalisme dan demokratisasi. Benedict Anderson, menyebutkan bahwa orang Indonesia dulu, terutama para pemimpin-pemimpinnya mempunyai persepsi tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan (*imagined society*), tetapi cita-cita itu muncul dalam wacana yang beragam pula, paling kurang ada dua cara pandang: pertama, mengacu kepada suatu masyarakat Indonesia modern, seperti diwakili Sutan Takdir Alisyahbana. Kedua ingin mencari konsep Indonesia yang bertolak dari nilai-nilai ketimuran, tokoh-tokoh pengusungnya antara lain Sanusi Pane dan dr. Sutomo (Miharja, 1997:11). Oleh karena itu, jika ditelusuri akar masyarakat madani dalam konteks Indonesia, sebenarnya embrio ini sudah ada semenjak masa sebelum revolusi Indonesia.

Sekali lagi, jika muncul pertanyaan apakah di Indonesia pernah ada *civil society*? Emil Salim sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Madani, pernah menyatakan masyarakat madani itu juga ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa wujud masyarakat madani sesungguhnya sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban yang sangat dominan di masa lampau, ketika masyarakat berkedudukan sama dan mengatur kehidupan bersama secara musyawarah. Oleh karena itu, masyarakat patembayan memerlukan pembaruan terutama melalui pendekatan pengembangan masyarakat madani dengan

kedudukan sama bagi semua kelompok dan kehidupan bersama hendaknya diatur melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Emil Salim menggunakan istilah paguyuban dan patembayan, kedua kata ini merupakan sebuah istilah terjemahan dari kata berbahasa Jerman yaitu *gemeinschaf* dan *geselschaf* yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonies dan dipakai juga oleh Max Weber. Menurut Weber (Rahardjo, 1999) *civil society* adalah *geselschaf* yang berarti sebuah masyarakat yang terorganisasi dan telah keluar dari pola kebiasaan masyarakat tradisional. Dengan kata lain, *civil society* adalah masyarakat maju dan rasional. Dengan demikian, bagi Emil Salim masyarakat madani sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban dimasa lalu dengan melihat berbagai ciri seperti persamaan kedudukan yang disepakati melalui upaya musyawarah. Untuk mencapai masyarakat patembayan diperlukan pembaruan masyarakat madani.

Ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan atas ketidaksesepakatan model politik ala Orde Baru, masyarakat Indonesia mengembangkan pemikiran untuk membentuk masyarakat Indonesia Baru. Pemikiran tersebut muncul dalam berbagai diskusi-diskusi, seminar-seminar, simposium-simposium yang membicarakan seputar wacana Indonesia Baru baik itu di tingkatan elit intelektual akademisi, maupun ditingkatkan aktivis gerakan. Sebuah simposium yang diselenggarakan di ITB pada 6 Juni 1998 yang mengangkat tema “Pencerahan Menuju Indonesia Baru”.

Pada event itu, yaitu tidak seorangpun para narasumber menyebut istilah *civil society* atau masyarakat madani, justru istilah yang acapkali muncul adalah “Masyarakat Baru Indonesia” atau “masyarakat Indonesia Modern” padahal istilah-istilah tersebut kurang memiliki substansi yang jelas, betapa istilah civil society kurang akrab dilidah yang justru datang dari kalangan ilmuwan senior negeri ini. Walaupun demikian, dari sekian narasumber dalam simposium tersebut, menurut Dawam

Rahardjo ada dua pembicara yang cukup bagus memaparkan secara singkat, yaitu Loekman Sutrisno dan Agung Gumelar. Sutrisno mencoba merumuskan secara singkat masyarakat baru Indonesia sebagai berikut ‘masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri; pertama, masyarakat yang berlandaskan sistem ekonomi dan politik yang demokratis, kedua, masyarakat yang munjunjung tinggi hak sipil dari individu maupun dari kelompok dalam masyarakat. Sementara, Agung Gumelar mencoba membuat rumusan yang lebih memadai, yaitu masyarakat Indonesia yang dikehendaki adalah masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Masyarakat yang maju dalam arti siap menerima dengan cepat, segenap perubahan-perubahan serta mampu memanfaatkan dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gambaran masyarakat maju seperti ini akan menjadikan masyarakat yang lebih dinamis. Sementara, masyarakat mandiri adalah masyarakat yang memiliki sikap mental yang berkepribadian, mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi masyarakat lain. Serta berani bertanggung jawab dan mampu bekerjasama. Dengan demikian, masyarakat mandiri adalah masyarakat yang berdaya saing dan memiliki posisi tawar ditengah kancah persaingan perbaikan hidup. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu yang primer maupun yang sekunder.

Selain riuhnya diskusi tentang *civil society* di tingkatan kampus dan Ormas/LSM, dikancah media juga ikut pro aktif menyuarakan wacana *civil society*. Sebut saja sebuah media televisi swasta pada awal-awal era reformasi menayangkan acara “Indonesia Baru” acara itu dimoderatori oleh Eef Saifullah Fatah, pada acara tersebut banyak sekali pemikir-pemikir garis depan negeri ini melontarkan gagasan ideal mengenai masyarakat madani. Oleh karena itu, hemat penulis hal tersebut perlu terus

diberi support, seorang Ryas Rasyid menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia baru dalam posisi pertumbuhan, bahkan mungkin masih berupa embrio. Masyarakat madani sedang tumbuh, menurutnya karena masyarakat madani barangkat berdasarkan faktor pendukung; Pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi, yakni semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin rendah pula ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Bahkan pemerintah yang bergantung kepada masyarakat. Kedua, tumbuhnya intelektualitas, artinya semakin cerdas suatu masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk independen. Ketiga, terjadinya budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan independen (Said, 1999).

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar masyarakat madani sudah ada di Indonesia, karena ciri-ciri masyarakat itu sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia. Secara historis kelembagaan masyarakat madani telah memiliki akar yang cukup kuat dengan ditemukannya tradisi *civil society* sebelum revolusi, yaitu dengan munculnya organisasiorganisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, politik, kebudayaan secara independen dan aktif mengimbangi peran negara dan hal itu berlangsung hingga era reformasi sekarang. Terlepas dari yang terjadi pada fase-fase sesudah masa revolusi Indonesia dan sebelum reformasi. Proses reformasi sedang berkembang, satu hal yang pasti adalah pemberdayaan *civil society* adalah sebuah keniscayaan jika bangsa yang besar ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Untuk itulah sambil terus mengikuti dan mengisi secara seksama dan memperjuangkan proses reformasi yang belum selesai ini, upaya-upaya pemberdayaan tidak dapat ditinggalkan (Hikam, 2000:150).

Strategi penguatan *civil society* di Indonesia dapat dikembangkan melalui beberapa tahap: Pertama, pemetaan dan identifikasi persoalan dasar menyangkut perkembangan *civil*

society, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya yang harus mendapat prioritas. Pada tahap ini diupayakan penelitian atau kajian secara mendalam baik secara induktif maupun deduktif terhadap potensipotensi yang ada dalam masyarakat guna menumbuh-kembangkan *civil society*. Umpamanya pemetaan terhadap segmen-semen kelas menengah yang dianggap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya *civil society* berikut organisasi di dalamnya. Kedua, menggerakkan potensipotensi yang telah ditemukan sesuai dengan bidang atau garapan masing-masing. Misalnya: bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan terpencil, agar supaya mereka pro aktif memperkuat basis ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Di tahap ini yang menjadi keharusan adalah reorientasi dalam model pembangunan tidak lagi berupa eksploitasi karena pola *top-down*. Tetapi, bagaimana tahap ini sekaligus diusahakan untuk menghidupkan dan mengaktifkan keswadayaan masyarakat. Perdekatan-pendekatan partisipatoris harus dipakai dalam hal inilah peran ormas dan LSM menjadi demikian signifikan, dan yang pasti ormas dan LSM itu bukan hanya berorientasi kepada tingkatan program saja. Tetapi juga pemberdayaan secara praksis eksis.

Pada tahap kedua ini, masyarakat kelas menengah diarahkan kepada penumbuhan kembali jiwa interprenuernya yang sejati, sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan kuat. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambahnya generasi muda yang berpengetahuan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis berkaliber global. Profesional muda ini, hemat penulis akan menjadi tulang punggung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayaan. Indikasi ini dapat dibaca melalui munculnya kelompok aktivis muda yang mendukung dan terus mengawasi jalannya reformasi. Hal yang paling sering mereka angkat kepermukaan adalah menyangkut transparansi dan kemandirian serta menunjukkan kepedulian terhadap duka derita

rakyat yang tidak berpendidikan dan berekonomi.

Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi masyarakat (ormas) yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Pemberdayaan kelompok ini sangat penting, karena kelompok inilah yang biasanya berada di garis depan dalam membela kaum tertindas. Organisasi masyarakat ini biasanya melakukan aktivitas-aktivitas berupa permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakberpengetahuan alaik kebodohan dan keterbelakangan, yang diatasnya dengan segala kemampuan yang dimiliki kendati itu tidak tuntas. Kelompok-kelompok ini yang selalu bersuara sebagai penyambung atau media suara rakyat kepada pemerintah maupun kepada publik secara luas. Sulit dibayangkan jika seperti pondok pesantren, gerakan muda masjid atau mushalla, LSM dan Ormas dan lain-lain tidak ada di nusantara ini. Sementara angka kemiskinan, kesakitan serta kematian terus bertambah dan merambah kepada persoalan-persoalan lain, boleh jadi jika tidak ada kelompok-kelompok itu, negeri ini sudah bubar.

Selain kelompok-kelompok itu, pihak lain dalam tahap ini tidaklah patut dilupakan adalah pihak media massa yang berperan sebagai wilayah publik bebas yang menjadi medium transaksi wacana publik. Media massa yang tidak dikungkung oleh negara adalah tumpuan masyarakat sekaligus instrumen bagi penguatan *civil society*. Sebab disinilah dimungkinkannya penyaluran aspirasi dan pembentukkan opini mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, disamping sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan tumbuh berkembangnya media massa yang memiliki kebebasan diatas etika jurnalis, maka kehidupan publik akan senantiasa mengalami penyegaran dan masyarakatpun memiliki ruang guna menyuarakan aspirasinya. Tentu saja, media massa juga memerlukan pengawasan pemilik, baik itu ditingkatkan penyebaran gagasan-gagasan dan informasi tertentu maupun sebagai bagian dari industri bisnis. Artinya media massa yang

terkontrol secara ketat akan mampu mewujudkan setting agenda yang bisa mendistorsi kehidupan publik.

Tahap ketiga adalah pemberdayaan jangka panjang agar supaya seluruh elemen *civil society* memiliki kapasitas kemandirian yang kuat. Sehingga secara bersama-sama dapat mempertahankan demokrasi. *Civil society* yang seperti ini dapat menjadi input bagi masyarakat politik (*political society*) seperti orsopol, birokrasi dan sebagainya dalam mengambil keputusan publik. Pada saat yang sama *political society* juga dapat melakukan rekrutmen dari kelompok-kelompok dalam *civil society* sehingga kualitas para politisi dan elit politik memiliki jaminan dalam kualitas dan bermutu.

Hubungan *civil society* dengan negara dalam konteks ini merupakan sebuah hubungan simbiosis mutualistik yang satu sama lain saling melengkapi (*complementary*) sehingga segala bentuk kebijakan betul-betul berkepentingan publik. Akan tetapi kenyataan untuk mengarah pada hal tersebut hemat penulis butuh waktu yang cukup lama dimana harmonisasi keseimbangan antara negara dengan rakyat menjadi syarat utama. Walaupun semacam situasi indah itu untuk saat ini masih bersemayam dalam dunia mimpi. Proses pemberdayaan *civil society* akan tergantung pada kesuksesannya kepada sejauh mana format politik pasca reformasi dibuat. Jika format tersebut hanya mengulangi yang lama, kendati dengan ornamen yang berbeda, maka pemberdayaan *civil society* juga hanya berupa angan-angan belaka. Sayangnya justru prospek inilah yang tampaknya sedang diatas angin. Kemungkinan terjadinya pemulihan rezim lama masih cukup besar mengingat akhir-akhir ini persoalan penyelesaian tindak pidana korupsi di semua sektoral semacam mengalami kejumudan, diperparah lagi dengan melemahnya kelompok pro demokrasi, sebuah saja kelompok mahasiswa seakan menjadi terasing di tanah air sendiri.

Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia

Analisis tentang prospek pengembangan *civil society* di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah mengingat kompleksitas faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, prospek tersebut dapat dianalisis dengan mengacu pada komponen-komponen *civil society*; Otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, Arena publik yang mandiri dan arena publik yang terbuka.

Pertama, ditinjau dari aspek komponen *civil society* yang pertama; otonomi. Masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai mengalami transformasi dari masyarakat yang sama sekali sangat tergantung kepada negara pada era Orde Baru ke arah minimalisasi atau pembatasan-pembatasan pengaruh negara dalam kegiatan-kegiatan masyarakat pada era pasca Orde Baru. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintahan negara pada masa Orde Baru disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal masyarakat memiliki ketergantungan terhadap negara disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau masyarakat masuk ke dalam wilayah pengaruh negara karena kebutuhan mereka akan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Contoh konkret dalam hal ini adalah kebijakan IDT yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat secara sukarela menggantungkan diri pada negara karena hal itu mereka rasakan sangat krusial untuk pengembangan daerah dan pemenuhan kepentingan lain mereka, terutama dalam masyarakat yang terbelakang secara vertikal dan horizontal.

Selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh faktor eksternal masyarakat, dalam hal ini adalah negara. Pada masa Orde Baru pemerintah memiliki kekuatan sistematik dalam koridor yuridis formal dan administrasi penyelenggaraan negara yang memaksa warga masyarakat untuk tergantung kepada negara, meskipun secara terpaksa. Hal demikian membuat kekuasaan negara begitu kuat dan dominan atas kekuasaan masyarakat sebagai sub ordinatnya. Dalam hal ini campur tangan negara terhadap

kegiatan-kegiatan masyarakat sangat besar, dan tidak jarang negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan etatis dan menggunakan tindakan-tindakan represif dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan masyarakat. Salah satu tragedi yang mengingatkan kita akan betapa besarnya kekuasaan pemerintah atas masyarakat saat itu adalah tragedi Tanjung Priuk yang dinilai sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Tragedi Waduk Nipah di Madura juga contoh konkret serupa yang membuktikan kuatnya pengaruh dan campur tangan pemerintah atas kegiatan dan inisiatif masyarakat.

Angin reformasi yang mulai berhembus di Indonesia sejak bulan Mei tahun 1998 menciptakan transformasi otonomi masyarakat *vis a vis* negara ke tingkat yang jauh lebih baik. Warga masyarakat belakangan ini terhitung sejak pertengahan 1998 tersebut mulai menanggalkan ketergantungan besar mereka kepada pemerintah, dan terus berusaha untuk membatasi pengaruh dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Walaupun demikian proses transformasi otonomi masyarakat belum dapat dikatakan sempurna sebagai salah satu komponen *civil society*. Namun begitu, atmosfer dimana negara sedikit demi sedikit mengurangi penetrasi dominasinya pada wilayah-wilayah privat warga negara akan menjadi salah satu prospek pengembangan *civil society* yang menjadi salah satu basis demokratisasi di Indonesia.

Kedua, ditinjau dari komponen *civil society* yang kedua, yaitu akses masyarakat terhadap lembaga negara. Proses demokratisasi yang sedang berjalan yang melahirkan berbagai bentuk sosialisasi atau pendidikan politik memberikan kemungkinan lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki akses terhadap agen-agen pemerintahan. Pada prakteknya, lembaga-lembaga negara yang menjalankan eksekutif maupun fungsi-fungsi lainnya belakangan mengalami perubahan, dimana mereka dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan situasi dan perkembangan politik riil dalam masyarakat, mulai membuka diri

untuk publik yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses ke dalamnya dalam hal penerimaan informasi sebagai salah satu hak masyarakat, dan dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakat dalam kapasitas mereka sebagai pelaksana *public services*. Titik awal desakralisasi lembaga pemerintahan secara institusional maupun personal dilakukan oleh Presiden Habibie, dilanjutkan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid, dengan membuka istana negara kepada masyarakat agar mereka memiliki akses yang cukup terhadap salah satu lokasi lembaga pemerintahan tersebut.

Akses masyarakat terhadap lembaga negara belakangan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh warga masyarakat, misalnya ditunjukkan dengan mendatangi lembaga pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi atau sekedar untuk mendapatkan informasi. Bentuk akses yang lain terhadap lembaga-lembaga negara antara lain dengan melakukan hearing dengan anggota legislatif di DPR atau DPRD. Unjuk rasa atas kebijakan lembaga pemerintahan yang dalam pandangan masyarakat dianggap kurang memenuhi aspirasi masyarakat, merupakan salah satu indikasi bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki akses yang cukup bagus terhadap lembaga pemerintahan. Jika aktivitas tersebut terus dipelihara, maka akan menjadi salah satu penopang bagi terciptanya *civil society* sebagai salah satu elemen demokratisasi.

Ketiga, ditinjau dari komponen dari *civil society* yang ketiga, yaitu arena publik yang mandiri. Arena publik yang berbentuk organisasi-organisasi sosial dan organisasi-organisasi politik memiliki tingkat kemandirian yang relatif rendah. Dimana, pada kenyataannya partai politik, kelompok penekan, dan organisasi politik lainnya secara finansial belum bisa mandiri terlepas dari arrangement yang dilakukan oleh negara. Di sisi yang lain akselerasi peran yang mereka tunjukkan belum seimbang dengan kewenangan negara yang memiliki daya tawar yang relatif lebih tinggi. Walaupun secara formal, otoritas negara dengan otoritas

organisasi sosial-politik, partai politik misalnya, dalam permukaannya tampak seimbang, akan tetapi pada pelaksanaannya daya tekan pemerintah atas partai politik lebih kuat. Selain itu, organisasi sosial dan politik seperti partai politik dan kelompok kepentingan sebagai sebuah arena publik juga masih memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah, paling tidak dalam dua hal; pertama, menyangkut derajat rekrutmen yang mereka miliki, kedua, derajat aktivitas yang memungkinkan mereka mengisi ruang yang tersedia antara negara dan masyarakat.

Dari sudut pandang rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, misalnya dalam hal penentuan calon legislatif yang berorientasi pada kekuasaan negara tidak sepenuhnya dilandaskan pada kemandirian dan representasi masyarakat konstituennya. Keterlibatan banyak partai politik dalam pemerintahan secara otomatis memperkuat kecenderungan keberpihakan mereka kepada kepentingan pemerintah, bukan pada masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang aktivitas mereka dalam mengisi ruang publik yang tersedia antara masyarakat dan negara, tampaknya masih berat pada keberpihakan pada negara daripada kepentingan masyarakat dalam sekup yang lebih luas. Hal itu, disebabkan oleh karena sejak kelahirannya partai politik sulit dilepaskan dari orientasi awalnya untuk meraih kekuasaan. Maka, dalam konteks ini sebenarnya ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh partai politik, yaitu berada dalam jalur utamap emerintahan, atau jika meraka tersingkir dan tidak mampu berada di jalur tersebut, maka akan memposisikan diri dalam oposisi.

Organisasi sosial lainnya baik yang berorientasi politik maupun tidak, yang bergerak di bidang profesi misalnya SPSI, IDI dan PGRI, kelompok kepentingan yang merupakan representasi kepentingan tertentu seperti kadin, dan kelompok keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan walubi sampai saat ini belum memiliki derajat aktivitas yang mampu mengisi ruang publik secara independen. Organisasi sosial yang mungkin sangat

mungkin untuk diharapkan berperan secara independen sebagai arena publik yang mandiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa, khususnya media cetak.

Keempat, ditinjau dari sudut pandang komponen *civil society* yang terakhir, yaitu arena publik yang terbuka. Heterogenitas dan pluralisme, serta tingginya fragmentasi sosial bangsa Indonesia turut memberikan kendala alami dalam penciptaan arena publik yang terbuka. Seperti diketahui, klasifikasi kelompok masyarakat di Indonesia yang ada selama ini didasarkan pada ikatanikatan primordial, yang hal itu menyebabkan rendahnya tingkat inklusivitas asosiasi sosial dalam masyarakat. Kondisi demikian, menyebabkan kerentanan untuk terciptanya konflik horizontal antar asosiasi sosial masyarakat.

Masih hangat tentunya dalam rekaman memori masyarakat Indonesia, kentalnya nuansa ekslusivitas asosiasi-asosiasi sosial di dalam masyarakat dalam merespon pro kontra seputar Rancangan Undang-Undang tentang Sistem pendidikan Nasional yang akhirnya disahkan oleh DPR menjadi UU. Begitu pula asosiasi-asosiasi sosial yang berkepentingan di dalam merespon pro kontra seputar proses spin off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik. Hal itu membuktikan bahwa kepentingan-kepentingan ikatan primordial dalam asosiasi sosial merupakan ancaman bagi terciptanya keterbukaan arena publik, jika tidak dikelola secara dewasa atas dasar kebersamaan dalam bingkai kebangsaan.

Di samping itu prospek pengembangan *civil society*, bisa dibangun dari beberapa pilar, di antaranya: Penciptaan keluarga demokratis, peningkatan peran organisasi non pemerintah, optimalisasi peran kelas menengah intelektual, khususnya mahasiswa, dan pendidikan politik, yang satu persatu dideskripsikan sebagaimana berikut. Pengembangan *civil society* di Indonesia dalam tahap yang sangat mendasar bisa diawali dari keluarga, yang dalam terminologi Anthony Giddens (2000: 102) disebut keluarga demokratis. Keluarga merupakan institusi dasar

dalam pengembangan *civil society*. Penciptaan keluarga demokratis harus dimulai dari langkah yang paling fundamental, yaitu prinsip kesamaan derajat antar jenis kelamin, dan bukan berarti kesamaan fungsi dan peranan.

Kriteria demokrasi di dalam keluarga tidak jauh berbeda dengan kriteria demokrasi dalam ruang publik yang lebih luas. Kriteria dalam ruang publik paling tidak melibatkan kesamaan formal, hak-hak individual, diskusi publik tentang berbagai isu tanpa kekerasan, dan otoritas yang merupakan output dari negosiasi, bukan diwariskan oleh tradisi. Demokratisasi dalam keluarga berimplikasi pada kesetaraan, otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan kebebasan dari kekerasan. Karakteristik yang serupa juga mengisi model hubungan antara orang tua dan anak. Penanaman karakteristik demokrasi dalam keluarga akan berimplikasi dalam jangka panjang terhadap penciptaan demokrasi dalam ruang publik yang lebih luas.

Aspek lain yang sangat mungkin untuk diharapkan peranannya dalam pengembangan *civil society* di Indonesia adalah LSM. Di tengah kondisi organisasi politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan atas dasar profesi tidak terlalu dapat diharapkan untuk saat ini, maka LSM dalam wacana politik Indonesia bisa mengisi ruang publik yang independen dalam *civil society*. Partisipasi yang dilakukan oleh LSM selama ini bersifat dua arah. Arah pertama, adalah partisipasi dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Peningkatan kualitas masyarakat tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan sosial dan politik kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan arah yang kedua, adalah partisipasi dalam mengisi ruang publik dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Contoh konkret dari partisipasi dua arah tersebut adalah apa yang selama ini dilakukan oleh PBHI, YLKI, YLBHI, Walhi, Lapera dan sebagainya.

Pengembangan *civil society* tampaknya juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan mahasiswa kini dan pada

masa-masa yang akan datang. Runtuhnya hegemoni kekuasaan Orde Baru dan bergulirnya bola reformasi tidak bisa dilepaskan dari peranan mahasiswa. Peranan demikian harus terus dikembangkan oleh kelas menengah intelektual tersebut, bukan saja pada wilayah partisipasi politik terhadap kebijakan-kebijakan publik oleh pemerintah, akan tetapi juga dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, untuk mengembangkan civil society di Indonesia.

Salah satu jalan lain menuju pengembangan *civil society* di Indonesia adalah penyelenggaraan pendidikan politik bagi warga negara secara sistematis melalui kegiatan-kegiatan formal, serta di sisi yang lain menegaskan doktrindoktrin ideologi politik pemerintah. Selama bertahun-tahun pemerintah memaksakan doktrin ideologi politik pemerintah yang dibungkus dalam pendidikan formal, seperti P-4 dan PMP, sebagai bentuk campur tangan negara yang bersifat etatis. Apalagi indoktrinasi tersebut disertai dengan ancamanancaman yang bersifat represif dengan alasan subversi.

Pendidikan politik dalam pendidikan formal harus dipandang sebagai salah satu hak warga negara dalam rangka peningkatan *politics literacy* dan partisipasi politik. Dalam hal ini, pendidikan politik bisa dikemas dalam format pendidikan kewarganegaraan seperti di negara-negara demokrasi maju yang dikenal dengan terminologi *civic education* atau *citizenship*. Namun begitu begitu banyak prospek yang memungkinkan terwujudnya *civil society* tidak serta merta meniscayakan kemudahan pada implementasinya di lapangan, hal itu mengingat seluruh prospek yang ada pasti lahir bersama tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah tingginya fragmentasi sosial, belum meratanya hasil pembangunan, dan masih kuatnya budaya politik paternalistik.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik atau bisa juga dikatakan sebagai masyarakat yang sangat tinggi fragmentasi sosialnya dipandang dari berbagai

aspeknya. Itu semua merupakan sesuatu yang bisa menghambat tumbuh dan berkembangnya *civil society*, atau paling tidak memperlambat perkembangan tersebut. Keterlepasan masyarakat yang sudah mulai ada masih akan terus bergulir secara gradual, sampai saat ini masih sampai pada tingkatan yang rendah, terutama di bidang ekonomi dan politik. Krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai menerpa Indonesia, membuat ketergantungan masyarakat masih sangat besar. Krisis ekonomi yang alah satu eksesnya adalah menurunnya *income* penduduk Indonesia per tahun per kapita secara menyeluruh semakin memperparah ketergantungan masyarakat kepada pemerintah melalui subsidisubsidi.

d) Rangkuman

1. Perkembangan sosial legal dan sosial kultural *civil society* sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran Barat (MD, 1999:3). *Civil society* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang tidak memiliki kaitan dengan ‘pemerintah militer’ seperti yang sering diperbincangkan masyarakat secara umum.
2. Konsep ini, sebenarnya merupakan lawan dari konsep ‘masyarakat negara’ (*state society*) atau masyarakat politik (*political society*), konsep ini mulamula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena *civil society* tidak lahir dari suasana vakum. Sebaliknya, *civil society* merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat (Effendy, 2000:23).
3. Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetrat kekuasaan negara.
4. Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan

dari *civil society* itu sendiri. Elemen-elemen ini merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari *social control* yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.

5. Wacana *civil society* selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, tidak saja dalam bentuk semakin banyaknya buku, artikel, opini, forum diskusi, debat publik mengenai topik ini, tetapi juga semakin bertambahnya pihak-pihak yang berminat dan pro aktif dalam wacana tersebut. Bahkan kalangan pemerintahpun ikut terlibat. Terdokumentasi dalam bukunya A. S Hikam sebuah kegiatan seminar sehari mengangkat isu *civil society* yang dipersembahkan Lemhanas bersama aktivis LSM (Hikam, 2000:112).
6. Prospek pengembangan *civil society* di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah mengingat kompleksitas faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, prospek tersebut dapat dianalisis dengan mengacu pada komponen-komponen *civil society*; Otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, Arena publik yang mandiri dan arena publik yang terbuka.

e) Latihan

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* modul terkait sejarah perkembangan *civil society*, pengertian dan ciri *civil society*, unsur-unsur *civil society*, perkembangan *civil society* di Indonesia, serta prospek dan tantangan *civil society* di Indonesia.
2. Hasil *review* bacaan modul dikembangkan dalam bentuk

tulisan malah/jurnal kemudian dipaparkan secara berkelompok oleh mahasiswa.

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman terhadap hasil bacaan dan *review* terhadap modul.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan, *review* dan pengembangan hasil bacaan yang dilihat saat pemaparan

g) Umpam Balik

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Materi pada modul ini membahas *Civil society* atau masyarakat madani sebagai gerakan non pemerintah dalam perkembangannya telah memberikan warna tersendiri dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini, *civil society* berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. *Civil society* merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara (*political society*). Tugas dari *civil society* adalah melakukan pengawasan dan perimbangan dalam demokrasi dan menjadi jembatan masyarakat kepada pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Di Indonesia sendiri pasca Reformasi tahun 1998 menciptakan transformasi otonomi masyarakat *vis a vis* negara ke tingkat yang jauh lebih baik. Warga masyarakat belakangan ini terhitung sejak pertengahan 1998 tersebut mulai menanggalkan ketergantungan besar mereka kepada pemerintah, dan terus berusaha untuk membatasi pengaruh dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat. Walaupun demikian proses transformasi otonomi masyarakat belum dapat dikatakan sempurna sebagai salah satu komponen *civil society*. Namun begitu, atmosfer dimana negara sedikit demi sedikit mengurangi penetrasi dominasinya pada wilayah-wilayah privat warga negara akan menjadi salah satu prospek pengembangan *civil society* yang menjadi salah satu basis demokratisasi di Indonesia. Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari *civil society* itu sendiri yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi hukum, Perguruan tinggi dan Partai politik. Elemen-elemen yang merupakan perwujudan dari *civil society* inilah yang hari ini terus tumbuh dan menjadi penyeimbang dan pengontol bagi pemerintah dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

1. Masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia adalah entitas yang luas dan beragam, terdiri dari berbagai organisasi, kelompok, dan individu yang bergerak di luar struktur pemerintahan dan bisnis, namun berperan penting dalam memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa aspek masyarakat sipil di Indonesia:
 - Organisasi Non-Pemerintah (LSM): LSM di Indonesia beragam dan beroperasi di berbagai bidang, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Beberapa LSM terkemuka di Indonesia termasuk Transparency International Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Indonesia.
 - Kelompok Advokasi dan Keagamaan: Ada banyak kelompok advokasi di Indonesia yang berfokus pada isu-isu tertentu, seperti hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, terdapat juga kelompok keagamaan yang aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan

masyarakat.

- Organisasi Profesional dan Akademis: Organisasi profesi seperti asosiasi dokter, insinyur, dan pengacara juga menjadi bagian dari masyarakat sipil di Indonesia. Mereka biasanya berperan dalam meningkatkan standar profesi, memberikan bantuan teknis, dan memberikan pendidikan kepada anggota dan masyarakat umum.
- Gerakan Sosial dan Budaya: Gerakan sosial dan budaya di Indonesia, termasuk organisasi seni, budaya, dan kebudayaan, juga menjadi bagian penting dari masyarakat sipil. Mereka seringkali memainkan peran dalam mempromosikan kesadaran akan isu-isu sosial dan budaya, serta mempertahankan warisan budaya Indonesia.
- Media Independen: Media independen, baik media cetak maupun online, merupakan bagian integral dari masyarakat sipil di Indonesia. Mereka sering berperan dalam memonitor kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menyediakan informasi kepada publik.
- Masyarakat sipil di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah. Meskipun mereka sering menghadapi tantangan seperti pembatasan kebebasan berbicara dan tekanan politik, masyarakat sipil terus berperan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
<i>Civility</i>	Kewarganegaraan
<i>Civilized Society</i>	Masyarakat yang beradap
NGO (NonGovernment Organization)	Organisasi non pemerintah
Oikos	Keluarga/Rumah tangga
Politike Koinonia	Masyarakat politik/Komunitas politik

<i>Public sphere</i>	Ruang gerak
<i>State</i>	Negara
<i>Social contrac</i>	Perjanjian masyarakat
<i>Society</i>	Masyarakat
<i>Telos</i>	Tujuan
<i>Urbanity</i>	Budaya kota

d) Referensi

- Brewer, Anthony. (1999). *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Jakarta: Teplok Press.
- Culla, Adi Suryadi. (1999). *Masyarakat Madani Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cohen, Jean L., and Andrew Arato. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Effendy, Bachtiar. (2000). Masa depan civil society di Indonesia: memeriksa akar sosio religious. *Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kubudayaan, Tashwirul Afkar*. Edisi No. 7 Tahun 2000 – ISSN: 1410-9166. Jakarta.
- Gellner, Ernest. (1990). *Membangun Masyarakat Sipil Pra Syarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Struktural: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haniah Hanifie, & Ana Sabhana Azmy. (2018). Kekuatan-kekuatan Politik. Depok: Rajawali Pers.
- Herdiawanto, Heri, dkk. (2019). *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikam, Muhammad A., S. (2000). *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Hikam, Muhammad A., S. (1999). Diskursus Intelektual tentang Civil Society di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, 39(3), 0215-1412.
- Karsidi, Asep. (2012). *NKRI Dari Masa Ke Masa*. Bogor: Sains Press.
- MD, Moh., Mahfud. (1999). *Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani*. Makalah, Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah. BEM IKIP Yogyakarta.

- Mihardja, Achdiat K. (1997). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer, Deliar. (1998). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Bandung: Mizan.
- Parmudi, M. (2015). Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. *Jurnal At-Taqaddum* FISIP UIN Walisongo, 7(2).
- Rahardjo, M. Dawam. (2005). *Paradigma al-Qur'an Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Rahardjo, M. Dawam. (2000). *Sejarah Agama dan Masyarakat Madani*, dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M., Dawam. (1999). Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, No. 39(3), 0215-1412, UII. Yogyakarta.
- Rahardjo, M., Dawam. (1999). Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, 1(2).
- Rahardjo, M., Dawam. (1999). *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan Visi Dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: LSAF dan TAF.
- Sanaky, Hujair AH. (2003). *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: MSI UII dan Safiria Insani Press.
- Stark, Rodney. (2003). *One True God Consequences of Monotheism*, terj. M. Sadat Ismail. Jakarta: Nizam Press.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

MODUL 4

KEKUATAN POLITIK LSM DAN PERS: PERAN DAN FUNGSINYA DALAM PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai kekuatan politik di Indonesia, mahasiswa selanjutnya perlu diperkenalkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers yang keduanya merupakan elemen serta perwujudan dari masyarakat madani (*civil society*). Baik LSM maupun Pers keduanya memiliki peran penting sebagai penyeimbang dan kontrol bagi pemerintah.

Sebagai gerakan sukarela yang dibentuk baik orang perseorangan maupun kelompok, LSM memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sukarela dan memberikan kontrol terhadap pemerintah. Di sisi lain, dengan landasan demokrasi, Pers mendapatkan tempat tersendiri dalam negara dengan tujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat, memberikan kontrol terhadap pemerintah, serta menjadi penjembatan antar keduanya melalui media. Baik LSM maupun Pers merupakan organisasi non pemerintah (*NonGovernment Organization*) yang hari ini berubah menjadi gerakan dengan kekuatan tersendiri di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka modul empat ini akan membahas terkait dengan LSM dan Pers sebagai kekuatan politik ditinjau dari peran, fungsi, dan perkembangannya dalam proses demokrasi di Indonesia.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 4 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

- pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
 4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
 5. Memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.
 6. Memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia
 7. Memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
 8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 4 ini adalah:

1. Mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian, peran, fungsi dan perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses demokrasi di Indonesia.
2. Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan mengenai pengertian, peran, fungsi dan perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses demokrasi di Indonesia.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5) Kegunaan Modul 4

Kegunaan atau manfaat dari Modul empat ini adalah membantu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang peran, fungsi, dan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers sebagai bagian dari *civil society* yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Adapun materi pokok pembelajaran pada modul ini menjadi dua yaitu mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers. Dari dua pokok bahasan tersebut, diturunkan ke dalam beberapa sub bahasan yang meliputi; Pengertian LSM, Peran dan jenis-jenis LSM, Hubungan LSM dengan pemerintah, Ruang politik untuk hubungan NGO dan pemerintah, Perkembangan LSM dalam proses demokrasi di Indonesia, Pengertian Pers, Peran & Fungsi Pers, dan Perkembangan Pers dalam proses demokrasi di Indonesia.

A. Kegiatan Pembelajaran 1

- a) Peran dan Perkembangan LSM di Indonesia
 - b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir
- Mahasiswa memahami tentang peran, pengertian, peran, fungsi, dan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses demokrasi di Indonesia.
- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

David Korten seorang aktivis dan pengamat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan gambaran tentang perkembangan LSM. Zaim membagi LSM menjadi empat generasi berdasarkan strategi yang dipilih LSM tersebut. Dari urutan general tersebut, garis perkembangan LSM di Indonesia dapat dilacak. LSM generasi pertama berperan sebagai pelaku langsung dalam menguasai persoalan masyarakat. Pendekatannya bersifat amal, yaitu berusaha memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat (kesehatan, makanan, pendidikan, dan lain-lain) dan memfokuskan kegiatannya pada

kegiatan amal bagi anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, penderita cacat, dan orang lanjut usia. LSM generasi ini disebut juga sebagai “*relief and welfare*” (Bastian, 2007:33).

LSM generasi kedua memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Perannya bukan sebagai pelaku langsung, tetapi sebagai penggerak saja. Orientasi kegiatannya adalah pada proyek-proyek pengembangan masyarakat. LSM generasi ini disebut juga sebagai “*small scale, self reliance llocal development*”. LSM generasi ketiga memiliki pandangan lebih jauh dari generasi sebelumnya. Situasi di tingkat lokal ini dipandang sebagai akibat dari isu-isu regional dan nasional, dan masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masalah politik pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan mendasar hanya dimungkinkan apabila ada perubahan struktural. LSM generasi ini disebut juga sebagai “*sustainable system development*” (Bastian, 2007:34).

LSM generasi keempat merupakan LSM yang termasuk bagian dari gerakan masyarakat (*people movement*). LSM seperti ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah mencita-citakan terciptanya dunia baru yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua penduduk dunia. Ciri gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur (Bastian, 2007:34). Dalam perspektif sejarah, kalau mengikuti antar generasi korten ini, cikal bakal LSM di Indonesia, telah ada sejak masa pra-kemerdekaan yang lahir dalam bentuk lembaga-lembaga keagamaan dan bersifat sosial atau amal. Contohnya LSM yang dibentuk oleh pemuka agama seperti Muhammadiyah atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan oleh kelompok katolik atau protestan.

Pada tahun 1950-an, muncul LSM yang kegiatanya

bersifat alternatif terhadap program pemerintah dengan pertimbangan pada kemanusiaan dan kedewasaan. LSM, pada tahun-tahun terakhir ini, dipelopori oleh LSD (Lembaga Sosial Desa) dan PKKS (Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial). Jadi, pada kurun waktu ini dapat dikategorikan sebagai LSM generasi pertama. Pada tahun 1960-an, LSM yang lahir terutama bergerak dalam pengembangan pedesaan. Ciri utama gerakannya adalah tertuju pada proyek-proyek mikro, terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan dan sudah merintis jaringan kerja sama nasional. LSM-LSM ini antara lain Yayasan Sosial Tani membangun yang kemudian berkembang menjadi Bina Desa dan Bina Swadaya (Bastian, 2007:34).

Pada tahun 1970-an, LSM yang muncul dipengaruhi oleh masa awal orde baru, yang merupakan reaksi sebagai anggota masyarakat atas kebijakan pembangunan yang diterakan. Motivasi gerakannya adalah untuk mempromosikan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, contoh LSM generasi ini antara lain LP3ES, LBH, YLKI, LSP dan sebagainya (Bastian, 2007:34). Sejak awal kelahirannya pada hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan perubahan mendasar dalam masyarakat. LSM bukan suatu tujuan, berada dalam suatu LSM merupakan pilihan, bukan karena terjerambab apalagi karena mencari nafkah. Suara LSM diniatkan merupakan hentakan dan dari "*silent majority*" yang dibisukan dan distigmatisasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia pada tahun 1065.

Pada awal tahun 1990-an LSM Indonesia mengalami puncak perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Pada saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM bangkit, berkembang biak dengan cepat dan mulai meraung serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan kekuatan ini mengantarkan LSM pada

puncak kegiatannya sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi. Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karena digerogoti faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang sosial budaya (Bastian, 2007:8-9).

Apa yang dikerjakan LSM setelah jatuhnya Soeharto merupakan pertanyaan yang mengemuka setelah berubahnya konstelasi politik di Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto menandai proses transisi ke demokrasi, yang popular disebut sebagai reformasi. Hanya dalam jangka waktu tiga tahun sejak 1998, ada tiga presiden Indonesia silih berganti, ini merupakan transisi politik dengan dinamika politik yang luar biasa, terutama bila dibandingkan dengan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Sejak reformasi ini, berbagai macam Partai Politik dan ORMAS lahir serta jumlah LSM meningkat.

- Dikalangan masyarakat telah tumbuh dan berkembang organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani.
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi

yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

- Menurut Indonesia *Center for Civic Education* (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh Negara dan juga menjadi juga menjadi perwujudan dari *civil society* (Tim ICCE, 2000:158). hal ini sejalan dengan definisi *civil society* yang dibangun oleh Ernest Gellner. Bahwa *civil society* adalah masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang cukup kuat dan independen untuk mengembangkan peran penyeimbang (Gellner, 1995:2). Hal serupa dipertegas kembali oleh Hikam dalam karyanya berjudul masyarakat dan *civil society* yang mengatakan bahwa *civil society* adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan Lembaga-Lembaga politik (Hikam, 1999:200).
- Selanjutnya Riker (dalam Gaffar, 2006:200) mengungkapkan bahwa LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (*NonGovernment Organization*) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/LSM merupakan

organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/LSM juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/LSM tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO.

- Riker (dalam Gaffar, 2006:202) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/LSM memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah.
- Budairi menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian politis adalah Organisasi Keswadayaan Masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan bisa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa definsi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan (Tarigan, 2017:63-64).

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Peter Hannan, seorang pakar ilmuilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal.

Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota (Tarigan, 2017:63-64).

Peran dan Jenis-Jenis LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Gaffar, 2006:203) mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu:

- Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.
- Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam Gaffar, 2006:204) juga mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

- Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan business.
- Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- Implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program

dalam masyarakat.

Jika melihat pendapat Heyzer di atas, Kalau kita mengacu pada pendapat Heyzer di atas, peran NGO dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama, peranan dalam bidang non-politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi; dan kedua, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

Selain peran yang dimiliki, Lembaga Swadaya Masyarakat juga terdiri dari beberapa jenis (Kerton, 2002:5) yang antara lain:

- Organisasi Sukarela (OS) yang melakukan misi sosial, ter dorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
- Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai usaha tanpa-laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
- Organisasi Rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota, dan cukup mandiri.
- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat memiliki beberapa jenis di Indonesia yaitu:

- Organisasi Mitra Pemerintah LSM Organisasi Mitra Pemerintah merupakan Organisasi Non Pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah.
- Organisasi Donor Darah LSM Organisasi Donor darah adalah Organisasi Non Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara finansial maupun yang berkaitan dengan tarif kegiatan donor darah bagi orang lainnya.

- Organisasi Professional Lembaga Swasdaya Masyarakat berupa Organisasi Professional adalah Organisasi Non Pemerintah untuk menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada kecakapan serta kemampuan profesional dalam bidang tertentu, misalnya terkait kesehatan jurnalistik hingga bantuan hukum.
- Organisasi Oposisi LSM Organisasi Oposisi merupakan Organisasi Non Pemerintah yang menjalankan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah, misalnya pemberi kritik, saran dan terkait pengawasan keberlangsungan pemerintah.

Hubungan LSM Dengan Pemerintah

Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (*Non Government Organisation*) dengan pemerintah menurut Eldridge (dalam Suharko, 2005:16), menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayani, Eldrige mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4 (empat) kategori:

- Kategori yang pertama adalah NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (*grass-roots*) dengan menggunakan pendekatan “*high-level cooperation-grassroots development*” (kerja sama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik.
- Kategori yang kedua adalah NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan

sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “*high level politics grassroots mobilization*” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah.

- Kategori yang ketiga adalah NGO yang menggunakan pendekatan “*empowerment from below*” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah. Kategori yang keempat adalah “NGO radikal” (*radical NGO*) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah.

Pemerintah dapat berinteraksi dan memberi respon kepada aktivitas NGO melalui berbagai cara, mulai dari cara kooperatif sampai cara kontrol dengan derajat yang bervariasi. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap NGO dapat dilihat dari cara pemerintah menanggapi inisiatif NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005: 44), dengan memeriksa bekerjanya tiga dimensi strategis, yakni dimensi finansial, organisasional dan otonomi kebijakan versus kontrol, ditemukan lima model utama hubungan NGO-Pemerintah di sepanjang kontinum ruang politik.

Dalam konteks hubungan antar LSM sebagai *NonGovernment Organisation* (NGO) setidaknya terdapat beberapa model:

- *Otonomi/Benign Neglect* (Pengabaian yang Baik)

Dalam model ini, pemerintah menganggap inisiatif NGO tidak berbahaya dan membiarkan NGO beroperasi sebagai aktor otonom di bidang keuangan, kebijakan dan

organisasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas-tangan” terhadap aktivitas NGO. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi NGO.

Akan tetapi ketika NGO bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik, pemerintah tidak lagi mengabaikan mereka. Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari NGO tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dari mereka. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, kebutuhan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, serta tujuan keamanan dan militer.

➤ Fasilitasi/ Promosi

Pada model ini, peran NGO dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintah bisa memfasilitasi inisiatif NGO melalui dukungan finansial, pengakuan resmi atas aktivitas NGO (misalnya berupa status hukum), pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dengan aktivitas NGO (misalnya untuk menghindari duplikasi).

➤ Kolaborasi/ Kerja Sama

Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan NGO secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan NGO-Pemerintah, yang juga melibatkan donor asing, didasarkan pada model interaksi ini. NGO dan Pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis.

Bentuk kerja sama adhoc sering diawali oleh NGO, meskipun dalam beberapa kasus departemen atau agen

pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Akan tetapi menurut Sandberg (dalam Suharko, 2005:45), kebijakan sistematis yang mendukung kerja sama dengan NGO masih jarang terjadi. Lima model ideal dari pola organisasional kerja sama NGO-Pemerintah: pertemuan terjadwal secara teratur namun tidak dilembagakan secara formal, satu kantor di pihak negara, pengkoordinasian hubungan NGO-Negara di masing-masing kementerian, koordinasi di tingkat pemerintah lokal dan terdesentralisasi, dan pengaturan institusional multifokus dan berjenjang untuk hubungan NGO-Negara.

➤ Kooptasi

Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas NGO, dan biasanya dilakukan oleh suatu negara agen pengawasan. Dalam konteks ini, NGO menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah di mana aspek finansial, organisasional dan kebijakan selalu di kontrol pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk NGO sendiri, yakni melalui pembentukan GONGOs (*Government-organized NGOs*) atau QUANGOs (*Quasi-non-governmental organizations*). Pemerintah juga dapat membentuk organisasi payung yang dibentuk NGO, atau dapat mengkooptasi organisasi payung yang dibentuk NGO sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi, tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur aktivitas NGO.

➤ Pembubaran

Jika NGO dianggap sebagai ancaman politik terhadap otoritasnya, pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif NGO. Menurut Bratton (dalam Suharko, 2005: 47), Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk represi untuk menindas kebebasan NGO dalam bertindak, seperti membatasi aktivitas NGO tertentu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional,

melakukan reorganisasi atas struktur manajemen internal NGO, dan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas NGO seperti penculikan, teror, dan memenjarakan aktivis. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu NGO. Akan tetapi, penolakan terhadap aktivitas NGO tidak selalu merupakan kebijakan pemerintah. Tindakan itu seringkali hanya dilakukan oleh lembaga atau departemen pemerintah tertentu.

Ruang Politik Untuk Hubungan NGO Dengan Pemerintah

Kegiatan-kegiatan NGO tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi berada di dalam konteks atau ruang yang tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh interaksi antara pemerintahan dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:35), ruang politik (*political space*) tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dan terus bertambah di mana di dalamnya para aktor harus berjuang untuk meraih tujuan dan membangun visi mereka tentang pembangunan.

Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah diantara dua faktor atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO-Pemerintah. NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO.

Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:36), ada 4 (empat) dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Masing-masing dimensi merupakan sumber

ketegangan dinamis antara NGO-Pemerintah, karena masing-masing pihak umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing.

Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah/negara ketika berhadapan dengan NGO. Adapun empat dimensi orientasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Dimensi Hubungan NGO dengan Pemerintah

Dimensi Ruang Politik	Strategi NGO <i>vis a vis</i> Pemerintah/Negara	Strategi Pemerintah/Negara <i>vis-a vis</i> NGO
Orientasi Isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik dan mengajukan alternatif kebijakan	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, dan memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan NGO, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi NGO, mengatur kegiatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kebijakan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan	Membantu kebijakan, dialog, mengatur

	kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan	akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijakan.
--	--	---

Sumber: Gaffar 2006: 216

Tabel di atas menggambarkan tentang empat dimensi yang dapat mempengaruhi hubungan politik *civil society* dengan pemerintah. Dimensi orientasi isu diartikan NGO mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik dan mengajukan alternatif kebijakan. Dimensi finansial menjelaskan tentang langkah-langkah NGO dalam memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah.

Dimensi kebijakan artinya dalam melaksanakan peran sebagai agen penyeimbang kekuasaan pemerintahan NGO senantiasa mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan. Sementara pada dimensi organisasional NGO berupaya menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan.

Perkembangan LSM Dalam Proses Demokrasi di Indonesia

Dinamika perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia lahir seiring dengan lahirnya orde baru awal tahun 1970-an. Pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokrasi yang ditandai dengan penguatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam transformasi pembangunan. Selama lima belas tahun terakhir terdapat lebih dari 10.000 LSM yang bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik (Praja, 2009:1).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau Organisasi non Pemerintah (Ornop) atau organisasi masyarakat sipil (*Civil society Organizations*) dalam dekade terakhir ini, di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah maupun keragaman peran. Ribuan Organisasi Masyarakat Sipil khususnya LSM, bermunculan di berbagai daerah. Mereka melakukan berbagai peran melalui berbagai program dan aktifitas. Pesatnya pertumbuhan LSM tersebut didorong oleh jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi, tumbangnya kekuasaan Soeharto yang totaliter kemudian diikuti dengan tumbuhnya era baru, transisi menuju demokrasi (Tim studi banding LSM, 2005:3).

Era ini membawa perubahan-perubahan penting terhadap tatanan kehidupan sosial politik yang salah satunya berdampak pada pertumbuhan, kesuksesan dalam mencapai program, dan kehidupan LSM itu sendiri. Di satu sisi pesatnya pertumbuhan LSM ini dapat dipandang sebagai bangkitnya masyarakat sipil, dimana kebebasankebebasan dasar warga negara seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat kembali dipulihkan. Namun disisi lain kebebasan tersebut juga dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mendirikan LSM yang dilandasi dengan motif mencari keuntungan semata dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pihak lain.

Hal tersebut di atas dapat berdampak buruk bagi LSM, antara lain berupa timbulnya pandangan negatif atau menurunnya kepercayaan publik terhadap LSM sehingga merugikan citra dan keberadaan LSM secara keseluruhan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini sorotan tajampun banyak bermunculan ditujukan kepada LSM, diantaranya berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, legitimasi, serta tatakelola (*Governance*) LSM3 (Tim studi banding LSM, 2005:4).

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini membuat banyak LSM meninggalkan strategi konfrontatif

dengan pemerintah, mereka bahkan berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia (Praja, 2009:14). LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas di kalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat.

Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara. Sebagai sosial terorganisir (*Organized Sosial Movement*), peran LSM di Indonesia dimulai pada era 70-an. Menurut Afan Gaffar, LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan demokrasi melalui peranannya dalam pemberdayaan *Civil Society* yang dilakukan melalui aktifitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran (Faqih, 1996:4).

Menurut Asrinaldi, dengan adanya kebebasan politik dan sipil tersebut, individu atau kelompok (masyarakat) berusaha untuk melembagakan hak sipil dan hak politiknya ke dalam suatu institusi kekuatan politik yang merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi di masyarakat. Sementara itu, kekuatan politik diartikan sebagai suatu institusi formal maupun informal dalam sistem politik yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dan menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya (Asrinaldi, 2014:28). Dengan kata lain, kekuatan politik selalu memiliki kecendrungan untuk terlibat secara politik dalam sistem politik. Oleh karena itu intuisi kekuatan politik sangat diperlukan sebagai kekuatan pengimbang (*balancing power*) dalam mencapai sistem demokrasi yang ideal demi kepentingan bersama dalam sebuah negara.

Civil Society sendiri adalah sebuah istilah yang mempunyai

sejarah yang amat panjang. Cicero, seorang filsuf Yunani purba menurut ilmuan Manfred Riedel adalah orang yang pertama menggunakan kata *Societes civilis* dalam filsafat politiknya. Istilah yang digunakannya ini memiliki persamaan dengan pengertian negara, yakni sebuah kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Istilah ini berlaku hingga abad ke-18 dan kemudian pengertian itu bergeser. Istilah barunya merujuk kepada kehidupan sosial yang terorganisir, yang bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*Self supporting*) (Rohman, 2009:65). Dan juga dicirikan dengan adanya kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan keterikatannya dengan norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Wujudnya bisa terlihat dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang dibuat di luar pemerintah. Kekuatan politik yang menjadi kekuatan pengimbang dalam sebuah negara, salah satunya adalah organisasi masyarakat sipil.

Kemandulan partai politik (parpol) akibat fokus aktivitas mereka yang terlalu berat dalam usaha memburu dan mendapatkan kekuasaan politik sehingga mengakibatkan partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya, maka dari itu diperlukan sebuah kekuatan alternatif dalam konteks kekuatan masyarakat yang sudah terlanjur menjadi kekuatan alternatif yang mampu menentukan strategi yang efektif untuk mendorong partai politik, parlemen, dan lembaga-lembaga negara kembali kepada fungsi yang semestinya. Dengan demikian, fungsi kekuatan alternatif kian dipertegas melalui intensitas sasaran yang lebih terarah dan tajam. Walaupun kekuatan alternatif harus berpolitik, bergerak bersama mahasiswa dan masyarakat, paling jauh kedudukan kekuatan mereka hanya sebatas sebagai pressure group (Rochman, 2002:135).

Individu, kelompok atau golongan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik (orba) merupakan kekuatan yang amat potensial untuk memainkan peran dalam

proses reformasi bangsa. Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan dengan “individu” ialah para tokoh dan warga masyarakat yang mampu bertindak sebagai pembaharu, sedangkan “kelompok” atau “golongan” mengacu pada sekumpulan orang yang didasarkan pada kesamaan agama, suku, ras, status intelektual, identitas (seperti mahasiswa dan pemuda), serta pengelompokan sosial lainnya. Adapun “organisasi kemasyarakatan” dalam konteks ini dibedakan antara yang tradisional dan yang modern. Masuk ke dalam kategori pertama, misalnya: Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sedangkan dalam kategori kedua adalah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM memiliki tempat berbeda dalam mengisi perannya sebagai salah satu komponen kekuatan dalam masyarakat sipil. LSM memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu menyangkut proses berjalannya sistem demokrasi dalam sebuah negara, melakukan penelitian dan penyuluhan terhadap masyarakat secara luas, memberikan pendidikan politik, agar masyarakat dapat terbuka dan ikut berpartisipasi baik dalam pembangunan negara. Selanjutnya LSM memiliki peran untuk memobilisasi massa demi menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta akademisi yang juga merupakan komponen dari masyarakat sipil berperan sebagai gerbong dari dunia pendidikan, menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian secara teoritis dan praktis. Dan juga tidak lepas peran penting jurnalis dalam memberikan informasi yang jelas terhadap publik.

Banyaknya forum yang dibentuk untuk membahas isu-isu yang menyangkut penyelenggara negara serta lahirnya organisasi-organisasi yang melakukan pengawasan, tekanan dan advokasi terhadap pemerintah dan DPR. Isu yang dipilih pun menyentuh berbagai segi, seperti korupsi, kinerja pemerintah daerah, dan pengelolaan sumber daya lokal. Meskipun masih bersifat bias urban, forum dan organisasi semacam ini bertebaran

di seluruh wilayah Indonesia. Mereka telah membawa misi alternatif untuk ikut memperbaiki penyelenggaraan negara (Rochman, 2002:181).

d) Rangkuman

- a. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
- b. Menurut Indonesia *Center for Civic Education* (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah atau organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh Negara dan juga menjadi juga menjadi perwujudan dari *civil society* (Tim ICCE, 2000:158).
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO memiliki peran dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Gaffar, 2006:203) mengidentifikasi 3 (tiga) jenis peran yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu: (a) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, (b) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan, dan (c) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Selain peran yang dimiliki, Lembaga Swadaya Masyarakat juga terdiri dari beberapa jenis (Kerton, 2002:5) yang antara lain; (a) Organisasi Sukarela (OS) yang melakukan misi sosial, ter dorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama, (b) Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai usaha tanpa-laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum, (c) Organisasi Rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota, dan

cukup mandiri, dan (d) Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

- e. Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah diantara dua faktor atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO-Pemerintah.
- f. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:36), ada 4 (empat) dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan.
- g. Dinamika perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia lahir seiring dengan lahirnya orde baru awal tahun 1970-an. Pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokrasi yang ditandai dengan penguatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam transformasi pembangunan. Selama lima belas tahun terakhir terdapat lebih dari 10.000 LSM yang bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik (Praja, 2009:1).

e) Latihan

- 1. Jelaskan Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)! Apakah LSM termasuk dalam salah satu kategori dari *civil society*!
- 2. Bagaimana relasi politik diantara LSM dan Pemerintah di Indonesia? Berikan contoh dan jelaskan!

f) Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan kembali pengertian, peran, fungsi, dan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses demokrasi di

Indonesia.

g) Umpang Balik

2. Kegiatan Pembelajaran 2

- a) Pers Dalam Proses Demokrasi di Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang Pers dalam proses demokrasi di Indonesia.

c) Uraian Contoh dan Ilustrasi

Pengertian Pers

Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yang sama dengan bahasa inggris yaitu “*press*” yang mempunyai arti menekan atau mengepres. Pengertian press atau pers mengacu sebagai pengertian komunikasi yang dilakukan dengan barang cetakan, namun seiring berjalannya waktu pers kemudian digunakan pada semua aktivitas jurnalistik yang berkaitan dengan berita media cetak maupun elektronik.

Pengertian pers dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas pers merupakan media elektronik, media tercetak, ataupun media *online* yang menyampaikan laporan dalam bentuk pendapat, usulan, gambar dan fakta kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan yang dimaksud tersebut merupakan laporan yang diberikan setelah melalui proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Sedangkan dalam arti kata sempit, pers merupakan media tercetak seperti majalah, buletin, surat kabar harian atau surat kabar mingguan, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi yang mengandalkan penglihatan dan pendengaran sebagai basis interaktifnya (Wahidin, 2012:12).

Pengertian pers sebagaimana disebut dalam *Black's Law Dictionary* adalah "*The Aggregate of Publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase "liberty of the press" freedom of the press is guaranteed by the first amendment*" (Wahidin, 2006:34). Keberadaan pers dalam istilah ini secara umum yaitu agar menjadi media penekan atau penghimpit dalam masyarakat dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers pada masa orde lama menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku semenjak zaman reformasi sampai saat ini, pengertian pers dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu "pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan sebagala jenis saluran yang tersedia".

Seiring berjalananya waktu pers tidak hanya menggunakan media cetak dan media elektronik, namun juga menggunakan media online. Media online merupakan media baru dengan cara penyampaian yang berbeda dengan media cetak dan elektronik. Media *online* membutuhkan perangkat komputer dan koneksi internet untuk menerima dan mencari informasi, maka media online bisa diartikan sebagai situs berita yang dipublikasikan lewat internet. Menurut Ashadi Siregar menarangkan bahwa media online dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah

bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), radio *online*, TV *online*, pers *online*, mail *online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya (Kurniawan, 2005:20).

Begini pentingnya pers dalam satu negara maka Pers sering juga disebut sebagai “*the fourth estate*” (pilar keempat) setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari Pasal 28 Undangundang Dasar 1945. Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan yang dimakasud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi (Wahidin, 2011:35).

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis yang menyampaikan berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya (Pius, 2010:498). Selanjutnya defenisi pers menurut beberapa ahli (Wikipedia, 2013) dapat dilihat sebagai berikut:

- Rifhi Siddiq, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yangmempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian

integral dari masyarakat.

- R Eep Saefulloh Fatah, Pers merupakan pilar keempat bagidemokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
- Oemar Seno Adji, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.
- Kustadi Suhandang, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
- Wilbur Schramm, Dalam bukunya *Four Theories of the Press* yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu *the authoritarian*, *the libertarian*, *the social responsibility* dan *the soviet communist theory*. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah masyarakat.
- McLuhan, Pers sebagai *the extended man* (media adalah ekstensi manusia), yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan.
- Raden Mas Djokomono, Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.

Kebebasan pers pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan masyarakat diruang publik, kebebasan pers dapat diartikan sebagai hak warga dalam mengetahui masalah publik dan hak warga untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Kebebasan pers merupakan mata rantai yang tidak terputus dari proses demokrasi. Negara dengan sistem demokrasi merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM.

Sejarah muncul dan berkembangnya hak asasi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dari suatu bangsa serta disesuaikan dengan berbagai aset sosial yang ada dalam suatu negara. Sejatinya, aplikasi dari prinsip-prinsip HAM, kendatipun secara universal dinyatakan sama akan tetapi pada penerapannya cenderung tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Adapun yang menjadi dasar dari perbedaanya, satu hal bahwa HAM mengakomodasi kebebasan (Wahidin, 2012:22).

- Menurut M. Solly Lubis (1984:4) “kebebasan adalah syarat untuk mencapai hak. Dalam hal ini, untuk mewujudkan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi harus dilaksanakan dengan asas-asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan”. Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara demokrasi, hal ini dijamin dalam piagam HAM PBB (*universal Declaration Of Human Rights*) article 19 yang menyatakan bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expresion; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frotiers*”. Artinya bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari menerima dan meberikan informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa

memandang batas-batas wilayah". Hak asasi Manusia diatur juga dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang isinya sebagai berikut Pasal 20 yaitu "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Peran dan Fungsi Pers

Pada perkembangannya Pers mempunyai peran sebagai penghubung kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Peran Pers lebih menunjuk pada peran yang "membangun". Untuk memberi informasi, mendidik dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Di samping itu Pers mempunyai peran penting yaitu sebagai alat perubahan sosial dan pembaruan masyarakat. Pers dituntut memberikan kontribusi dalam pembentukkan watak masyarakat, dan mampu untuk merubah keadaan masyarakat kearah pembaruan yang lebih baik (Wikrama Iryans Abidin, 2005: 5).

Media dapat berperan apabila media digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkan dalam program pembangunan. Peranan tersebut dalam memperluas pendidikan publik dan meningkatkan inovasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Dalam hal ini media digunakan dalam kampanye untuk perubahan sosial (Denis Mc Quail, 1991: 97). Peranan Pers selain melakukan pemberitaan yang obyektif kepada masyarakat, juga berperan dalam pembentukan pendapat umum dan sebagai "agen perubahan". Pers mampu menciptakan suasana membangun yaitu dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

F. Rachmadi (1990: 17) menjelaskan Pers sebagai agen perubahan sosial memiliki berbagi tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang sebagai salah satu tempat terjadinya

pembaruan dan perubahan sosial. Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi:

- Pers dapat memperluas pandangan cakrawala.
- Pers dapat memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang dituliskannya.
- Pers mampu menumbuhkan aspirasi, dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.

Pers atau surat kabar dapat berperan dalam penyampaian kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah melalui Pers dapat memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat pun dapat menggunakan Pers sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Ia berperan sebagai salah satu penghubung yang kreatif antara pemerintah dan masyarakat.

Pers Indonesia juga mempunyai peranan sebagai alat perjuangan bangsa sejak zaman pra kemerdekaan, bahkan sejak masa pergerakan nasional yang mendorong tumbuhnya kesadaran nasional. Pada masa kemerdekaan Pers dituntut sebagai *social controls* yang aktif (Eduard Depari, 1995: 30). Eduard Depari dan Colin Mac Andrew (1995: 44) mengungkapkan pendapat Wilbur Schamm tentang peran masa media dalam pembangunan nasional. Menurutnya secara umum media tidak dapat lepas dari masalah sosial politik.

Secara umum peranan media masa antara lain memperluas cakrawala, memusatkan perhatian, menumbuhkan aspirasi, menciptakan suasana membangun, mengembangkan dialog tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah politik, mengenal norma-norma sosial, sebagai pendidik, mengubah sifat lemah menjadi kuat dan menumbuhkan selera masyarakat (Eduard Depari dan Colin Mac Andrew, 1995: 48).

Selain itu, pers menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai

saluran komunikasi pemerintah dan saluran komunikasi masyarakat dalam melakukan fungsi kritik. Sebagai saluran komunikasi pemerintah kepada masyarakat, Pers menyebarkan informasi mengenai tindakan dan kebijakan pemerintah, membentuk pendapat umum yang sehat, serta membiarkan dorongan masyarakat ikut berpartisipasi dalam program-program nasional dan melakukan fungsi kritik yang konstruktif terhadap tindakan-tindakan pemerintah dan aparatur pemerintah, serta mencerminkan pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam masyarakat (F. Rachmadi, 1990: 2).

Rachmadi (1990: 20) menjelaskan Pers dalam perkembangannya memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan. Penyebaran informasi atau pemberitaan kepada khalayak pembaca/masyarakat yang merupakan fungsi utama dari Pers. Fungsi utama Pers juga memiliki fungsi-fungsi lain didalam masyarakat, yaitu fungsi mendidik, fungsi menghubungkan, fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum dan fungsi kontrol sosial. Penjelasan tentang fungsi Pers tersebut adalah sebagai berikut:

➤ **Fungsi Mendidik**

Fungsi media sebagai sarana mendidik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut ditentukan adanya bantuan yang disampingkan oleh media dalam menunjang pendidikan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menonjolkan fungsi mendidik sebagai fungsi yang penting walaupun dalam teori tentang Pers bukan merupakan fungsi utama, tetapi hanya sebagai tambahan.

➤ **Fungsi Menghubungkan**

Media menyelenggrakan suatu hubungan sosial (*social contact*) antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.

➤ **Fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum**

Media tidak hanya menyajikan berita atau informasi tetapi juga memuat pikiran-pikiran, pandangan atau pendapat

(*opinion*) orang, sehingga mempunyai dua sifat sebagai *organ of public information and opinion*. Media akan mengajak pembacanya berpikir sesuai pola yang dinginkan.

➤ **Fungsi Kontrol Sosial**

Kontrol sosial merupakan salah satu fungsi Pers yang paling penting, di negara yang menerapkan sistem pemerintahan yangdemokratis. Kekuatan utama dalam media masa sebagai kontrol sosial terletak pada fungsinya sebagai pengawas lingkungan. Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh Pers sebagian besar ditunjukan kepada pemerintah dan aparaturnya.

Pemberitaan Pers pada umumnya adalah penyampaian informasi,namun disela-sela itu terdapat kritikan-kritikan yang disampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang ditujukan pada kekuasaan yang dianggap mengesampingkan keadilan bagi pihak- pihak tertentu yang dirugikan dengan adanya penyalah gunaan kewenangan yang didudukinya. Suatu pemberitaan disebut mengandung sebuah kritik apabila isi pemberitaan yang dimuat/dipaparkan tersebut menyebutkan suatu opini yang mengungkapkan suatu *das sollen* yang berbeda dengan *das sein* (Denis Mc Quail, 1991: 89).

Ciri-ciri utama kritik adalah adanya pemberian perhatian kepada penanganan dan pembagian kekuasaan yang tidak adil dalam masyarakat serta pemanfaatan pandangan kelas tertindas, bukannya pandangan pelaksana media atau masyarakat pada umumnya (Denis Mc Quail, 1991: 104). Perkembangan Pers pada Era Reformasi tidak terbatas pada upaya mengurangi kejelekan masyarakat, tetapi juga negara. Munculnya pemerintahan yang bobrok dan otoriter adanya pemikiran anti *individualisme* dalam Pers era reformasi diuraikan sebagai salah satu fungsi Pers.

Fungsi kontrol dan pengawasan Pers digunakan untuk mengurangi kejelekan masyarakat dan negara dalam menciptakan masyarakat dan negara yang sehat dalam kehidupan

sosial dan ketatanegaraan Indonesia. Formulasi tentang pentingnya kemerdekaan Pers untuk memerangi keboboran masyarakat dan negara kedalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 ternyata tenggelam ditengahkuatnya arus pemikiran anti *Individualisme-Liberalisme* yang menolaknya. Pengaturan tentang kemerdekaan Pers tidak terdapat dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Pasal yang diharapkan dapat menjamin dan sekaligus melindungi praktik kemerdekaan Pers untuk mencegah lahirnya pemerintah yang bobrok dan otoriter ini muncul dengan Pasal *karet* dan *banci* karena kemerdekaan Pers tidak diatur secara eksplisit. Masalah praktik kemerdekaan Pers diserahkan kepada Undang-undang yang dibuat sesuai dengan selera dan kepentingan penguasa (Wikrama Abidin, 2005: 15).

a. Perkembangan Pers di Indonesia

Disamping Indonesia sebagai negara hukum juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Kehidupan pers sebagai manifestasi kebebasan untuk memperoleh informasi bagi warga negara memperoleh tempat yang layak dalam sistem kemasyarakatan. Perkembangan pers di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kerangka politik di tanah air (Wahidin, 2006:88) Maka perkembangan pers di Indonesia dapat dilihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini.

1) Masa Perjuangan

Pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Masa penjajahan Belanda pertengahan abad ke 18, Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia meskipun penerbitnya terdiri dari orang Belanda sendiri. Pers nasional pada waktu itu jelas membedakan dirinya dengan pers Belanda, dimana pers penjajah yang dipergunakan oleh Belanda saat itu adalah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan (Wahidin, 2006:89). Sedangkan cikal bakal pers

nasional yaitu sebagai satu media informasi dan komunikasi yang menjadi satu kesatuan dengan pergerakan nasional. Pers dipergunakan oleh pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Surat kabar pertama di Indonesia adalah *Bataviase Nouvelles* (Agustus 1744 -Juni 1746), disusul kemudian *Bataviasche Courant* (1817), *Bataviasche Advertentieblad* (1827).

Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867). Perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan mengerakkan kesadaran bangsa (Surjomihardjo, 2002:25).

Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub studi, lembaga sosial, badan kebudayaan, bahkan gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo bulan Mei 1908, pers merupakan saranakomunikasi utama menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada gilirannya proses tersebut mengukuhkan gerakan mencapai kemerdekaan. Lahirlah surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Ra'jat Merdika, Fikiran Ra'jat, Daulat Ra'jat, Soeara Oemoem serta organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (1933) adalah tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan wartawan dan pers

nasional sebagai bagian perjuangan nasional secara keseluruhan (Surjomihardjo, 2002:76).

2) Masa Kemerdekaan

Hal ini terus berlangsung sampai dengan diproklamasikannya kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai revolusi di berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam hal ini tentunya revolusi dalam bidang pers dalam arti pers menemukan kebebasannya setelah sekian lama dibelenggu dan dibatasi oleh pemerintah Belanda. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, ada 4 (empat) hal yang digarisbawahi sebagai fenomena umum kehidupan pers pada masa itu. Disadari bahwa semua institusi sosial memang mempunyai masa tersendiri pada jamannya. Yakni yang dapat dipelajari dari perkembangan tersebut adalah:

- Dari awal masa penjajahan Hindia Belanda Nampak bahwa peran pemerintah jajahan begitu dominan dalam bidang pers.
- Pers dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penguasa dengan tidak memberikan keleluasaan bergerak baik karena keterbatasan fasilitas maupun keterbatasan kemampuan pengelola. Pers cenderung berhadapan dengan penguasa.
- Tingkat intelektualitas masyarakat berpengaruh besar terhadap hidup dan berkembangnya penerbitan sehingga akhirnya hanya penerbitan yang sejalan pemerintah saja yang memungkinkan bisa hidup.
- Pergesekan kepentingan yang tampat pada saat itu adalah antara kepentingan penguasa dan pengelola pers dan belum muncul ke permukaanadanya konflik akibat sajian pers yang merugikan masyarakat. Paling tidak hal ini menjadi indicator bahwa pada masa itu pers berpihak kepada masyarakat dan antikolaborasi kepada penjajah dan memilih untuk mengambil jalan berseberangan dengan penguasa.

3) Masa Orde Baru

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI. Kehancuran G30S/ PKI merupakan awal “pembenahan” kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah (Wahidin, 2006:92). Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan men-gundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter (Hamad, 2004:63).

Pada era Soeharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak mempunyai kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah Orde Baru . Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde baru. Tanggung jawab pers bukan pada masyarakat melainkan penguasa Orde Baru. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempatdemokrasi.

Satu hal lainnya adalah struktur organisasi media itu

sendiri sebagai corong kepentingan pemilik modal dan kelompok usahanya mau tidak mau membuat media harus tunduk pada aturan main perusahaan yang mencerminkan ketergantungan antara pemiliknya dan pemerintah. Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas akan mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebebasannya dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers sepanjang orde baru.

4) Era Reformasi

Pada tahun 1998, lahir gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan perundangan-perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, secara normatif, persfilosofi adalah kebebasan pers yang professional (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum) sebagaimana yang disebut dalam konsideran. Filosofi yang demikian mengantikan sebelumnya yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab (Wahidin, 2006:98).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, sedangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu antara lain terletak pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 (Hamad, 2004:66). Kebebasan pers yang professional memahami kebebasan pers sebagai satu konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dibatasi.

Sementara pers yang bebas dan bertanggungjawab

memandang kebebasan sebagai sesuatu yang harus diatur (dibatasi) dengan asumsi untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pada dalam hal Hak Asasi Manusia siapa pun termasuk negara tidak mempunyai kewenangan untuk membatasinya (Wahidin, 2006:98). Keadaan pers Indonesia dimasa era reformasi saat ini adalah gambaran dari *a liberal-pluralis or marked model*, dimana isu-isu yang diliput oleh pers semakin beragam (Hutagalung, 2016:67). Banyak bermunculan penerbitan baru di Indonesia baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari politik, ekonomi sampai yang berbau pornografi. Kualitas penerbitannya pun beragam.

d) Rangkuman

- a. Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yang sama dengan bahasa inggris yaitu “*press*” yang mempunyai arti menekan atau mengepres.
- b. Pengertian *press* atau pers mengacu sebagai pengertian komunikasi yang dilakukan dengan barang cetakan, namun seiring berjalanya waktu pers kemudian digunakan pada semua aktivitas jurnalistik yang berkaitan dengan berita media cetak maupun elektronik.
- c. Kebebasan pers pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan masyarakat diruang publik, kebebasan pers dapat diartikan sebagai hak warga dalam mengetahui masalah publik dan hak warga untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya.
- d. Menurut M. Solly Lubis (1984:4) “kebebasan adalah syarat untuk mencapai hak.
- e. Pada perkembangannya Pers mempunyai peran sebagai penghubung kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Peran Pers lebih menunjuk pada peran yang “membangun”. Untuk memberi informasi, mendidik dan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. Pers menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai saluran

- komunikasi pemerintah dan saluran komunikasi masyarakat dalam melakukan fungsi kritik.
- g. Perkembangan pers di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari kerangka politik di tanah air (Wahidin, 2006:88) Maka perkembangan pers di Indonesia dapat dilihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini.

e) Latihan atau Lembar Kerja Praktek

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* modul terkait pengertian, peran, fungsi dan perkembangan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Pers di Indonesia.
2. Hasil *review* bacaan modul dikembangkan dalam bentuk paparan dan essay secara berkelompok oleh mahasiswa.

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman terhadap hasil bacaan dan *review* terhadap modul lima ini.
2. Kemampuan mahasiswa menjelaskan kembali pengertian, peran, fungsi, dan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pers dalam proses demokrasi di Indonesia..

g) Umpulan

3. Penutup

a) Rangkuman

Baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pers merupakan bagian dari masyarakat madani yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari

kegiatannya. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sedangkan Pers merupakan pilar keempat bagidemokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menjadi dasar bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pers untuk terus berkembang dan melaksanakan aktivitasnya di Indonesia. Baik LSM maupun Pers hari berubah menjadi kekuatan besar yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat, menjadi penyeimbang bagi pemerintah, serta menjadi penjembatan antara keduanya.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

1. Relasi antara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pemerintah Indonesia bisa beragam tergantung pada konteksnya. Di satu sisi, pemerintah dan LSM dapat memiliki hubungan yang kolaboratif dan saling mendukung dalam upaya membangun dan memperbaiki masyarakat. Di sisi lain, mereka juga bisa memiliki hubungan yang tegang atau konflik, terutama jika LSM mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi relasi LSM dengan pemerintah Indonesia:
 - Kerjasama dalam Program Pembangunan: Pemerintah dan LSM sering bekerja sama dalam program pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dapat mengakses pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh LSM untuk membantu dalam pelaksanaan program-program ini.
 - Advokasi dan Pengawasan: LSM sering berperan sebagai pengawas (watchdog) terhadap pemerintah, memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Kadang-kadang, ini bisa

menyebabkan konflik jika pemerintah tidak menyukai kritik atau pengungkapan LSM terhadap kekurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

- Penyedia Data dan Analisis: LSM sering melakukan riset, survei, dan analisis atas berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi yang diberikan oleh LSM dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif.
 - Kerja Sama Kapasitas: Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan LSM dalam membangun kapasitas masyarakat, melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan di tingkat lokal.
 - Konflik dan Ketegangan: Meskipun banyak LSM yang berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah, ada juga kasus di mana hubungan antara LSM dan pemerintah menjadi tegang, terutama jika LSM mengekspos korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan yang merugikan masyarakat.
 - Secara keseluruhan, relasi antara LSM dan pemerintah Indonesia adalah dinamis dan bervariasi tergantung pada konteks dan kepentingan masing-masing pihak. Meskipun terdapat konflik atau perbedaan pendapat, hubungan yang konstruktif antara LSM dan pemerintah dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Relasi antara pers dan pemerintah di Indonesia juga memiliki dinamika yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa aspek yang mempengaruhi hubungan antara pers dan pemerintah:
- Kebebasan Pers: Indonesia secara konstitusional menjamin kebebasan pers. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers sering kali dihadapkan pada tantangan, baik dalam bentuk intimidasi, penindasan, atau pembatasan hukum yang dirasakan oleh wartawan dan media.
 - Kerjasama dalam Penyiaran Informasi: Pemerintah sering kali menggunakan media massa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah, kebijakan, dan pencapaian. Kerjasama antara pemerintah dan media bisa berlangsung dalam bentuk konferensi pers, rilis

pers, atau wawancara dengan pejabat pemerintah.

- Pengawasan dan Pengkritik: Pers memiliki peran penting sebagai pengawas (watchdog) terhadap pemerintah. Media seringkali mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
- Pengaruh Politik dalam Media: Di Indonesia, terdapat kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan segelintir pemilik atau kelompok tertentu, yang dalam beberapa kasus memiliki afiliasi politik. Hal ini dapat memengaruhi independensi dan objektivitas media dalam melaporkan berita atau mengkritik pemerintah.
- Tantangan Legal dan Intimidasi: Wartawan dan media sering menghadapi ancaman, intimidasi, atau tindakan hukum dari pemerintah atau pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk menekan kebebasan pers atau menghentikan laporan yang kritis terhadap pemerintah.
- Etika dan Standar Jurnalistik: Hubungan antara pers dan pemerintah juga dipengaruhi oleh etika dan standar jurnalistik. Wartawan diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, objektivitas, dan kejujuran dalam melaporkan berita.
- Secara keseluruhan, relasi antara pers dan pemerintah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebebasan pers, keterbukaan pemerintah, independensi media, serta norma-norma dan nilai-nilai dalam profesi jurnalistik. Meskipun terdapat tantangan dan ketegangan, pers yang independen dan kuat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, mendorong transparansi, dan memperkuat demokrasi.

c) Daftar Istilah

<i>Balancing Power</i>	Kekuatan penyeimbang
<i>Civil Society</i>	Masyarakat Sipil
<i>Governance</i>	Tata kelola
<i>LBH</i>	Lembaga Bantuan Hukum
<i>LP3ES</i>	Lembaga Penelitian, Pendidikan,

	dan Penerangan Ekonomi Sosial
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
NGO (<i>NonGovernment Organization</i>)	Organisasi non-Pemerintah
People Movement	Gerakan Rakyat
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

d) Referensi

- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ageng Nata Praja. (2009). *Distorsi peran lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil society di kabupaten Grobogan*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Asrinaldi. (2014). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- David C. Korten. (2002). *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ernest Gellner. (1995). *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hikam. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hutagalung, Inge. (2016). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 2(2), 57.
- Indra Bastian. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Erlangga.
- Irwan Jasa Tarigan. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Social Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mansour Fakih. (1996). *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Meuthia, Ganie-Rochman. (2002). *Peran Organisasi Non- Pemerintah dalam Reformasi Sosial dalam Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Indosia, Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.

- M. Solly Lubis. (1984). *Hak Asasi Menurut UUD 1945, dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Samsul Wahidin. (2006). *Hukum Pers*, cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsul Wahidin. (2012). *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharko, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Surjomihardjo, Abdurachman. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Tim ICCE. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Tim Studi Banding LSM. (2005). *Menjadi LSM yang akuntabel. Belajar dari masyarakat madani filipina*. KPMM. Padang.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahidin, Samsul. (2006). *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wikipedia. (2013). *Media Massa*. Dikutip pada laman website:<http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa>.

MODUL 5

GERAKAN MAHASISWA DAN BURUH

1. Pendahuluan

a) Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai kekuatan politik di Indonesia, maka mahasiswa perlu diperkenalkan dengan gerakan mahasiswa dan buruh sebagai bagian dari *civil society* yang memiliki kekuatan besar dalam mengawal setiap proses politik di Indonesia. Gerakan mahasiswa dalam catatan sejarah bangsa tidak pernah luput dari berbagai momen penting seperti yang terjadi pada tahun 1908 yakni berdirinya organisasi Budi Utomo, kemudian tahun 1928 deklarasi Sumpah Pemuda, tahun 1965 gerakan menentang aksi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, tahun 1999 Gerakan Reformasi. Seperti halnya gerakan mahasiswa, gerakan buruh mulai massif sejak kemerdekaan dengan dasar kesamaan nasib dan penindasan yang dialami dalam aktivitas kerja. Buruh kemudian bertransformasi menjadi kekuatan-kekuatan besar baik dalam bentuk komunitas, serikat, maupun partai politik. Baik gerakan mahasiswa maupun keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama menjadi kontrol dan penyeimbang bagi proses politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu maka pengetahuan tentang gerakan mahasiswa dan buruh menjadi penting bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari Modul lima (5) ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik;
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia;
7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada;
8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia

c) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari Modul 5 ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai gerakan mahasiswa, buruh, serta perkembangannya dalam proses politik di Indonesia.

d) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

e) Kegunaan Modul 5

Kegunaan atau manfaat dari Modul lima ini adalah membantu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang gerakan mahasiswa dan buruh, serta perkembangannya dalam politik Indonesia.

f) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Gerakan Mahasiswa dan perkembangannya di Indonesia yang meliputi, Konsep gerakan mahasiswa, Peran dan fungsi gerakan mahasiswa, Prinsip gerakan mahasiswa, dan Perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia, dan
2. Gerakan Buruh dan keterlibatannya dalam politik di

Indonesia yang meliputi, Pengertian buruh, Perkembangan gerakan buruh di Indonesia, dan Afiliasi buruh dalam politik pasca reformasi.

1) Kegiatan Pembelajaran 1

a) Gerakan Mahasiswa dan Proses Politik di Indonesia

b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang Konsep gerakan mahasiswa, Peran dan fungsi gerakan mahasiswa, Prinsip gerakan mahasiswa, dan Perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia.

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Konsep Gerakan Mahasiswa

Definisi biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan atau sering disebut beban perusahaan. Biaya merupakan bagian atau unsur dari harga pokok dan merupakan unsur yang paling pokok dalam akuntansi biaya. Standar Akuntasi Keuangan (1999), definisi biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktivitas atau kejadian yang mngakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal

Gerakan menurut Basrowi dan Sukidin dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif menyatakan bahwa gerakan merupakan media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidak puasan sosialnya kepada penguasa. Disamping itu menurutnya gerakan muncul dari satu golongan yang bersifat terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas, berjangkauan panjang serta mempunyai ideologi baru sehingga dapat ikut serta menciptakan sebuah masyarakat yang maju (Basrowi & Sukidin. 2003:17). Sedangkan pengertian Gerakan Mahasiswa menurut Andik Matulessy (2005:25)

menyatakan gerakan mahasiswa adalah perilaku kolktif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik.

Pengertian Gerakan Mahasiswa menurut Andik Matulessy menyatakan gerakan mahasiswa adalah perilaku kolktif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik (Matulessy, 2005). Hal ini sejalan seperti apa yang diungkapkan oleh Nasikun bahwa;

”Suatu sistem sosial memang seringkali mampu melakukan penyesuaian-penesuaian terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, dan oleh karenanya mampu mengikuti perubahan-perubahan tersebut tanpa mengalami disintegrasi sosial. Akan tetapi, sebaliknya suatu sistem sosial dapat juga bersikap menolak perubahan-perubahan yang datang dari luar, baik dengan cara tetap memelihara statu quo maupun dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang bersifat reaksioner. Dan suatu reaksioner untuk melakukan perubahan terhadap status sosial tersebut selalu melibatkan mahasiswa dan masyarakat” (Nasikun, 2000:15).

Idealisme mahasiswa itu muncul karena mereka berada di dalam kelompok dan ketika mereka di luar kelompok mereka idealisme itu pun tidak ada. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan dalam bukunya tentang Kisah Perjuangan Reformasi bahwa: ”Di dalam kondisi *collective behaviour* terdapat kesadaran kolektif dimana sentimen dan ide-ide yang tadinya dimiliki oleh sekelompok mahasiswa menyebar dengan cepat sehingga menjadi milik semua mahasiswa. Di dalam *collective behaviour* akan muncul norma yang disebut dengan emergent norm yaitu norma yang harus ditaati oleh orang-orang

yang merasa menjadi bagian dari kelompok mahasiswa. Jika tidak ikut serta dalam arus tersebut akan dinilai sebagai orang yang menyimpang dan akan mendapatkan sanksi. Sanksi diberikan dapat berupa ejekan bahwa mereka adalah pengecut, benci, antek-antek penguasa. Bentuknya bisa secara lisan melalui mikrofon yang diteriakan oleh orator aksi-aksi demo ataupun bingkisan yang berupa pakaian dalam wanita (Soemardjan, 1999:151-152).

Menurut Andik matulessy terdapat sebuah teori yang memicu munculnya gerakan mahasiswa adalah "*Deprivasi kumulatif (Cumulative Deprivation)*", Deprivasi kumulatif cenderung mencakup ketidak puasan dalam masalah ekonomi. Artinya ketika seseorang dalam kondisi ekonomi yang miskin menjadi lebih miskin maka akan terjadi ketidak puasan, yang lama kelamaan akan terakumulasi, sehingga akan lebih mudah mengarahkan individu untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial" (Matulessy, 2005: 75-76).

Hal ini seperti diungkapkan oleh Daliso bahwa ketidak puasan deprivatif akan melahirkan terjadinya kekerasan massal. Teori psikologis maupun teori konflik sama-sama mengakui bahwa semakin besar intensitas ketidak puasan semakin besar dorongan untuk melaksanakan kekerasan (Daliso, 1999: 93-95). Timbulnya gerakan mahasiswa dikarenakan kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, seperti yang diungkapkan oleh Henry A. Landberger bahwa gerakan protes hadir karena adanya suatu reaksi terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor ketidak adilan sosial, ekonomi dan politik dalam sepanjang sejarah melahirkan pemberontakan dan kekerasan massa radikal. Kekerasan masa radikal pada dasarnya merupakan reaksi spontan, kefrustasian dalam kehidupan rakyat. Hal serupa seperti yang diungkapkan Andik Matulessy bahwa, gerakan mahasiswa adalah sebagai bentuk gerakan sosial dan ini selalu dimotori oleh sejumlah mahasiswa dalam jumlah yang besar.

Gerakan Mahasiswa sebagai bentuk gerakan sosial selalu muncul dengan bentuk organisasi tertentu, baik dari tingkatan yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks. Aktifitas mereka pun didasari oleh berbagai alasan dan strategi tertentu yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selain itu gerakan mahasiswa relatif memiliki usia yang lama untuk beraktifitas, paling tidak semasa mereka kuliah dalam waktu 3 sampai dengan 4 tahun. Namun demikian gerakan mahasiswa tidak pernah padam sama sekali, selalu beraktifitas dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi sosial suatu negara (Matulessy, 2005:12-13).

Di banyak negara, mahasiswa merupakan variabel penting yang berperan dalam proses perubahan politik. Gerakan mahasiswa telah memainkan peranan penting menjadi barisan terdepan yang selalu meneriakan tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Di Indonesia, gerakan mahasiswa (terutam pada 1998) terbukti membuka jalan demokrasi. Di dalam setiap gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki ciri khas dari gerakan tersebut.

Adapun ciri khas dari gerakan tersebut, menurut Jayanto (2008) menjelaskan ciri gerakan mahasiswa yaitu:

➤ Bersifat spontanitas

Partisipasi mahasiswa dalam gerakan merupakan respon spontan atas situasi yang tidak sehat, bukan atas ideologi tertentu, melainkan atas nilai-nilai ideal. Namun hal ini bukan berarti tidak ada pendidikan publik di kalangan mahasiswa.

➤ Bercorak nonstruktural

Gerakan mahasiswa tak terkendali oleh suatu organisasi tunggal, termasuk kepemimpinan komando, melainkan bercorak organisasi cair, dengan otonomi masing-masing berbasis kampus sangat besar. Agenda aksi dibicarakan secara terbuka dan diputuskan serta diorganisasikan secara kolektif.

➤ Bukan agenda politik di luar kampus

Gerakan mahasiswa bersifat independen dari kelompok kepentingan tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan ada langkah bersama. Ini bisa terjadi lantaran sifat gerakan mahasiswa itu sendiri yang merupakan reartikulator kepentingan rakyat atau gerakan moral.

➤ Memiliki jaringan luas

Mengingat otonomi masing-masing kampus begitu tinggi, pola gerakan mahasiswa terlatak pada jaringan yang dibinanya. Bentuk jaringan menjadi salah satu ciri dari pengorganisasian gerakan mahasiswa. Jaringan yang terbentuk biasanya luwes sehingga memudahkan untuk bermanuver serta tidak mudah untuk dikooptasi oleh kelompok kepentingan yang bertentangan dengan gerakan moral, termasuk pemerintah (Jayanto, 2008).

Sedangkan menurut Anas Syahrul Alimi di dalam bukunya tentang Solilqui, Pemikiran Filsafat, Agama dan Politik mengatakan: Pada hakekatnya gerakan mahasiswa bersifat anti kekerasan. Kekerasan bukanlah ciri gerakan mahasiswa di belahan bumi manapun. Watak gerakan mahasiswa lebih sebagai gerakan pemikiran kearah perubahan-perubahan yang evolutif menuju perubahan. Artinya yang ditonjolkan oleh gerakan mahasiswa adalah kualitas gagasan perubahan yang dihendaki dengan cara-cara yang lebih logis-intelektual (Ma'aruf, 2000:147).

Menurut Andik Matulessy bahwa gerakan mahasiswa atau aksi kolektif mahasiswa memiliki ciri antara lain:

- Gerakan mahasiswa dibawahi oleh organisasi, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.
- Gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda, pada gerakan mahasiswa yang permanen tujuannya mempengaruhi kebijakan, sedangkan yang bersifat temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik.
- Gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran.

- Gerakan mahasiswa memiliki ideologi.
- Gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti parpol, namun lebih pada aksi kolektif untuk mewujudkan gerakan.
- Dalam menggelar aksi kolektif gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu strategis dalam sarana massa memobilisasi dan mengefektifkan aksi (Matulessy, 2005:40-47).

Dari pendapat diatas, bahwa ciri dari gerakan mahasiswa tidaklah bersifat kekerasan dan bersifat spontanitas hal inilah yang membedakan gerakan mahasiswa dengan gerakan lainnya. Dari ciri tersebut gerakan mahasiswa terdapat berbagai bentuk gerakan mahasiswa. Bentuk gerakan mahasiswa di Indonesia terdapat tiga bentuk yaitu seminar, diskusi dan demonstrasi. Hal ini diperkuat menurut pendapat Arbi Sanit bahwa gerakan mahasiswa adalah sebagai bentuk gerakan sosial yang dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut.

Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivitas intelektual yang kritis melalui seminar, dan diskusi merupakan bentuk aktualisasi. Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan. Bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa ini dilakukan dengan

menurunkan massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak. Kemudian mahasiswa ini mendorong desakan reformasi politiknya melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah dan menyerukan pemboikotan. Untuk mencapai citacita moral politik mahasiswa ini maka muncul berbagai bentuk aksi seperti umumnya terjadi dalam gerakan sosial.

Sebagai aktualisasi dalam memainkan peranannya mahasiswa memiliki bentuk dalam gerakannya yang berbeda-beda di setiap kondisi yang ada. Bentuk dari gerakan mahasiswa diantaranya seminar, diskusi dan demonstrasi dengan menurunkan masa turun ke jalan. Sedangkan menurut Satrio dalam Blumer menyatakan, sebuah gerakan mahasiswa dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Biasanya, gerakan ini melibatkan cara-cara yang terlembagakan, seperti demonstrasi, seminar, dan diskusi untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan mahasiswa melibatkan jumlah orang yang cukup banyak dan biasanya berlanjut untuk rentang waktu yang cukup panjang.

- Menurut Asep Setiawan (2006:16) bahwa terdapat teori tentang meningkatnya gerakan mahasiswa. Teori tersebut diadopsi dari pendapat Smeler tahun 1962 tentang teori kemacetan yang berisi. “Sebuah gerakan mahasiswa muncul ketika masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti disebutkan Smelser (1962). Teori kemacetan ini berpendapat bahwa “pengaturan lagi struktural dalam masyarakat seperti urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan hilangnya kontrol sosial dan meningkatkan “gelombang menuju perilaku antisosial”. Kemacetan sistemik ini dikatakan menjadi penyebab meningkatnya demonstrasi, seminar dan diskusi.
- Gerakan mahasiswa mengaktualisasikan potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-

isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ideal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya.

- Menurut Arief Budiman (1984:160) bahwa gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral untuk mendobrak pemerintahan dan hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk gerakan mahasiswa. “Gerakan Mahasiswa ini diakui pula oleh Arief Budiman yang menilai sebenarnya sikap moral mahasiswa lahir dari karakteristiknya mereka sendiri. Mahasiswa sering menekankan peranannya sebagai “kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”. Aksi protes yang dilancarkan mahasiswa berupa demonstrasi di jalan,seminar dan diskusi dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis”.

Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa seperti seminar, diskusi dan demonstrasi merupakan cara yang sering dilakukan mahasiswa dalam melakukan aksinya. Dari ketiga bentuk gerakan mahasiswa tersebut memiliki perbedaan dalam menyampaikan tujuannya. Sehingga yang dimaksud seminar dalam bentuk gerakan mahasiswa adalah arena terbuka dimana peserta diberi kesempatan untuk ikut serta berbicara sebagai penyaluran perasaan dan pendapat dapat terjadi bahan dari seseorang yang ditanggapi oleh peserta lain dalam bentuk pertanyaan dan komentar. Sedangkan diskusi adalah sekolompok kecil yang terdiri dari 6 orang atau lebih mendiskusikan suatu masalah dihadapan suatu kelompok yang lebih besar yang mendengarkan dan mengikuti diskusi tersebut walau tidak terlibat langsung selama 15-40 menit, kemudian selama 20-60 menit hasil diskusi tersebut dibahas dalam pleno. Proses yang kedua tidak boleh mengulangi atau mementahkan proses yang pertama, sebaliknya proses yang kedua adalah pematangan. Kesimpulan tidak harus satu pendapat, dapat lebih dari satu asal cukup mendasar secara

nalar.

- Menurut Basrowi dan Sukidin dalam bukunya tentang kekerasan-kekerasan kolektif (2003) bahwa demonstrasi adalah media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidak puasan sosialnya kepada penguasa. Hal tersebut diperkuat oleh ungkapan Agus Halawa, menyatakan demonstrasi adalah bentuk ekspresi berpendapat unjuk rasa melalui demonstrasi. Demonstrasi pada umumnya melibatkan ribuan massa untuk melakukan perubahan dan juga demonstrasi merupakan media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikan dalam bentuk pengerahan massa.
- Menurut Tan Malaka bahwa demonstrasi politik yang ditujukan dengan masa yang berbaris di sepanjang jalan raya dan di gedung rapat dengan maksud mengadakan protes dan memperkuat tuntutan politik, ekonomi, dan menunjukkan kepada musuh beberapa besar kekuatan kita, karena bila semboyan dan tuntutan sungguh diteriakan oleh masa demonstrasi politik dapat menjadi gelombang yang makin lama makin kuat sehingga meruntuhkan benteng-benteng ekonomi dan politik dari kelas yang berkuasa (Malaka, 2000:99).

Dalam teori gerakan mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari aktualisasi gerakan mahasiswa terbagi kedalam tiga bentuk diantaranya seminar, diskusi dan demonstrasi. Ketiga bentuk gerakan tersebut merupakan sebuah jalan dalam mencapai keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut. Oleh karena itu ketiga bentuk tersebut yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa dalam sejarah gerakan mahasiswa pada tahun 1966-1998. Gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan yang mempunyai kekuatan moral dalam mendobrak kekuatan pemerintah pada saat itu. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga

memunculkan ketiga bentuk gerakan mahasiswa yaitu seminar, diskusi, dan demonstrasi.

Peran dan Fungsi Gerakan Mahasiswa

Pergerakan mahasiswa diperhitungkan dalam setiap keputusan-keputusan besar suatu bangsa karena pergerakan mahasiswa memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengawal setiap kebijakan yang ada dalam sebuah negara. Peran pergerakan mahasiswa diantaranya yaitu:

- Sebagai pelembagaan peran perubahan sosial (*agent of social change*).
- Sebagai pelembagaan peran cadangan masa depan dalam bentuk pendidikan politik bagi aktifis pergerakan mahasiswa.
- Sebagai pelembagaan peran penyebaran pemikiran politik keadilan.

Selain beberapa peran yang disampaikan di atas, pergerakan mahasiswa juga memiliki fungsi yang sangat penting, fungsi pergerakan mahasiswa antara lain:

- 1) Menjaga kelangsungan regenerasi kepemimpinan politik pergerakan mahasiswa.
- 2) Merumuskan Wacana Pergerakan Mahasiswa.
- 3) Melakukan komunikasi politik yang intensif dengan Konstituen Pergerakan Mahasiswa.
- 4) Membina Konstituen Pergerakan Mahasiswa.
- 5) Melakukan pendidikan politik yang didasarkan pada ideologi, etika politik, pemikiran politik dan perilaku organisasi (Kusuma, 2007: 34-35).

Prinsip Gerakan Mahasiswa

Dalam melakukan sebuah pergerakan, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Prinsip-prinsip pergerakan yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa diantaranya yaitu:

- 1) Menjadikan ideologi, pemikiran dan konsep serta pola gerakan sebagai pengarah dan sumber petunjuk.

- 2) Membingkai kerja dengan perilaku dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
- 3) Memegang teguh konsep perjuangan: memberi teladan sebelum mengajak, mengembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta memberi solusi bukan menghakimi.
- 4) aktifitas pergerakan yang intelektual dan inklusif, serta menjauhi kerja yang anarkis, eksklusif dan khusus untuk golongan tertentu.
- 5) Mengelola lembaga pergerakan mahasiswa dengan mengacu kepada prinsip Legal, Formal dan Wajar.
- 6) Mengingat hakikat dirinya sebagai aktifis pergerakan yang memiliki tugas mengajak orang untuk terlibat dalam proses kaderisasi gerakan melalui berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Menyemangati diri dan aktifis yang lain untuk terus berkontribusi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.
- 8) Melakukan upaya yang terus-menerus untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penemuan ilmiah dan pemikiran solutif.
- 9) Memperhatikan secara khusus orang-orang yang cerdas, berprestasi dan kreatif untuk diajak sinergi dalam pergerakan.
- 10) Menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan seorang sivitas akademika lulusan perguruan tinggi di hadapan masyarakat adalah berdasar pada kompetensi ilmu, keterampilan, moral dan interaksi sosialnya. Karenanya tidak ada keringanan dan pengecualian dalam pencapaian hal tersebut.
- 11) Mengantisipasi kondisi dan kebutuhan dunia pasca kampus.
- 12) Memiliki peran besar dalam isu kemanusiaan, kebangsaan dan keumatan.
- 13) Membela hak asasi manusia, kemerdekaan dan keadilan bagi manusia, bangsa dan umat.
- 14) Melakukan interaksi dan hubungan baik dengan semua golongan dalam batas adab umum yang berlaku dan prinsip

persaudaraan serta kemanusiaan yang luas.

- 15) Memahami dan memanfaatkan logika dan adab umum sivitas akademika serta peraturan formal keorganisasian sivitas akademika yang berlaku.
- 16) Memandang penting keikutsertaan dalam media mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (Kusuma, 2007: 31).

Perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Dalam perkembangannya dari masa ke masa gerakan mahasiswa merupakan kekuatan moral dan politik untuk menekan kekuatan kolonial dan rezim otoriter yang korup, serta merenggut hak-hak individu (Sanit 1999: 219). Secara historis sumber kekuatan pemuda banyak terbentuk selain karena semangat nasionalisme yang tumbuh, didukung pula dengan munculnya kelompok-kelompok intelektual bangsa. Situasi itu dimulai dari keterdesakan yang dialami oleh Belanda juga dari munculnya gerakan beraliran agama dan sosialisme sekuler yang mendorong Belanda membangun kebijakan politik etis. Kebijakan itu kemudian melahirkan banyak kaum-kaum terpelajar dalam negeri. Kemunculan kaum terpelajar ini pun mendorong terbentuknya berbagai organisasi-organisasi sosial dengan corak ideologi yang radikal, seperti Sarikat Priyayi tahun 1906 dan Boedi Oetomo. Walaupun kedua organisasi tersebut masih mengalami kendala karena hanya mencakup kalangan bangsawan semata (Pramusinto dan Purbakusumo 2016).

Keberadaan organisasi ini berlanjut dengan terbentuknya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lebih mencakup berbagai dimensi kelas, agama, Jawa dan non-Jawa. SDI kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1919. Mereka mengklaim memiliki anggota sebanyak 2000.000 orang, yang menjadikan Syarikat Islam sebagai organisasi pemuda terbesar saat itu (Lane 2014: 44). SI yang lebih bersifat heterogen membangun aliansi yang meliputi kalangan modernis dan tradisional, sehingga semakin memperkuat basis gerakan perjuangan melawan kebijakan kolonial. Infiltrasi ideologi

berpaham komunis juga membangun fondasi ideologis yang semakin kokoh. Semakin kuatnya Syarikat Islam membuat koloni beranggapan bahwa keberadaan SI dapat mengancam dengan potensi-potensi yang mereka miliki (McVey 2010: 16). Pada tahun 1914 muncul pula ISDV yang membangun kerja sama dengan SI untuk memperkuat basis gerakan dalam perjuangan anti feodal dan anti kolonial. Pada masa itu, banyak anggota SI yang beranggota ganda seperti Semaroen, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka yang merupakan tokoh dari kedua organisasi tersebut (Kasenda 2014: 143- 144).

Organisasi ini mulai nampak bercorak gerakan politik progresif. Beberapa orang dari kedua organisasi ini kemudian merubah ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Anggota SI yang merupakan anggota Partai Komunis kemudian dikeluarkan dari PKI lewat kongres pada bulan Oktober 1921 sebagai upaya pendisiplinan partai. Dengan munculnya organisasi yang banyak dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa pribumi memaksa Belanda mengurangi jumlah beasiswa ke luar negeri. Sebagai gantinya, mereka membentuk beberapa sekolah, seperti sekolah kedokteran di Surabaya, Institut Teknologi Bandung, dan sekolah hukum di Batavia (Ingleson 2015). Peningkatan pajak pun dilakukan karena kebijakan politik etis pemerintah Belanda dianggap semakin memberatkan dan semakin meningkatkan penderitaan rakyat. Hal-hal tersebutlah yang memicu meningkatnya radikalisasi gerakan mahasiswa.

Peran mahasiswa berlanjut di era pasca kemerdekaan. Walaupun tidak terlalu berperan signifikan di era ini, tidak sedikit kalangan-kalangan terpelajar yang mengambil peran besar dalam mencapai kemerdekaan. Pada periode demokrasi parlementer tahun 1950-an dan demokrasi terpimpin Indonesia mulai membangun perguruan tinggi, ditandai dengan banyaknya gelombang pelajar yang mulai menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Namun, banyak pengamat yang beranggapan bahwa tahun-tahun tersebut disebut sebagai periode ketenangan politik dan memunculkan generasi muda yang berciri hedonistik,

elitis, dan apolitis (Aspinall 2012: 159). Sayangnya, gelombang pelajar atau mahasiswa ini masih banyak didominasi oleh masyarakat kelas atas yang lebih mendapatkan akses yang mudah, ketimpangan ini seakan melupakan peran pemuda lintas kelas maupun dimensi baik dari kalangan modernis dan tradisional yang mencakup berbagai kalangan pemuda nasionalis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan ini juga mahasiswa yang dianggap sebagai calon potensial mulai banyak dilirik oleh berbagai partai politik dalam membangun kapasitas partai dan menarik atensi konstituen, sehingga menghadirkan dimensi politik yang kental (Pramusinto dan Purbokusumo 2016).

Dimensi politik yang kuat menciptakan politik aliran dalam tubuh organisasi gerakan mahasiswa, relasi politik yang bermunculan seperti adanya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1947 yang berafiliasi dengan Partai Islam Modernis yaitu Masyumi, kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1954 berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) 1956 dan Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) 1955 yang memiliki kedekatan intim dengan PKI dan PSI (Maxwell 1997). Kedekatan Organisasi pergerakan mahasiswa dengan partai-partai politik tak jarang merangsek mahasiswa masuk dalam kepentingankepentingan elit politik partai. Meski demikian, gerakan mahasiswa yang berhaluan kiri ini berhasil memobilisasi kaum proletariat dan petani, terkhususnya pengaruh besar peran partai berhaluan kiri radikal yakni PKI. Gerakan aliran kiri dalam tubuh organisasi mahasiswa jelas semakin memperuncing politik “aliran” dalam kontestasi politik di tingkat electoral (Lane 2014: 56). Kelompok kepentingan didikan Belanda, seperti para perwira militer KNIL, tuan-tuan tanah, borjuis, yang buta perjuangan emansipatif dan kelompok enclave yang lain merasa terancam dengan semakin masifnya pengaruh gerakan kiri. Kelompok ini perlahan dibuat tersingkir hingga berbuntut pada pemberontakan (PRRI/Permesta) lalu menepi bersama kekuatan TNI AD

(Pramusinto dan Purbokusumo 2016).

Gerakan mahasiswa yang membentuk aliran kiri dan tentunya PKI ini perlahan mengalami tekanan terlebih dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kampanye penghabisan gerakan kiri yang didalangi oleh PKI dan kelompok Soekarnois mulai dilakukan. Peran gerakan mahasiswa yang beraliran anti komunis cukup sentral dengan akhirnya sepakat membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di rumah Menteri Pendidikan Tinggi, Brigjen Syarief Thayep. Komposisi KAMI terdiri dari organisasi keagamaan yang meliputi HMI, PMKRI, GMKI, PMII. Sedangkan organisasi Non keagamaan meliputi Sekretariat Bersama Mahasiswa Lokal (SOMAL), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMASI), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) (Pramusinto dan Purbokusumo 2016). Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan KAMI bersama militer (TNI AD) dengan mengampanyekan tuntutan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Hal ini memicu Soekarno dan kelompok gerakan kiri terdesak (Lane, 2014: Asspinall 2012). Puncaknya gerakan ini berhasil menjatuhkan Soekarno dari takhta kepemimpinannya dan berhasil melakukan aksi yang berujung pada pemberangusannya kelompok PKI atau pun pihak yang berafiliasi bersama gerakan kiri PKI. Peristiwa dan peran besar mahasiswa di tahun ini dijuluki sebagai “Angkatan 66”, Diantaranya yang cukup terkenal saat itu seperti Soe Hok Gie dan Arief Budiman.

Perjuangan itu terus berlanjut memasuki periode Orde Baru. Gerakan ini sempat mengalami fase hening di mana mahasiswa yang kembali ke kampus untuk belajar dan menempuh ilmu sebanyak mungkin. Arif Budiman (1970) menyebutnya sebagai “Gerakan Koreksi” yaitu gerakan yang tidak harus mengumpulkan massa yang besar namun membekali dirinya dengan ideologi alternatif. Asspinall (2012) menyebut periode ini sebagai menguatnya “gerakan moral” dan meredupnya “gerakan kiri”. Hal ini dapat terjadi akibat tindakan represif Orde Baru yang kemudian memaksa mahasiswa bersikap halus. Ali

moertopo menyebut periode ini sebagai floating mass (massa mengambang), ditambah dalam bidang politik dengan dwifungsi ABRI semakin diperkuat. Oleh sebab itu ABRI dapat bertindak sebagai stabilisator, dinamisator, dan penjaga kebijakan Orde Baru (Semma 2008: 110). Namun, demonstrasi dan protes mulai bermunculan dalam tahun-tahun berikutnya terkait permasalahan tentang merajalelanya korupsi, anggaran terhadap pendidikan, dan munculnya ketimpangan kelas di berbagai sektor sosial. Walaupun reaksi tersebut masih terbatas pada gerakan moral.

Tindakan represif terhadap aktivisme mahasiswa yang berjalan Panjang pada periode Orde Baru ini mulai mencapai klimaksnya saat krisis moneter melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada tahun 1997. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa sehingga menciptakan kepanikan publik secara masif. Mata uang yang anjlok berdampak pada kenaikan harga barang yang juga diikuti dengan pengangguran yang semakin meningkat. Situasi ini disusul lagi dengan krisis pangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Krisis ekonomi dan politik yang melanda bangsa segera direspon mahasiswa (Kasenda 2015). Peristiwa ini dianggap sebagai momentum yang tepat untuk meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Pengorganisasian gerakan mulai bermunculan dalam merespon kondisi ini. Berbagai organisasi baik organisasi lama dan baru bermunculan seperti BEM, KM, dan Senat-Senat Fakultas. Selain itu, terdapat sebuah gerakan politik kaum muda saat itu yang dinamakan Aliansi Demokrasi Rakyat atau ALDERA. Pergerakan ALDERA yang dijalankan oleh beberapa mahasiswa saat itu seperti Pius Lusrilanang dan rekan-rekannya membangun skema gerakan yang bersifat sporadis menuju aksi yang lebih politis atau bersifat semi partai (Wibisana, et al 2022).

Gerakan Ekstra Parlementer Sebagai Sebuah Strategi

Dikatakan gerakan mahasiswa ekstra parlementer, karena gerakan mahasiswa ini merupakan aktivitas/gerakan yang

diselenggarakan oleh mahasiswa diluar institusi parlemen/institusi negara untuk memberikan bantuan dan pembelaan (*advokasi*) terhadap kelompok/masyarakat yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan penguasa yang dirasa tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer yang dilakukan merupakan gerakan yang strategis, karena dari segi pendidikan formalnya, mahasiswa ada pada jenjang terakhir. Mahasiswa memiliki seperangkat ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk “menilai kebenaran”. Oleh karena itu mahasiswa akan memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak benar, mahasiswa akan fokus untuk memperbaikinya. Pendekatan mahasiswa adalah pendekatan yang ideal, gerakan yang ditujukan untuk kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Idealisme mahasiswa akan terusik apabila terdapat “penyimpangan” pada masyarakat. Itulah sebabnya mahasiswa disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of control* (agen pengawasan) terhadap apa-apa yang dianggap ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer merupakan gerakan kerakyatan dan gerakan moral yang berbicara tentang kasus-kasus riil yang terjadi di masyarakat sekitar dan Negara. Gerakan ekstra parlementer mahasiswa bukan hanya sebuah gelombang demonstrasi saja, namun sebuah gerakan lokal yang dikemas dan dapat menjadi sebuah gerakan Nasional bahkan Internasional. Gerakan yang konsisten dalam mencapai tujuan sehingga dapat mempengaruhi pengambil kebijakan/mengubah kebijakan publik agar tidak menindas, merugikan dan atau memberikan rasa ketidak adilan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat tertentu.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer juga meliputi bagaimana menggalang aliansi taktis dan aliansi strategis dalam mencapai tujuan gerakan tersebut. Gerakan ini juga harus

memerhatikan bagaimana memilih isu publik dan mengelola opini publik sehingga dapat menjadi “bola salju”. Gerakan mahasiswa ekstra parlementer juga bebicara strategi dan taktiknya sehingga apa yang menjadi fokus gerakan itu tercapai. Sederhananya adalah bagaimana gerakan mahasiswa ini menjadi sebuah gerakan yang benar-benar terorganisir, bukan gerakan yang spontan dan sporadis, gerakan spontan dan sporadis.

Gerakan mahasiswa ekstra parlementer itu berupa bongkahan es/gunung es yang dibawah permukaan ari lebih besar dari yang diatasnya. Kekuatan yang dibawah permukaan inilah yang dapat menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan. Karena di dalam perlemen sendiri sulit untuk steril dari kepentingan politik tertentu, dan lebih terikat oleh *sistem* dan kode etik, sedangkan jika berada di luar perlemen akan lebih luas dari pada di dalam parlemen sendiri. Gerakan ini lebih dikenal dengan parlemen jalanan. Karena memang pusat/kantor kegiatan mahasiswa adalah di jalanan. Melakukan aksi yang membuka mata masyarakat untuk mengkritisi kinerja pemerintah tanpa pandang bulu,dan independen.

Gerakan ekstraparlementer ini bisa juga diartikan dari perwujudan partisipasi politik aktif oleh mahasiswa. Menurut Huntington dan Nelson, pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington, 1990: 9-10).

Gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah muncul sejauh ini sesungguhnya hanya berperan sebagai inspirator dan katalisator bagi kemunculan gerakan massa yang lebih besar yang kemudian menjadi penyebab jatuhnya sebuah rezim. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa hanya sebagai katalisator dari kekuatan

politik yang lebih besar. Hal ini juga menjelaskan posisi mahasiswa yang memangbukan sebagai gerakan politik murni melainkan hanya sebagai *moral force* dan *agent of social change*. Gerakan mahasiswa hanya akan berhasil bila bertemu dengan kelompok intelektual radikal yang menopang gerakan mereka.

Menurut George Rude, seorang teoritis sosial kritis, dalam bukunya *Ideology and Popular Protest*, sebuah gerakan sosial politik atau revolusi hanya akan berhasil bila merupakan kolaborasi kuat antara “*inherent ideology of common people*” (ideologi yang hidup di masyarakat) dengan “*radical ideologies of intellectuals*” (ideologi ideologi radikal kaum intelektual). Menurut Rude (1995:17) “*the inherent ideology of the people had to be supplemented by a more structured radical ideology, and therefore political possibilities depended heavily on the capacity of radical intellectuals to articulate their own aspirations and ideas in conjunction with those of the common people*”.

Bila tanpa dukungan kaum cendikiawan yang radikal dari berbagai kelompok politik yang bisa dijadikan suri tauladan, rakyat (*common people*), dan tak lupadidukung pers yang kuat, sulit membayangkan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1997 menjatuhkan Soeharto akan berhasil. Gerakan reformasi adalah gerakan seluruh kekuatan politik dan seluruh rakyat Indonesia dimana mahasiswa sendiri memainkan peranan inspirator dan katalisator gerakan.

Secara umum kita memahami gerakan mahasiswa sebagai komunitas sosial yang menjalankan aktivitas dengan usaha untuk memainkan perannya dalam proses politik, terlepas dari skala dan metode penggerahan massa yang dilakukannya. Terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan yang dilakukan dalam menciptakan perubahan, gerakan mahasiswa memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi proses politik. Kondisi pemerintahan pasca reformasi belum juga memberikan perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik.

Kecenderungan untuk kembali merajalelanya pola-pola orde baru terlihat dengan jelas, salah satu indikasinya adalah semakin tingginya tingkat korupsi di negeri kita, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PERC (*Political & Economic Risk Consultancy*) yang diakibatkan lemahnya sistem hukum dinegara kita. Fungsi kontrol yang dijalankan oleh legislatif terkesan jauh dari hakekatnya sebagai pembawa aspirasi rakyat, justru yang lebih menonjol adalah pembawa aspirasi partainya.

Kondisi pemerintahan pasca reformasi belum juga memberikan perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik. Kecenderungan untuk kembali merajalelanya pola-pola orde baru terlihat dengan jelas, salah satu indikasinya adalah semakin tingginya tingkat korupsi di negeri kita, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PERC, yang diakibatkan lemahnya sistem hukum di negara Indonesia (Survey PERC, 2010). Kondisi legislatif teralienasi ini semakin diperparah dengan kurang responsifnya partai-partai politik terhadap isu-isu publik untuk pemberdayaan rakyat, pengentasan krisis, serta pencerdasan bangsa. Mereka lebih sibuk dengan isu-isu berdimensi aliran, uang serta pembagian kekuasaan. Kondisi yang akut ini menuntut gerakan mahasiswa untuk proaktif dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang kontraproduktif.

Akan tetapi, melihat kondisi seperti ini justru gerakan mahasiswa seolah kehilangan arah gerakannya pasca reformasi sehingga terpolarisasi kepada banyak kutub. Sebagian mahasiswa telah terlena dalam euforia reformasi sehingga cenderung lebih sering berkuat dengan bangku kuliahnya dibandingkan ikut dalam mempengaruhi proses politik bangsa ini. Menurut Yozar Anwar, pada dasarnya gerakan mahasiswa merupakan gerakan budaya, karena ia memiliki kemandirian dan berdampak politik yang sangat luas. Oleh karena itu mereka tidak boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mahasiswa seharusnya senantiasa menggunakan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Selain itu, budaya

Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa (Yozar, 1982).

Ada pula yang terkooptasi oleh kepentingan politik sesaat, ataupun berafiliasi kepada partai yang sudah ada, sehingga pola gerakan dan isu yang dibangun sudah tereduksi oleh kepentingan golongannya. Ini merupakan gejala kemunduruan gerakan mahasiswa, karena stigma yang telah dikenakan kepada mahasiswa sebagai gerakan yang independen dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan golongannya. Ketidakpastian politik di negeri ini, pasca reformasi yang digulirkan oleh gerakan mahasiswa, menggugah berbagai elemen bangsa untuk kembali mempertanyakan eksistensi gerakan mahasiswa dalam perjalanan politik bangsa ini. Gerakan mahasiswa dituntut untuk kembali melakukan perubahan signifikan guna memperbaiki kerusakan yang terjadi di negeri ini (Ichzan, 2014).

Dinamika gerakan mahasiswa pasca reformasi ini ingin dijelaskan oleh peneliti berkaitan bagaimana konstruksi aktifis mahasiswa. Dalam penelitian ini dinamika gerakan mahasiswa memiliki beberapa faktor yang memperngaruhi. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana aktifis mahasiswa selaku bagian dari gerakan mahasiswa mengonstruksi fenomena tersebut. Peneliti ingin realitas yang benar-benar obyektif dari fenomena dinamika gerakan mahasiswa, mulai dari mengapa konstruksi itu terbentuk hingga bagaimana konstruksi tentang dinamika gerakan mahasiswa itu terbentuk. Karena dengan mengetahui realitas yang paling obyektif pasti akan diketahui masalah yang sebenarnya terjadi hingga muncul fenomena tentang dinamika gerakan mahasiswa.

d) Rangkuman

- a. Pengertian Gerakan Mahasiswa menurut Andik Matulessy (2005) menyatakan gerakan mahasiswa adalah perilaku kolktif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif

- lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik.
- b. Idealisme mahasiswa itu muncul karena mereka berada di dalam kelompok dan ketika mereka di luar kelompok mereka idealisme itu pun tidak ada.
 - c. Gerakan mahasiswa telah memainkan peranan penting menjadi barisan terdepan yang selalu meneriakan tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Di Indonesia, gerakan mahasiswa (terutam pada 1998) terbukti membuka jalan demokrasi.
 - d. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivitas intelektual yang kritis melalui seminar, dan diskusi merupakan bentuk aktualisasi.
 - e. Peran pergerakan mahasiswa diantaranya yaitu: (1) Sebagai pelembagaan peran perubahan sosial (*agent of social change*), (2) Sebagai pelembagaan peran cadangan masa depan dalam bentuk pendidikan politik bagi aktifis pergerakan mahasiswa, dan (3) Sebagai pelembagaan peran penyebaran pemikiran politik keadilan.
 - f. Dalam perkembangannya dari masa ke masa gerakan mahasiswa merupakan kekuatan moral dan politik untuk menekan kekuatan kolonial dan rezim otoriter yang korup, serta merenggut hak-hak individu (Sanit 1999: 219).
 - g. Dikatakan gerakan mahasiswa ekstra parlementer, karena gerakan mahasiswa ini merupakan aktivitas/gerakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa diluar institusi parlemen/institusi negara untuk memberikan bantuan dan pembelaan (*advokasi*) terhadap kelompok/masyarakat yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan penguasa yang dirasa tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

e) Latihan

- 1. Jelaskan definisi, bentuk dan ciri dari gerakan mahasiswa!
- 2. Jelaskan fungsi dan prinsip dari gerakan mahasiswa sebagai

kekuatan!

3. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan politik di Indonesia?
4. Sebagaimana penjelasan diatas terkait dengan karakteristik dan perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia, menurut anda bagaimana perkembangan gerakan mahasiswa di tengah arus globalisasi dan pesatnya perubahan sosial saat ini sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia? Jelaskan!

f) Evaluasi Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan memberikan analisa terkait Gerakan Mahasiswa dan perkembangannya di Indonesia yang meliputi, Konsep gerakan mahasiswa, Peran dan fungsi gerakan mahasiswa, Prinsip gerakan mahasiswa, dan Perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia, dan

h) Umpulan

2. Kegiatan Pembelajaran 2

- a) Gerakan Buruh Dalam Politik Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Pengertian buruh, Perkembangan gerakan buruh di Indonesia, dan Afiliasi buruh dalam politik di Indonesia pasca reformasi.

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Pengertian Buruh

Sebenarnya kita sudah sering mendengar kata buruh ini sejak lama. Di seluruh dunia bahkan di Indonesia, setiap awal Mei pada setiap tahun adalah merupakan bulan yang ada kaitannya dengan buruh. Menurut seorang sosiolog yang mengupas mengenai konflik sosial, dikatakan bahwa kata buruh berasal dari bahasa

lisan petani Jawa yang kemudian diidentifikasi dengan konsep proletariat yang menunjukkan pada suatu hubungan konflikual antara pekerja dan majikan dengan penekanan pada ide perjuangan kelas (Susetiawan, 2000).

Buruh, pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Buruh dibagi atas dua klasifikasi besar (Irmayani, 2011) yaitu:

- Buruh profesional-biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja.
- Buruh kasar-biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja.

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah; pekerja. Secara teori, dalam konteks kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu, kelompok pemilik modal (*owner*) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut buruh (Irmayani, 2011). Jadi pada dasarnya buruh hampir sama dengan pekerja karyawan yang bekerja untuk mendapatkan upah dari atasan/majikan hanya saja dalam konteks pekerjaan yang berbeda.

Buruh, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, pasal 1 ayat a dituliskan sebagai berikut: "Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah". Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh disamakan dengan pekerja. Hal itu dapat dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Istilah buruh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau sama dengan pekerja. Mengenai buruh itu di dalam KBBI lebih lanjut dibedakan adanya tiga klasifikasi buruh, yaitu pertama buruh kasar yang berarti buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kedua buruh terampil, yaitu buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu, dan ketiga buruh terlatih, yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Kata pekerja sendiri dalam KBBI tersebut memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah orang yang bekerja dan yang kedua orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan.

Berangkat dari definisi mengenai buruh tersebut maka setiap orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapat upah juga termasuk kelompok pekerja atau buruh. Namun, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kata buruh sering diidentikkan dengan mereka yang bekerja di bagian lapangan dalam suatu industri pertanian, industri perkebunan, suatu perusahaan manufaktur, atau pabrik dengan klasifikasi yang pertama dalam KBBI, yaitu buruh kasar. Hal itu mengakibatkan buruh sering diberi penekanan “rendah” dibanding pekerja.

Banyak orang yang tidak bersedia atau tidak mau mengidentifikasi dirinya sebagai buruh, meskipun dalam beberapa definisi tersebut mereka termasuk dalam kategori buruh. Mereka lebih senang menyebut diri mereka sebagai pekerja atau karyawan/karyawati. Bagi orang-orang tertentu, istilah buruh identik dengan orang rendahan, orang miskin, lemah tidak berdaya, tidak berpendidikan, kasar, kotor, dan berbagai sebutan lain yang amat merendahkan. Kondisi buruh seperti itulah sehingga di beberapa perusahaan, kelompok itu sempat mengalami pengalaman yang sangat menyedihkan. Misalnya, kaum wanita sering mengalami pelecehan seksual, bahkan ada yang “dieksplorasi” sehingga berakibat munculnya demo, seperti

dikemukakan dalam awal tulisan ini. Hal itu berbeda dengan istilah karyawan/karyawati yang dirasakan lebih halus maknanya.

Jika menghayati definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mencoba untuk mengangkat citra positif dari kata buruh ini dengan menyebutkan: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Artinya, buruh itu juga dianggap sebagai pekerja, suatu definisi yang diambil maknanya dari KBBI. Oleh karena itu, akibat dari adanya pembedaan makna itu, maka mereka yang sama-sama menerima upah atau digaji atau menerima imbalan dalam bentuk lain merasa bukan berada dalam golongan yang sama (buruh), hanya karena tempat atau lokasi pekerjaan mereka berbeda. Terlebih bagi mereka yang bekerja di dalam ruangan kantor yang sejuk dan nyaman menggunakan jas dan berdasarkan digaji tinggi dan memperoleh berbagai fasilitas yang "wah", akan menganggap diri mereka bukan buruh, tetapi karyawan/karyawati.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar,yaitu:

- Buruh profesional (buruh kerah putih) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otak dalam bekerja.
- Buruh kasar biasa (kerah biru) yaitu buruh yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja.

Buruh rosok merupakan jenis buruh kasar biasa yang

sehari-harinya bekerja menggunakan otot dalam memilih-milih dan mengangkat barang-barang bekas. Buruh rosok dapat dikategorikan tenaga kerja tetap harian dan tenaga kerja borongan. Buruh rosok yang merupakan pekerja tetap harian mendapatkan upah sesuai waktu kerja mereka dan penerimaan upahnya dapat dilakukan perhari, perminggu, dan perbulan. Sedangkan buruh yang merupakan tenaga kerja borongan, adalah buruh yang bekerja borongan membersihkan barang-barang bekas dan akan mendapatkan upah berdasarkan timbangan dari barang rosok yang telah diselesaiannya.

Adapun hak-hak yang didapat oleh buruh adalah sebagai berikut (Irmayani, 2011):

- i. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
 - ii. Mereka tidak boleh diberi pekerjaan yang melibihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.
 - iii. Mereka harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah.
 - iv. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerjaan.
 - v. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
 - vi. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
 - vii. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.
- Oleh karena itu maka secara umum dapat dikatakan

bahwa hak-hak pokok buruh adalah buruh berhak mendapatkan upah yang layak, bekerja sesuai kemampuannya, diberikan bantuan pengobatan, penentuan biaya pensiun yang layak, dibayar ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi pada pekerja, diperlakukan secara baik, dan disediakan akomodasi kesehatan yang layak.

Perkembangan Gerakan Buruh di Indonesia

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, gerakan buruh mulai tumbuh secara massif pasca kemerdekaan. Oleh karena itu maka setidaknya perkembangan buruh di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase yang meliputi orde lama/pasca kemerdekaan, orde baru, dan orde reformasi.

1. Pasca Kemerdekaan

Di masa pra-kemerdekaan, pengaturan ketenagakerjaan diatur melalui Burgerlijk Wetboek dan Koeli Ordonanntie. Meskipun secara normatif memberikan sejumlah perlindungan untuk semua golongan, akan tetapi dalam praktiknya pekerja pribumi lebih banyak dirugikan dibandingkan dengan kulit putih. Pada 1921, dibentuk Kantoor van Arbeid di bawah Departemen Kehakiman yang bertugas mengurusi soal-soal perburuhan. Pun demikian departemen ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak pekerja (Surya Tjandra, 1998: 33).

Dari pihak pekerja, terjadi sejumlah aksi demonstrasi maupun mogok buruh di Pulau Jawa. Aksiaksi ini berujung pada dibentuknya untuk kali pertama serikat buruh pada 1905, Staatsspoor Bond di Bandung dengan beberapa anggota berasal dari kalangan pribumi. Alur ini bersambut dengan makin menjamurnya organisasi-organisasi lokal yang juga mewadahi kepentingan buruh, terutama dengan menguatnya pengaruh sayap radikal dari Sarekat Islam di kalangan buruh kereta api (Tjandra, 1998: 36).

Pada 1920an, Semaoen, Surjopranoto, Agus Salim, dan Alimin mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB),

dan banyak mengampanyekan terutama upah minimun dan jam kerja. Organisasi seperti PPKB ini tumbuh layu dalam kurun waktu yang cepat. Pada 1921, terdapat Revolutionaer Vakcentrale, dan pada 1922 Persatuan Vakbond Hindis. Sebagai respon, pemerintah kolonial berupaya untuk sebisa mungkin menghambat kemunculan aksi buruh dengan menerapkan sanksi berupa ancaman pidana atas gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan. Pada 1927, Pemerintah Kolonial melarang seluruh serikat buruh, yang merupakan buah dari peristiwa pemberontakan Banten 1926-1927.

Patut untuk dicatat bahwa sampai pada titik ini, perlindungan buruh masih berlaku secara individual berdasarkan pada kontrak saja. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara perusahaan dan kolektif buruh baru mulai diatur pada 1926 dan itu pun terbatas terhadap pekerja golongan Eropa saja. Pada 1937, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem mediasi tripartit dengan pejabat yang ditunjuk dari departemen kehakiman untuk menyelesaikan proses sengketa sebelum diserahkan kepada Pengadilan.

Keterlibatan buruh dalam upaya-upaya perlawanan kekuasaan kolonial berbuah manis pada masa awal kemerdekaan, yang menempatkan mereka sebagai kelompok strategis menuju modernisasi. Pada 3 Juli 1947, tokoh perempuan Surastri Karma Trimurti ditunjuk sebagai menteri perburuhan. Menurut Surya Tjandra, awal kemerdekaan memberikan dampak yang cukup positif bagi hak buruh. Era ini ditandai dengan produk legislasi berupa UU pro-buruh (Surya Tjandra, 1998: 42). Diantara dari regulasi tersebut adalah ketentuan pembayaran ganti rugi kecelakan kerja bagi buruh pada UU 33/1947, Ketentuan mengenai hak-hak buruh yang secara progresif termuat dalam UU 12/1948 jo UU 14/1969, penyelesaian perselisihan perburuhan dalam UU 22/1957, dan ketentuan PHK bagi perusahaan swasta melalui UU 12/1964.

Serikat Buruh pun menjamur, dengan ideologi maupun

afiliasi politik yang berbeda-beda. Menurut Tedjasukmana, ada empat kekuatan besar kala itu: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dekat dengan PKI, Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) yang dekat dengan PSI, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dekat dengan Masyumi, dan Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) yang memiliki kedekatan dengan PNI. Di antara mereka, SOBSI muncul sebagai serikat buruh yang paling vokal, aktif, dan keanggotaan yang militan (Tedjasukmana, 1959:20). Terlepas dari berbagai fraksi serta kontestasi dari menjamurnya gerakan buruh, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki daya tawar politik yang cukup ampuh dalam berkontribusi terhadap arah kebijakan yang diambil. Kemajuan ini nampaknya merupakan hasil dari pertautan antara gerakan buruh di akar rumput dan pengaturan dalam regulasi.

Pada satu sisi, kedekatan dan afiliasi gerakan buruh memberikan dampak pada proses legislasi. Dan pada sisi yang lain, hasil regulasi yang ada menguatkan kedudukan buruh yang nantinya akan berpengaruh pada akumulasi kekuatan buruh itu sendiri. Keberhasilan gerakan buruh ini tidak melulu berdampak positif, setidaknya bagi pemerintah dan pelaku usaha. Frekuensi aksi buruh yang terus mengalami peningkatan, bagi pemerintah, berpotensi mengancam stabilitas ekonomi. Untuk mempertemukan kepentingan buruh dan pelaku usaha diundangkan UU 22/1957 yang pada pokoknya mengatur mekanisme mediasi. Dalam implementasinya, pengaturan ini dinilai berhasil menampung aspirasi buruh yang buntutnya sukses mengurangi jumlah aksi (Tjandra, 1998: 45).

2. Orde Baru

Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Orde Baru memberikan pukulan yang besar bagi gerakan buruh. Dalam upayanya untuk mengatasi krisis ekonomi, Orde Baru menggenjot proses industrialisasi termasuk diantaranya dengan

merangkul modal-modal asing. Segera setelah Soekarno jatuh, pada 1967 Orde Baru meredam kekuatan buruh dengan memberlakukan pelarangan perayaan hari buruh internasional pada tiap tanggal 1 Mei dengan dalih untuk mencegah komunis menyusup.

Perlahan, dan tentunya dengan pendekatan yang disertai ancaman, Orde Baru berupaya menundukkan serikat-serikat buruh dalam satu wadah. Pada 1969, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang beranggotakan “Panitia 9”: Sarbumusi, Gasbiindo, KBM, Kongkarbusoksi, KBIM, SS PTT, PGRI, Kubu Pancasila, dan Kekarbu-MKGR. Pada 1973, MPBI bersepakat untuk memyatukan diri dengan membentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Karena FBSI masih dinilai gagal mengkondisikan aksi-aksi buruh, organisasi ini kembali bertransformasi menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dalam realisasinya menjalankan peran sebagai “kosmetik advokasi perburuhan dengan tujuan utama mengendalikan kaum buruh” (Sijoen,2020). Di antara rentang waktu tersebut, pemerintah melalui Laksamana Sudomo memperkenalkan jargon “Hubungan Industrial Pancasila” yang pada pokoknya merupakan ikhtiar untuk menjaga stabilitas demi kelangsungan pembangunanisme yang diusung rezim.

Dari sisi serikat buruh, nampaknya tidak ada banyak pilihan yang tersedia selain mengikuti kemauan pemerintah. Peristiwa 1965 yang diikuti dengan kehancuran SOBSI tidak menyediakan ruang yang leluasa bagi sisa-sisa kekuatan gerakan buruh, ditengah situasi siapapun yang berlawanan dengan penguasa adalah sinonim dengan PKI. Dan sebagaimana bisa ditebak, militer turut memainkan peran dalam upaya mempertahankan stabilitas keamanan (Tjandra, 1998: 57). Dalam praktiknya, rezim membungkam gerakan buruh untuk melancarkan ekspansi modal atas nama pemajuan ekonomi, yang oleh Farid secara dramatis dituliskan sebagai: *“I only wish to contend that the extermination of 1965-66 represents one specific, epochal moment in the history*

of capitalism in Indonesia, a moment that is written in 'letters of blood and fire' (Farid, 2005: 10-13).

Apabila disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hubungan timbal-balik antara gerakan buruh dan regulasi, maka masa Orde Baru ini dapat menjadi titik uji yang menarik. Orde Baru menggunakan perangkat pengaturan perundang-undangan penyelesaian sengketa hubungan industrial yang ditetapkan pada masa Soekarno, yaitu UU 22/1957 dan UU 12/1964. Kedua perangkat regulasi tersebut memuat mekanisme penyelesaian sengketa industrial pada prinsipnya memuat perlindungan hak-hak buruh, mengingat keduanya diterbitkan pada masa ketika gerakan buruh menjadi salah satu faktor politik yang diperhitungkan.

Akan tetapi, implementasi dari kedua peraturan tersebut sangat tergantung dari kekuatan serikat buruh sebagai representasi ketika terjadi suatu perselisihan: baik secara internal dengan pihak perusahaan, mediasi via pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait, ataupun penyelesaian Tripartit melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah (P4P/P4D). Alhasil, kondisi gerakan yang lumpuh mengakibatkan tidak ada posisi tawar yang berimbang pada tidak efektifnya penyelesaian sengketa untuk mewadahi kepentingan pihak buruh (Tjandra, 1998: 69-70).

Fenomena ini membuktikan bahwa gerakan buruh dan regulasi haruslah berjalan beriringan untuk dapat berlaku efektif. Pun demikian, kajian yang dilakukan oleh World Bank pada 1996 menyatakan perangkat regulasi tersebut rupanya masih dirasa kurang ramah investasi (Wiratraman, 2014:74). Atas dasar itulah kemudian menjelang senjakala Orde Baru terbit UU 25/1997¹⁵ yang nantinya memicu gelombang penolakan dari gerakan buruh. Meskipun sedikit, tapi gerakan buruh yang oposan terhadap pemerintah dan SPSI bukan berarti tidak ada sama sekali.

Pada 1990, dibentuk Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBM Setiakawan), disusul dengan Serikat Buruh Sejahtera

Indonesia (SBSI), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Bersama dengan aktivis pro-demokrasi, mereka bergerak menjadi oposisi meski dengan ruang yang sangat terbatas. Rezim tentu tidak diam saja. Mochtar Pakpahan, tokoh gerakan buruh yang juga bagian dari SBSI beberapa kali ditangkap menjadi tahanan atas keterlibatannya terhadap gerakan buruh dan pandangan politiknya yang dianggap subversif. Puncak dari praktik teror ini mendapatkan momentumnya melalui peristiwa pembunuhan Marsinah, aktivis buruh perempuan yang meninggal dengan kondisi yang naas di Nganjuk, Jawa Timur pada 1993 (Qurniasari, 2014).

3. Pasca Reformasi

Kekuasaan sentralistik Orde Baru yang berjalan dengan beking militer mulai aus pada paruh kedua 1990an. Gerakan perlawanan yang semakin jengah dengan rezim menemukan momentumnya pada 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang pada akhirnya memaksa Soeharto mundur dari tumpuk kekuasaan. Pergeseran kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan dampak terhadap gerakan buruh dan regulasi terkait perburuhan yang akan dijabarkan dalam bagian berikut.

Menguatnya masyarakat sipil membawa pengaruh positif terhadap arus keterbukaan dan demokratisasi. Bersamaan dengan upaya untuk membalik citra sebagai negara otoriter, pemerintahan B. J. Habibie mengambil kebijakan yang lebih akomodatif terhadap hak-hak perburuhan. Hanya sebulan setelah dilantik Habibie menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83/1998 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO No. 87 yang pada pokoknya memuat kebebasan dan perlindungan untuk berserikat dan berorganisasi. Pada masa Habibie pula direncanakan untuk menyusun tiga UU baru mengenai: Serikat Buruh, Penyelesaian Sengketa Perburuhan, dan Ketenagakerjaan.

Presiden Habibie juga membebaskan aktivis buruh yang sempat ditahan seperti Mochtar Pakpahan dan Dita Indah Sari.

Selanjutnya, terdapat upaya untuk mengonversi gerakan akar rumput dalam kontestasi elektoral. Diantaranya, Pakpahan dengan Partai Buruh Nasional (PBN) dan Partai Pekerja Indonesia (PPI) oleh Wilhemus Bhoka, dimana keduanya gagal memperoleh suara signifikan di Pemilu 1999. PBN kelak bertransformasi menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat sedangkan PPI menjadi Partai Kongres Pekerja Indonesia yang lagi-lagi tidak dapat dikatakan berhasil mendulang suara (Caraway, 2020:37).

Terlepas dari kegagalan dalam ranah elektoral Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Bomer Pasaribu (Golkar) dan Jacob Nuwa Wea (PDI-P), masing-masing dari SPSI menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, ada lagi dua jalan yang ditempuh dalam mengawal proses perumusan kebijakan: lobi dan aksi, sebagai kemewahan yang sebelumnya tidak dimiliki dalam iklim Orba (Ford, 2016:58). Konversi dari tuntutan di jalan dalam bentuk kebijakan selanjutnya adalah melalui kandidasi dari jalur partai politik konvensional baik di tingkat daerah maupun nasional yang sekaligus ditujukan menjaga keterhubungan dengan pengambilan keputusan (Caraway & Ford, 2020:37).

Dengan akses kekuasaan yang relatif lebih baik, apakah reformasi dapat dikatakan sebagai momentum kebangkitan kembali gerakan buruh? Sayangnya tidak semudah itu. Pukulan yang menjatuhkan rezim Soeharto berupa krisis ekonomi menghasilkan gelombang pengangguran yang cukup tinggi (Hadiz, 2002:85). Situasi ini nampaknya menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan semacam “reformasi total” perburuhan. Negara-negara investor seperti Korea maupun Jepang kala itu memberikan sinyal bahwa menguatnya daya tawar buruh malah akan membuat mereka mengalihkan investasinya ke negara dengan biaya produksi lebih rendah

seperti Myanmar dan Tiongkok (Heryanto, 2005: 265).

Lagipula, fenomena menjamurnya organisasi buruh setelah berakhirnya monopoli SPSI ternyata tidak berbanding lurus dengan potensi kekuatan riil yang mereka miliki karena kecenderungan adanya fragmentasi untuk saling bersaing satu sama lain. Ada lagi faktor eksternal yang berkontribusi menghambat gerakan buruh melalui perekutan organisasi massa oleh perusahaan yang ditujukan untuk memberikan tekanan (Heryanto, 2005: 266). Dari tantangan tersebut, menurut Hadiz, terbukanya ruang di masa reformasi akhirnya tidak dapat menghasilkan perubahan secara optimal yang ia gambarkan: terfragmentasi, tidak efektif, meskipun aktif dan dalam kadar tertentu, vokal (Hadiz, 2002:85). Tapi kritik Hadiz tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tidak dapat disangkal adanya perbaikan kebijakan pro-buruh pada masa reformasi.

Sebagaimana telah disebutkan, keterbukaan reformasi membuat buruh bergerak lebih leluasa dalam menyalurkan aspirasinya. Salah satunya adalah Peraturan Menakertrans 150/2000 yang mengatur perlindungan buruh perihal PHK, uang pesangon, ganti rugi, dan uang penghargaan masa kerja. Kelompok buruh tentu saja menyambut baik kebijakan tersebut, tapi tidak dengan investor terutama dari Jepang dan Korea. Akibatnya, tidak berselang lama Peraturan a quo diubah oleh Keputusan Menakertrans 78/2001, seiring dengan pergantian menteri dari Bomar Pasaribu ke Hamdi Al Hilal (PAN). Kebijakan Menaker baru direspon dengan unjuk rasa hingga akhirnya terbit Keputusan Mennakertrans 111/2001. Tapi langkah itu masih dinilai tidak memuaskan buruh sehingga muncul gelombang aksi yang cukup besar sampai akhirnya diputuskan menghidupkan kembali Peraturan Menaker 150/2000. 29 Pada tahun yang sama, terbit UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sebagian merupakan salah satu hasil masukan dari ILO.

Pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, Jacob

Nuwa Wea dipilih sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Dan pada masa ini pula mulai disusun draf UU ketenagakerjaan baru untuk menggantikan UU 25/1997 yang dinilai tidak pro-buruh. Kelompok buruh mengawal draf dengan melancarkan aksi dan membentuk koalisi dari 60 serikat buruh, Ornop, dengan dukungan LBH dalam wadah Komite Anti Penindasan Buruh. Pemerintah bersama DPR menjawab sikap buruh dengan mengutus Herman Rekso Ageng untuk mengadakan diskusi. Hasilnya, terbit UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang meskipun terdapat sejumlah kekurangan akan tetapi banyak dianggap sebagai “milestone” dalam regulasi perburuhan di Indonesia.³⁰ Kebijakan penting lain yang lahir pada pasca-reformasi adalah diundangkannya UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang disahkan menjelang akhir masa jabatan Megawati Soekarnoputri. Satu lagi aspek penting selama Pemerintahan Megawati terhadap hak perburuhan adalah pengesahan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang nantinya diteruskan oleh era pemerintahan selanjutnya dalam bentuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui UU 24/2011.

Pada 2006 dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sempat muncul usulan untuk mengganti UU 13/2003. Sebagaimana diduga, usulan tersebut muncul berkat tekanan dari para investor dan pelaku usaha. Akan tetapi Strategi “lobi dan aksi” yang dilancarkan Aliansi Buruh Menggugat (ABM) yang merupakan gabungan dari FNPBI, KASBI, dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) sukses melancarkan aksi penolakan dengan dukungan dari partai politik oposisi. Taktik ini berbuah manis dan usulan penggantian urung terlaksana. Sebagai pelengkap, masa kepemimpinan SBY meratifikasi kovenan ICCPR dan ICESCR dalam UU 12/2005 dan 11/2005 serta penetapan 1 Mei sebagai hari libur yang dituangkan dalam Keputusan Presiden 24/2013.

Pada dasarnya, terlepas dari kekurangannya perangkat

regulasi perburuhan yang diundangkan pada masa reformasi memberikan pondasi dan keleluasaan yang cukup baik. Akan tetapi harus diakui pula bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan baik pada aras praktik maupun kekurangan dari regulasi itu sendiri. Substansi UU 13/2003 dan UU 21/2000 sesungguhnya mengambil sebagian besar pokok-pokok dari UU 25/1997 yang disertai dengan perbaikan disana-sini. Kedua UU a quo memuat semangat yang diusung dalam Konvensi ILO 87. Pasal 1 angka 17 UU 13/2003 dan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 3 UU 21/2000 menyebutkan bahwa serikat buruh pada pokoknya adalah organisasi di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kedua UU a quo juga memuat jaminan hak untuk berserikat dan berorganisasi yang disertai dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi pada titik ini sekurang-kurangnya buruh telah mendapatkan perlindungan untuk berorganisasi yang dilengkapi dengan sistem jaringan jaminan sosial.

Sekali lagi, kemajuan yang demikan bukan berarti tanpa catatan. Meskipun dalam proses penyusunan UU 13/2003 maupun kebijakan perburuhan lain biasanya mendapatkan pengawalan penuh dari gerakan buruh, masih ada isu-isu pokok yang dianggap belum memuaskan. Ada empat hal yang disorot disini: *outsourcing*, PKWT, pengupahan, dan PHK. Untuk yang pertama, outsourcing adalah permasalahan klasik yang sering dipandang sebagai bentuk baru eksplorasi. Sebagian yang lain bahkan menyebutnya sebagai praktik perbudakan modern. UU 13/2003 sesungguhnya telah memberikan pengertian yang limitatif terhadap pelaksanaan PKWT-*outsourcing* dan telah beberapa kali diujikan kepada Mahkamah Konstitusi. MK dalam Putusan 012/PUU-I/2003 menyatakan bahwa praktik outsourcing secara an sich adalah bentuk perbudakan. Namun MK dalam Putusan yang sama juga menyatakan praktik tersebut bukanlah perbudakan sepanjang terdapat perlindungan terhadap hak-hak

pekerjaanya. Dalam kesempatan lain, terdapat kemenangan kecil untuk buruh. MK melalui Putusan 27/PUU-IX/2011 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian perihal isu status pekerja *outsourcing*. Isi pokok muatan Putusan a quo dapat dicermati dalam tabel di bawah.

Kedua, tentang PKWT. Pasal 56 ayat (2) UU 13/2003 mengatur PKWT yang terbagi atas jangka waktu atau selesaiya pekerjaan yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Ketentuan Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa PKWT tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang tetap sifatnya. Pasal 59 ayat (7) pokoknya menyatakan apabila ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perjanjian kerja batal demi hukum dan status buruh beralih menjadi PKWTT. Dari uraian di atas terlihat pada dasarnya telah tersedia alas perlindungan buruh beserta kepastian status kerjanya. Tetapi rupanya ada celah yang memungkinkan penyelundupan hukum. Dalam praktiknya, pengusaha biasanya tidak melakukan pengalihan status dari PKWT menjadi PKWTT melainkan mengakhiri perjanjian kerja dan mempersilahkan buruh yang bersangkutan untuk melamar ulang di perusahaan dan posisi yang sama. Permasalahan ini cukup merepotkan karena dengan demikian kepastian hukum justru dipergunakan untuk kepentingan penyelundupan hukum. Pada sisi yang lain, terhadap persoalan ini telah terdapat Putusan MK No: 96/PUU-XI/2013, 100/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan PKWT menjadi PKWTT yang berlaku sesuai dengan ketentuan UU tersebut telah memberikan perlindungan hukum. Dengan kata lain, belum terdapat pemecahan atas persoalan sebagaimana disebutkan.

Permasalahan berikutnya adalah tentang PHK. Pasal 151 UU 13/2003 menyatakan untuk sebisa mungkin menghindarkan PHK dengan mengedepankan perundingan. Selain itu telah terdapat pula ketentuan larangan-larangan alasan PHK yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1), dan hak-hak pekerja sebagaimana diatur

dalam Pasal 156. Pengaturan yang demikian ditujukan terutama untuk memberikan perlindungan bagi buruh agar tidak terjadi PHK secara semena-mena (justified, bukan at will dismissal) (Santoso, 2018). Akan tetapi masih terdapat keluhan yang mencakup beberapa aspek, diantaranya soal kepastian hukum dan kaitan antara akibat hukum PHK dengan pengupahan maupun hak lain. Beberapa persoalan ini telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan intisari dari Putusan-Putusannya tersaji dalam tabel di bawah. Sekedar tambahan adalah soal praktik di lapangan apabila terdapat penyimpangan dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, maupun Perjanjian Kerja terhadap ketentuan UU 13/2003 maupun UU 21/2000.

Afiliasi Buruh Dalam Politik Pasca Reformasi

Kritik terhadap model rasional komprehensif akhirnya melahirkan model penambahan atau inkrementalisme. Berawal dari kritik terhadap model rasional, model ini berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah yang ditemui dalam model rasional (Anggara, 2014). Model *incremental* pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena tidak memiliki cukup waktu, intelektual, dan biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik.

Semangat reformasi setelah runtuhnya Orde Baru sempat membangkitkan dan mendorong gerakan buruh untuk turut serta dalam proses demokratisasi melalui Pemilu. Tahun 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Namun dari lima partai tersebut tidak ada satu pun partai yang memperoleh satu kursi di parlemen.

Pemilu tahun 2004 hanya menyisakan satu partai buruh yang berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjadi kontestan, yaitu partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Partai ini merupakan perubahan nama dari PBN yang sebelumnya ikut pada pemilu 1999. Namun partai ini kembali gagal memperoleh kursi dalam pemilu nasional, yang hanya mendapatkan 636.397 suara (0,56%).

Tabel 2.
Suara Partai yang Memiliki Basis Buruh dalam Pemilu 1999-2009

Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
Partai	Suara	Partai	Suara	Partai	Suara
PBN	111.629	PBSD	636.397	PB	265.203
PPI	63.934			PPPI	745.625
PSPI	61.105				
PSP	61.105				
PRD	78.730				
Jumlah	365.205		636.397		1.010.828
Presentase	0,35%		0,56%		0,97%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2019

Tahun 2009, partai yang memiliki kaitan dengan buruh yang mengikuti pemilu adalah Partai Buruh (PB) yang tak lain merupakan nama baru dari PBSD. Selain PB ada Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang sebenarnya cukup kontradiktif karena partai ini justru dipimpin oleh seorang pengusaha, Daniel Hutapea. PB mendapatkan 265.203 suara (0,25%) dan PPPI memperoleh 745.625 suara (0,72%). Berarti dua partai ini kembali gagal mewujudkan cita-cita menempatkan perwakilan buruh dalam parlemen.

Pengalaman buruh dalam membangun partai dan mengikuti pemilu adalah pelajaran berharga. Kegagalan yang pernah terjadi

perlu dievaluasi bagi gerakan buruh untuk mempersiapkan gerakan yang lebih matang. Alih-alih membunuh semangat kolektif gerakan buruh dalam berpolitik, justru kondisi tersebut perlu untuk mendorong dalam menghidupkan kembali imajinasi kekuatan buruh. Berarti, setelah vakum pada pemilu 2014 lalu, wacana menjalankan model partisipasi buruh dengan membangun partai alternatif perlu digalakkan kembali.

Problem mendasar mengapa gerakan buruh kerap mengalami kegagalan adalah fragmentasi dan konflik internal dalam gerakan buruh itu sendiri. Fragmentasi gerakan buruh merupakan konsekuensi masyarakat pascaotoriter. Pergeseran dan penyusunan kembali kelompok-kelompok politik akan diikuti oleh fragmentasi kelompok, termasuk serikat buruh (Thirkell, 2005). Pada awal-awal masa reformasi (demokratisasi), selama lima tahun pertama lahir 80 federasi serikat buruh. Ketidakmampuan membentuk gerakan barisan yang mumpuni membuat gerakan buruh selalu gagal memanfaatkan ruang politik yang disediakan oleh demokratisasi (Suryomenggolo, 2014).

Problem fragmentasi ini pun terbawa sampai saat ini. Alih-alih hadir partai buruh, pemilu tahun 2014 justru semakin mengkotak-kotakan suara buruh. Polarisasi ini terlihat ketika ada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) yang mendukung Prabowo, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) mendukung Jokowi, dan Konfederasi kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang tetap memilih independen (Triyono, 2014). Begitu pula yang terjadi pada pemilu 2019, serikat pekerja kembali terbelah, ada yang menjadi pendukung dua kandidat calon presiden, ada juga yang tetap berdiri secara independen.

Fragmentasi dalam tubuh gerakan buruh mengakibatkan kooptasi oleh partai-partai politik besar. Kooptasi ini bisa kembali menciptakan kondisi politik “penitipan aspirasi” buruh kepada partai-partai yang ada, yang selama ini jelas tidak pernah efektif. Karena *elite* politik oligarki tidak pernah peduli dengan persoalan

buruh, bahkan para *elite* justru malah merampas dan menunggangi gerakan buruh untuk kepentingan jangka pendek mereka (Suryomenggolo, 2014).

Untuk memperjuangkan kepentingan buruh, tidak semata melakukan mobilisasi anggota, namun juga membangun kesadaran politis dan menghimpun kekuatan kolektif yang mumpuni. Kekuatan kolektif buruh merupakan faktor penting dalam menjalin kemitraan strategis dengan elite politik untuk dapat mendikte hasil dan rumusan kebijakan publik (Murillo, 2001). Dengan kekuatan kolektif buruh pula, partai politik yang mandiri bisa terbangun. Maka, hal yang terus dilakukan oleh gerakan buruh untuk membangun partai yaitu dengan melakukan pendidikan politik kepada seluruh buruh.

Pendidikan politik bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi di tengah kondisi apatisme warga (dan juga buruh) yang masih besar. Karena politik yang hendak dibangun bukan soal perkara partisipasi pencoblosan saat pemilu, melainkan lebih dari itu, bagaimana buruh bisa merebut dan mempertahankan segala sumber daya yang saat ini kerap dirampas oleh kepentingan segelintir pihak pemerintah dan kapital. Hak-hak normatif buruh saat ini masih sering dinegasikan harus direbut.

Gerakan buruh perlu membangun konstituen yang kuat untuk mendukung kerja politik. Maka, salah satu hal konkret yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh adalah melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah. Tidak hanya suara buruh, namun suara rakyat pada umumnya. Penyerapan aspirasi ini adalah bentuk partisipasi langsung dari rakyat (tentunya buruh) untuk mengidentifikasi kebutuhan riil mereka beserta solusi yang bisa ditawarkan langsung dari aspirasi rakyat. Pendekatan bottom up ini penting menjadi antitesa dari kerja-kerja partai politik yang elitis dan kerap tidak mampu mengakomodasi suara-suara rakyat kecil.

Membangun partisipasi melalui penyerapan aspirasi ini sejalan dengan paradigma *New Public Service* (NPS) yang dalam satu dekade berkembang di beberapa negara. Paradigma NPS

memandang rakyat perlu terlibat aktif dalam tata kelola pemerintahan termasuk urusan aktivitas sosial-ekonominya dan penentuan kebijakan. Dengan kata lain, partisipasi rakyat adalah kunci penting (Denhardt & Denhardt 2012). Nilai-nilai yang diadaptasi dalam paradigma NPS merupakan hasil dialog. Salah satu akar NPS yakni teori warga negara demokratis (*democratic citizenship*). Dalam teori warga negara demokratis, harus ada jaminan hak-hak individu warga melalui berbagai prosedur yang ada dalam menyampaikan gagasan-gagasan dan aspirasi dalam pemenuhan kebutuhan publik. Dalam hal ini, warga negara, termasuk buruh, kemudian perlu melibatkan diri dalam penentuan-penentuan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Semangat itu, meminjam istilah Mansbridge disebut sebagai “*public spirit*” (Faedluloh, 2015: 427–432).

Semangat publik dimanifestasikan dalam format altruisme warga negara untuk melibatkan diri dalam aktivitas kepemerintahan. Sikap demikian melampaui semata dorongan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan publik dan jangka panjang. Semangat publik memperhatikan prinsip seperti keadilan, partisipasi publik, dan deliberasi. Keadilan merupakan prinsip yang begitu kuat hingga seseorang dapat merasakan sedang teraniaya atau tereksplorasi yang membuatnya bertahan. Sedangkan partisipasi publik merupakan proses pelibatan warga negara dalam proses penyerapan aspirasi, perencanaan sampai aksi. Kemudian melalui deliberasi, warga negara memperoleh pijakan umum bagi terbangunnya solidaritas dan komitmen bersama.

Selanjutnya, strategi yang perlu dilakukan untuk menyatukan suara buruh, maka buruh harus segera melakukan konsolidasi (nasional) untuk bersatu membangun kembali partai buruh. Seluruh aktivis buruh yang tersebar di pelbagai serikat di setiap kota harus duduk bersama merumuskan tujuan untuk mengawali langkah tahap pembangunan partai buruh. Konsolidasi ini penting untuk mengikis fragmentasi antar lintas organisasi buruh.

Alihalih berpecah karena faktor egoisme elite buruh, harusnya gerakan buruh melakukan kerjasama secara politis. Dalam konteks ini, upaya merefleksikan ulang pemikiran Habermas tentang demokrasi deliberatif menjadi relevan. Demokrasi deliberatif melandasi proses komunikasi yang setara dan terbebas dari dominasi serta kooptasi pihak tertentu, terlebih elite. Relasi yang dibangun bukan hubungan tuan-budak melainkan warga negara. Habermas merealisasikan komunikasi kemanusian itu dalam konsep *public sphere* (ruang publik) (Habermas, 1984). Demokrasi deliberatif merupakan derivasi ruang publik dalam konteks teori politik.

Bagi gerakan buruh yang terbiasa menggunakan analisis basis kelas, peran ruang publik bisa dinilai kurang efektif karena kemungkinannya memberikan ruang berkolaborasi dengan kelas borjuis. Namun, dalam konteks sesama buruh (sebagai suatu kelas), kehadiran ruang publik menjadi perlu adanya sebagai manifestasi dari etos egaliter dalam berkomunikasi dan membangun opini publik sesama kelas buruh. Melalui kesalingpahaman sebagai subjek komunikasi, sebuah tindakan komunikatif akan mampu berjalan. Akan tetapi bila terjadi pemaksaan kehendak atau bahkan terjadinya disinformasi serta penyampaian kebohongan, maka tindakan komunikasi tersebut berubah menjadi tindakan strategis dan instrumental yang tidak akan berujung pada pencapaian konsensus, melainkan penguasaan dan pemenuhan ambisi tujuan-tujuan pribadi. Hal inilah yang perlu dihindari dalam proses perjuangan membangun sebuah partai buruh. Opini yang hadir kelak akan berperan untuk mempengaruhi segala yang ada dalam ruang publik, baik secara formal maupun informal, untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang secara prinsip merupakan hal yang sangat penting bagi proses demokrasi (Faedlulloh, 2015: 433).

Partisipasi memerlukan suatu dialog terbuka dan keterlibatan pelbagai elemen gerakan buruh secara aktif, serta membutuhkan hak suara dari para partisipan dalam pengambilan keputusan yang

dapat mempengaruhi suatu forum. Dalam menyelami proses komunikasi dalam ruang publik, para buruh harus melatih diri untuk menciptakan rasa saling percaya sesama gerakan buruh. Melakukan pendewasaan bersamasama dengan saling menutupi perbedaan (yang kadang) tidak substansial. Dengan demikian, harapan membangun lagi partai buruh menjadi mungkin. Secara dialektis, kuantitas-kuantitas rembug bersama yang diselenggarakan dengan konsisten akan menuju kualitas. Bila situasi dan kondisi telah matang, maka partai buruh mampu berdiri.

d) Rangkuman

- a) Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah; pekerja. Secara teori, dalam konteks kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu, kelompok pemilik modal (*owner*) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh disamakan dengan pekerja.
- c) Banyak orang yang tidak bersedia atau tidak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai buruh, meskipun dalam beberapa definisi tersebut mereka termasuk dalam kategori buruh.
- d) Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya.
- e) Dalam perjalanan bangsa Indonesia, gerakan buruh mulai tumbuh secara massif pasca kemerdekaan. Oleh karena itu maka setidaknya perkembangan buruh di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase yang meliputi orde lama/pasca kemerdekaan, orde baru, dan orde reformasi.
- f) Tahun 1999 hadir Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai

Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

e) Latihan

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* tmodul terkait Pengertian buruh, Perkembangan gerakan buruh di Indonesia, dan Afiliasi buruh dalam politik pasca reformasi.
2. Hasil *review* bacaan modul akan dikembangkan dalam bentuk materi yang akan disampaikan secara berkelompok

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman terhadap hasil bacaan dan *review* terhadap modul lima ini.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan dan pemahaman terhadap bacaan yang dilihat saat mahasiswa melakukan paparan.

g) Umpan Balik

3) Penutup

a) Rangkuman

Gerakan Mahasiswa sebagaimana dikatakan oleh Andik Matulessy (2005) adalah perilaku kolktif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik. Teori yang memicu munculnya gerakan mahasiswa adalah *Deprivasi kumulatif (Cumulative Deprivation)*. Deprivasi kumulatif cenderung mencakup ketidak puasan dalam masalah ekonomi. Artinya ketika seseorang

dalam kondisi ekonomi yang miskin menjadi lebih miskin maka akan terjadi ketidak puasan, yang lama kelamaan akan terakumulasi, sehingga akan lebih mudah mengarahkan individu untuk berpatisipasi dalam gerakan sosial. Menurut Arief Budiman (1984:160) bahwa gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral untuk mendobrak pemerintahan dan hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam perkembangannya dari masa ke masa gerakan mahasiswa merupakan kekuatan moral dan politik untuk menekan kekuatan kolonial dan rezim otoriter yang korup, serta merenggut hak-hak individu yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai puncaknya di Reformasi tahun 1998. Selanjutnya, Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah; pekerja. Keterlibatan buruh dalam upaya-upaya perlawanan kekuasaan kolonial berbuah manis pada masa awal kemerdekaan, yang menempatkan mereka sebagai kelompok strategis menuju modernisasi. Perkembang gerakan buruh sudah secara massif terjadi sejak kemerdekaan. Puncak tertinggi gerakan buruh adalah hadirnya gerakan perjuangan terorganisir maulai dari kehadiran serikat buruh, organisasi resmi yang didirikan oleh para buruh, sampai dengan Partai Buruh yang secara aktif terlibat dalam politik Indonesia.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Gerakan mahasiswa telah lama menjadi kekuatan penting dalam politik Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang hubungan antara gerakan mahasiswa dan politik di Indonesia:

- Peran dalam Sejarah Perubahan Politik: Sejak era kolonial, mahasiswa telah aktif dalam gerakan politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Gerakan mahasiswa memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan gerakan nasionalis di masa lalu. Bahkan setelah kemerdekaan, mahasiswa sering menjadi motor perubahan politik melalui demonstrasi dan protes.
- Advokasi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Mahasiswa sering kali menjadi suara yang keras dalam memperjuangkan hak asasi

manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan ketidaksetaraan. Mereka terlibat dalam demonstrasi dan aksi protes untuk menyuarakan aspirasi ini.

- Kritik terhadap Pemerintah dan Politik Elit: Mahasiswa sering kali menjadi pengkritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku politik elit yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka menyuarakan tuntutan untuk perubahan sistem dan reformasi politik.
- Pelestarian Budaya dan Identitas: Di samping isu-isu politik, mahasiswa juga terlibat dalam pelestarian budaya dan identitas lokal. Mereka memainkan peran penting dalam mempromosikan keberagaman budaya dan bahasa daerah serta melawan hegemoni budaya.
- Pengaruh terhadap Pemilihan Umum: Mahasiswa sering berperan dalam menggalang dukungan untuk calon tertentu atau memobilisasi pemilih dalam pemilihan umum. Mereka juga dapat membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilihan.
- Pengorganisasian dan Pembentukan Pemimpin Masa Depan: Aktivitas politik di kampus, seperti organisasi mahasiswa dan debat, merupakan tempat pembentukan pemimpin masa depan. Banyak tokoh politik Indonesia yang memulai karir politik mereka sebagai mahasiswa aktivis.
- Hubungan dengan Partai Politik: Beberapa mahasiswa terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota, simpatisan, atau pemimpin partai. Namun, terdapat pula mahasiswa yang lebih memilih untuk tetap independen secara politik.
- Tantangan dan Represi: Gerakan mahasiswa juga menghadapi tantangan, termasuk represi dari pihak berwenang. Demonstrasi dan protes sering kali dihadapi dengan kekerasan atau penangkapan oleh aparat keamanan.
- Gerakan mahasiswa di Indonesia terus berperan penting dalam politik dan masyarakat, membawa aspirasi dan tuntutan perubahan. Meskipun terkadang dihadapkan pada tantangan dan risiko, peran mereka dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial tetap menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan.

c) Daftar Istilah

Advokasi	Pembelaan
Collective Behaviour	Perilaku kolektif
Deprivasi Kumulatif	Cenderung mencakup ketidakpuasan
Ideologi	Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat
ISDV	Organisasi yang berhaluan Marxisme-Leninisme pertama di Hindia Belanda
Konvensi	Pertemuan formal besar orang-orang dalam satu pekerjaan, minat atau organisasi yang sama
Parlementer	Sistem politik suatu negara dimana kekuasaan politik perletak pada badan legislative
Pemilu	Pemilihan Umum
Reformasi	Perubahan secara derastis untuk perbaikan

d) Referensi

- Ade Ma'aruf. (2002). *Solilqui, Pemikiran Filsafat, Agama dan Politik*. Jendela: Yogyakarta.
- Andik, Matulessy. (2005). *Mahasiswa & Gerakan Sosial*. Surabaya: Srikandi.
- Aspinall, Edward. (2012). *Indonesia: moral force politics and the struggle against authoritarianism*, in Weis, Meredith L & Aspinall, Edward (ed). *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*. London: University of Minnesota Press.
- Basrowi & Sukidin. (2003). *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Budiman, Arief. (1984). *Peranana Mahasiswa sebagai Intelektual dalam Cendekiawan dan Politik* diedit Waitomo Soekito, Lp3ES: Jakarta.
- Caraway, Teri L., & Michele Ford. (2020). *Labor and Politics in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Denhardt, Janet V, & Robert B. Denhardt. (2015). *The New Public Service: Service Not Steering*. 4th edition. England: Routledge.

- Faedlulloh, Dodi. (2015). Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 427–32.
- Farid, Hilmar. (2005). Indonesia's original sin: mass killings and capitalist expansion, 1965-66. *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(1).
- Habermas, Jurgen. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization Of Society*. Boston: Beacon Press.
- Hadiz, Vedi R. (2002). *The Indonesian Labour Movement: Resurgent or Constrained?*. Southeast Asian Affairs.
- Heryanto, Ariel & Vedi R. Hadiz. (2005). *Post-Authoritarian Indonesia: A Comparative Southeast Asian Perspective*. Critical Asian Studies.
- Ichsan Pahruddin. (2014). “*Pergerakan Mahasiswa*” diakses dari Ichsanpahruddin.wordpress.com diunduh tanggal 12 Desember.
- Indra Kusumah. (2007). *Risalah pergerakan mahasiswa*. Bandung: Indydec Press.
- Kasenda, Peter. (2014). *Hari-Hari Terakhir Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lane, M. (2012). *Malapetaka Di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri*. Jakarta: Djaman Batoe.
- Maxwell, John. (2001). *Soe Hok-Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- McVey, Ruth T. (2010). *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Muchtar E., Harahap. (1993). *Mahasiswa Dalam Politik*. Jakarta: NSEAS.
- Nasikun. (2000). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada.
- Pramusinto, Agus & Purbokusumo, Yuyun. (2016). *Indonesia Bergerak2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: IGPA Universitas Gadjah Mada & Pustaka Pelajar.
- Qurniasari, Iyut, & IG. Krisnadi. Konspirasi Politik Dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995. *Publika Budaya*, 3(2).
- Sanit, Abri. (1999). *Pergolakan Melawan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Samuel P., Huntington, & Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik*

- di Negara Berkembang*. Jakarta: RinekaCipta.
- Santoso, Budi. (2018). *Prinsip-Prinsip Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha dalam Prosiding Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan Tantangan dan Peluang Hukum Ketenagakerjaan Menghadapi Pasar Bebas*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok.
- Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sijoen, Lily Martha Josina. (2020). Dampak Intervensi Pemerintah Orde Baru Dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) Terhadap Pergerakan Buruh di Indonesia Tahun 1998-2014. *Avataria*, 10(1).
- Soemardjan, Selo. (1999). *Kisah Perjuangan Reformasi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Survei ini dilakukan pada tahun 2010. Indonesia mendapatkan angka 9,07 dari angka 10. Survei ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai tingkat kepemimpinan politik dan layanan sipil. “PERC: Indonesia Paling Korup di Asia”, vivanews.com 12 November 2014 diunduh tanggal 7 November pukul 19.45.
- Suryomenggolo, J. (2014). *Kebangkitan Gerakan Buruh (Pengantar) Dalam Kebangkitan Gerakan Buruh: Refleksi Era Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Tan Malaka. (2000). *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press.
- Tedjasukmana, Iskandar. (1959). *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement*. Sotheast Asia Program, Department of Far Eastern Studies Cornell University. 1959.
- Tjandra, Surya. (1998). *Labour Law and Development in Indonesia*. Ph.D Thesis, Universiteit Leiden.
- Thirkell, John, Richard Scase, & Sarah Vickerstaff. (2005). *Labour Relation and Political Change in Eastern Europe*. London: Taylor and Francis.
- Triyono. (20014). *Buruh Dalam Pusaran Politik 2014*. LIPI. <http://kependudukan.lipi.go.id/en/> population-study/employment/152-buruh-dalam-pusaranpolitik-2014.
- Wiratraman, Herlambang P. (2014). *Disciplining Post-Suharto Labour Law Reform*. Asia Monitor Resource Centre. Hong Kong.
- Yozar Anwar. (1982). *Protes Kaum Muda*. Jakarta: PT Variasi Jaya.

MODUL 6

PARTAI POLITIK SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, mahasiswa perlu diperkenalkan dengan berbagai kekuatan kelompok yang salah satunya Partai Politik. Sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaan partai politik menjadi penting di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Bryce (Katz & Crotty, 2015:4) bahwa “Demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai politik”. Sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia, tentunya partai politik memiliki peran yang cukup strategis mulai dari Pemberian pendidikan Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, Penciptaan iklim politik yang kondusif, Partisipasi politik warga negara, maupun Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik baik dilegislatif maupun eksekutif. Dari uraian tersebut maka adapun pokok bahasan dalam modul tujuh ini berkaitan dengan partai politik baik dari segi konsep maupun sejarah dan perkembangan serta implikasi penerapan multi partai di Indonesia.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul 6 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;

5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang fungsi partai politik sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5) Kegunaan Modul 6

Kegunaan atau manfaat dari modul ini adalah membantu mahasiswa memahami mengenai partai politik dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Selain itu, melalui modul tujuh ini dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang sejarah dan perkembangan partai politik serta implikasi penerapan system multi partai yang dianut di Indonesia.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok pembelajaran dalam modul ini adalah Partai Politik sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia yang terbagi ke dalam Sembilan sub materi yang meliputi; (1) Pengertian partai politik, (2) Peran dan fungsi partai politik, (3) Klasifikasi partai politik, (4) Sistem kepartaian, (5) Rekrutmen politik, (6) Pelembagaan partai politik, (7) Sejarah kemunculan partai politik di Indonesia, (8) Demokratisasi partai politik pasca reformasi, dan (9) Implikasi penerapan multi partai di Indonesia.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran

- a) Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik di Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mengetahui tentang partai politik sebagai kekuatan sosial politik, baik dari segi konsep maupun sejarah dan perkembangan serta implikasi penerapannya di indonesia.

- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Pengertian Partai Politik

Partai Politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai peran yang sangat penting. Adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan secara berkala merupakan syarat utama pelaksanaan demokrasi. Karena negara yang meganut demokrasi harus menjalankan negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat.

Apabila dilihat secara etimologis, kata partai berasal dari kata “*party*” yang berarti kelompok atau kumpulan orang. Dalam hal ini bisa merujuk kepada satu kelompok atau perkumpulan sejumlah masyarakat dalam suatu negara yang mempunyai kesatuan dan kesamaan tujuan dalam tujuan tertentu. Sedangkan Partai Politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan suatu ideologi politik tertentu (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 342).

Partai politik sendiri mempunyai definisi yang beragam, beberapa tokoh ilmuan juga memberikan pendapatnya tentang definisi partai politik (Firmanzah, 2008: 66) sebagai Berikut:

- 1) Max Weber mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya

berkuasa dan kemungkinan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.

- 2) Di sisi lain Carl J. Friedrich memberikan definisi partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat formil maupun materil (Budiardjo, 1988: 160-161).
- 3) Definisi tersebut sejalan dengan pendapat dari Roger H. Soltau, yang mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu politik dan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Budiardjo, 1988: 160-161).
- 4) Anthony Downs (Katz & Crotty, 2015:4) bahwa “Dalam arti luas, partai politik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai apparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Yang kita maksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapainya. Yang kita maksut dengan aparatus pemerintahan adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Yang kita maksud dengan cara sah adalah pengaruh yang melembaga atau sah.”
- 5) Lapalombara dan Myton weiner melihat partai politik sebagai organisasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus mengapresiasi dan mengatur konflik (Subekti, 1992:13). Partai politik dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan berkesinambungan serta secara organisatoris memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

- 6) Menurut Sigmund Neumann (1963:352) partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.
- 7) Huszar dan Stevenson dalam buku Sukarna (1981:89) mengatakan, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.
- 8) Partai politik menurut William Nisbet Chambers dikutip dari Katz dan Crotty (2015: 5) adalah: “Partai politik dalam arti modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantongkantong lokal, dan menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol identifikasi atau kesetiaan kelompok”.
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia”.

Definisi tersebut menekankan bahwa tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang-orang dalam parlemen yang terlebih dahulu

harus berusaha memenangkan pemilihan umum.

Tujuan dari partai politik di Indonesia tercantum dalam undangundang. Tujuan peraturan ini adalah supaya partai politik di Indonesia yang berjumlah sangat banyak ini dapat bergerak kearah tujuan yang sama yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan dari partai politik di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Tahun Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu:

- i. Tujuan umum politik adalah: (a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ii. Tujuan khusus partai politik adalah (a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, Partai Politik dapat dikatakan sebagai kendaraan politik bagi seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai

politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

Keberadaan Partai Politik dalam negara demokrasi adalah suatu keniscayaan (Wijayanti, 2017:1). Dengan kata lain untuk menjadi sebuah negara demokrasi keberadaan partai politik adalah sebuah keharusan. Jimly asshiddiqie menyatakan dalam bukunya bahwa partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memerankan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, *political parties created democracy*. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Asshiddiqie, 2006:153).

Peran dan Fungsi Partai Politik

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus, sarana untuk mencapai cita-cita bangsa serta dituntut mampu untuk mengarahkan artikulasi arah dan tujuan partai, karena partai politik memiliki kewajiban,

antara lain: sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara (Nasution, 2012:38).

Dalam negara demokratis, partai politik tidak dapat melepaskan dari peran dan fungsinya. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu peran dan fungsi internal organisasi dan eksternal organisasi. Pada internal organisasi, partai politik melakukan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Sedangkan pada eksternal organisasi, partai politik memiliki peran dan fungsi terkait masyarakat luas, bangsa dan negara. Partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:69).

Rusadi Kartaprawira (Kurniasih, & Rohmawat, 2013:241) berpendapat bahwa fungsi partai politik yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang berkembang di masyarakat, baik itu pikiran dari satu golongan, institusi, social atau dari sudut pandang kehidupan politik masyarakat dengan sudut pandang politik pemerintah.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partain politik mengatur tentang fungsi partai politik yang tertuang dalam pasal 11, yaitu:

- a. Pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim politik yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan penetapan kebijakan negara;

- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Pendidikan politik dapat disampaikan melalui materi dan metode penyampaian antara lain (Fadilah, 2017:6):

1) Materi Pendidikan

Hal-hal yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai dalam materi pendidikan politik berkaitan kepada pemantapan dan pengembangan program partai, menumbuhkan loyalitas dan dedikasi terhadap partai, peningkatan kualitas dan kemampuan kader dan pengurus partai untuk berfikir. Sedangkan materi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pendidikan politik meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Metode Pendidikan

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai yaitu penyampaian yang intensif dan massif secara langsung untuk membentuk pemikiran mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partai. Sedangkan metode yang dilakukan kepada masyarakat melalui penyampaian secara langsung maupun tidak langsung, maupun dalam praktik nyatanya materi lebih banyak disampaikan secara tidak langsung. Contohnya menggunakan media massa.

Banyak para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai fungsi partai politik, pada umumnya pendapat mereka saling menguatkan dan melengkapi. Salah satu ahli yang memberikan pendapatnya mengenai fungsi partai politik menurut Sigmund Neuman yang telah dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam bukunya;

1) Tugas utama partai politik adalah mengatur kehendak umum yang kacau. Partai politik menyusun keteraturan

dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya. Partai adalah perangkat ideide dan selalu menjelaskan, mensistematiskan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah perwakilan dari kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang perorang dan masyarakat luas.

- 2) Mengikat pendidikan para pemberi suara mengenai pola persaingan dalam memperebutka kekuasaan dan mempertajam kebebasan pilihannya. Kompetisi politik merupakan bagian dari sistem kepartaian yang demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat secara bebas.
- 3) Menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum. Dengan kata lain, partai politik merupakan saluran informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Tugas ini mengandaikan dalam suatu negara demokrasi perwakilan.
- 4) Memilih para pemimpin. Fungsi ini mengandaikan bahwa keterbukaan telah ada dalam jaringan politik.

Ahli lain yang memberikan pendapat mengenai fungsi partai politik yaitu Miriam Budiarjo. Secara rinci Miriam Budiarjo (1988:87) menyebutkan fungsi yang dimiliki partai politik, yaitu;

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Di ruang publik, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Setiap anggota masyarakat, tentu memiliki kepentingan yang hendak disuarakan, terutama apabila kepentingan tersebut menyangkut pada kebijakan pemerintah. Peran partai politik adalah untuk menampung beragam aspirasi itu agar terwadahi dan dapat disampaikan kepada pemerintah. Di sisi lain, terhadap kebijakan yang terlah dibuat oleh pemerintah, partai politik juga memiliki peran untung memperbincangkan dan memperluaskannya.

Dengan kata lain, partai politik adalah jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dengan adanya partai politik di suatu negara, diharapkan para warga negara tersebut memiliki kesadaran akan politik. Artinya setiap warga negara memiliki orientasi dan sikap terhadap kehidupan politik yang ada di negaranya. Hal ini juga akan menciptakan susunan masyarakat yang tanggap akan negaranya, tidak apatis dengan yang dilakukan oleh penguasa. Fungsi ini juga berarti partai politik juga perlu untuk melakukan suatu pendidikan politik kepada seluruh warga negara, tidak hanya kepada simpatinya saja.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan berdirinya partai politik adalah untuk merebut kekuasaan. Dalam hal ini, sebuah partai politik tentu harus menyiapkan kadernya untuk tujuan tersebut. Fungsi rekrutmen politik ini erat kaitannya dengan usaha partai politik untuk mengajar orang-orang yang berbakat dan berkualitas untuk menjadi kadernya, yang akhirnya bersedia ditempatkan di salah satu kursi kekuasaan. Rekrutmen politik menjamin keberlangsungan dan kelestarian partai, sekaligus untuk menyeleksi calon-calon pemimpin, baik pemimpin internal, maupun pemimpin nasional.

4. Sebagai sarana mengatur konflik

Di dalam suatu negara, terlebih lagi sebuah negara demokrasi, keberagaman pendapat tersebut dapat dilatarbelakangi oleh perbedaan adat, suku, agama, status sosial, maupun status ekonomi yang dapat berujung pada konflik. Partai politik memainkan peran sentral untuk menjaga keberagaman pendapat, namun menekan konflik sampai ke tingkat minimal. Fungsi ini pada akhirnya menempatkan partai politik pada posisi yang independen, tidak terlalu berpihak namun tetap memiliki standing

position sendiri. Jangan sampai keberadaan partai politik justru mempertajam konflik.

Klasifikasi Partai Politik

Banyak jenis dan bentuk Partai politik yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan ketatanegaraan. Ada partai yang berasaskan kebangsaan, kedaerahan, agama dan lain sebagainya. Namun demikian, dari berbagai warna yang ada dalam Partai politik, pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori besar Partai Politik, (Budiardjo, 1988: 166-167) yaitu:

- 1) Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Partai Politik, yaitu:
 - i. Partai Massa, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
 - ii. Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.
- 2) Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari sifat dan orientasinya. Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - i. Partai Lindungan (*patronage Party*), yaitu suatu Partai Politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi ditingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran

secara teratur. Tujuan utama dari Partai Politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan. Oleh sebab itu Partai Politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat.

- ii. Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin Partai yang kuat dan mengikat.

Berdasarkan dua klasifikasi Partai Politik tersebut, maka saat Partai-Partai Politik itu melakukan koalisi, maka langkah yang paling mudah dan relatif berkemungkinan berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi dengan partai politik yang berjenis sama, seperti Partai Massa dengan Partai Massa atau Partai Lindungan dengan Partai Lindungan. Koalisi antara Partai Kader atau antara Partai Ideologi relatif sulit dilakukan. Apalagi koalisi antar Partai Politik dengan ideologi yang jauh berseberangan, misal koalisi Partai Politik yang berbasis agama yang berbeda.

Sistem Kepartaian

Secara umum sistem partai berarti menjelaskan bagaimana suatu sistem kepartaian dalam suatu pemerintahan. Sistem kepartaian menurut Maurice Duverger (Budihardjo: 2008: 415-420) dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Sistem Partai Tunggal

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.

- b. Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan selandia baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai kecil sulit untuk berkembang, karena hanya 2 partai dominan dan menempati urutan teratas yang dapat berkuasa. Kemungkinan partai kecil untuk mengalahkan partai teratas sangat kecil. Partai kecil hanya dijadikan koalisi pada saat tertentu saja.

c. Sistem Multi-Partai

Pola multi-partai umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi. Dari beberapa sistem kepartaian tersebut di atas, Sistem Multi-Partai adalah sistem yang berlaku di Indonesia. sistem ini memberikan ruang kepada partai kecil untuk mampu bersaing dalam mengikuti pesta demokrasi. Dalam sistem ini juga biasanya partai kecil dilibatkan untuk selalu berkoalisi dengan partai lainnya untuk memenangkan Pemilu.

Rekrutmen Politik

Dalam partai politik, proses rekrutmen yang terbuka dipandang jauh lebih baik dan memberikan peluang besar bagi

semua kalangan masyarakat untuk terlibat secara aktif. Menurut Miriam Budiarjo (1994:202) rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas (2011:91) rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Sedangkan menurut Haryanto (1984:46) rekrutmen politik merupakan penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatankabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian diatas maka rekrutmen politik dapat diartikan sebagai suatu proses melalui mana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:57) ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orangorang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen.

Proses yang dipilih partai politik menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Tentu saja partai politik menginginkan kader yang loyalis terhadap partai, sehingga partai politik dapat menduduki jabatan-jabatan politik dipemerintahan suatu negara. Maka proses rekrutmen yang seharusnya digunakan adalah proses partisian dan *Compartmentalization*.

Menurut Czudnomski (Fadillah Putra,2008:77) mekanisme rekrutmen politik antara lain:

- a. Rekrutmen Terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka meliputi; (1) Mekanismenya demokratis, (2) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki, (3) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, dan (4) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

- b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbarui legitimasinya.

Berdasarkan penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.

Pelembagaan Partai Politik

Studi tentang pelembagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul *Political Order in Changing Societies* (1983: 23). Huntington mendefinisikan pelembagaan sebagai proses di mana suatu organisasi menentukan tatacara untuk memperoleh nilai baku dan stabil. Lebih dari 20 tahun kemudian Vicky Randall dan Lars Svasand menemukan konsep baru mengenai pelembagaan partai politik.

Randall dan Svasand (2002:13) memahami institusionalisasi atau pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural di mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya. Ramlan Surbakti mengartikan pendapat Randall dan Svasand sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap dan budaya. Artinya, partai politik akan terlihat melembaga dengan baik apabila partai politik tersebut mapan dalam hal-hal pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi (Surbakti, 2003).

Randall dan Svasand kemudian membagi proses pelembagaan partai politik menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua aspek

ini dipersilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik (*reification*) (Randall & Svasand, 2002:13). Penjelasan mengenai 4 aspek ini dapat dilihat di bawah. Namun, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada dimensi kesisteman partai.

Tabel 3.
Dimensi Pelembagaan Partai Politik

	<i>Internal</i>	<i>External</i>
<i>Structural</i>	<i>Systemness</i>	<i>Decisional autonomy</i>
<i>Attitudinal</i>	<i>Value infusion</i>	<i>Reification</i>

1. Dimensi Kesisteman

Ramlan Surbakti mendefinisikan kesisteman sebagai suatu proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dijalankan menurut aturan main, persyaratan, prosedur, dan mekanisme. Aturan dan mekanisme ini telah disepakati bersama dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik (Surbakti, 2003). Apabila partai politik telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam AD/ART, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembaga dalam dimensi kesisteman.

Karakteristik partai yang paling memberikan pengaruh terhadap kesisteman partai itu sendiri (Randall & Svasand, 2002:17) di antaranya: *Pertama*, cara partai tumbuh dan berkembang. Cara pendirian partai termasuk juga di dalamnya

asal-usul atau metode genetiknya; *Kedua*, sumber daya relevan terutama pendanaan partai. Partai-partai yang berada di dunia ketiga tidak mendapatkan dana yang signifikan dari iuran keanggotaan. Sedangkan pada negara-negara demokrasi apabila ingin bersaing secara efektif dalam kampanye elektoral membutuhkan dana yang cukup banyak. Maka, para politisi oposisi yang memiliki dana atau kekayaan yang banyak sering memainkan peran dominan dalam penciptaan dan arahan partai politik baru; *Ketiga*, siapa yang lebih menentukan dalam partai apakah pemimpin personal yang disegani oleh anggota partai atau kedaulatan anggota yang dilaksanakan menurut mekanisme organisasi. Keberadaan pemimpin yang mengandalkan kharisma menjadi karakteristik partai-partai dalam negara demokrasi baru. Kharisma pemimpin memang berperan positif dalam tahap awal pendirian partai untuk membantu menjaga kohesivitas koalisi dominan. Partai yang bergantung pada kharisma pemimpin memang pada awalnya akan melejit tapi jika partai terus bergantung terhadap kharisma pemimpin tadi, maka partai tersebut akan mati tanpa pernah melembagakan (Randall & Svasand, 2002:19).

Partai-partai yang tidak mampu membangun basis organisasi dan identitas yang sudah ada sebelumnya, maka tidak lain partai tersebut hanya merupakan kendaraan bagi individu yang memiliki kharisma untuk memenuhi ambisi politiknya, atau dapat juga dikatakan sebagai akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dalam keadaan seperti ini, kepemimpinan personalistik memberikan kontribusi pada tahap awal menuju terciptanya kohesi internal partai. Selain itu, kepemimpinan personalistik juga berguna bagi kelangsungan hidup partai. Kepemimpinan personalistik dalam jangka panjang juga akan menghambat pengembangan kelembagaan partai politik. Hal ini juga berkaitan dengan isu yang harus kita hadapi yaitu faksionalisme. Faksionalisme merupakan fenomena endemik di partai-partai dunia ketiga yang bertentangan dengan kohesi

organisasi (Randall & Svasand, 2002:19).

Keempat, bagaimana partai menjaga hubungan dengan anggotanya yaitu apakah dengan klientelisme/patronase atau menurut konstitusi partai (AD/ART). Klientelisme sama seperti faksi, tersebar luas di masyarakat dunia ketiga dan partai politiknya. Di masa lalu, para ilmuwan politik menyepakati bahwa partai politik yang berbasis patronase berperan positif dalam memfasilitasi pertumbuhan partai politik menghadapi birokrasi pemerintah. Namun, hubungan klien dalam partai, antar partai, atau dengan pendukung partai saat ini dianggap bertentangan dengan pelembagaan partai politik. Karena hal ini jelas melanggar peraturan dan prosedur yang tertera dalam konstitusi partai.

Klientelisme atau patronase menurut Warner seperti dikutip oleh Randall dan Svasand (2002:20) dapat merusak kohesi partai. Patronase memberikan akses kepada politisi untuk membangun karier pribadi dengan mengorbankan konstituen dan partai itu sendiri. Meskipun demikian, klientelisme/patronase tidak mengancam kohesi partai apabila kegiatan ini mampu dikendalikan dengan baik secara kolektif dan didistribusikan semata-mata demi kepentingan konstituennya.

2. Dimensi Identitas Nilai

Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai (Surbakti, 2003). Identitas nilai tampak bukan hanya pada pola atau arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukungnya. Partai dalam memperjuangkan kebijakannya tidak hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri. Partai juga memanfaatkan organisasi- organisasi sayap atau organisasi afiliasi. Partai itulah yang menjadi tulang punggung untuk merangsang pengembangan organisasi- organisasi lainnya (Randall & Svasand, 2002:21).

Partai politik dapat dikatakan terlembaga dalam dimensi

identitas nilai apabila partai tersebut telah memiliki pendukung loyal yang berasal dari golongan masyarakat tertentu baik itu buruh, petani, maupun kelompok etnis. Dukungan ini harus diberikan karena ideologi atau platform partai sama dengan kebijakan atau kepentingan yang diperjuangkan oleh kelompok tadi bukan karena transaksi yang bersifat material.

3. Dimensi Otonomi Kepuasan

Dimensi otonomi keputusan partai mengacu pada ketergantungan partai terhadap aktor eksternal. Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal memberikan implikasi terhadap partai itu sendiri. Kehadiran aktor eksternal ini cenderung menyebabkan pelembagaan partai yang lemah karena sumber legitimasi pimpinan dan objek loyalitas partai berada di luar partai (Randall & Svasand, 2002:22). Pola hubungan partai dengan aktor luar dapat berupa hubungan ketergantungan terhadap aktor luar; hubungannya bersifat saling tergantung; hubungan berupa jaringan yang memberikan dukungan kepada partai. Aktor luar yang dimaksud bisa pemerintah, pengusa, pengusaha, maupun organisasi masyarakat (Surbakti, 2003).

Suatu partai politik dikatakan terlembaga dalam segi otonomi partai apabila pengambilan keputusan partai ditentukan oleh anggota partai itu sendiri tanpa dipengaruhi maupun dikonsultasikan kepada aktor luar yang menjadi mitra partai tersebut. Partai politik akan mampu membangun otonomi dalam pengambilan keputusan jika partai memperoleh dana operasional dari iuran yang dibayarkan oleh anggota, kontribusi para pengurus, dan iuran aktivis lainnya.

4. Dimensi Pengetahuan Publik

Reifikasi atau pengetahuan publik mengacu pada sejauh mana partai politik melekat dalam imajinasi publik. Derajat pengetahuan publik ini menurut Surbakti dilihat dari sejauh mana kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat, bukan tentang sikap masyarakat terhadap partai politik (Surbakti, 2003).

Derajat pengetahuan publik ini juga dapat dilihat dari usia partai politik. Semakin tua partai politik, maka semakin dalam juga pengetahuan publik mengenai kiprah suatu partai politik. Namun, pengetahuan publik mengenai partai politik ini bukan hanya tentang eksistensi partai, tapi pengetahuan tersebut juga harus sesuai dengan identitas nilai atau platform partai. Pengetahuan yang sesuai dengan identitas atau platform partai ini maksudnya adalah masyarakat umum memahami alasan mengapa suatu partai politik melakukan tindakan ini dan tidak melakukan tindakan itu. Apabila hal ini telah dimiliki oleh partai politik, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembaga dalam segi pengetahuan publik.

Sejarah Kemunculan Partai Politik di Indonesia

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Partai politik pada pertama kali lahir di negara-negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Budiardjo, 1982: 397).

1. Masa Kolonial (Pra-Kemerdekaan)

Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program serta aktivitas politik.

Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa kolonial tersebut dan juga cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia, maka dari itu tidak heran apabila kelahiran Budi Utomo diidentikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo pada awalnya disebabkan oleh kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam jajahan Belanda. Dimana rakyat berada dalam kondisi menderita dan disiksa. Hanya sebagian pemuda dan pelajarlah yang menikmati pendidikan, akan tetapi hanya sebagian kecil pemuda yang menikmati pendidikan tersebut yang sadar akan kondisi kesengsaraan bangsa Indonesia. Sehingga atas dasar itu pemuda-pemuda tersebut mendirikan perkumpulan Budi Utomo dengan tujuan untuk memajukan rakyat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan (Muljana, 1968:114).

Keberadaan organisasi tersebut di ikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik. Partai-partai tersebut diantaranya adalah *Indische Partij* (IP), *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Perindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindro), Partai Indonesia (Pertindo), dan Partai Rakyat Indonesia (PRI).

Indische partij merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan, baik organisasi politik yang bersifat ilegal maupun legal (Poerwanta, 1994:35). Mengingat ekstrimnya pemikiran partai ini kala itu, *Indische Partij* hanya bertahan 8 bulan saja, hal itu disebabkan karena ketiga pemimpin mereka masing-masing dibuang ke Kupang, Banda dan Bangka, dan kemudian diasingkan ke Nederland (Chotib et al.,

2007:8). Setelah beberapa tahun diasingkan, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudi kembali ke Indonesia untuk mendirikan partai politik yang dinamakan sebagai National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang kemudian secara langsung mempelopori lahirnya beberapa partai politik lain yakni Indische Social Democratische Verening (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Muljana, 2008:97).

Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut, tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari kolonial Belanda. Bahkan, partai-partai tersebut tidak dapat beraktivitas secara damai dan lancar di zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, partai yang bergerak atau menentang tegas pemerintahan belanda akan dilarang, dimana pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan.

Pada masa kependudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, namun tokoh-tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat, pada saat terbentuknya BPUPK dan PPKI oleh pemerintahan Jepang, yang keanggotaannya di isi oleh tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik.

Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan pada umumnya bersifat iedeologis serta memiliki fungsi dan program utama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Partai-partai tersebut menjalankan fungsi mengagresikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mencapai kemerdekaan, serta menjalankan fungsi rekruitmen politik yang memunculkan tokoh nasional dan wakil rakyat yang menjadi anggota Volksraad.

2. Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu para tokoh nasional telah menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada UUD 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik, ketentuan yang terkait terdapat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI nantinya diharapkan menjadi partai tunggal yang mempelopori kehidupan bernegara Indonesia. Adanya gagasan mengenai partai tunggal adalah ide dari Soekarno yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Mentjapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933, yang pada intinya dalam tulisan tersebut Soekarno menegaskan bahwa untuk mencapai massa aksi diperlukan adanya satu partai pelopor, tidak dua ataupun tiga, sebab jika ada lebih dari satu akan membingungkan massa (Soekarno, 1964: 282-284). Pandangan tersebut ditanggapi oleh Maswadi Rauf (2006: 10-11) yang menyatakan bahwa Soekarno memiliki pemikiran yang anti sistem multi partai model barat dan sistem demokrasi parlementer sebab partai politik hanyalah sumber perpecahan yang akan memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan.

Tetapi adanya pertentangan mengenai gagasan partai politik tunggal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh

salah satu tokoh nasional yaitu Sjahrir yang pada saat itu menjadi Ketua BP KNIP, ia mengemukakan bahwa partai politik tunggal nantinya hanya akan menjadikan partai sebagai alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat (Legge, 1993: 180-181).

Berkaitan dengan Sjahrir menjadi Ketua BP KNIP maka pandangan yang telah dikemukakannya tersebut mempengaruhi usulan BP KNIP yang terdapat dalam pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional nomor 3, bahwa pembentukan satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, pada saat itu memang diperlukan untuk mempersatukan segala aliran dalam masyarakat guna mempertahankan negara. Namun yang dapat memenuhi keperluan tersebut adalah Komite Nasional. Dengan kata lain, Komite Nasional-lah yang mempersatukan berbagai aliran yang berbeda, apalagi sudah berubah menjadi badan perwakilan rakyat sejak 16 Oktober 1945 (Maklumat Nomor X 16 Oktober 1945).

Mengingat hal tersebut dan sesuai dengan semangat menjunjung asas demokrasi, diusulkan untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, dengan adanya partai-partai politik akan memudahkan memperkirakan kekuatan perjuangan serta meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya. Maka dari itu atas usul BP KNIP, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berisi pernyataan bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum (Noer, 1977:37). Maklumat ini di tanda tangani oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri (Asshiddiqie, 2006: 177).

Partai politik kemudian dipertegas kembali dalam Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang

menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik. Akibat dikeluarkannya maklumat tersebut mempengaruhi tokoh-tokoh lainnya, hal itu dilihat dari mulai bangkit kembali partai-partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan.

Partai-partai yang terbentuk setelah adanya maklumat tersebut adalah Masyumi, Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Banteng Republik Indonesia, Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai WanitaRakyat, Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Patai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Rakyat Sosialis (PRS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Sosialis Indonesia (Parsi) di bawah pimpinan Mr. Amir Sjarifuddin, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), dan Partai Indo Nasional.

Tujuan dari dibentuknya partai politik adalah mengorganisir konflik sosial dan artikulasi kepentingan sosial. Menurut Maklumat 3 November 1945 adalah untuk memperkuat perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari

berbagai golongan. Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk di perjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat, serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada (Safa'at, 2009:129).

Di masa kemerdekaan, polarisasi itu menguat karena Indonesia masa itu mengambil jalan demokrasi liberal, sehingga pada tahun 1955, sebagai pemilihan umum (pemilu) pertama, banyak sekali partai yang ikut terlibat (30an partai lebih). Namun pemilu tersebut menyaksikan empat pemenang yang terpolarisasi dari dua madzhab besar politik sebelum kemerdekaan. Keempatnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PNI dan PKI tampaknya berasal dari ideologi yang dibawakan oleh Syarikat Rakyat; dan Masyumi dan NU melanjutkan ideologi yang dibawakan Syarikat Islam (Idzam, 2020:2).

Polarisasi partai politik di Indonesia semakin rumit ketika memasuki pemilu kedua, yaitu pada tahun 1971; di mana ketika itu Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, atau apa yang disebut dengan Orde Baru. Namun karena riwayat pemenang dapat dilihat pada tahun 1955 bahwa ada empat pola partai, maka pada tahun 1971 situasi politik mengarahkan Indonesia pada 9 kontestan pemilu saja dengan dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya sejak pemilu 1977 hingga berakhirnya pemilu Orde Baru tahun 1997, Indonesia hanya punya 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Polarisasi klasik ala Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat tampak, tetapi ditengahi oleh Golkar yang merupakan *single majority*. Selama masa Orde Baru ini kampanye anti-kiri dan anti-kanan terus-menerus dikumandangkan.

Setelah Soeharto mundur, Indonesia kembali menyaksikan bermunculannya berbagai partai yang merupakan wadah aspirasi rakyat. Namun pemilu 1999 hanya bisa menyaksikan 5 pemenang mayoritas dari 48 kontestan pemilu. Dari lima itu, dua adalah pendatang baru, yaitu PKB dan PAN. Ketiga lainnya masih warisan Orde Baru, yaitu PDI-P, Golkar, dan PPP. Polarisasi klasik ala Orde Lama muncul lagi, yaitu adanya PKB sebagai representasi NU, dan PAN sebagai representasi Masyumi. Pada masa berikutnya Masyumi baru muncul dengan kekuatan tua dari PBB dan kekuatan muda dari PK/PKS (Idzam, 2020: 2-3).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini unik dan mempunyai tradisi yang cukup mengakar, yaitu kaum santri dan kaum abangan. Kaum santri mewakili tradisi Islam dan kaum abangan mewakili tradisi sekuler. Diantara keduanya selalu ada yang menengahi, berusaha mengatasi, dan berusaha pluralis. Tetapi ujung-ujungnya selalu ada polarisasi seperti tadi, kaum yang mengutamakan Islam dan kaum sekular. Apapun kejadian dan tradisinya, sebagai bangsa yang memodernisasi diri Indonesia selalu menunjukkan itikadnya sebagai bangsa yang demokrasi. Oleh karena itu segala perubahan haluan politik selalu diwadahi oleh hukum-hukum yang mengawali dan menyertainya. Di sinilah maka kita dapat melihat kembali dengan kajian sejarah hukum, bahwa untuk urusan politiknya, terutama politik kepartaian, Indonesia selalu menyediakan payung hukumnya, sehingga Negara Hukum (*Rechstaat*) itu menjadi kenyataan.

Demokrasi Partai Politik Pasca Reformasi

Pengertian demokrasi bila disederhanakan tidak lain adalah sistem yang ditandai adanya kebebasan, yang diatur menurut undang-undang. Realitas demokrasi tidak bisa

dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi negara dan masyarakat. Diantara karakteristik pergeseran pola *state society relation* pasca reformasi adalah adanya perluasan peran dan kebebasan masyarakat. Perluasan partisipasi tersebut berimplikasi pada semakin terbukanya kompetisi kepentingan antar elit massa.

Seringkali ada jarak yang senjang antara keputusan parpol dengan popularitas figur di mata rakyat. Hal ini dapat dimengerti karena parpol tidak selalu dapat memberi kebijakan populis, tetapi adakalanya membutuhkan langkah strategis. Trend para ketua parpol pada era Reformasi yang sebagian besar terpilih melalui cara aklamasi, ditambah durasi kepemimpinan lebih dari 10 tahun, turut mempengaruhi citra parpol adalah kepentingan oligarkis bukan representasi publik. Bukan karena aklamasi tidak dapat dikategorikan sebagai cara yang demokratis, tetapi karena parpol seperti gagap dalam mengorbitkan figur baru yang kapabel. Format Pemilu sistem proporsional terbuka, mengharuskan kampanye yang bertumpu pada calon langsung bukan parpol. Penggunaan dana dikelola sendiri oleh calon, membuka peluang adanya perang modal. Kecenderungan ini tentunya mudah untuk dipahami, karena parpol lebih tergiur pada keuntungan pragmatis, dan juga karena masyarakat sendiri belum sepenuhnya siap dalam berdemokrasi (Rauf, 2009).

Figur politik seharusnya dilahirkan melalui proses kaderisasi yang sistematis. Bukan tiba-tiba muncul menjelang musim Pemilu. Meskipun adakalanya kebebasan rekrutmen parpol disisi lain menunjukkan keterbukaan parpol, yang semakin mengindikasikan kebebasan sebagai karakteristik demokrasi. Kebuntuan kaderisasi parpol berakibat pula pada krisis kepemimpinan nasional. Pertanyaannya, masihkah relevan parpol diletakkan sebagai lembaga inti demokrasi, ketika acapkali masih disangskakan demokratisasi dalam parpol sendiri. Kegagalan politik pra reformasi dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas, dimulai dari kegagalan

parpol dalam menegakkan kedaulatan politik. Penguatan kelembagaan DPR pada masa reformasi, sebenarnya turut mendongkrak penguatan parpol (Hadi, 2006:30-57).

Demokratisasi parpol berkaitan erat dengan upaya apa yang dapat dilakukan, agar perwakilan yang terpilih melalui pemilihan umum, mencerminkan kompetensi dari kebutuhan masyarakat (Sianturi, 2018:1-22). Sepintas akan terlihat bahwa tidak ada relevansi antara sistem Pemilu dengan integritas dan kompetensi calon-calon yang masuk lingkaran kekuasaan. Namun ada beberapa alasan berikut ini, yang mengarah pada kesimpulan bahwa sistem Pemilu berpengaruh terhadap posisi parpol, sehingga menentukan pula demokratisasi parpol. Pertama, electoral sistem menentukan alokasi kursi yang akan diperoleh. Kedua, adanya electoral threshold, akan mewarnai bagaimana strategi parpol untuk dapat lolos. Ketiga, sistem Pemilu membawa konsekuensi terhadap proporsionalitas hasil pemilihan, akuntabilitas pemerintahan, dan kesatuan partai politik. Keempat suatu kebijakan merupakan dimensi yang paling mudah dikompromikan dalam sistem demokrasi.

Terwujudnya sistem kepartaian dan terselenggaranya Pemilu secara periodic, sering dianggap sebagai tolok ukur diterapkannya prinsip demokrasi. Menurut Maurice Duverger perkembangan parpol berjalan linier dengan perkembangan demokrasi, dalam hal perluasan hak pilih rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Teori ini menggarisbawahi bahwa penguatan propol sejalan dengan akses yang luas oleh rakyat terhadap kekuasaan. Semakin kuat Parpol semakin tinggi juga tingkat demokrasi.

Semenjak Reformasi, terhitung beberapa kali perubahan sistem Pemilu, dari perubahan regulasi yang berlaku, sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 3 tahun 1999, sebagai landasan pelaksanaan Pemilu tahun 2009;
- Undang-undang nomor 12 tahun 2003, sebagai landasan

pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang diperbaui dengan peraturan pemerintah penganti Undang-undang nomor 2 tahun 2004;

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang ditinjau dengan Keputusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang Pasal 124;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2014; 5.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilihan kepala daerah;
- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Akibat dari perubahan undang-undang tersebut, maka setiap Pemilu mengandung sedikit perbedaan. Pemilu 1999 dicirikan dengan kembalinya sistem multi partai tetapi perwakilan tertutup. Pemilu 2004 berubah menjadi sistem perwakilan semi terbuka, ada nama calon tetapi penentuan calon terpilih didasarkan dengan nomor urut. Pemilu tahun 2009 dicirikan dengan sistem terbuka, penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Pemilu 2009 mulai diterapkan ambang batas parlemen. Pemilu 2014 hampir sama teapi ambang batas parlemen dinaikkan. Pemilu 2019 waktunya bersamaan dengan pilihan presiden.

Perubahan sistem Pemilu menuntut strategi parpol berubah pula. Bagaimana langkah yang diambil parpol berimplikasi pada indeks demokrasi, apakah kearah kemajuan, atau hanya jalan di tempat, ataukah justeru berjalan mundur.

Tabel 4.
Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemilu terhadap Parpol

Identifikasi sistem (Tahun)	Demokratisasi Parpol	Sistem Rekrutmen dan
-----------------------------	----------------------	----------------------

Pemilu)		Penetapan Calon
Proporsional Tertutup (1999)	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan latar belakang partai dan ideologi sebagai daya tarik kampanye Parpol dengan basis masa yang jelas, lebih diuntungkan Muncul politik aliran 	<ul style="list-style-type: none"> Dipilih dengan sangat mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi. Parpol memiliki kedaultan mengirimkan wakilnya dari kader yang berkualitas. Parpol memiliki kewenangan mengirimkan wakil dari kalangan minoritas yang sulit terpilih dengan sistem terbuka.
Proporsional semi Terbuka (2004)	<ul style="list-style-type: none"> Elektabilitas parpol akan terkotrol oleh calon yang popular dan calon yang memiliki sumberdaya. Parpol tidak kehilangan kesempatan menetapkan kader yang diprioritaskan, melalui nomer urut. Sebaliknya parpol besar turut meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Penjaringan terbuka, tetapi penentuan nomer urut secara tertutup. Menetapkan daftar urut prioritas bagi kader utama, mengikutsertakan figur popular dan memiliki sumber daya modal pada urutan berikutnya

	elektabilitas calon	
Proporsional Terbuka (2009)	<ul style="list-style-type: none"> Partarungan calon melampui pertarungan program dan ideologi Sering terjadi persaingan antar calon dalam satu parpol 	Merekrut sebanyak mungkin calon yang memiliki sumber daya dan calon yang memiliki popularitas tinggi. Misalnya dari kalangan artis
Ambang Batas Parlemen (2014)	Partai akan melakukan langkah ketat agar lolos ambang batas	Calon yang memiliki sumberdaya semakin mendapat prioritas
Pemilu dan Pilpres serentak (2019)	Perolehan suara pilpres berkorelasi dengan perolehan suara gabungan partai pengusung	Calon direkrut dengan mempertimbangkan prospek, meskipun bukan berasal dari kader, bahkan dari yang berasal dari basis lawan

Parpol yang selain harus menjaga marwah demokrasi, berkepentingan pula mempertahankan dan mengembangkan posisi tawarnya. Demokrasi parpol dalam rumusan IDI mencakup dua hal yaitu kaderisasi dan proporsi keterlibatan dan keterwakilan perempuan. Tulisan hanya mengambil bagian pertama yaitu kaderisasi. Kaderisasi bagaimanapun juga merupakan poin terpenting dari keberadaan parpol. Parpol dalam makna dasarnya sebagai organisasi kader, dan berkompetisi dalam kontestasi demokrasi, tidak lain adalah pertarungan tokoh-tokoh politik agar diterima rakyat dan menguasai pemerintahan.

Hakekat dari keberhasilan parpol dalam memperoleh suara dukungan adalah keberhasilan dalam mencetak wakil-wakilnya dalam pemerintahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kasus yang menunjukkan berjalanannya proses kaderisasi parol,

jikalau suara kecil tetapi kadernya leading, dibandingkan memperoleh suara banyak tetapi minim dalam memegang jabatan-jabatan strategis. Semakin banyak kader yang menjabat sama artinya dengan semakin besar kesempatan menaikkan kepercayaan dengan rakyat. Kaderisasi parpol memiliki makna yang luas, dalam fungsi parpol sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik. Penelitian ini akan menitikberatkan pada tiga bagian terpenting dalam kaderisasi parpol, yaitu: rekrutmen anggota, mekanisme penetapan calon, dan mekanisme pergantian antar waktu (*recall*).

Implikasi Penerapan Multi Partai di Indonesia

Dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Dalam perubahan Undang Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Undang Undang ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang;
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; dan
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dari ketentuan ini dan ketentuan pasal 20 di atas dapat diketahui bahwa terdapat pergeseran kekuasaan membentuk Undang Undang dari tangan Presiden ke tangan DPR.

Permasalahannya adalah dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut tidak adanya hak veto bagi Presiden untuk menolak sebuah rancangan Undang Undang yang telah disetujui. Padahal dalam sistem presidensial setiap kekuasaan memiliki mekanisme *check and balances* untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan di tangan satu lembaga negara. Persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan Undang Undang tidak dapat dijadikan acuan bahwa presiden juga menyetujui Rancangan Undang Undang tersebut, hal ini karena praktek pemerintahan di negara modern tidak memungkinkan presiden untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang bersama DPR secara langsung akan tetapi presiden mendelegasikannya kepada bawahannya dalam hal ini adalah menteri yang membidangi Rancangan Undang Undang tersebut.

Persetujuan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang Undang yang diwakili oleh menteri seharusnya disetujui terlebih dahulu oleh presiden sebelum diundangkan, karena Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan pejabat yang bertanggungjawab kepada rakyat terhadap kebijakan yang diambil kabinetnya, karena menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hubungan yang tercipta antara Presiden dengan DPR menurut Syamsuddin Haris merupakan hubungan yang bersifat politik-transaksional, hal ini dikarenakan dukungan riil politik presiden di parlemen merupakan minoritas dan fragmentasi partai politik di parlemen yang lebar.

Oleh karena itu untuk memperoleh dukungan parlemen Presiden harus membuka ruang kompromi yang besar dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini disinyalir menjadikan

produk legislasi Presiden dan DPR banyak memiliki kelemahan karena sarat dengan kepentingan sesaat hasil dari kompromi yang luas. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari banyaknya gugatan *judicial review* materi Undang Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Undang Undang merupakan produk yang menjelaskan secara normatif kehendak politik DPR dengan pemerintah. Karena itu masuknya pertimbangan atau kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi masuknya kepentingan politik ini seharusnya tidak sampai menjadikannya sebagai suatu undang-undang yang bermuatan kepentingan politik.

Indonesia menganut sistem multi partai. Indonesia menerapkan secara bersamasama sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional representation yang berakibat sulitnya memperoleh suara mayoritas di parlemen dan *majority government*. Keadaan demikian mengakibatkan lahirnya koalisi partai yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Sistem multipartai dengan jumlah partai sangat banyak perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai dengan jumlah partai yang banyak perlu perubahan secara institusional menjadi sistem multipartai sederhana sehingga implikasi dalam penggabungan multi partai di tengah sistem presidensial dapat diredam.

Terdapat 3 (tiga) cara yang harus dilakukan meredam implikasi yang terjadi di tengah sistem Multi Partai dalam sistem presidensial, yaitu:

- Pertama, Penyederhanaan partai politik perlu dilakukan karena sistem multi partai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional (*institutional engineering*), antara lain: menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed*

member proportional), memperkecil besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Indonesia telah menerapkan 2 dua alternatif guna penyederhanaan partai politik dengan menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, dan menggabungkan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

- Kedua, Desain pelembagaan koalisi. Pada era Reformasi, kecenderungan koalisi partai dalam kehidupan politik Indonesia mulai terbangun pasca-Pemilu 1999, yaitu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR. Koalisi dalam bentuk Poros Tengah, yang dimotori PAN dan PPP berhasil menaikkan Abdurahman Wahid sebagai presiden pertama era Reformasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, koalisi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar tawar untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

Ketiga, Pengaturan pelembagaan terhadap partai politik yang memilih menjadi oposisi perlu dilakukan, guna menjadi penyeimbang dalam jalannya pemerintahan. Istilah oposisi telah menjadi bagian dalam wacana politik di Indonesia sejak dimulainya era presidensialisme multipartai. Tetapi istilah ini tampaknya dipahami secara beragam. Sebagian pengamat politik sering menghubungkan oposisi dengan sistem parlementer sehingga menganggapnya asing bagi sistem presidensial. Dengan adanya partai oposisi, akan bisa dihindari praktik-praktek politik yang bersekongkol antara pemerintah dan para anggota legislatif dan praktik politik uang atau suap untuk mengegarkan kebijakan pemerintah kecil kemungkinan bisa dilakukan.

d) Rangkuman

- a. Carl J. Friedrich memberikan definisi partai politik adalah

kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat formil maupun materil (Budiardjo, 1988: 160-161).

- b. Partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus, sarana untuk mencapai cita-cita bangsa serta dituntut mampu untuk mengarahkan artikulasi arah dan tujuan partai, karena partai politik memiliki kewajiban, antara lain: sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara (Nasution, 2012:38).
- c. Secara umum sistem partai berarti menjelaskan bagaimana suatu sistem kepartaian dalam suatu pemerintahan. Sistem kepartaian menurut Maurice Duverger (Budihardjo: 2008: 415-420) dibagi menjadi tiga kategori yaitu Sistem Partai Tunggal, Sistem Dwi-Partai, dan Sistem Multi-Partai.
- d. Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas (2011:91) rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.
- e. Randall dan Svasand (2002:13) memahami institusionalisasi atau pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural di mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya.

e) Latihan

- 1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* tentang partai politik sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
- 2. Hasil *review* bacaan terhadap modul dikembangkan dalam bentuk tulisan malah/jurnal kemudian dipaparkan secara berkelompok oleh mahasiswa.

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman mahasiswa terhadap hasil bacaan dan *review* modul.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan, *review* dan pengembangan hasil bacaan yang dilihat saat pemaparan.

g) Umpam Balik

3. Penutup

a) Rangkuman

Partai Politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai wadah Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, menciptaan iklim politik yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga Negara Indonesia, serta wadah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan secara berkala merupakan syarat utama pelaksanaan demokrasi. Huszar dan Stevenson dalam buku Sukarna (1981:89) mengatakan, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Kehadiran partai politik di Indonesia sejak awal ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi seperti Budiutomo, Indische Partij (IP), Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Perindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindro), Partai Indonesia (Pertindo), dan Partai Rakyat Indonesia (PRI). Indonesia sendiri menganut system Multi-Partai sehingga memberi peluang lahirnya berbagai partai politik yang dibentuk oleh kelompok dengan latar belakang yang beragam seperti kelompok nasionalis, agamis dan kelompok buruh. Implikasi dari system multi partai adalah

penguasaan jabatan-jabatan politik baik legislative maupun eksekutif oleh beberapa partai yang merupakan partai pemenang pemilu. Sampai hari ini tercatat setidaknya terdapat 76 Partai Politik yang telah memiliki kekuatan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham. Meskipun demikian namun dalam konteks keterlibatan aktif, hanya partai-partai yang dianggap lolos dan memenuhi syarat yang akan bertarung dalam Pemilu sebagai gerbang untuk mendistribusikan kader-kadernya untuk menduduki sejumlah jabatan politik di Indonesia. Dari para kader partai politik yang terpilih dalam Pemilu inilah yang akan menentukan berbagai kebijakan untuk menjawab sejumlah permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

1. Klasifikasikan ideologi partai politik apa saja yang menjadi peserta pemilu 1955?
Ideologi yang dimaksud antara lain nasionalisme, marxisme, sosialisme, dan agama.
2. Jelaskan alasan pemerintahan orde lama melakukan fusi partai politik?
Beberapa alasan utama mengapa pemerintahan Orde Lama melakukan fusi partai politik antara lain:
 - a) Konsolidasi Kekuasaan.
 - Mengatasi Ketidakstabilan Politik.
 - Menghadapi Tantangan Ideologis.
 - Mengamankan Kedudukan Politik Elite.
 - Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan.
 - Penguatan Pemerintahan Otoriter.
3. Jelaskan alasan pemerintahan orde baru melakukan fusi partai politik?
Alasan utama di balik kebijakan ini antara lain:
 - a) Stabilitas Politik dan Keamanan.
 - b) Penguatan Otoritas dan Kontrol Pemerintah.
 - c) Pengawasan Terhadap Partai Politik.
 - d) Pencegahan Pengaruh Ideologi Kiri.

- e) Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan.
- f) Peran Ganda ABRI dalam Pembangunan Nasional.
4. Jelaskan dinamika politik yang berkembang pada pemilu yang dilaksanakan pasca reformasi 1998?
- Berikut adalah beberapa aspek dinamika politik yang berkembang pada pemilu pasca Reformasi:
- Pluralisme Politik dan Partai Politik.
 - Pemilihan Umum Langsung dan Pilkada.
 - Partai Koalisi dan Aliansi.
 - Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Serentak.
 - Isu Regional dan Otonomi Daerah.
 - Partisipasi Masyarakat Sipil.
 - Media dan Teknologi Informasi.
 - Isu Korupsi dan Reformasi Birokrasi.
 - Dinamika Politik Identitas.
 - Pertumbuhan Partai Populis.
 - Siklus Pemilihan dan Pergantian Kepemimpinan.

c) Daftar Istilah

Elit	Sekelompok kecil orang-orang berkuasa
Kaderisasi	Proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader
Kliantelisme	Hubungan pertukaran timbal balik dan hierarkis yang dibentuk melalui pertukaran sumber daya material atau non-material antara kandidat dan pemilih.
Konstitusional	Suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter
Legitimasi	Penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh

	masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan
Loyalis	Pengikut atau pendukung (pemerintah dan sebagainya) yang setia
Partisan	Pengikut partai
Pemilu	Pemilihan Umum
Rekrutmen Politik	Proses pemilihan, seleksi dan pengangkatan sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik
Single Majority	Majoritas tunggal

d) Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Pertama Jakarta:Konstitusi Press hlm.153.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan ketiga, hlm.177.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan.
- Budiardjo, Miriam. (1988). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 160-161.
- Budihardjo, Miriam. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chotib, et al. (2007). *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira, hlm. 8.
- Fadillah, Icwan Nur. (2017). Pendidikan Politik oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Pekan Baru Tahun 2015-2016, *JOM Fisip*, 4(1), hlm 6.
- Fadillah Putra. (2003). *Partai Politik & Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 66.
- Handoyo, B., Hestu Cipto. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm: 259.

- Haryanto. (1984). *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Liberty, hlm.46.
- Huntington, Samuel P. (1983). *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jakarta: CV.Rajawali, hlm.23.
- Idzam, Fautanu. (2020). *Partai Politik di Indonesia*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Katz, Richard S., & William Crotty. (2014). *Handbook Partai Politik*. Nusa Media: Bandung.
- Kurniasih Dewi, & Rohmawati, Tatik. (2013). Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Partai Politik (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013), *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 11(1), hlm 241.
- Legge, J., D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 180 – 181.
- Maklumat Nomor X 16 Oktober 1945. Berita Repoeblik Indonesia Tahun I Nomor 2, h. 10. Diambil dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Dijilid I, (Djakarta-Bandung: Neijenhuis & Co. N. V., 1950), hlm. 60.
- Muljana, Slamet. (1968). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.114.
- Muljana, Slamet. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS, hlm. 97
- Nasution, Muhammad Arifin. (2012). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan, *Jurnal Politeia*, 4(1), hlm 38.
- Noer, Deliar. (1977). Perkembangan Demokrasi Kita, *Prisma* 2, hlm.37.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 342.
- Poerwanta, PK. (1994). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 35.
- Randall, Vicky & Lars Svasand. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics* 8(1), hlm.13.
- Rauf, Maswadi. (2006) Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan, *Jurnal Politika*, Vol.2, hlm. 10 – 11.
- Rauf, Maswadi, dkk. (2009). *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*. Jakarta: United Nations Development Programme, Indonesia.
- Safa'at, Muhammad Ali. (2009). *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum Dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas

- Indonesia Program Pasca Sarjana, hlm.129.
- Shubhan, Hadi. (2006). *Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Politik Anggota Parpol*. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 30-57.
- Sianturi, Kristina Agustiani. (2018). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-22.
- Soekarno. (1964). *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I. Jakarta: Panitya, hlm. 282 – 284.
- Subekti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm 13.
- Surbakti, Ramlan. (2003). Tingkat Pelembagaan Partai Politik, *Harian Kompas*, 6 Januari 2003.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wijayanti, Septi Nur. (2017). *Corporate Political responsibility (CPR) Sebagai Upaya Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik*. Yogyakarta: Repository UMY, hlm 1.

MODUL 7

KEKUATAN POLITIK LEMBAGA NEGARA: PERAN BIROKRASI DAN PARLEMEN DI INDONESIA

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai kekuatan politik di Indonesia, lembaga negara merupakan salah satu yang tidak dapat dipungkiri. Kekuatan lembaga-lembaga negara memberikan kontribusi besar bagi Indonesia sejak zaman kolonial, pasca kemerdekaan sampai saat ini. Birokrasi merupakan salah satu lembaga negara yang diamanatkan untuk menyelenggarakan urusan pelayanan publik dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada masa orde baru, Birokrasi dijadikan alat oleh Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun pasca orde baru yang ditandai dengan Reformasi 1998, Birokrasi mulai berbenah dengan kembali difokuskan pada agenda pelayanan dan tidak terlibat dalam politik praktis seperti yang terjadi pada masa orde baru. Selain Birokrasi, Parlemen sebagai lembaga perwakilan yang meliputi MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan Indonesia. Melalui Parlemen, masyarakat memiliki kekuatan untuk ikut terlibat (secara tidak langsung) untuk menentukan suatu kebijakan dan melaksanakan pengawasan atas anggaran maupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu maka pengetahuan tentang Birokrasi dan Parlemen sebagai lembaga negara perlu diketahui dan dipahami oleh mahasiswa dalam mempelajari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran dari Modul 7 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik.
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari modul 7 ini adalah Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan kembali tentang kekuatan-kekuatan politik lembaga negara diantaranya Birokrasi dan Parlemen.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5) Kegunaan Modul 7

Kegunaan atau manfaat dari modul ini adalah membantu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kekuatan-kekuatan politik dari lembaga-lembaga negara diantaranya Birokrasi dan Parlemen yang ada di Indonesia.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi Birokrasi yang mengarah pada pelayanan publik, Birokrasi dan birokratisasi, Hubungan birokrasi dan politik, dan Perkembangan birokrasi di Indonesia, dan
2. Kedudukan Parlemen sebagai lembaga perwakilan yang meliputi Sejarah Parlemen di Indonesia, Fungsi Parlemen sebagai lembaga perwakilan, dan Perkembangan parlemen di Indonesia pasca Amandemen UUD 1945.

b. Kegiatan Pembelajaran 1

1) Kegiatan Pembelajaran

- a) Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Birokrasi yang mengarah pada pelayanan publik, Birokrasi dan birokratisasi, Hubungan birokrasi dan politik, serta Perkembangan birokrasi di Indonesia.

- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Birokrasi Yang Mengarah Pada Pelayanan Publik

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diundangkan oleh pemerintah, dan berbagai kebijakan publik yang dituangkan dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan yang dikembangkan dalam rangka

penyelenggaraan negara dan pembangunan, akan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah apabila terdapat “birokrasi yang sehat dan kuat”, yaitu “birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara”.

Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam sistem administrasi negara (baca: dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bangsa), dan sesuai pula dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai pengetahuan dan informasi serta dukungan sumber daya yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi dan kemampuan sangat besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha (Hadisuwarto, Ruminta, 2001).

Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategik seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik birokrasi pada partai tertentu; birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak penguasa. Kalau perilaku birokrasi berkembang dalam pengaruh politik seperti itu dan menjadi tidak netral, maka birokrasi yang seharusnya mengemban misi menegakkan “kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan optimal kepada masyarakat”, besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai atau partai-partai; sehingga terjadi pergeseran keberpihakan dari “kepentingan publik” ke pada “pengabdian pada pihak penguasa atau partai-partai yang berkuasa”. Dalam kondisi seperti itu, KKN akan tumbuh dan birokrasi akan kehilangan jati dirinya, dari pengemban misi

perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit (Hadisuwarto, Ruminta, 2001).

Sejarah Indonesia menunjukan, birokrasi yang tidak netral telah turut membawa Indonesia pada jurang kekacauan politik; dan birokrasi yang tidak netral selalu tumbuh bersama dengan kekuatan dan kepentingan politik atau golongan tertentu, selalu terjebak dalam godaan KKN, dan akhirnya juga membawa negara kita pada kehancuran ekonomi. Hal semacam itu telah terjadi pada setiap “rezim pemerintahan”; dengan akibat dan dampak yang serupa berupa kelemahan bangunan kelembagaan hukum, dan kehancuran kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Tuntutan akan reformasi birokrasi mengandung makna perlunya langkah-langkah pendayagunaan bukan saja (a) terhadap sistem birokrasi dan birokrat, tetapi juga (b) langkah-langkah serupa pada berbagai institusi dan individu di luar birokrasi, baik publik maupun *private*, termasuk lembaga-lembaga negara dan berbagai lembaga, yang berkembang dalam masyarakat, beserta segenap personnelnya; dan (c) semuanya itu dilakukan secara sinergis dengan semangat “mengembangkan perjuangan yang diamanatkan konstitusi”, dan mengindahkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Hadisuwarto, Ruminta, 2001).

Reformasi birokrasi, dengan demikian, dalam konsteks pembangunan sistem administrasi negara tersebut, baik di pusat maupun di daerah-daerah, perlu memperhatikan aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip berikut (Leighton, Sherry, 2002):

Pertama, demokrasi dan pemberdayaan. Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara dan seluruh unsur aparatur negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan pemberdayaan bagi mereka yang dalam posisi lemah secara rasional dan berkeadilan. Demokrasi tidak hanya mempunyai

makna dan berisikan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab; demokrasi juga mengandung tuntutan kompetensi dan bermakna kearifan dalam memikul tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan berkeadaban, disertai komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.

Dalam hubungan itu, birokrasi dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi mengarahkan (*steering rather than rowing*), atau memilih kombinasi yang optimal antara steering dan rowing apabila langkah tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Yang jelas sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan lagi oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (*empowered*). Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah di dalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, peran pemerintah dapat direinveting antara lain melalui (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (e) pengembangan program untuk lebih meningkatkan keamampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, pelayanan. Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (*a spirit of public services*), dan menjadi mitra masyarakat (*Partner of society*); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat (*Coproduction atau*

partnership). Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik (*code of ethical conducts*) yang didasarkan pada dukungan lingkungan (*enabling strategy*) yang diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Ketiga, transparansi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik, aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara.

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, selain (1) memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitas mereka. serta (3) member kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan

keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keempat, partisipasi. Masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan *public good and services* dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan, dan bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering rather than serving*), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) juga selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan keswadayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*). Jangan diabaikan pula penyebaran informasi mengenai berbagai potensi dan peluang pembangunan nasional, regional, dan global yang terbuka bagi daerah; serta privatisasi dalam pengelolaan usaha-usaha negara.

Kelima, kemitraan. Dalam membangun masyarakat yang modern dimana dunia usaha menjadi ujung tombaknya, terwujudnya kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah yang terarah pada peningkatan mutu dan efisiensi serta produktivitas usaha amat penting, khususnya dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, dan informasi. Dalam upaya mengembangkan kemitraan dunia usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar, menengah, dan kecil,

peranan pemerintah ditujukan kearah pertumbuhan yang serasi. Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagai kebijaksanaan dan perangkat perundang-undangan yang mendorong terjadinya kemitraan antarskala usaha besar, menengah, dan kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa, dan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya, serta pengintegrasian usaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serta mendorong proses pertumbuhannya. Dalam proses tersebut adanya kepastian hukum sangat diperlukan.

Keenam, desentralisasi. Desentralisasi merupakan wujud nyata dari otonomi daerah, merupakan amanat konstitusi, dan respons atas tuntutan demokratisasi dan globalisasi. Peningkatan kompetensi dan Penguatan kelembagaan sangat diperlukan dalam mewujudkan format otonomi daerah tersebut, termasuk kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian perizinan, yang tetap terarah pada keterikatan dan pada perwujudan cita-cita dan tujuan NKRI. Perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang pembangunan menuntut pengambilan keputusan dan pelayanan yang tidak terpusat, tetapi tersebar sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab yang ada di daerah. Karena pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah, berbagai kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Langkah-langkah serupa perlu diikuti pula oleh organisasi-organisasi dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta, sehingga pengambilan keputusan bisnis bisa pula secara cepat dilakukan di daerah (Karim, Patiasina, 2003).

Ketujuh, konsistensi kebijakan, dan kepastian hukum. Tegaknya hukum yang berkeadilan secara efektif merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pernerrintahan yang baik dan bersih, justru di tengah kemajemukan, merajalelanya

KKN termasuk *money politics*, berbagai ketidakpastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum (Karim, Patiasina, 2003).

Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum dan harus mengandung kepastian hukum (Walsh and Stewart, 1992).

Wujud dari cita-cita reformasi birokrasi adalah berupa sistem dan proses pemerintahan negara berdasarkan hukum yang merupakan perwujudan atas nilai peradaban dan kemanusiaan yang luhur, dilaksanakan dengan penuh kearifan, ketaatan, atau kepatuhan sebagai aparatur negara, warga negara, dan warga masyarakat dunia. Dengan demikian hukum dapat ditempatkan pada tingkat yang paling tinggi, yang pada akhirnya tidak boleh lagi menjadi subordinasi dari bidang-bidang lain, tapi menghikmati bidang-bidang lain.

Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum, sehingga kepentingan ekonomi dan politik tidak dapat lagi memanipulasi hukum sebagaimana lazimnya terjadi. Pembangunan hukum sebagai sarana mewujudkan supremasi hukum, harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum, harus diberikan tempat yang strategis sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hukum juga harus bersifat netral dalam menyelesaikan potensi konflik dalam

hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (Walsh and Stewart, 1992).

Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi oleh konsep yang jelas, dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap HAM benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjamin adanya pemerintah yang bersih (*clean government*) serta kepemerintahan yang baik (*good governance*), maka pelaksanaan pembangunan hukum harus memenuhi asas-asas kewajiban prosedural (*fairness*), pertanggungjawaban publik (*accountability*) dan dapat dipenuhi kewajiban untuk peka terhadap aspirasi masyarakat (*responsibility*).

Birokrasi dan Birokratisasi

Max Weber (1978) mungkin menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di dunia karena pengaruh ajarannya pada ilmu pengetahuan sosial. Ia terkenal oleh karena studinya mengenai pembirokrasian masyarakat; banyak aspek dari administrasi publik moderen berpaling kepadanya; pendekatan klasik, pegawai pemerintah yang secara organisasi hirarkhis selanjutnya disebut “Weberian *civil service*.” akan tetapi, bertolak belakang dengan pendapat masyarakat umum, “*bureaucracy*” merupakan kata yang berasal dari Inggris jauh sebelum Weber; Kamus Bahasa Inggris terbitan Oxford menyebutkan kata ini beberapa kali dalam edisi tahunan yang berbeda antara tahun 1818 dan 1860, sebelum tahun kelahiran Weber pada 1864.

Organisasi formal dibentuk secara sengaja yang mencerminkan pembagian kerja. Oleh Max Weber dan Parson organisasi semacam ini merupakan posisi-posisi yang ditetapkan secara formal, dan interaksi antara posisi-posisi tersebut ditentukan oleh keterkaitan peranan dari masing-masing posisi.

Secara spesifik Weber (1978) menyebut organisasi semacam ini sebagai birokrasi.

Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien daripada alternatif yang terdapat sebelumnya, yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional. Menurut terminologinya, birokrasi merupakan bagian dari dominasi legal. Akan tetapi, ia juga menekankan bahwa birokrasi menjadi ineffisien ketika keputusan harus diadopsi kepada kasus individual.

Menurut Weber (1978), atribut birokrasi moderen termasuk kepribadiannya, konsentrasi dari arti administrasi, efek daya peningkatan terhadap perbedaan sosial dan ekonomi dan implementasi sistem kewenangan yang praktis tidak bisa dihancurkan. Birokrasi ala Weber dikenal juga dengan sebutan “Birokrasi Weberian”.

Tidak bisa disangkal bahwa birokrasi merupakan suatu model organisasi yang sangat efektif dan efisien. Diantara berbagai bentuk tindakan sosial, Weber (1978) melihat bahwa yang paling dominan dalam era industri modern adalah tindakan rasional, dan menjadi dasar kelahiran model organisasi birokrasi. Menurut Weber, Organisasi birokratis memiliki tujuan yang ditetapkan secara jelas, menggunakan kalkulasi yang akurat mengenai cara mencapai tujuan tersebut, dan secara sistematis mengeliminasi hal-hal yang menghambat pencapaian tujuan tersebut (lihat Van Krieken, Smith et al., 2000).

Secara khusus Weber (1978) menyebutkan karakteristik organisasi birokrasi dalam bentuknya yang murni atau ideal sebagai berikut:

- 1) Tugas-tugas yang kompleks dibagi kedalam bagian-bagian yang kemudian tanggung jawab pelaksanaanya diserahkan sebagai tugas resmi kepada setiap anggota organisasi.
- 2) Mengikuti prinsip hierarki dengan rantai komando,

- dimana unit-unit yang lebih rendah dikendalikan oleh dan bertanggung jawab kepada unit yang lebih tinggi.
- 3) Penyelenggaraan tugas didasarkan pada peraturan yang tegas. Prosedur tetap menjadi dasar pelaksanaan tugas yang menekankan kedisiplinan dan pengendalian yang menyisakan hanya sedikit ruang bagi pegawai untuk berinisiatif dan berinovasi.
 - 4) Pegawai melaksanakan tugasnya secara formalistik dan impersonal. Segalanya ditetapkan dengan hukum dan aturan yang objektif, sementara unsur personal, irasional dan emosional dieliminasi.
 - 5) Pegawai diserahi tugas berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.
 - 6) Pemisahan secara tegas antara pendapatan peribadi dan pendapatan organisasi.

Karakteristik tersebut di atas menjadikan model organisasi birokrasi unggul secara teknis yang hingga kini belum tertandingi. Kendati demikian, Weber (1978) juga memperingatkan bahwa kalau organisasi birokrasi benar-benar mencapai bentuk idealnya tersebut, maka ia akan menjadi “kerangkeng besi” (*iron cage*) yang bisa memenjara daya kreativitas dan inovasi pegawai. Ritzer (1996; 1998), seorang mengikut teori Weber, menganggap bahwa kini birokrasi sudah semakin mendekati tipe ideal tersebut. Hal ini, misalnya, terlihat pada masyarakat Amerika dan bahkan masyarakat dunia yang sudah diorganisir secara kaku sebagaimana layaknya restoran cepat saji McDonald, dimana prosedur, waktu, urutan pelayanan sudah dikalkulasi secara baku. Inovasi pegawai tidak lagi dibutuhkan karena hanya akan merusak standard yang sudah ditetapkan. Meskipun organisasi birokrasi formal belum sepenuhnya mencapai karakteristik ideal tersebut di atas, sebagian peneliti sepakat dengan Ritzer dan berargumen bahwa efek kerangkeng besi tersebut sudah semakin terasa dan menggejala.

Seorang pejabat birokrasi adalah berkepribadian bebas dan ditunjuk dalam posisi berdasarkan peraturan, menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan gaya kepemimpinan yang adil, dan kesetiaannya tergambar melalui pelaksanaan tugasnya secara sepenuh hati, penunjukkan dan penempatan kerja berdasarkan kualifikasi teknis yang dimiliki, kerja administratif dikerjakan penuh waktu (*full time*), pekerjaan diganjar berdasarkan upah harian dea prospek masa depan sepanjang karir.

Seorang pegawai pemerintah harus menggunakan penilaian dan keterampilannya, akan tetapi tugasnya adalah menempatkan kedua hal tersebut pada kewenangan yang lebih tinggi; akhirnya ia hanya bertanggungjawab untuk menjalankan sebagian tugas yang telah ditugaskan dan harus mengorbankan penilaiannya apabila bertentangan dengan tugas pekerjaannya. Pola kerja Weber banyak diikuti oleh yang lainnya seperti Robert Michels (Knoke, D. & Kuklinski, 1982) dengan teori Besi Oligarki (*Iron Law of Oligarchy*).

Teori birokratisasi Weber tadi menimbulkan satu pertanyaan yang selalu mengusik di benak para sarjana administrasi pembangunan: “Apakah birokratisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi sebagai prasarana pembangunan ekonomi?” Atau, sebaliknya, sudahkah birokratisasi yang terlalu berlebihan (*overbureaucratization*) justru telah menjadi beban yang menghambat kemajuan ekonomi negara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibahas proses birokratisasi secara lebih mendalam agar kita dapat memban-dingkan tingkat birokratisasi di Indonesia dengan di bebera-pa negara di kawasan ini. Evers (1987) dalam analisisnya tentang birokratisasi Asia Tenggara membedakan tiga pola birokratisasi berikut:

- 1) Pola pertama adalah birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintahan dan aparat administrasi negara. Proses ini menjadi fokus dan dibahas secara luas dalam teori

Weber dan oleh Evers dinamakan birokratisasi a la Weber atau Weberisasi atau Birokrasi Weber.

- 2) Pola kedua adalah proses birokratisasi dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai negeri dan pembesaran organisasi pemerintah. Dalam literatur ilmu sosial sering disebut nama Parkinson, tokoh ilmu sosial dari Universitas Singapura menjadi terkenal karena “*Parkinson's Law*” yang telah diciptakannya. Hukum Parkinson ini menyatakan; (a) tiap pegawai negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya, dan (b) tiap pegawai akan selalu menciptakan tu-gas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya. Karena itu laju birokratisasi akan meningkat dan jumlah pegawai negeri akan naik secara otomatis tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan. Pola semacam ini disebut Evers birokratisasi Parkinson.
- 3) Pola ketiga adalah birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan peraturan, regulasi, dan bila perlu pemaksaan. Proses ini disebut Evers birokratisasi Orwell atau Orwellisasi sesuai dengan gambaran masyarakat yang digambarkan oleh penulis George Orwell dalam novelnya yang berjudul “1984”.

Tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi aspirasi publik pasca Orde Baru, tampaknya kini perlu diangkat kembali sebagai isu publik. Apalagi dari sejumlah agenda reformasi yang telah dilaksanakan selama ini, birokrasi merupakan salah satu wilayah yang belum tersentuh secara signifikan. Presiden SBY pun beberapa waktu lalu telah merespon tuntutan ini dengan mengemukakan akan memimpin sendiri secara langsung proses reformasi birokrasi ini dengan membentuk tim khusus. Entah tim khusus seperti apa yang akan dibentuk, belum ada penjelasan konkret.

Salah satu masalah krusial yang patut disoroti terkait masalah

ini adalah soal yang berhubungan dengan perilaku jaringan orang-orang partai yang berkuasa dalam domain lembaga birokrasi. Kita ketahui, bahwa keberadaan mereka bagaimanapun sulit dipungkiri membawa pengaruh kepentingan politik praktis. Tuntutan publik adalah agar para politisi yang menjadi pejabat pemerintahan tidak mempolitisasi birokrasi. Memang ironis, bahwa upaya untuk membangun birokrasi modern yang seperti diistilahkan oleh Max Weber sebagai birokrasi rasional yang lebih bertumpu pada aspek profesionalitas dan prestasi sebagai public servant masih sulit untuk dibangun. Sepanjang era reformasi, birokrasi menunjukkan peluangnya malah kian terperangkap menjadi alat politik partisan. Apalagi sumber rekrutmen kepemimpinan birokrasi mulai Presiden/Wakil Presiden, Menteri-menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, hingga Bupati/Wakil Bupati, tidak terlepas dari jaringan dukungan parpol.

Hubungan Birokrasi dan Politik

Politik dan birokrasi pada realitanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Politik dan birokrasi saling mengisi antara satu sama lain, birokrasi identik dengan keteraturan, sistematis, dan kaku namun disamping itu birokrasi merupakan garda terdepan dalam urusan pelayanan terhadap rakyat. Birokrasi akan selalu ada didalam pemerintahan suatu negara baik di tingkat nasional, provinsi, dan seterusnya (Ratna, 2012:18).

Birokrasi menekankan pada efisiensi dan kecepatan dalam mencapai tujuan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, tujuan sebenarnya dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan terselsaikan secara cepat dan terorganisir. Namun, birokrasi di Indonesia sering diidentikan dengan kinerja yang rumit, tidak jelas, lama dalam proses pelayanan, penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sumaryadi, 2016:36).

Kemudian, politik pada dasarnya berkaitan dengan

kekuasaan. Politik merupakan alat untuk memaksakan kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu. Individu yang berpolitik memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan, dengan asumsi jika individu tersebut dapat memperoleh kekuasaan, kekuasaan tersebut akan digunakan sebagai alat untuk menanamkan pengaruhnya terhadap orang lain. Misalnya suatu individu dicalonkan oleh partai tertentu untuk menjadi anggota legislatif. Setelah terpilih, individu tersebut akan memasukan kepentingan-kepentingan dari partai yang mengusungnya, kemudian kepentingan pribadi, kemudian kepentingan konstituen nya dalam setiap kebijakan yang dirumuskan.

Menurut Miriam Budiardjo, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau *public goals* dan bukan tujuan pribadi atau *private goals*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik yang dijalankan oleh suatu negara harus dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Singkatnya, politik adalah instrument untuk mewujudkan tujuan-tujuan seluruh masyarakat. Konsep-konsep pokok yang terkait dengan politik (Budiardjo:2008:36) adalah: Negara (*state*) Kekuasaan (*power*) Pembagian kebijakan (*decision making*) Kebijakan (*policy*) Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) kekuasaan. Sedangkan birokrasi dapat didefinisikan sebagai kantor pemerintah atau organisasi pemerintah,. Birokrasi juga dapat dikatakan organisasi yang dibentuk untuk mencapai satu tujuan tertentu, terorganisir secara hierarki dengan perintah yang tegas, pembagian kerja yang jelas, memiliki peraturan umum, karyawan dipilih berdasarkan kompetensi. Birokrasi seperti yang sebelumnya penulis katakan, merupakan garda terdepan dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat (Sumaryadi, 2016: 33).

Dalam praktiknya, birokrasi seharusnya mengutamakan kepentingan umum, akan tetapi faktanya birokrasi di Indonesia seringkali hanyamenguntungkan pihak-pihak tertentu. Terbukti dengan banyaknya kasus yangterjadi didalam tubuh birokrasi di

Indonesia, seperti fenomena penerimaan suap atau pungutan liar yang dilakukan oleh para birokrat di Indonesia. Sistem birokrasi yang ada menempatkan birokrasi sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari para pejabat yang berkuasa berlindung dalam kekuatan politik. Terlepas dari asumsi bahwa politik dan birokrasi memiliki sinergi positif yang tidak dapat dibantah, di Indonesia seringkali sinergi ini memiliki arti tersendiri, yaitu bayangan politik secara negatif ditubuh oleh birokrasi itu sendiri.

Birokrasi sebagai pemegang tugas utama dalam pelayanan terhadap masyarakat sering dihadapkan dengan situasi yang dilematis, dimana birokrasi sering dijadikan sebagai alat politik untuk memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Realitanya birokrasi memang sulit terlepas dari bayang-bayang politik, hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa banyak dari birokrat berasal dari politisi yang juga menduduki jabatan dalam partai politik. Untuk mengembalikan fungsi dan peran birokrasi yang sebenarnya yaitu sebagai administrator publik maka diperlukan adanya reformasi birokrasi.

Banyak pandangan tentang hubungan antara politik dan birokrasi ketika keduanya berjalan bersama. Pandangan yang pertama bahwa birokrasi terkesan menjadi penghambat berlangsungnya pemenuhan tujuan-tujuan politik, sedangkan pandangan selanjutnya yaitu bahwa politiklah yang menjadi kambing hitam dari segala permasalahan yang terjadi pada birokrasi. Politik cenderung merubah birokrasi dari kodrat aslinya (Ratna, 2012: 18).

Dalam pemikiran klasik, seperti terungkap dalam pemikiran Woodrow Wilson yang tertuang dalam *The Study of Administration*, politik dan birokrasi yang merupakan institusi yang mewakili dunia administrasi merupakan dua hal yang berbeda, terpisah, dan dominatif, bagi Wilson, politik adalah urusan formulasi kebijakan yang menjadi hak para politisi yang dipilih melalui pemilihanumum. Sementara administrasi dengan

birokrasinya merupakan persoalan bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang dibuat para politisi secara efektif dan efisien (Alamsyah, 2003:56).

Sejarah mencatat bahwa pemikiran ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran generasi ilmuan administrasi publik pasca Wilson. Sebut saja Leonard D. White, pada tahun 1926 White dengan tegas mengungkapkan bahwa administrasi terkait dengan masalah bagaimana mengatur orang-orang dan barang-barang material untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Frank J Goodnow mengatakan bahwa kendati sama-sama melekat pada institusi pemerintahan, tetapi politik dan administrasi merupakan dua fungsi yang berbeda. Politik adalah fungsi yang berkaitan dengan masalah *expression the state will* dan administrasi adalah fungsi yang berkenaan soal *the execution of these policies* (Alamsyah, 2003:57).

Pada kenyataanya, pemikiran yang diungkapkan oleh wilsonian seperti yang disebut diatas tidak mampu mencegah terlibatnya birokrasi dalam proses politik, asumsi wilsonian bahwa birokrasi hanya menjadi eksekutor dan implementor dengan kapabilitas yang mumpuni untuk menjalankan kebijakan tanpa memiliki kepentingan politik tertentu, tidak terjadi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pemikir wilsonian (Alamsyah, 2003:58).

Birokrasi nyatanya bukan sekumpulan orang yang berkutat pada sebuah sistem dan prosedur tertentu, namun birokrasi juga memiliki perbedaan pandangan, kepentingan, nilai ataupun motivasi yang menciptakan sebuah masalah di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Masalah yang pada masa kini utamanya, menimbulkan “kegaduhan” dalam proses pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Birokrasi cenderung terorganisir dalam proses politiknya, birokrasi sering digambarkan sebagai institusi pemenuhan janji politik penguasa. Maksudnya, birokrasi diisi oleh segelintir orang yang berasal dari partai politik tertentu yang memenangi sebuah kontestasi politik seperti pemilihan

umum kepala daerah atau pemilihan presiden.

Birokrasi yang terorganisir menjadi birokrasi yang penuh dengan pemakluman, yang awalnya berfungsi sebagai pelayan rakyat, kini menjadi pelayan golongan. Pada dasarnya Birokrasi melaksanakan atau merupakan pelaksana dari kebijakan publik, sedangkan politik sebagai aktor yang membuat kebijakan tersebut. Sehingga, apabila pembuat kebijakan lebih mementingkan kepentingan golongan tertentu maka alur birokrasi akan mengikutinya.

Dalam proses menjalankan suatu kebijakan, birokrasi negara tidak akan lepas dari lingkungan politiknya, berjalan atau tidak berjalannya kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan politik dari birokrasi itu sendiri. Pengaruh pengaruh tersebut dapat berlangsung dari lingkup internal, eksternal, resmi, ataupun non resmi. Guy Peters dalam pandangannya tentang dimensi pengaruh politik suatu negara terhadap jalannya administrasi publik yang dijalankan birokrasi-birokrasi negara, membaginya menjadi dua dimensi. Dimensi yang disampaikannya berdasarkan pada sejumlah aktivitas politik yang dilakukan seorang administrator publik, yaitu dimensi internal-eksternal, dan yang kedua adalah formal-informal. Dimensi pertama, internal-eksternal, khususnya internal, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan politik di dalam suatu birokrasi yang berupaya mencari sejumlah masukan dari kelompok kepentingan, partisan, eksekutif politik, dan sejumlah besar sumber-sumber lain guna membuat suatu kebijakan. Pada sisi eksternal, adalah kegiatan-kegiatan politik birokrasi yang berupaya mencapai pemeliharaan dan perkembangan organisasi. Dimensi kedua, formal-informal, yaitu mengenai sifat resmi dari suatu politik administrasi (Alamsyah, 2003:67).

Para administrator publik berinteraksi dengan pejabat-pejabat resmi pemerintahan (DPR, eksekutif, perwakilan-perwakilan daerah), selain itu para administrator publik juga bersentuhan dengan para actor politik tidak resmi seperti tokoh-

tokoh masyarakat, para pengacara, kelompok penekan, dan sejenisnya. Sifat formal ataupun informal sulit untuk dibedakan, sebab terkadang terdapat lobi-lobi tidak resmi antara birokrat publik dengan para anggota DPR, misalnya dalam menjalankan suatu proyek pembangunan.

Perkembangan Birokrasi di Indonesia

Hampir di semua negara berkembang atau Dunia Ketiga dapat disaksikan munculnya peran dan kekuasaan birokrasi yang semakin besar. Ini ditandai oleh kekuasaan politik dan birokrasi yang terpusat pada sekelompok elit dan bersifat sentralistik. Kekuasaan birokrasi yang kuat dan besar di banyak negara berkembang pada satu sisi merupakan warisan kolonial, sementara pada lain sisi merupakan produk dari budaya feodal, terutama sistem hubungan patronage (*patron-klien*) dan *privilege* (hak-hak istimewa pada kelompok tertentu) (Wright, 1992).

Birokrasi di Indonesia, secara empirik . juga mengikuti kecenderungan di atas. Ditinjau dari perspektif historis, birokrasi di Indonesia sudah terbentuk sejak masa kolonialisme Belanda. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh barangkali telah ada pada masa kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Mataram Islam. Namun birokrasi di Indonesia dalam pengertian modern sekarang memang sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke19 M untuk menjadi alat kekuasaan dan represi pemerintah kolonial. Ketika itu birokrasi disebut dengan istilah “pangreh praja atau pamong praja”. Rupanya pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa hubungan kekuasaan antara rakyat dengan penguasa pribumi (raja atau bupati) bersifat patron-klien (*patronage*). Rakyat mematuhi Para pembesar mereka yang dipandang dan dihormati karena dipercaya memiliki hak ketuhanan, yakni hak yang berasal dari Tuhan untuk mengurus rakyatnya. Pangreh praja atau pamong praja yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial Belanda terdiri atas para bupati dan jabatanjabatan di bawahnya seperti wedana dan asisten wedana

serta bawahan-bawahan mereka. Para pejabat tersebut mempunyai beberapa privilege (hak istimewa) tertentu yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan (Koesoemahatmadja, 1978).

Setelah Indonesia merdeka, peran dan kekuasaan birokrasi belum begitu menonjol hingga lahirnya pemerintahan rezim Orde Baru. Hal ini karena pada masa Revolusi Fisik (1945-1949), energi pemerintah dan rakyat habis digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dari rongrongan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Selama masa Demokrasi Liberal (1950-1958), kekuasaan dan pengaruh birokrasi belum begitu besar karena panggung kekuasaan politik didominasi oleh partaipartai yang berbeda aliran ideologi politiknya dan kerap timbul persaingan serta konflik di antara partai-partai tersebut. Selain itu, juga karena banyaknya pergolakan daerah di mana-mana seperti Gerakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan; serta PRRI di Sumatera Barat, dan Permesta di Sulawesi Utara. Demikian pula pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). birokrasi relatif kurang berkembang peran dan kekuasaannya karena terlalu besarnya kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Di samping itu, juga karena adanya persaingan berebut pengaruh dan kekuasaan antara PKI dan TNI AD dalam mendekati Soekarno.

Birokrasi selama masa Orde Baru (1966-1998) menunjukkan perkembangan dalam peran dan kekuasaan yang semakin besar. Sejak awal tampaknya kepemimpinan rezim Orde Baru di bawah Jendral Soeharto meyakini, bahwa birokrasi dapat menjadi mesin yang efektif bagi pertumbuhan ekonomi negara yang sedang terpuruk saat itu. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika birokrasi dijadikan sebagai struktur hirarkis tunggal yang komandonya tersentralisasi di bawah arahan politik rezim. Struktur birokrasi yang tersentralisasi dianggap sebagai prasyarat bagi stabilitas politik nasional dan kelangsungan proses pembangunan. Di dalam birokrasi kemudian diterapkan monoloyalitas politik hanya kepada rezim Orde baru) sebagai reaksi atas pengalaman periode

sebelumnya, di mana birokrasi mengalami polarisasi secara sosiologis dan politis (Legowo, t.t.).

Perkembangan birokrasi yang semakin kuat dan mencengkeram negara dalam dekade pertama rezim Orde Baru ditempuh melalui tiga cara. Pertama, depolitisasi masyarakat, antara lain lewat jalur KORPRI di mana pegawai negeri wajib menjadi anggotanya. Kedua, stabilisasi keadaan. Instrumen yang dipakai, misalnya melalui pengangkatan perwira-perwira tinggi ABRI kini TNI pada jabatan-jabatan birokrasi yang strategis, termasuk menteri dan eselon I pada setiap departemen pemerintah. Ketiga, legitimasi kekuasaan, yaitu menjadikan GOLKAR sebagai organisasi politik (ropol) yang berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan pada rezim (Legowo, t.t.).

Hingga akhir tahun 1980an, birokrasi berperan sangat efektif dalam menjalankan program-program administrasi dan ekonomi pemerintah. Dapat disebut contohnya sebagai berikut. Dalam sejumlah problem sosial dan ekonomi, birokrasi mampu merespons terhadap kegagalan pasar, mengantarkan program KB, mempromosikan teknik-teknik baru di bidang pertanian serta peningkatan varietas hasil panen. Di bidang politik, birokrasi tampil sukses menjadi mesin politik dalam memobilisasi dukungan kepada rezim. Pendeknya, birokrasi telah menjadi instrumen yang efektif bagi pemerintah rezim Orde baru dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempertahankan stabilitas politik nasional (Legowo, t.t.).

Akan tetapi sejak awal tahun 1990an, birokrasi yang tadinya efektif berubah menjadi kurang efektif. Hal ini barangkali karena pola kekuasaan birokrasi yang lebih dominan dari otoritarian dalam jangka waktu yang lama, justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Akibatnya akan mempersulit program-program pembangunan yang sebelumnya selalu dimotori oleh birokrasi (Pratikno, 1998). Paling tidak ada dua alasan mengapa

birokrasi rezin Orde baru pada dekade 1990an tidak algi efektif. Pertama, peluang pare birokrat yang sangat tinggi bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua, berkembangnya budaya di kalangan para birokrat yang hanya mau menang sendiri dan tidak menghargai pihak lain (Pratikno, 1998).

Sebenarnya birokrasi di Indonesia selama Orde Baru secara teoritis dapat dikategorikan sebagai Birokrasi Weberian. Indikatornya antara lain terlihat pada struktur organisasi yang hirarkis dengan mekanisme yang terpusat atau sentralistik. Kemudian sistem karir yang bergantung pada prestasi, dedikasi, dan loyalitas individu birokrat. Namun dalam praktiknya, karena birokrasi digunakan sebagai mesin politik untuk memobilisasi dukungan kepada rezim Orde Baru, maka birokrasi tidak pernah netral dan justru memperalat atau diperalat (?) secara politis oleh Golkar. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia selama Orde Baru agak jauh dari ideal Birokrasi Weberian. Mengutip Pratikno (1999: 2), birokrasi Indonesia selama Orde Baru dapat disebut sebagai birokrasi “Weberian Setengah Hati”. Hal ini karena birokrasi Indonesia tidak mampu dikontrol oleh politisi, dan justeru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu politisi yang dikontrol oleh birokrasi.

Dominasi birokrasi pada hampir seluruh arena percaturan politik sepanjang Orde Baru, terutama pada politisi, mengilhami para Indonesianis (paket asing yang ahli Indonesia) dan ilmuwan Indonesia sendiri untuk membuat model kepolitikan Indonesia dengan fokus pada birokrasi. Sebagai contoh, model Bureaucratic Polity (Masyarakat Politik Birokratik) yang dibuat oleh Karl D. Jackson (1978), dan model Bureaucratic Authoritarianism (Otoritarianisme Birokratik) yang diajukan oleh Dwigh Y. King (1982). Sementara itu, Arief Budiman (1991) menyebut birokrasi Indonesia bermodel Birokratik Rente.

Model *Bureaucratic Polity* memusatkan perhatian pada pengambilan keputusan politik harus didukung oleh minimal

adanya konsensus di kalangan elit militer dan birokrasi. Model *Bureaucratic Authoritarianism* menekankan pada pembuatan keputusan oleh rezim secara efektif, efisien, tidak bertele-tele, dan tidak memungkinkan adanya proses tawar-menawar yang lama. Dalam pada itu, model Birokratik Rente mensinyalir bahwa birokrasi cenderung dimanfaatkan oleh para birokrat bagi keuntungan ekonomi dan politik mereka sendiri.

Pasca Reformasi 1998, menjadi babak baru pemberian birokrasi dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Birokrasi juga diarahkan untuk kembali terfokus pada urusan pelayanan publik dan tidak masuk pada ruang-ruang politik seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemberian birokrasi dilakukan baik terkait dengan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

d) Rangkuman

1. Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi.
2. Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien daripada alternatif yang terdapat sebelumnya, yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional.
3. Politik dan birokrasi saling mengisi antara satu sama lain, birokrasi identik dengan keteraturan, sistematis, dan kaku namun disamping itu birokrasi merupakan garda terdepan dalam urusan pelayanan terhadap rakyat. Birokrasi akan selalu ada didalam pemerintahan suatu negara baik di tingkat nasional, provinsi, dan seterusnya (Ratna, 2012:18).
4. Birokrasi di Indonesia, secara empirik. juga mengikuti kecenderungan di atas. Ditinjau dari perspektif historis,

birokrasi di Indonesia sudah terbentuk sejak masa kolonialisme Belanda. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh barangkali telah ada pada masa kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Mataram Islam.

e) Latihan

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* tentang Birokrasi sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
2. Hasil *review* bacaan terhadap modul dikembangkan dalam bentuk tulisan malah/jurnal kemudian dipaparkan secara berkelompok oleh mahasiswa.

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman mahasiswa terhadap hasil bacaan dan *review* modul.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan, *review* dan pengembangan hasil bacaan yang dilihat saat pemaparan.

g) Umpang Balik

2. Kegiatan Pembelajaran 2

- a) Kedudukan Parlemen Sebagai Lembaga Perwakilan
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang sejarah Parlemen di Indonesia, fungsi Parlemen sebagai lembaga perwakilan, dan perkembangan parlemen di Indonesia pasca Amandemen UUD 1945

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sejarah Parlemen di Indonesia

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Aristoteles, John Locke, maupun Montesquieu Montesquieu terdapat satu kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang yang disebut dengan kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari “*legislate*” yaitu membuat undang-undang. Dalam perkembangan negara modern sekarang ini, kekuasaan membuat undang-undang adalah salah satu dari tugas lembaga perwakilan rakyat. Dalam suatu negara, lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan membentuk undangundang (legislatif) juga biasa disebut dengan parlemen. Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undangundang, sedangkan badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijaksanaan umum itu.

Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan dua hal yang saling terkait. Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin “*parliamentum*” atau bahasa Perancis “*parler*”, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat. Parlemen berkembang seiring dengan perkembangan negara-negara demokrasi modern yang bermunculan sebagai negara bangsa (*nation state*), terutama pada abad 19 setelah masa kolonialisme (Syafa’at, 2010: 24).

Pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pertama, ada yang menggunakan sistem distrik atau disebut dengan *single*

member constituency, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan. Kedua, ada juga yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil (*multi member constituency*), berimbang dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen yang dianut di negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang dianutnya. Selain itu, kondisi masyarakat dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang dianut oleh negara tersebut.

Bangunan sistem parlemen suatu negara diatur dalam konstitusinya (Ida, 2008: 260). Ada yang menerapkan sistem parlemen satu kamar (*unikameral*), ada yang menerapkan sistem parlemen dua kamar (*bikameral*). Sistem parlemen satu kamar biasanya dianut oleh negara yang berbentuk kesatuan, sedangkan sistem parlemen dua kamar dianut oleh negara yang berbentuk federal. Namun demikian, tidak selamanya negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya bikameral, karena masing-masing negara mempunyai variasinya sendiri. Bahkan, sekarang ini, ada negara kesatuan yang sistem parlemennya bikameral, misalnya Indonesia, bentuk negaranya kesatuan, sistem parlemennya bikameral. Tidak ada satu sistem, baik unikameral maupun bikameral, bahkan federalis, dapat diterapkan secara universal. Tipe sistem yang dipilih oleh suatu masyarakat terutama tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya (Thaib, 2002:20). Oleh karena itu, sistem parlemen yang dianut suatu negara dapat betulah karena dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Di Indonesia semdiri, Parlemen merupakan hasil Pemilihan Umum yang dalam sejarahnya pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertingi

negara. namun setelah amandemen, MPR ditempatkan pada posisi sebagai lembaga tinggi negara yang didalamnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gagasan pemebentukan DPD berawal dari anggapan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di perlemen. DPD merupakan utusan daerah yang dalam konstitusi bersanding dengan DPR. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 2 UUD 1945 dimana MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Mengenai susunan kedudukan MPR, DPR dan DPD memang sudah diatur dalam UUD 1945. Namun disamping itu keberadaan MPR, DPR dan DPD diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan esensi dari Pasal 18 UUD 1945. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No 12 Tahun 2008, DPRD menjadi mitra kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Susunan dan kedudukan parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD saat ini diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Fungsi Parlemen Sebagai Lembaga Perwakilan

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu badan yang anggotanya merupakan wakil dari partai dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum atau Pemilu. parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah legislature yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat undangundang atau badan dalam mana para pembuat undang-undang (legislator) bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya

parlemen tidak selalu berarti seperti yang disebutkan diatas. Sudah menjadi kelaziman bahwa badan-badan politik diluar parlemen bahkan lebih berperan dalam perbuatan undang-undang (Cipto, 1995:5).

Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Namun saat ini perlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Kewenangan untuk menetapkan peraturan diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif yang memang sebagai cabang kekuasaan yang paling mencerminkan kedaulatan rakyat karena wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Fungsi pengaturan atau legislasi merupakan fungsi pertama dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Hal ini karena fungsi pengaturan terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang.

Fungsi legislasi juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: (1) Prakarsa pembentukan undang-undang, (2) Pembahasan rancangan undang-undang, (3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, dan (4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

2) Fungsi Pengawasan

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga

negara, dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakil rakyat. Jika halhal tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu lembaga perwakilan rakyat yang diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal tersebut, yaitu kontrol atas pemerintahan, kontrol atas pengeluaran, dan kontrol atas pemungutan pajak.

Fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan menjadi (Cipto, 1995:302):

- Pengawasan terhadap penentuan kebijakan;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
- Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan; dan
- Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dan bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPRD.

Parlemen haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, agar kebijakan pemerintahan tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen bersama dengan pemerintah.

3) Fungsi Anggaran

Kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN ataupun APBD oleh pemerintah juga memerlukan kontrol sebaik mungkin oleh lembaga perwakilan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut membuat fungsi anggaran sangat berakaitan arat dengan fungsi pengawasan. Tak hanya itu, fungsi anggaran juga berkaitan dengan fungsi

legislasi. Fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran. Sedangkan fungsi pengawasan bertindak mengawasi kualitas pelaksanaannya. Fungsi anggaran merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja pemerintah dan pembangunan dalam hal anggaran (*budgetting*).

4) Fungsi Perwakilan (Representasi)

Pada dasarnya fungsi parlemen yang paling pokok adalah fungsi parwakilan itu sendiri karena lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermaksan sama sekali. Secara substansial, keterwakilan rakyat dapat dikatakan tersalur ketika kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan oleh wakil rakyat dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan atau setidaknya aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.

Terdapat 3 (tiga) sistem perwakilan yang ada dalam negara demokrasi, yaitu (Cipto, 1995:305):

- Sistem perwakilan politik. Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik.
- Sistem perwakilan teritorial. Sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah.
- Sistem perwakilan fungsional. Sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional.
- Fungsi Deliberal dan Resolusi Konflik.

Menurut Friedrich fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi representatif dan deliberatif menjadi (Cipto, 1995:306). Dalam setiap pembuatan aturan, selalu dilakukan pembahasan baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Perdebatan yang terjadi di dalam parlemen adalah cermin dari

perdebatan publik atas suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat. Perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai upaya mengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak.

Perkembangan Parlemen di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia menganut sistem parlemen (*unicameral*) yaitu sistem parlemen satu kamar dimana dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berada dalam posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Amandemen UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Dengan hal tersebut maka lembaga parlemen di Indonesia berubah menjadi sistem (*bicameral*) yaitu sistem parlemen dua kamar dimana kedua kamar tersebut DPR dan DPD. Di bawah ini merupakan parlemen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sebelum amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang membawahi beberapa lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

menyebutkan bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menetapkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi

yang dibawahnya terdapat lima lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi termasuk didalamnya yaitu DPR (Tutik, 2010:191). Saat itu DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Namun setelah amandemen UUD 1945, DPR mengalami perubahan. Fungsi legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden, telah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain:

- Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
- Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI 1945, undang-undang, dan peraturan palaksanaannya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden. Dengan demikian DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- Memebentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah;
- Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta panggabungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- Memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- Membahas bersama Presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perdamaian dan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang;
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- Memilih anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas penelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
- Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundanganundangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti

- aspirasi rakyat;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undangundang;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menciptakan fungsi check and balances dalam ketatanegaraan indonesia agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu institusi saja. Amandemen UUD 1945 telah memberikan dampak yang besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama pada lembaga-lembaga negara. Setelah amandemen UUD 1945, ada lembaga negara yang mendapat proporsi baru yaitu dengan bertambahnya kewenangannya dalam konstitusi. Ada pula lembaga negara yang justru berkurang kewenangannya karena kewenangan tersebut telah diberikan pada lembaga negara lainnya. Lembaga perwakilan rakyat termasuk yang paling tampak mengalami perubahan dan penataan. Perubahan pada lembaga perwakilan rakyat diantaranya adalah berubahnya sistem parlemen unicameral menjadi sistem bicameral yang telah merubah kedudukan MPR yang semula menjadi lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi menjadi lembaga negara yang keanggotannya terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum (Tutik, 2010:196).

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), dimaksudkan agar mekanisme check and balances dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti (Tutik, 2010:196) beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD karena distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 223 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa DPD mempunyai fungsi antara lain:

- Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Selain mempunyai fungsi, Pasal 224 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa DPD juga mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
- Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undangundang yang berkaitan dengan APBN.
- Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

- Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 18 UUD 1945, mengamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan atau dibentuk badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi pada asas permusyawaratan (Siswanto, 2012:65). Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka di daerah dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara rinci DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut (Siswanto, 2012:67):

- Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, paraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten Kota;
- Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi

- kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam susunan dan kedudukan parlemen di Indonesia, Badan Kehormatan berkedudukan sebagai alat kelengkapan yang dibentuk guna menegakkan kode etik, disamping itu Badan Kehormatan baik di MPR, DPR, DPD maupun DPRD, dibentuk untuk mengakomodir aspirasi masyarakat ataupun lembaga terkait kinerja dan tingkah laku anggota dewan. Secara umum mengenai BK telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 27 Tahun 2009. Namun secara Khusus BK telah diatur dalam tat tertib dan kode etik masing-masing parlemen.

d) Rangkuman

1. Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-

fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara.

2. Di Indonesia semdiri, Parlemen merupakan hasil Pemilihan Umum yang dalam sejarahnya pertama kali dilakukan pada tahun 1955.
 3. Lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
 4. lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
 5. Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia menganut sistem parlemen (*unicameral*) yaitu sistem parlemen satu kamar dimana dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berada dalam posisi sebagai lembaga tertinggi negara.
- e) Latihan
- a) Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* tmodul terkait parlemen sebagai bagian kekuatan politik di Indonesia
 - b) Hasil *review* bacaan modul akan dikembangkan dalam bentuk materi yang akan disampaikan secara berkelompok.
- f) Evaluasi Pembelajaran
3. Pemahaman mahasiswa terhadap hasil bacaan dan *review* modul.
 4. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan, *review* dan pengembangan hasil bacaan yang dilihat saat pemaparan.
- g) Umpulan Balik

3) Penutup

a) Rangkuman

Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategik seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik birokrasi pada partai tertentu; birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak penguasa. Sejarah Indonesia menunjukan, birokrasi yang tidak netral telah turut membawa Indonesia pada jurang kekacauan politik; dan birokrasi yang tidak netral selalu tumbuh bersama dengan kekuatan dan kepentingan politik atau golongan tertentu, selalu terjebak dalam godaan KKN, dan akhirnya juga membawa negara kita pada kehancuran ekonomi. Dengan begitu maka harus diakui bahwa Birokrasi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengimbangi dan mengontrol kinerja birokrasi maka kehadiran Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi penting. Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Di Indonesia semdiri, Parlemen merupakan hasil Pemilihan Umum yang dalam sejarahnya pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara. namun setelah amandemen, MPR ditempatkan pada posisi sebagai lembaga tinggi negara yang didalamnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam penyelenggaraannya di Indonesia, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Oleh karena itu maka sudah selayaknya, Parlemen menjadi salah satu

lembaga negara yang memiliki peran serta kekuatan dalam mempengaruhi proses politik di Indonesia.

1. Daftar Istilah

<i>Clean Government</i>	Pemerintahan yang bersih
<i>Good Governance</i>	Pemerintahan yang baik
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
<i>Legislate</i>	Pembuat undang-undang
<i>Policy</i>	Kebijakan
Reformasi	Suatu proses perubahan atau juga pembentukan kembali suatu tatanan (bentuk/susunan) kehidupan yang lama
<i>State</i>	Negara

Daftar Pustaka

- Alamsyah. (2003). Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal, *Jurnal Politik dan Birokrasi*, Vol.2, h. 56.
- Bambang, Cipto. (1995). *Dewan Perwakilan Rakyat, Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: Rajawali PERS.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Knoke, D. and Kuklinski, J. (1982). *Network Analysis*. Sage Publications, Beverly Hills.
- Koesoemohatmadja, Djenal Hoesen. (1978). *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*. Bandung: Alumni.
- Laode Ida. (2008). *Menegaskan Posisi Dewan Perwakilan Daerah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.
- Legowo, T. A., t.t., The *Bureaucracy and Reform*, dalam Baker, Richard W. (ed.), *Indonesia The Challenge of Change*. Netherland: KITLV.
- Patiasina, Karim. (2003). *Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Rakyat*. Ambon: Penerbit Merdeka.
- Pratikno. (1998). Urgensi Reformasi Basis Kekuasaan Birokrasi di Indonesia. *Arm' Kebijakan dan Administrasi Publik*, No. 1, Vol. 2,
- Ratna, Ikhwani. (2012). Reformasi Birokrasi Terhadap Penataan Pola Hubungan Jabatan Politik Dan Karir Dalam Birokrasi di

- Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), h.18.
- Siswanto Sunarno. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryadi, I., Nyoman. (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafa'at, Muchammad Ali. (2010). *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, Cetakan Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Thaib, Dahlan. (2002). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Titik, Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amanademen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Wright, Vincent. (1992). *Comparative Government and Politics An Introduction*. London: The Macmillan Press Ltd.

MODUL 8

KEKUATAN MILITER DAN POLITIK

a. Pendahuluan

1. Deskripsi Singkat

Dalam mempelajari mengenai konsep kekuatan politik di Indonesia, mahasiswa perlu diperkenalkan dengan berbagai kekuatan baik individu maupun kelompok yang salah satunya adalah Militer. Sejarah mencatat bahwa Militer menjadi salah satu kelompok yang memiliki kontribusi aktif dalam penyelenggaraan bernegara tidak terkecuali dalam dunia politik. Keterlibatan militer di Indonesia sudah dimulai pada masa orde lama dan menguat pada masa orde baru yang puncaknya menempatkan Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno dan hadirnya Fraksi ABRI di Parlemen. Militer yang masuk ke dalam dunia politik didasari oleh banyak faktor baik internal kelembagaan atas inisiasi para perwira yang akan memasuki masa pensiun, maupun faktor ekternal yang terbangun dari kerjasama yang terbangun dengan lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Dari uraian tersebut maka adapun pokok-pokok bahasan pada modul empat ini terbagi dalam empat sub bahasan yang meliputi; (1) Politik militer, (2) Orientasi militer terhadap politik, (3) Kekuatan militer pada masa Orde Lama yang; masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Masa Pemberontakan PKI, dan (4) Kekuatan Militer pada masa Orde Baru.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan nantinya dari modul ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

- pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
 4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
 5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik;
 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
 7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
 8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari modul ini adalah Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali terkait dengan relasi politik dan militer, orientasi politik dan militer, dan kekuatan politik militer baik pada masa orde lama maupun orde baru.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

5) Kegunaan Modul 8

Kegunaan atau manfaat dari modul ini adalah membantu mahasiswa memahami mengenai militer sebagai kekuatan politik di Indonesia. Modul ini juga berguna bagi mahasiswa untuk dapat memahami lebih dalam mengenai politik militer, orientasi politik militer, kekuatan politik militer masa orde lama sampai dengan orde baru.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep/teori yang menggambarkan relasi antara politik dan militer ,

2. Orientasi militer terhadap politik.dan,
3. Militer sebagai kekuatan politik di Indonesia dari masa orde lama yang meliputi masa demokrasi parlementer (1950-1959), masa demokrasi terpimpin (1959-1965), masa pemberontakan PKI, dan masa orde baru.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran

- a) Militer Sebagai Kekuatan Politik di Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami relasi diantara politik dan militer, orientasi militer terhadap politik, dan kekuatan politik militer di Indonesia dari masa orde lama sampai orde baru.

- c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Relasi antara Politik dan Militer

Pelayanan sebagai fungsi dasar dari suatu pemerintah sampai saat ini masih tetap menjadi diskursus yang memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi seiring dengan permasalahan-permasalahan yang masih sangat banyak dikeluhkan oleh sebagian anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, karena secara realita hampir seluruh masyarakat pasti akan bersinggungan dan bersentuhan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sehingga masalah penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi suatu pembicaraan yang serius baik bagi unsur masyarakat yang menerima pelayanan publik maupun unsur institusi pemerintah yang melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan publik, dan hal ini merupakan suatu gejala umum yang terjadi pada proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Perwujudan peran militer dalam politik Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dan keterlibatan militer dalam politik senantiasa mengalami pasang surut. Bilveer Singh (1996:1-24) menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam bidang non-militer (politik) disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut terdiri dari; (1) nilai-nilai dan orientasi para perwira militer, baik secara individu maupun kelompok, serta (2) kepentingan-kepentingan material korps militer.

Nilai-nilai dan orientasi militer secara garis besar merupakan hasil dari sejarah pengalaman yang dimiliki para anggota militer. Pada gilirannya, sejarah asal-usul dan peran awal militer tersebut membentuk suatu tradisi dan seperangkat nilai, yang di dalamnya para generasi perwira militer pendahulu dan penerusnya cenderung mematuhi dan mengekalkannya. Faktor kunci dalam memperkuat keutuhan militer adalah ancaman terhadap institusi tersebut.

Militer yang masuk ke dalam dunia politik didasari oleh banyak faktor pendukung baik internal maupun eksternal kelembagaan. Secara kultur yang dibangun dalam dunia militer memang menjadikan setiap perwira militer memiliki keunggulan yang dapat dikatakan melebihi kualitas sipil. Indoktrinasi yang dibangun dalam dunia militer juga memberikan semangat juang yang berbeda dibandingkan kalangan sipil. Faktor-faktor pendukung itu antara lain adalah jaringan yang dibangun oleh setiap perwira cukup baik. Jaringan itu dibangun dari berbagai momen seperti latihan militer bersama, pendidikan militer bersama, atau hubungan antar pimpinan militer di negara yang berbeda.

Perwira tinggi militer yang memiliki jaringan yang kuat dapat melakukan koordinasi bahkan bantuan dukungan jaringannya di negara lain. Selain Jaringan, faktor pendukung lainnya adalah sistem kepemimpinan yang dibangun dalam dunia militer. Setiap perwira militer sudah dilatih

kepemimpinannya dalam suatu entitas terkecil sampai memimpin satu angkatan secara keseluruhan. Kultur itu membuat pengalaman seorang perwira militer benar-benar terlatih sejak dini. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang juga sangat mempengaruhi kualitas seorang perwira militer yang siap memimpin negara antara lain pendidikan berkualitas yang dididik dengan orang-orang berkualitas bahkan dari kalangan sipil yang memenuhi kriteria terbaik.

Kekuatan politik militer dapat dilihat dari sumber-sumber *powernya* (Sanit, 1997: 56-58) yaitu:

- a) Garis komando yang jelas; melalui sistem komando militer lebih mampu untuk berada didalam suatu organisasi yang utuh.
- b) Sistem Hirarki; lebih utuhnya kepemimpinan militer, disokong pula oleh sistem hirarki yang dilaksanakan dengan disiplin, amat membantu komandan untuk mengendalikan tingkah laku anggotanya yang tersebar dideluruh daerah. Dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap organisasi tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan efektif.
- c) Rasa keterikatan di antara anggota-anggota militer (*esprit decorp*); sebagai kelompok yang memperoleh sosialisasi secara seragam, diikatkan oleh organisasi dan lambang-lambang yang ditafsirkan secara seragam oleh keseluruhan anggotanya, maka lebih kecil kemungkinan untuk tumbuhnya perbedaan pandangan dalam militer.
- d) Komunikasi intern yang terpelihara; sebagai organisasi yang paling modern di dalam masyarakat, militer mempunyai jaringan komunikasi yang terpisah dari sistem komunikasi yang dipergunakan masyarakat pada umumnya. Peralatannya termasuk yang paling efektif untuk menghubungkan pimpinan di pusat dengan satuan-satuan didaerah.

Meskipun naluri militer adalah ingin terjun ke bidang politik, tetapi hal itu tergantung pada beberapa faktor, antara lain ialah

latar belakang terbentuknya militer, situasi dan kondisi masyarakat/pemerintahan dan sistem atau bentuk pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Talcot Parson, terdapat tiga hal yang menyebabkan militer terlibat dalam politik (Hanie, 2007: 40-41) yaitu; 1) Kelemahan struktural/disorganisasi, 2) Adanya kelas-kelas yang cenderung terpecah belah dan tidak mampu melancarkan aksi terpadu, termasuk kelas menengah yang secara politik impoten, dan 3) Rendahnya tingkat aksi sosial dan mobilisasi sumber-sumber materiil.

Persoalan disorganisasi, tidak dapat dipungkiri, mengingat militer memiliki kelebihan daripada kelompok lain, yaitu kedisiplinan, sentralisasi sistem komando, disiplin tinggi, sehingga organisasi militer lebih solid dan mampu mengorganisir dengan baik, apabila militer tampil sebagai penguasa. Dengan kerapuhan secara struktural yang dialami masyarakat, maka titik kelemahan ini, menarik militer untuk tampil meleakukan intervensi politik. Motivasi politik tentara untuk terjun ke dalam politik memang sudah ada pada rezim-rezim yang kekuasaannya mengalami kemunduran.

Naluri militer untuk terjun ke politik dan kondisi pemerintahan yang tidak demokratis, adalah dua hal yang mempengaruhi motivasi militer untuk melakukan kudeta. Kudeta dilakukan kelas menengah bukan karena ideologi atau politik kelas menengah. Menurut Amos Palmuter militer, melakukan kudeta (Hanie, 2007:42) apabila:

- a) Tentara merupakan kelompok yang kohesif dan secara politik terorganisir paling baik pada suatu saat tertentu dan suatu sistem politik.
- b) Apabila tidak ada kelompok oposisi yang kuat.
- c) Harus mendapat dukungan partai politik tertentu atau kelompok masyarakat lainnya misalnya kelas pekerja.

Menurut K. Man Haim (2007:18), bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mendorong militer berpolitik yaitu:

- a) Ambisi Pribadi

Ambisi-ambisi pribadi para perwira militer untuk merebut posisi penting di dalam jaringan kekuasaan politik. Ambisi pribadi perwira tinggi dan menengah militer dapat dilihat dari dua segi yakni keinginan berkuasa dan keinginan memperoleh materi sebagai konsekuensi dari jabatan itu, atau karena jabatan tertentu memberi peluang seseorang untuk memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan yang pada akhirnya bermuara pada kesenangan materi.

b) Kepentingan Kelompok

Kepentingan kelompok yakni keinginan untuk mendominasi kelompok yang lain melalui kekuasaan. Keinginan untuk mendominasi kekuasaan terkait dengan status mereka di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat para perwira merupakan kelompok elite sesuai konsep ksatria. Para perwira berusaha untuk memperlihatkan atau menampilkan diri sebagai kelas elite dengan standar hidup di mana ia berada. Untuk memenuhi standar hidup tersebut para perwira harus merebut kekuasaan nonmiliter, selanjutnya secara sistematis membangun hegemoni. Para perwira kemudian mengalienasi kelas yang lain yang merupakan mayoritas sosial dan membiarkannya berada pada posisi tertentu yang terabaikan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Dominasi kekuasaan diiringi pula oleh dominasi bisnis. Hal ini dikaitkan dengan dua hal yaitu *Pertama*, penguasaan bisnis bertujuan untuk mengumpulkan materi dalam rangka pemenuhan standar hidup kelas menengah. *Kedua*, pengumpulan materi untuk membiayai kegiatan-kegiatan memperluas kekuasaan dan mempertahankannya.

c) Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional, yakni mempertahankan dan membangun keamanan negara dan masyarakat, dengan asumsi mereka adalah kekuatan pengintegrasи bangsa. Artinya, militer menjaga kemungkinan berkembang suatu pemikiran untuk merubah bentuk negara atau munculnya daerah tertentu untuk memaksakan kehendaknya untuk memisahkan diri. Militer tampil

melindungi kepentingan segala golongan di dalam negara dan masyarakat.

Beberapa literatur mendeskripsikan intervensi angkatan bersenjata dalam politik suatu negara diakibatkan situasi-situasi (Clark, 1989: 155-156) seperti ini:

1. Jatuhnya *prestise* pemerintah atau partai politik yang memegang pemerintahan, menyebabkan rezim yang bersangkutan semakin banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat;
2. Perpecahan diantara pemimpin-pemimpin politik, menimbulkan keragu-raguan pada komandan-komandan militer apakah rezim sipil masih mampu untuk memerintah secara kolektif;
3. Kecilnya kemungkinan terjadinya intervensi dari luar oleh negara yang besar atau oleh Negara-negara tetangga dalam hal perebutan kekuasaan;
4. Pengaruh buruk dari perebutan kekuasaan oleh militer di negara- negara tetangga;
5. Permusuhan sosial dalam negeri, yang paling jelas terjadi di negara- negara yang diperintah oleh suatu kelompok minoritas;
6. Krisis ekonomi, yang menyebabkan dicabutnya kebijakan penghematan yang mempengaruhi sektor-sektor masyarakat kota yang terorganisir;
7. Korupsi, pejabat-pejabat pemerintahan dan partai yang tidak efisien, atau anggapan bahwa pejabat-pejabat sipil berniat menjual bangsanya kepada suatu kelompok asing;
8. Struktur kelas yang sangat ketat, yang menyebabkan dinas militer menjadi satu-satunya saluran yang terbuka untuk anak miskin untuk status dari bawah ke

atas.

9. Kepercayaan yang semakin meningkat tebal pada anggota-anggota militer bahwa mereka adalah satu-satunya kelas sosial yang mempunyai cukup disiplin dan cukup setia kepada modernisasi untuk menarik negara keluar dari tata-cara yang tradisional;
10. Pengaruh asing, dapat melibatkan perwakilan militer negara asing, pengalaman yang diperoleh dalam perang di negara asing, atau dalam pusat-pusat latihan di luar negeri, atau bantuan asing dalam bentuk peralatan dan senjata; dan
11. Kekalahan militer dalam perang dengan Negara lain, khususnya kalau para pemimpin militer yakin bahwa pemerintahan sipil telah mengkhianati mereka dengan merundingkan ketentuan-ketentuan perdamaian yang tidak menguntungkan atau karena salah menjalankan kegiatan perang di belakang garis pertempuran.

Disamping beberapa alasan yang terpapar di atas, perlu pula kita lihat alasan-alasan militer merambah ke dunia politik dalam sejarah Indonesia sendiri. Kusnanto Anggoro melihat ada beberapa faktor yang mendorong militer maju kepanggung politik, yaitu tidak dewasanya para politisi sipil dalam mengelola negara, adanya ancaman terhadap keamanan nasional, ambisi mempertahankan *privilege* seperti otonomi dalam merumuskan kebijakan pertahanan, memperoleh dan menggunakan anggaran pertahanan serta melindungi aset dan akses ekonomi dan tugas sejarah (Sukma & Kristiadi, 1999:10).

Orientasi Militer Terhadap Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan dengan jelas tentang pengertian dari pelayanan, yakni Pelayanan adalah suatu-usaha untuk membantunya menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh orang lain. Sedangkan pengertian *service* dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai *a system that provides*

something that the public needs, organized by the government or a private company. Oleh karenanya, pelayanan akan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kebutuhan dasar masyarakat. Pandangan yang hampir sama tentang pengertian dari konsep tentang pelayanan juga dinyatakan oleh Gronross, pengertian dari pelayanan menurut Gronross (1990), yakni.

Selain masalah hubungan sipil-militer, kecenderungan politik militer juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan relasi-relasi antar kekuatan dalam suatu negara yang melahirkan tipe orientasi militer-politik yang berbeda-beda (Widiarto & Syafaat, 2007:52). Menurut Huntington (2003:229) faktor-faktor penting yang menyebabkan militer melakukan intervensi bukan faktor yang bersifat militer melainkan bersifat politis, bukan masalah kesejahteraan sosial dan organisasi militer melainkan karena struktur kelembagaan politik yang semrawut dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Perlmutter (2002:134) tipe orientasi militer-politik lebih merupakan kondisi budaya dalam institusi dan personel militer dari pada sebuah struktur formal. Namun antara struktur dan kultur selalu memiliki keterkaitan dan muncul karena kondisi dan relasi yang serupa seperti adanya stabilitas pemerintahan, doktrin militer, ancaman internal, ancaman eksternal, dan ideologi sipil.

Menurut pandangan Huntington dan Perlmutter (2002:135) terdapat tiga model utama orientasi militer-politik yang berhubungan dengan kultur dan kecenderungan intervensi pada masalah diluar sektor pertahanan. Ketiga model terbentuk sebagai hasil dari kondisi dan hubungan dalam keseluruhan masyarakat tertentu. Ketiga model tersebut yaitu:

1. Pretorian, dalam arti yang sempit pretorian adalah campur tangan militer di bidang politik, kondisi orientasi militer-politik seperti ini dicirikan dengan kondisi di mana militer dalam suatu masyarakat melaksanakan kekuasaan politik yang otonom karena penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan

kekuatan. Namun secara lebih luas terdapat istilah “masyarakat pretorian” yaitu kondisi di mana semua kekuatan sosial terpolitisasi. Dalam masyarakat pretorian terjadi ledakan partisipasi politik dalam kehidupan kenegaraan, bukan saja oleh militer tetapi juga oleh kekuatan sosial lainnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya lembaga politik yang efektif yang dapat menghaluskan dan memperlunak aksi-aksi politik yang dilakukan berbagai kelompok.

Menurut Perlmuter, syarat munculnya model orientasi militer-politik pretorian adalah pemerintahan sipil yang tidak efektif dan tidak melembaga, serta tidak dapat mengontrol militer. Selain itu juga terdapat tiga kondisi sosial yang dapat melahirkan model orientasi militer-politik, yaitu: a). Kelemahan struktural, b). Adanya kesenjangan antar kelas, dan c). Rendahnya tingkat aksi sosial dan mobilisasi sumber-sumber material.

2. Profesional, model orientasi militer-politik ini memiliki karakteristik sebagai suatu profesi karena merupakan suatu kelompok fungsional khusus yang memiliki tingkat spesialisasi tinggi. Karakteristik orientasi militerpolitik profesional adalah keahlian, tanggungjawab, dan kesatuan. Keahlian merupakan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman sehingga memiliki standar obyektif. Fungsi militer adalah keberhasilan dalam pertempuran bersenjata dengan tugas-tugas meliputi; a). Pengaturan, perlengkapan, dan pelatihan angkatan bersenjata, b). Perencanaan kegiatan, dan c). Pengarahan kegiatan operasi. Yang semua kemampuan untuk menjalankan fungsi tersebut meliputi keterampilan, intelektual, dan kepemimpinan yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman.

Keahlian, tanggung jawab, dan kesatuan sebagai karakter profesional militer melahirkan *the military mind* sebagai dasar hubungan militer dan negara. *Etika militer* menekankan pada sifat permanen, irasionalitas, kelemahan manusia, dan supremasi

masyarakat terhadap individu. *Military mind* menekankan pada ketertiban, hierarki, dan pembagian tugas, serta pengakuan terhadap ‘Negara Kebangsaan’ (*nation state*) sebagai bentuk organisasi politik tertinggi. Negara yang kuat hanya mungkin jika ada kekuatan militer yang kuat, tetapi militer adalah abdi negara. *The military mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Bagi perwira militer, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil.

Kemudian menurut Huntington, ada beberapa kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang dapat mendorong terwujudnya militer profesional, yaitu; a). Perkembangan masyarakat yang membutuhkan berbagai macam keahlian yang terspesialisasi, b). Pertumbuhan negara bangsa yang memungkinkan terbentuknya militer sebagai institusi terpisah dari institusi sosial lainnya, c). Munculnya pandangan dari kelompok-kelompok pro demokrasi untuk mengorganisasikan institusi politik, dan d). Keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan yang dikenal oleh kekuatan militer. Tanpa adanya otoritas tunggal dalam militer, perkembangan demokrasi dapat memecah belah korps militer.

3. Profesional revolusioner, model orientasi militer-politik ini disampaikan oleh Perlmutter sebagai tambahan dari dua model sebelumnya yang disampaikan oleh Huntington. Model profesional revolusioner adalah bagian dari kelompok profesional yang selalu berusaha menigkatkan persyaratan profesionalisme namun tidak memandang dirinya sebagai kelompok profesional yang hanya mementingkan tingkat keahlian teknis semata. Militer profesional revolusioner sering terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan namun tidak berusaha melembagakan kekerasan sebagai wilayahnya yang otonom dan eksklusif.

Keahlian yang dimiliki militer bukan merupakan sarana untuk mencapai mobilisasi sosial. Militer profesional

revolusioner memandang dirinya sebagai pendamping gerakan revolusioner. Ia tidak memisahkan fungsinya sebagai prajurit dan sebagai abdi rakyat tanpa merusak integritas profesionalnya. Tujuan utamanya sebagai abdi rakyat bukanlah profesionalisme, melainkan menjadi pembela orde revolusi. Konsekuensinya, militer profesional revolusioner memiliki kecenderungan interventionis tanpa mengharapkan pengakuan sebagai pahlawan.

Model orientasi militer-politik ini merupakan bagian integral dari rezim yang berkuasa. Intervensi militer profesional revolusioner biasanya merupakan aktivitas suatu kelompok militer yang beroperasi secara tersembunyi untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada. Intervensi hanya dilakukan untuk mendukung revolusi sehingga militer profesional revolusioner bukan merupakan tipe yang permanen (Huntington, 2003:301-304).

Untuk mempermudah memahami model-model orientasi militerpolitik yang berbeda berdasarkan pandangan Perlmutter akan dijelaskan dalam tabel model-model orientasi militer politik berikut ini:

Tabel 5.
Model-Model Orientasi Militer Politik

Ciri-Ciri	Pretorian	Profesional	Profesional Revolusioner
Keahlian	Pengetahuan profesional tidak diperhatikan dengan ketat.	Pengetahuan khusus berdasarkan standar obyektif kompetensi profesional yang tinggi.	Pengetahuan profesional diarahkan kepada nilai-nilai sosial politik.
Klien	Salah satu dari yang berikut: bangsa, kelompok suku, suku,	Negara	Gerakan Partai

	militer, negara.		
Sifat Lembaga (Tipe Kekuasaan)	Hierarki, tidak kohesif, kolektif, berubah-ubah, kepatuhan, sempit.	Hierarki, kohesif, organik, kolektif, subordinasi, otomatik/ma ni pulasi sempit	Sebelum dan selama revolusi bersifat egaliter, mobil, kader manipulatif.
Penerimaan	Terbatas hanya universal pada masa perang	Terbatas	Universal
Ideologi	Tradisional materialis, anti sosialis, pretorian	Konservatif	Revolusioner Gerakan Partai
Kecenderungan Campur Tangan	Permanen/berkelanjutan	Rendah	Tinggi Sebelum dan Selama Revolusi

Sumber: Amos Perlmutter, 2000

Kekuatan Politik Militer Pada Masa Orde Lama

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada masa perang kemerdekaan di tahun 1945-1949 kepemimpinan serta komando militer Indonesia sangat carut-marut dan simpang siur. Salah satunya dikarenakan berlakunya sistem parlementer sejak dikeluarkannya “Maklumat Wakil Presiden No. X, maka jabatan Presiden sebagai panglima Tertinggi sebenarnya tidak berlaku lagi; tetapi prakteknya panglima tertinggi itu tetap dianggap sebagai atasannya langsung oleh Panglima Besar. Menteri Pertahanan yang seharusnya bertanggung jawab dalam segala hal atas pimpinan militer, pada hakekatnya hanya menjadi pimpinan administratif belaka; sedangkan *de facto* atas pimpinan militer berada pada tangan Panglima Besar APRI (Angkatan Perang Republik

Indonesia) yang merangkap sebagai Panglima Angkatan Darat, beserta Staf Umumnya dan gabungan kepala stafnya. Ada lagi lembaga yang bernama Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dapat disamakan sebagai pemegang kekuasaan militer. disamping itu adanya Dewan Siasat Militer yang diketuai oleh Presiden sendiri menambah terpencaranya kepemimpinan militer Indonesia di mana duduk panglima tiap Angkatan.

Pada masa 10 tahun pertama Indonesia merdeka persoalan tentang militer selalu timbul, terutama mengenai peran politik yang ingin dimiliki oleh militer, karena mereka merasa juga perlu ikut berperan aktif dalam perpolitikan bangsa ini. Tetapi, pola hubungan sipil-militer pada masa-masa ini kurang harmonis, asumsi mengenai peran militer dalam perpolitikan harus dibatasi, berkembang berbarengan dengan keinginan pihak militer yang menginginkan berperan dalam perpolitikan.

Pada masa Kabinet Wilopo terdapat rencana Pimpinan TNI untuk menjadikan tentara Indonesia sebagai Tentara Profesional dan Tentara Inti. Rencana ini disetujui serta didukung oleh Menteri Hamengku Buwono IX. Oleh karena alokasi anggaran belanjanya yang amat terbatas maka pada pertengahan tahun 1952 Pimpinan TNI-AD memutuskan untuk memulai melaksanakan demobilisasi sebagai konsekuensi reorganisasi dan rasionalisasi militer tersebut. Tetapi program dari pimpinan TNI tersebut diatas tidak disetujui oleh beberapa kalangan TNI sendiri, terutama oleh anggota-anggota tentara yang dahulu berasal dari bekas-bekas PETA dan Laskar, yang begitu dekat dengan Presiden Sukarno. Oposisi terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer itu mempunyai dukungan politik yang cukup besar, ialah dari PNI dan Presiden Sukarno (Said, 2001:38).

Perpecahan dikalangan TNI, ternyata banyak dimanfaatkan pihak parlemen untuk menintervensi internal TNI (Bhakti, 2001:197-198) diantaranya:

- a) Pada tanggal 23 September 1952, Zainal Baharudin

(Ketua Komisi Pertahanan, dari sayap kiri) mengajukan mosi yang didukung Partai Murba, Partai Buruh, PRN, dan PKI. Mosi ini menyatakan “tidak percaya dan tidak menerima policy yang dijalankan Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik di dalam tubuh TNI, dan minta agar diadakan reformasi serta reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan serta Pimpinan Militer”.

- b) Pada tanggal 13 Oktober 1952, Kasimo dari Partai Katolik mengajukan suatu mosi yang didukung oleh wakil-wakil Partai Masyumi, Partai buruh, Parkindo, Parindra. Mosinya ini menyatakan agar pemerintah segera membentuk sebuah panitia yang beranggotakan wakil-wakil dari Parlemen yang memiliki suara mayoritas dan wakil-wakil pemerintah guna mempelajari secara objektif dan hati-hati seluruh persoalan di dalam Parlemen tersebut dan dalam waktu tiga bulan memberi saran ‘‘kemungkinan dilakukannya penyempurnaan struktur dan kementerian pertahanan dan struktur kemiliteran’’. Pada tanggal 14 Oktober 1952, diajukan mosi ketiga yang disponsori oleh Sekretaris Jendral PNI, Manai Sophian. Mosi yang ini didukung oleh NU dan PSII itu adalah sebagaimana pernyataan mosi Kasimo, hanya berbeda mengenai tugas Panitia Negara, yaitu agar Panitia Negara memberi saran ‘‘kemungkinan penyempurnaan pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Kemiliteran’’.
- c) Pada tanggal 16 Oktober 1952, diadakan voting untuk ketiga Mosi tersebut, namun situasi itu menemui jalan buntu. Lemahnya persatuan di kalangan militer sebelum agresi militer Belanda kedua menimbulkan masalah antara pemerintah dan Panglima Soedirman, serta antara mantan perwira KNIL didikan Belanda yang bertipe ‘‘administrator’’ dan para perwira mantan anggota

PETA yang dilatih Jepang, serta laskar yang bertipe “*solidarity makers*”. Masalah khusus ini memuncak dalam peristiwa 17 Oktober 1952 (Bhakti, 2001:185-200).

Pada tanggal 17 Oktober pagi, suatu Demonstrasi yang mengejutkan melanda Jakarta, yang dilakukan oleh sekitar 30.000 ribu orang. Pertama kaum demonstran itu menuju ke tempat gedung Parlemen, dan setelah itu menuju ke istana Presiden untuk menyampaikan tuntutannya. Pada pokoknya mereka menunut “supaya Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang ada dan kemudian segera mengadakan Pemilu”. Di istana berdiri mobil-mobil berlapis baja dan beberapa meriam, yang secara jelas terlihat mengarah tepat ke tempat Presiden berbicara (Muhammin, 1982:73) Presiden menjanjikan diadakannya Pemilihan Umum secepat mungkin, tetapi dia menolak membubarkan Parlemen sebab, kata Presiden, hal itu berarti akan menjadikannya seorang diktator.

Selesai menghadapi para demonstran Presiden kemudian menerima dua kelompok Perwira TNI; semuanya berjumlah 17 Perwira. Dalam pertemuan tersebut delegasi TNI itu antara lain menyatakan bahwa Parlemen yang ada itu “tidak representatif” dan merupakan sumber ketidak-stabilan politik sehingga menyebabkan kabinet-kabinet tidak bisa melaksanakan program-programnya dengan waktu yang cukup, dan bahwa intervensi yang langsung dilakukan oleh Parlemen terhadap TNI amatlah membahayakan negara. Karena itu mereka menyatakan agar Presiden segera mengatasi masalah itu dengan membubarkan Parlemen dan membentuknya secepat mungkin sesuai dengan kehendak rakyat. Dan bahkan lebih dari itu mereka menuntut Presiden untuk mengganti kabinet dengan pemerintahan *triumvirate* (pemerintah oleh tiga penguasa) oleh Sukarno, Hatta dan Hamengku Buwono IX. Presiden Sukarno tidak ingin memenuhi seluruh keinginan pihak militer. Dan sampai selesainya pertemuan tersebut tidak didapat suatu penyelesaian

(Muhammin, 1982:73-75). “Peristiwa 17 Oktober” ini walaupun politik militer tidak hanya sampai di situ dan berekor panjang di kemudian hari, tetapi dapatlah dikatakan, sejak itu gagallah *manuver politik* TNI itu.

Sebenarnya presiden Sukarno juga tidak menyukai dan bahkan secara diam-diam berusaha mengganti sistem parlementer yang amat membatasinya itu, tetapi Sukarno menolak tawaran pihak militer. Penolakan Sukarno itu, karena dia takut pada timbulnya suatu Yunta militer. Tetapi disamping itu, kegagalan *political manuver* yang dilakukan TNI itu juga disebabkan terpecahnya Perwira dan Pemimpin TNI. Barangkali justru inilah sebab pokoknya. Mereka terpecah antara kelompok yang menginginkan TNI atas dasar profesionalisme. Bahkan dalam peristiwa itu sendiri, pimpinan dan perwira TNI yang berpaham profesionalisme, yang merupakan penggerak dari kejadian tersebut, menunjukkan tidak adanya kesatuan arah.

Sebagai akibat dari kejadian ini, pada tanggal 5 Desember 1952, Kolonel Nasution dibebaskan oleh pemerintah dan berhenti sebagai KSAD, dan demikian pula beberapa perwira “pro-17 Oktober 1952” lainnya mendapat sangsi yang sama. Pada tanggal 16-nya, Kolonel Banmbang Sugeng ditunjuk oleh pemertah selaku KSAD pengangkatan Bambang Sugeng ini ternyata berdampak timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan masalah itu, terutama mengenai keutuhan TNI, sebab antara Menteri Pertahanan Hamengku Buwono dengan KSAD Bambang Sugeng terdapat perbedaan yang besar didalam menyelesaikan perpecahan di dalam tubuh TNI. Maka pada tanggal 1 Januari 1953, Sultan Hamengku Buwono IX mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

Langkah-langkah kemudian yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri, cenderung memperlebar keretakan tubuh militer, maka atas inisiatif dan usaha beberapa Perwira TNI baik yang “pro 17 Oktober 1952” maupun yang “anti-17 oktober

1952"- diadakanlah serangkaian pertemuan guna menciptakan kembali kesatuan TNI yang retak sejak 17 Oktober 1952. usaha ini mendapat dukungan dan dorongan yang kuat dari Bambang Sugeng yang pada waktu akhir-akhir itu otoritasnya banyak dilangkahi oleh Iwa Kusumasumantri di dalam mengambil kebijakan mengenai hal-hal yang menyangkut persoalan intern TNI. Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1955, berhasil dilangsungkan pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh sekitar 280 perwira dari kedua belah pihak. Pertemuan itu berakhir pada tanggal 25 Februari, dengan menghasilkan suatu Resolusi yang diterima oleh seluruh Perwira yang hadir, kemudian disahkan oleh KSAD, Bambang Sugeng. Pada upacara penutupan Konferensi TNI, yang juga dihadiri Presiden Sukarno dan juga Wakil Presiden Hatta serta para Menteri, mereka berziarah ke makam Almarhum Jendral Sudirman dan Letnan Jendral Urip Sumohardjo. Di makam itu para perwira tersebut bersama-sama mencetuskan semacam sumpah setia (Muhamimin, 1982:75).

Resolusi yang berhasil dicetuskan oleh konferensi tersebut terkenal dengan sebutan "Piagam Jogja" atau "Piagam Keutuhan Angkatan Darat". Di dalam keputusan itu antara lain ditekankan bahwa korps Perwira tersebut akan selalu mempertahankan persatuan dan profesionalisme di dalam tubuh TNI-AD, dan tidak membenarkan campur tangan politik di dalam masalah militer, terutama di dalam urusan pengangkatan pada sesuatu jabatan militer yang harus didasarkan pada senioritas dan kecakapan. Di samping itu, di dalam hubungannya dengan pemerintah serta Presiden sebagai panglima tertinggi, resolusi itu menyatakan, bahwa korps Perwira TNI-AD akan mematuhi segala keputusan yang diambil oleh pemerintah bersama-sama dengan Dwitunggal Sukarno-Hatta –bukan hanya cukup dengan presiden sekalipun sebenarnya dia sebagai panglima tertinggi. Selain dari itu konferensi menegaskan suatu pernyataan agar peristiwa 17 Oktober 1952 dianggap tidak pernah ada, dan meminta kepada pemerintah supaya sebelum hari peringatan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah sudah memberi penyelesaian secara formal mengenai kejadian tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemerintah.

Keterlibatan militer dalam dunia politik pada era Demokrasi Parlementer ditandai pula dengan program *civic mission*, menjiplak program tentara Amerika. Konsep tersebut kemudian dalam praktiknya di Indonesia disalahgunakan dan diplesetkan menjadi “nyivik”, yaitu kegiatan yang semata-mata bersifat ekonomi, alias “ngobyek” (Bhakti, 1999:71). Civic berasal dari bahasa Inggris yang berarti *having to do with city or a citizen*; civic berarti pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum dari suatu masyarakat atau warganya. Dilihat dari sisi tugasnya, *civic-mission* adalah tugas atau program militer yang ditujukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Kekuatan politik militer pada masa Demokrasi Parlementer bisa dikatakan dalam masa pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya militer dalam membubarkan Parlemen yang gagal total. Dari peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut dapat dibuat beberapa kesimpulan: *Pertama*, para perwira TNI tetap tidak menginginkan TNI bersikap apolitis; *Kedua*, para perwira bertipe *administrator* tetap ingin berkompetisi dengan para politisi sipil dalam mengatur negara; *Ketiga*, konflik internal di dalam TNI telah menyebabkan terjadinya “*Subyektif Civilian Control*”; *Keempat*, TNI akan mendukung setiap politisi, khususnya Menteri Pertahanan, yang memiliki kebijakan pertahanan yang menguntungkan mereka, dan tidak menyukai seorang Menteri Pertahanan yang lemah atau tidak memiliki visi mengenai pertahanan dan keamanan; *Kelima*, upaya Parlemen dan Presiden untuk campur tangan dalam kebijakan pertahanan dan organisasi kemiliteran, menyebabkan TNI melakukan “*kudeta*” yang gagal pada 17 Oktober 1952 tersebut; *Keenam*, agar tidak dianggap

kudeta militer, maka TNI mengerahkan massa rakyat berdemonstrasi untuk memaksa presiden membubarkan Parlemen. Demonstrasi tersebut merupakan awal dari bentuk mobilisasi massa yang digerakkan dengan uang; *Ketujuh*, “kudeta” 17 Oktober 1952 itu gagal karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari kalangan dalam militer itu sendiri (kelompok PETA dan bekas Laskar- laskar rakyat), tidak di dukung oleh partai-partai politik besar, dan masih kuatnya legitimasi dan otoritas Sukarno di mata rakyat dan bahkan perwira militer sendiri.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada periode tahun 1957-1959 Tentara Nasional Indonesia melalui Mayor Jendral A.H. Nasution sebagai KSAD, menitik beratkan tindakannya untuk mengurangi, dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada TNI. Jendral Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimasi atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non militer dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.

Hal ini kemudian mulai terakomodir ketika peranan Nasution dalam memuluskan jalan bagi terciptanya demokrasi yang terpimpin oleh Sukarno nampak jelas terlihat. Pada masa demokrasi terpimpin begitu besar peranan Sukarno dan Nasution dalam memilih anggota kabinet baru, terutama tindakan Nasution dalam menerapkan idea *middle way*-nya di tingkat atas. Beberapa perwira militer berhasil diangkat menjadi menteri serta beberapa orang dari partai IPKI (partai yang punya hubungan erat dan merupakan kepercayaan kepentingan TNI-AD, yang dibentuk pada tahun 1954 oleh Nasution). Walaupun Sukarno dengan baik juga dapat memasukkan beberapa menteri sayap kiri (pro komunis), tetapi Nasution berhasil mencegah masuknya PKI ke dalam formasi kabinet, dan programnya banyak dipenuhi (Muhaimin, 1982:80).

Pada bulan Juli itu Presiden mengumumkan kabinetnya, yang terdiri dari sembilan Menteri yang disebut “Menteri-menteri kabinet inti” dan 24 orang “Menteri Muda”. Dalam kabinet ini, 12 orang Menteri di antaranya adalah dari golongan militer, dua orang menjadi “Menteri Kabinet Inti”. Pada masa inilah untuk pertama kalinya, seorang menteri, dan yang lebih penting lagi, seorang perwira tinggi TNI-AD yang masih melakukan tugas kemiliterannya dengan aktif menjadi menteri pertahanan, yaitu Letnan Jendral A.H. Nasution.

Namun ini tidak berarti bahwa perjalanan TNI dalam politik berjalan mulus tanpa hambatan. Sukarno tidak ingin kemudian TNI yang menguasai perpolitikan atau berada di belakangnya, tetapi dia menciptakan situasi perimbangan antara militer dengan PKI. Pihak militerpun menyadari itu, namun, melihat usia Sukarno yang lahir pada tahun 1901, maka umur para perwira tinggi TNI adalah jauh lebih muda dari Sukarno; misalnya, Jendral A.H. Nasution yang lahir tahun 1918, atau para perwira yang sebaya dengan mayor Jendral Suharto yang lahir tahun 1920. mengingat faktor usia ini, agaknya pimpinan TNI menganggap Sukarno tidak membahayakan kepentingan jangka panjang TNI-AD. Karena hal-hal itu, TNI-AD tidak mau melancarkan politik langsung konfrontasi dengan Presiden Sukarno dan lebih bersifat mengimbangi belaka sejauh tidak merugikan posisi TNI (Muhammin, 1982:81).

Usaha TNI-AD dalam rangka strategi politiknya yang difokuskan pada pengembangan dan peningkatan peranan golongan fungsional untuk “melayani” politik Presiden Sukarno serta menandingi peranan Partai-partai Politik dengan fokus untuk menghadapi PKI mempunyai tujuan utama untuk memperkokoh legitimasi yang goyah bersama dengan dicabutnya SOB (*Staat Van Oorlog en Beleg*): pemberlakuan darurat perang yang membolehkan TNI mengambil tindakan apapun dan bagaimanpun macamnya. Kalau sebelum perkembangan pada 1 Mei 1963, legitimasi peranan politik TNI-AD sepenuhnya bersandar pada SOB, sedang statusnya sebagai

kekuatan politik golongan fungsional waktu itu hanya dipakai sebagai *reserve* dalam kehidupan politik, maka pada masa sesudah dihapusnya SOB ini TNI-AD menggunakan status golongan fungsional sebagai landasan utama partisipasi politiknya. Usaha strategi TNI-AD ini, ditinjau dari satu segi, tidak mendapat hambatan yang berat mengingat TNI-AD dengan pimpinan Jendral Nasution telah lama perlahan-lahan giat merintis peranan politik golongan fungsional sejak tahun 1958/1959 dan yang kini menjadi pusat perhatian TNI-AD yaitu mengembangkan serta meningkatkan posisi dan organisasi golongan fungsional sehingga perannya akan mampu menandingi peranan partai politik, terutama PKI (Muhammin, 1982:138).

Walaupun secara kasat mata sepak terjang militer dalam bidang non- hankam telah nyata sejak awal berdirinya republik Indonesia, namun keterlibatan militer dalam politik baru mendapat pengakuan secara resmi ketika presiden Soekarno membentuk Dewan nasional pada 6 Mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7/1957, setelah peranan partai-partai politik dilumpuhkan (dengan pengecualian PKI) dan Undang-Undang Darurat diberlakukan (*Staat Van Oorlog en Beleg*: SOB), yaitu peraturan negara dalam keadaan darurat perang.

Tujuan dibentuknya Dewan Nasional oleh Adnan Buyung Nasution dilihat sebagai upaya Angkatan Darat untuk mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional dan menganjurkan supaya UUD 1945 diberlakukan kembali. Cara tersebut membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif kongkret terhadap pemerintahan konstitusional yang sedang diusahakan konstituante (Soebijon, 1995:85). Pada tanggal 9 Juni 1957 Soekarno menyampaikan pidato yang ditujukan baik kepada personil sipil maupun militer di Serang (Jawa Barat) mengatakan bahwa Dewan Nasional mencakup person-person dari golongan-golongan buruh, petani, intelektual, seniman, kaum wanita, orang-orang Kristen, Muslim, pengusaha nasional, personil Angkatan Darat, Angkatan

Udara, Angkatan Laut (Suryadinata, 1992:10-11).

Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan nasional, Nasution melakukan ceramah pada ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang tanggal 12 November 1958 yang dinamakan *the army's middle way*. Tujuan Nasution melakukan pidato agar kedudukan tentara yang statusnya sebagai golongan fungsional menjadi jelas, yaitu membolehkan keikutsertaan militer dalam pemerintahan dengan atau tanpa Undang-Undang Darurat Bahaya Perang (Muhamin, 1982:110-111).

KONSEPSI Presiden (Pokok-Pokok Pikiran Presiden, 1984) dan Nasution yang menginginkan memasukkan sebagai golongan fungsional dibahas dalam Dewan Nasional. Dalam banyak pembahasan didapati bahwa konsepsi-konsepsi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan Undang Undang Dasar Sementara, oleh karena itu diusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Usulan tersebut kemudian diusulkan kepada Konstituante, namun dalam perdebatan- perdebatan yang terjadi pada sidang-sidang konstituante ternyata usulan tersebut mengalami jalan buntu. Kebuntuan yang menimpa Konstituante menyebabkan sistem ketatanegaraan dinyatakan berada dalam keadaan bahaya. Untuk mengatasi hal itu Presiden Soekarno dengan dukungan penuh TNI mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 (Soedijono, 1995:26). Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, maka peranan ABRI/TNI sebagai golongan fungsional/kekuatan sosial politik memperoleh legitimasi konstitusional.

Era Demokrasi Terpimpin merupakan titik awal dari meluasnya peranan militer di dalam sistem politik Indonesia (Bhakti, 2001:75). Demokrasi Terpimpin dibangun atas dasar bangunan politik segi tiga yang menempatkan Soekarno pada posisi puncak, dengan mengikat Partai Komunis Indonesia di sisi kiri bawah dan TNI khususnya Angkatan Darat di kanan bawah. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal pokok, antara lain: (1) Pembubaran Konstituante, (2) Menetapkan Undang-Undang

Dasar 1945, berlaku kembali dan (3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada masa-masa setelah dekrit inilah keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer, di mana duduk delapan perwira ABRI (Soebijono, 1995:25). Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus tetap menjabat Kepala Staff Angkatan Darat. Juga, ketika Soekarno mengumumkan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah anggota militer aktif (Bhakti, 2001:77)

Demokrasi Terpimpin telah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin sentral dengan kekuasaan yang bersifat absolut. Dalam bahasa yang lain Presiden menjadi penentu baik dan buruknya sebuah kebijakan. Namun menurut Herbert Feith sesungguhnya pada masa awal Demokrasi Terpimpin kekuasaan ada pada dua poros utama yaitu Presiden dan Angkatan Darat (Feith, 1995:31). Barulah setelah Presiden menyadari bahwa beliau membutuhkan satu lagi kekuatan politik penyeimbang yang mampu menopang kekuasaannya, maka Soekarno melabuhkan pilihannya kepada PKI yang memang memiliki semboyan kebersamaan dan kegotongroyongan.

Seperti telah diungkap bahwa Sukarno dan Nasution memiliki kepentingan yang sama dalam diberlakukannya Demokrasi Terpimpin. Namun bulan madu Soekarno dan Nasution tak berlangsung lama, karena di balik “kemesraan” itu sesungguhnya terkandung potensi konflik yang melibatkan keduanya. Soekarno, yang semakin khawatir akan pertumbuhan kekuatan militer, khususnya kekuatan Nasution, mencoba mengurangi ketergantungannya kepada militer. Pada perkembangan selanjutnya Soekarno terbukti berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membuat posisi tentara semakin terdesak, dengan cara merapatkan diri dan

merangkul kalangan komunis, PKI.

Perselingkuhan politik Soekarno dengan PKI memunculkan keresahan di benak TNI khususnya garis militer Nasution yang menilainya sebagai suatu pengkhianatan, karena dengan posisi seperti ini tentunya akan mengancam keberadaan tentara di dalam sistem pemerintahan. Tentara yang semakin gelisah dengan manuver-manuver politik yang kian liar berupaya pula melakukan langkah-langkah preventif guna menghadang laju pergerakan kaum komunis Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa TNI AD adalah lawan utama PKI.

Sampai di sini setidaknya telah sedikit terjelaskan, pada saat awal hubungan Presiden dengan TNI bersifat simbiosis mutualistik. Di satu pihak Soekarno membutuhkan dukungan TNI dalam menggolkkan ide Demokrasi Terpimpin. Sedangkan di pihak yang lain, TNI memerlukan Soekarno demi menjaga peluang TNI untuk terus bisa duduk di kursi pemerintahan. Namun pada era selanjutnya, ketika Soekarno lebih menempatkan PKI pada posisi istimewa, otomatis TNI pun meradang menyaksikan realitas politik yang berkembang. Di tambah lagi dengan seringnya PKI melakukan intrik-intrik politik yang tidak sungkan-sungkan melakukan penistaan terhadap TNI, bahkan membunuh anggota TNI. Maka tak ada pilihan lain bagi TNI, kecuali dengan melakukan perlawanan politik pula. Untuk melempangkan niatnya ini, pada tahun 1964 TNI segera mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan fungsional dalam sebuah wadah bersama, dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Suryadinata, 1992). Pada akhirnya situasi ini menciptakan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan posisi TNI *vis a vis* Soekarno dan PKI.

Pertikaian politik TNI dan PKI mengalami puncaknya ketika terjadi suatu peristiwa berdarah yang mengubah wajah sejarah perpolitikan Indonesia modern secara drastis. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September (G30S) menjadi klimaks atas

permusuhan yang pada masa itu terjadi. Jenazah mereka di masukan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang merupakan organisasi *underbow* Partai Komunis Indonesia. Maka tak heran jika penculikan para Jenderal tersebut diidentikan sebagai upaya kup dari kekuatan PKI terhadap pemerintahan yang tidak lagi kuat.

Masa Pemberontakan PKI

Pergolakan yang di timbulkan “Gerakan 30 September” telah menampilkan seorang Jendral yang sebelum meletusnya peristiwa itu kurang dikenal dalam percaturan politik di Indonesia, seorang Jendral yang hampir sepenuhnya memainkan kecakapannya di bidang militer melulu; Mayor Jendral Suharto. Sedikitnya ada dua faktor pokok yang menggagalkan kudeta “Gerakan 30 September”. Pertama, anak buah Letnan Kolonel Untung tidak berhasil menculik dan membinasakan Jendral A.H. Nasution. Barangkali tidaklah amat mengganggu operasi selanjutnya dari “Gerakan 30 September” kalau yang lolos dari usaha penculikan tersebut bukan Jendral A. H. Nasution. Faktor kedua, para perencana dan pimpinan “Gerakan 30 September” mengabaikan Jendral Suharto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) untuk sekurang-kurangnya dinetralisirkan terlebih dahulu sebelum kudeta itu dilancarkan. Suharto adalah seorang nasionalis yang kuat serta setia kepada Jendral Ahmad Yani dan Nasution yang anti komunis.

Banyak penafsiran yang berkembang terhadap kudeta gagal tersebut. Tjipta Lesmana dan Asvi Warman Adam seperti yang dikutip Abdul Fatah menulis hampir sama mengenai peristiwa tersebut (Fatah. 2005:124) antara lain:

a) *Cornell Paper* dan Wertheim menyatakan, kudeta dilakukan oleh kelompok Angkatan Darat (karena ada konflik internal Angkatan Darat).

b) Manai Sophian, Oe Tjie Tat, dan dari pelengkap Nawaksara (sembilan pokok pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno di depan MPRS tanggal 22 Juni 1966) menyatakan bahwa G30S/PKI merupakan sebuah konspirasi unsur-unsur nekolonialisme yang berusaha menggagalkan revolusi Indonesia. Robinson berbicara tentang peran Amerika Serikat dalam “memprovokasi” Angkatan Darat melakukan kudeta dan perannya membangun rezim Soeharto.

c) Sedangkan Brackman dan Miroslav Fic menafsirkan bahwa kudeta September 1965 merupakan persekongkolan komunis yang melibatkan Presiden Soekarno.

Pada tanggal 1 Oktober pagi, setelah Jendral Suharto mendengar dan menerima laporan tentang penculikan Ahmad Yani, Nasution, dan lain-lainnya, dan kemudian mendengar siaran RRI jam 07.20, dia segera mengambil inisiatif mengumpulkan Pimpinan Angkatan Darat ke tangannya. Setelah dia berhasil mengadakan kontak dengan Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian, sebagai pimpinan sementara angkatan darat Jendral Suharto mengeluarkan sebuah pengumuman yang disiarkan oleh Departemen Angkatan Darat No. 002/Peng/Pus/1965 yang antara lain berisi, bahwa angkatan darat, laut dan kepolisian telah sepakat untuk menutup perbuatan kontra revolusioner yang dilakukan “Gerakan 30 September” adalah merupakan suatu *coup* terhadap Presiden dan terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Setelah Suharto merebut RRI dan memberikan gambaran kepada rakyat tentang perkembangan yang sedang berlangsung. Kemudian Suharto beserta pimpinan lainnya membuat rencana untuk secepat mungkin membebaskan pangkalan udara “Halim Perdanakusumah”. Masa setelah jatuhnya “Halim Perdanakusumah” ke tangan Jendral Suharto pada tanggal 2 Oktober, dua orang telah tampil memegang peranan utama dalam kehidupan politik selanjutnya, yaitu Presiden Sukarno dan Panglima Angkatan Darat (sementara) Jendral Suharto.

Pada tanggal 2 Oktober, Suharto menemui Presiden di Bogor, pertemuan itulah yang pertamakalinya antara Presiden Sukarno dan Jendral Suharto. Pertemuan yang dihadiri beberapa kalangan pejabat pemerintahan dan militer itu berlangsung dalam suasana yang tegang akibat perbedaan kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh Sukarno dan oleh Suharto secara terpisah dan kontroversial dalam waktu yang bersamaan, yakni pada tanggal 1 Oktober. Hal-hal yang kontras dari kedua pemimpin itu ialah:

a)Jendral Suharto mengutuk “Gerakan 30 September” yang dilakukan Untung, yang menyebutnya sebagai suatu percobaan kudeta yang kontra-revolusioner; sedang, Presiden Sukarno tidak menyebutnya sama sekali sebagai suatu kudeta.

b)Presiden Sukarno memerintahkan kepada masing-masing angkatan dalam ABRI agar kembali ke posnya masing-masing serta tetap tinggal tenang; sedangkan Jendral Suharto menyebutkan bahwa telah disepakati oleh Angkatan-angkatan Darat, laut, dan kepolisian untuk menghancurkan “Gerakan 30 September”.

c)Presiden Sukarno mengumumkan, bahwa dia sendiri telah mengambil pimpinan Angkatan Darat ke dalam tangannya, dengan menunjuk Mayor Jendral Pranoto sebagai pimpinan TNI-AD guna mengurus tugas sehari-hari; sedang Mayor Jendral Suharto mengumumkan bahwa dia telah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk sementara ke dalam tangannya (Muhamimin, 1982:195).

Pada tanggal 4 Oktober 1965, timbul perkembangan yang merupakan impetus pergolakan di dalam masyarakat dan kalangan politik, ialah diketemukannya mayat keenam orang Jendral, serta perwira pertama yang diculik dalam satu sumur kecil yang dalam di lubang buaya. Atas dorongan Jendral Nasution, Jendral Suharto dengan baiknya mendramatisir tragedi pembunuhan tersebut di mata rakyat dan kalangan elit.

Dengan terjadinya perkembangan kejadian itu, maka

Angkatan Darat (TNI-AD) telah dipandang sebagai “Pelindung Bangsa”, “Penyelamat Negara” oleh kekuatan yang anti-komunis, sedang oleh keolmpok yang pro komunis TNI-AD dipandang sebagai pengancam keselamatan yang sewaktu-waktu akan mengahabisi hidupnya. Dan sejak saat itu TNI-AD meraih suatu posisi baru menjadi satu pusat perhatian nasional, dan TNI-AD menerima dengan kaget sekali. Posisi tersebut ternyata justru jatuh ke tangan Mayor Jendral Suharto, seorang politisi Muallaf yang belum seminggu memasuki arena politik . karena itu untuk mengimbangi situasi baru tersebut, Suharto dengan Nasution- bertindak dalam bentuk memelihara keamanan, mempertahankan negara, dan berusaha menciptakan *status quo* baru dengan memandang PKI sebagai musuh negara. Posisi TNI- AD ini semakin kuat setelah pada tanggal 16 Oktober Mayor Jendral Suharto diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat secara resmi oleh Presiden, sementara Jendral Nasution tetap Menteri koordinator Bidang Pertahanan Dan Keamanan.

Tindakan Jendral Suharto sesudah menguasai situasi Jakarta, ialah mengatasi daerah luar Jakarta, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teristimewa daerah Jawa Timur dimana Aidit telah dipastikan bersembunyi di sekitar Surakarta, daerah ini disamping merupakan basis kekuatan massa pro-PKI dan PKI, juga banyak kesatuan dari Divisi “Diponegoro” yang telah jatuh kedalam pengaruh “Gerakan 30 September” (Muhaimin, 1982:195).

Peranan Presiden Sukarno sebenarnya telah berkurang banyak dengan digagalkannya Gerakan 30 September oleh Jendral Suharto. Gagalnya gerakan 30 September bererti rontoknya perimbangan kekuatan politik antara TNI-AD dan PKI yang telah lama dipertahankan dan diciptakan oleh Presiden Sukarno. Pada tanggal 8 Oktober, terjadilah demonstrasi besar di Jakarta yang disponsori oleh kalangan pemuda islam dengan teriakan menuntut dibubarkannya PKI, serta dengan poster “hancurkan PKI”, “bunuh Aidit”.

Presiden sukarno menanggapi demonstran anti-PKI itu dengan keras sekali. Dia menganggap perbuatan itu sebagai usaha yang dikendalikan kaum imperialis untuk mebelokkan revolusi Indonesia ke “kanan”. Gerakan Sukarno untuk membangun kembali image kepemimpinannya dilakukannya dengan gencar, ia pun berkampanye bahwa PKI tidak bersalah (Sundhaussen, 1982:390) tidak ada kaitannya dengan gerakan 30 September. Hal ini tentu membahayakan bagi masa depan politik TNI-AD, maka. TNI-AD mencoba melawan gerakan-gerakan Sukarno (dengan tidak secara terang-terangan) dengan memobilisasi massa mahasiswa yang membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dengan giat melakukan aksi demonstrasi menuntut di bebarkannya PKI setelah KAMI dibubarkan oleh pemerintah kemudian terbentuk kembali KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) dengan tujuan yang sama dengan KAMI.

Melihat perkembangan yang semakin eksplosif ini, TNI-AD nampak belum mau secara terbuka membela ex-KAMI-KAPPI dalam pertarungannya melawan Presiden Sukarno. Ini berarti kelompok Angkatan Darat belum mau melakukan konfrontasi langsung dalam pergulatannya dengan Presiden Sukarno. Tetapi tindakan-tindakan Sukarno terhadap para demonstran yang menentangnya, dan aksi-aksi demonstran ex-KAMI- KAPPI yang telah mempengaruhi kaum political elit dan orang-orang berpengaruh di Jakarta, memaksa TNI-AD untuk mengambil langkah baru mulai awal Maret ini dengan melakukan tekanan-tekanan langsung terhadap Presiden, yang akan dilakukan pada tanggal 12 maret, yaitu hari dimana presiden Sukarno akan melakukan sidang dengan para Pimpinan Militer termasuk para Panglima Daerah Militer.

Untuk mengatasi situasi yang sangat kacau akhirnya pada tanggal 11 Maret, sesuai dengan rencananya, Presiden mengetuai sidang Kabinetnya dengan 100 orang Menteri, tetapi Menteri Pangad Jendral Suharto tidak menghadirinya karena “sakit”. Beberapa saat setelah sidang berlangsung, pada jam 11.30,

Presiden menerima surat dari pengawalnya, Jendral Sabur, yang memberitahukan kepdanya bahwa “Pasukan tidak dikenal” telah mengepung istana dan sedang memasuki komplek istana. Setelah dibacanya Presiden dengan buru-buru meninggalkan ruang sidang, langsung terbang ke Bogor bersama Subandrio dan Khaerul saleh (Muhammin, 1982:213).

Suharto segera mengirim tiga Jendral ke Bogor, yaitu Basuki Rahmat, Muhammad Yusuf dan Amir Mahmud. Mereka berhasil menemui Presiden, ketiga Jendral tersebut memperingati Presiden, bahwa “Presiden tidak mempunyai grip lagi kepada situasi” yang sedang berkembang di Jakarta khususnya. Setelah dilangsungkan pembicaraan antara ketiga Perwira Tinggi Angkatan Darat tersebut dengan Presiden yang didampingi oleh ketiga Waperdamnya Subandrio, Leimena dan Khaerul Saleh- Presiden menandatangani “konsep” Surat Perintah. Surat perintah Presiden yang kemudian terkenal dengan nama “Surat Perintah Sebelas Maret” itu, antara lain berisi “memutuskan dan memerintahkan kepada Letnan Jendral Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan”.

Dikeluarkannya sebuah “Surat Perintah” dari Presiden Sukarno kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jendral Suharto, pada tanggal 11 maret 1966, yang kemudian terkenal dengan sebutan “Surat Perintah Sebelas Maret”, mengandung arti yang penting dalam sejarah politik kehidupan bangsa Indonesia, terutama penting bagi TNI-AD dalam hubungannya dengan sumber legitimasi peranan politik yang dimainkannya. Surat perintah itu pula yang mengakhiri *showdown* antara Presiden Sukarno melawan Angkatan Darat (Muhammin, 1982:211).

Peristiwa itu juga menjadi awal dimulai dominasi militer dalam perpolitikan bangsa ini, tidak tanggung-tanggung, rezim militer pimpinan Suharto bertahan selama 32 tahun. Tentu bukan

waktu yang singkat, untuk merasakan tumpuk kekuasaan, sehingga militer merajalela di setiap lembaga dan lini kehidupan masyarakat.

Kekuatan Politik Militer Masa Orde Baru

Sejarah keterlibatan militer dalam politik diawali pada akhir pemerintahan Soekarno dan semakin begitu mendominasi kehidupan politik ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan yang kemudian berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru tampil dengan mengedepankan dominasi militer dalam kehidupan politik yang berimplikasi terhadap represifitas dan berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Suasana politik yang represif dimana suara kritis dibungkam, peran dan fungsi lembaga-lembaga politik tidak berjalan dengan semestinya serta hukum yang dijalankan berdasarkan *like or dislike*, telah menjadi prototipe bagi perjalanan pemerintahan Orde Baru yang militeristik. Richard Tanter, seorang Pengamat politik militer dari AS, menilai bahwa Indonesia dibawah Soeharto telah menjadi negara intel.

Model operasinya, Tanter menyimpulkan bahwa jangan ambil resiko dan hantam selalu dari belakang. Tanter beranggapan bahwa penggunaan teror yang dilakukan oleh aparat militer dipandang paling efektif. Represif militer hanya menimbulkan kebiadaban dan berbagai bentuk kekerasan politik yang intinya adalah diluar batas kemanusiaan.

Kehancuran sistem Demokrasi Terpimpin yang terjadi setelah bencana yang menyertai percobaan kudeta di tahun 1965 diikuti oleh tersingkirnya PKI dan jatuhnya Soekarno telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan (Crouch, 1999:15). Melalui ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966, pada masa permulaan Orba dengan tandas meletakkan posisi ABRI pada “kedudukan ABRI adalah sebagai alat revolusi dan alat negara yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem persenjataan fisik teknologis dan sistem persenjataan sosial politik” (Cholisin, 2002:11).

Sejarah kekuasaan Orde Baru adalah sejarah neo-fasisme (militer), yaitu suatu pemerintahan yang dibangun dengan cara mengandalkan elitisme, irasionalisme, nasionalisme dan korporatisme. Ciri dari Pemerintahan neo-fasisme militer ini adalah mengandalkan kekuatan militer untuk menghancurkan organisasi-organisasi massa (kekuatan sipil) dan menghilangkan semua gerakan militant (Iswandi, 1998:61). Bibit-bibitnya telah muncul sejak masa Demokrasi Terpimpin, dan diaplikasikan "nyaris" sempurna pada masa Orde Baru. Meskipun ketetapan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan sosial baru dikukuhkan pada tahun 1982, yaitu melalui UU No. 20/1982, namun prakteknya peran sosial-politik TNI telah berjalan sejak tahun 1960-an. Terutama, sejak Soeharto berkuasa pada tahun 1966, peran sosial-politik TNI semakin membesar. Peran sosial-politik TNI ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan "dwi fungsi ABRI/TNI".

Konsep dwi fungsi TNI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah "dwi fungsi" diperkenalkan kemudian pada rapat pimpinan Polri di Porong tahun 1960. Dwi fungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi "pembina wilayah" atau pembina masyarakat (Nasution, 2001:3). Nasution menganggap bahwa, "TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwi fungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya".

Mayor Jendral Nasution, meski berasal dari kalangan militer yang netral, pada tahun 1965 merumuskan sebuah konsep yang dia namai "Jalan Tengah". Dalam seminar pertama yang diselenggarakan pada April 1965 tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peran rangkap, yaitu sebagai "kekuatan militer" dan "kekuatan

sosial-politik”. Sebagai kekuatan “sosial-politik”, kegiatan tentara meliputi bidang-bidang: “ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.”

Peran rangkap militer ini, walau belum tercetuskan secara resmi, sering dijadikan alasan untuk meraih kendali kekuasaan ke tangan mereka, terutama ketika sistem pemerintahan sedang mengalami kemerosotan. Konflik-konflik yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, seperti “Peristiwa Madiun”, membuat tentara menyadari peran ekstrem mereka. Perkawinan antara kalangan militer netral yang lebih terdidik dengan kalangan militer yang haus kekuasaan seperti Soeharto, sekurangnya dalam ruang lingkup yang paling dominan di dalam TNI, berhasil meredam perpecahan lebih jauh di kalangan militer Indonesia yang pada waktu itu terbagi-bagi menjadi divisi-divisi kecil yang memegang ideologi politik tertentu. Setiap konflik yang terjadi membuat militer memiliki alasan untuk memberlakukan situasi darurat, kemudian menuai kendali-kendali politik dan ekonomi setelah konflik berhasil direddam.

Dwi fungsi ABRI adalah satu point penting yang memungkinkan ABRI memasuki hampir seluruh lapangan kehidupan, bukan saja sebagai aparat pertahanan dan keamanan, melainkan juga sebagai kekuatan sosial politik. Dwifungsi ABRI menurut Soebiyanto (1976:4-8) adalah “Bahwa ABRI itu mempunyai dua fungsi, adalah sebagai kekuatan hankam, maka ABRI merupakan aparatur negara dan bangsa terhadap serangan/ancaman/ bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial ABRI, merupakan salah satu golongan karya yang ikut secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat dan negara di semua bidang dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sebagai aparatur negara ABRI menegakkan dan membela negara, sebagai golongan karya ABRI mengisi dan membangun negara”.

Dwi fungsi TNI ini muncul sebagai refleksi atas pengalaman politik masa sebelumnya. Sebelum tahun 1952, hampir semua keputusan-keputusan politik ditentukan oleh politisi sipil,

sementara campur tangan militer di politik sangat minim dan tidak signifikan. Akibatnya, keberadaan militer menjadi bergantung kepada kemauan politisi sipil. Ketika Kabinet Wilopo melakukan berbagai penghematan dalam anggaran dan belanja negara, termasuk memperkecil anggaran di sektor pertahanan, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan rasionalisasi organisasi TNI. Akibatnya, sekitar 80.000 anggota militer terancam di-demobilisasi.

Kompleksitas persoalan dan konflik politik saat itu, telah menyebabkan militer melakukan kudeta pada 17 Oktober 1952. Terdapat dua kelompok militer (AD) yang bertikai: yaitu kelompok yang setuju perubahan organisasi, dan kelompok yang tidak setuju perubahan. Rumor bahwa kelompok yang akan terkena demobilisasi adalah laskar-laskar rakyat telah mempertajam konflik, karena laskar rakyat merupakan *underbouw* partai-partai politik, seperti Masyumi, PNI, PKI, PSI dan Murba. Akibatnya konflik tersebut berubah menjadi konflik politik di parlemen. Partai-partai kiri seperti Partai Murba, Partai Buruh dan PKI menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Di sisi lain, partai-partai kanan seperti Masyumi dan Partai Katolik melakukan *counter motion* untuk mengakhiri penggunaan Misi Militer Belanda dan setuju untuk melanjutkan demobilisasi.

Pada 28 Juli 1952 parlemen mengadakan serangkaian sidang yang membahas persoalan-persoalan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, khususnya persoalan internal TNI AD. Namun pimpinan TNI AD menganggap bahwa debat tersebut telah membuka aib TNI AD. Sehingga, para pimpinan TNI AD, terutama yang berhaluan kanan marah karena menganggap para politisi sipil telah mencampuri urusan internal TNI AD. Meskipun Sukarno berhasil menggagalkan kudeta, namun militer berhasil mendapatkan *bargaining position* di arena politik nasional. Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan di beberapa daerah, sehingga peran militer semakin dibutuhkan, dan sejak

saat itu, perannya semakin besar pula di bidang politik.

Satu-satunya kelompok sipil yang kritis terhadap militer AD hanyalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pemberangusan partai-partai politik di awal tahun 1960-an, kekuatan politik nasional hanya terdiri dari tiga, yaitu Sukarno, PKI dan militer (AD). Antara PKI dan TNI saling bersaing dan melakukan "manuver" untuk menarik perhatian Sukarno. Sejak tahun 1963, peristiwa demi peristiwa telah mempengaruhi dinamika hubungan segitiga kekuasaan tersebut. Sebagai misal, pergantian KSAD dari Nasution kepada Ahmad Yani pada Juni 1962, pencabutan Undang-undang Keadaan Bahaya (SOB) pada November 1962, dianggap telah menguntungkan PKI. Perihal diangkatnya Yani tersebut dianggap sebagai kemunduran serius bagi kelompok Nasution yang mendukung militer sebagai kekuatan politik yang utuh. Setelah dilantik sebagai KSAD, A. Yani segera mengganti sejumlah Panglima daerah yang berani menentang Sukarno dengan isu-isu komunis (Feith, 2001:136-137).

Tetapi, ketika Maret 1963 terjadi kerusuhan anti-Cina di Jawa Barat pada saat Sukarno berkunjung ke Cina, kelompok AD dianggap berhasil mempermalukan Sukarno dan sekaligus memperlemah PKI. Kerusuhan tersebut disinyalir sengaja dilakukan oleh militer karena pada saat itu sejumlah komandan militer setempat terlihat bekerjasama dengan para perusuh.

Kemudian, pada tahun 1965, terjadi peristiwa kontroversial "G-30-S", yang tidak saja mematikan gerakan PKI di Indonesia, tetapi juga merubah kekuasaan politik Sukarno. Sehingga, militer menjadi satu-satunya pemenang, dan segeralah babak Orde Baru dimulai. Sejak saat itu, militer mendominasi hampir di seluruh bidang sosial, politik dan ekonomi nasional.

Agar keberadaan militer di bidang sosial-politik diakui, maka pemerintah militer Orde Baru melakukan langkah-langkah yuridis sebagai berikut: (1) memasukkan dwi fungsi ABRI dalam

GBHN tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan; (2) UU No. 20/1982 tentang Pokok- pokok Hankam Negara; (3) UU No. 2/1988; dan (4) UU No. 1/1989. Dua produk UU yang terakhir merupakan penyempurnaan dari produk UU sebelumnya.

Setidak-tidaknya, terdapat tiga peran militer pada masa Orde Baru yang berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi. *Pertama* adalah menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk mewakilinya dirinya di DPR. Misalnya, pada tahun 1966, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer yang menempati jabatan strategis di departemen- departemen urusan sipil. Di DPR, sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili militer. Di tingkat daerah, pada tahun 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada tahun 1970. Sementara, pada tahun 1968, terdapat sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer. Hingga tahun 1982, sebanyak 89% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer. Kemudian paska pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal di militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kenaikan ini dianggap tidak layak, karena jumlah ABRI hanya 500.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% di parlemen (Cholisin, 2002:23).

Banyaknya anggota militer yang duduk di parlemen telah mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR. Misalnya, pengalaman masa kerja DPR dari 1971-1977 dan 1977-1982, Fraksi ABRI terlihat paling keras menentang penggunaan

hak interpelasi dan angket pada kasus korupsi di Pertamina yang diusulkan oleh F-PP dan F-DI¹²⁹. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh F-ABRI dalam menolak usulan penggunaan hak angket pada kasus pembunuhan massal di Tanjung Priok.

Kedua adalah menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil. Contoh yang paling mencolok pada kasus ini adalah pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dapat diartikan sebagai salah satu upaya "mengendalikan" kekuatan intelektual melalui sebuah lembaga. Hal ini bertentangan dengan hakikat cendekiawan yang berpikiran bebas dan kreatif, tetapi diikat dalam suatu wadah yang bersifat ideologis. Sebelumnya, militer selalu menganggap bahwa intelektual Indonesia terlalu "bias Barat". Dengan kelahiran ICMI, diharapkan intelektual tidak lagi "bias Barat", tetapi lebih "bersahabat" dengan militer. Contoh lain terjadi pada Maret 1997, di mana Kassopol ABRI, Letjen Syarwan Hamid mengumpulkan para guru besar dari seluruh Indonesia di Bogor. Tujuan dari pengumpulan para profesor tersebut adalah untuk "memberi informasi" mengenai bahaya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan bangkitnya komunisme baru. Rejim militer Orde Baru menganggap bahwa PRD dianggap berbahaya selain karena beraliran kiri dan diasosiasikan dengan komunis dan PKI, PRD juga dituduh sebagai dalang kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996.

Militer mendikotomikan antara Barat dan Timur secara oposisional. Barat adalah sesuatu yang berbau asing, sekular dan sangat bertentangan dengan Timur yang relijius dan menjunjung tinggi kesantunan. Oleh karena itu, untuk melihat Indonesia maka tidak dapat dipahami dengan kerangka struktural Barat yang liberal. Hal tersebut juga berlaku untuk melihat kedudukan militer di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk isu demokratisasi dan hak asasi manusia, militer selalu mendefinisikan bahwa Indonesia memiliki keunikan tersendiri sehingga memerlukan penanganan sendiri seusai dengan kepentingan militer.

Ketiga adalah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat. Beberapa kasus yang terjadi pada masa ini adalah: Orde Baru melakukan pembunuhan terhadap ratusan ribu anggota PKI dan pendukung Sukarno, serta memenjarakan ribuan lainnya tanpa proses pengadilan (1966-1971), pembunuhan massal terhadap anggota kelompok Islam di Tanjung Priok (1984); kasus tanah petani di Jenggawah (1989); pelaksanaan operasi militer di Aceh (1989-1999), Timor Lorosae (1980-1999) dan Papua (1960-an-1999); penggusuran dan intimidasi penduduk di Kedung Ombo, Jawa Tengah (1989); penembakan penduduk di sekitar waduk Nipah, Madura (1993), intimidasi terhadap pendukung non-Golkar menjelang setiap pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1987), penyerangan terhadap kantor PDI (1996), penculikan aktivis pro demokrasi (1997), penembakan empat mahasiswa Trisakti (1998), tragedi Semanggi (1998) dan masih banyak lagi peristiwa- peristiwa lainnya, yang karena terjadi di wilayah pedalaman dan jumlah korbannya sedikit sehingga tidak diberitakan secara luas (Noorsalim, 2003: 17-28).

Terdapat dua penjelasan mengapa militer banyak terlibat dalam kasus kekerasan di Indonesia. *Pertama*, karena pada dasarnya militer memang tidak dilatih untuk melindungi rakyat. Semua prajurit adalah dilatih untuk menyerang, membunuh dan menghancurkan lawan. Dalam pendidikan militer selalu ditekankan untuk merangsang insting kebusasannya. Begitu juga, teknologi yang dikembangkan oleh militer adalah lebih banyak untuk menyerang, membunuh dan menghancurkan lawan. *Kedua*, adalah doktrin pertahanan dan keamanan yang menekankan perang gerilya yang menggunakan rakyat sipil sebagai bumber. Dalam doktrin yang disebut Sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) tersebut tidak membedakan antara militer (*combatans*) dan penduduk sipil.

ABRI telah menjadikan perannya berdwifungsi itu sebagai senjata utama untuk mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis. Dalam posisi seperti itu, ABRI (TNI AD) menjadi

satu-satunya institusi politik yang berkuasa dan dapat mengatur sendiri seluruh kehidupan masyarakat. Lebih jauh, Daniel S. Lev menuliskan bahwa dwi-fungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer.

Bibit dari perluasan penguasaan muncul sejak masa paska kemerdekaan. Misalnya penolakan Jenderal Sudirman terhadap rencana pembentukan staf pendidikan untuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibawah kementerian Pertahanan, pada januari 1946. Alasannya kekuatan militer adalah kekuatan politik, dan militer pecaya bahwa mereka harus menjadi pemimpin Indonesia (Briton, 1996: 53-56).

Sementara Perluasan penguasaan militer terhadap seluruh lembaga kenegaraan sejak 1965 paska G30S, Soeharto mengembangkan apa yang saat ini dikenal sebagai komando territorial (Lev, 1999:10-11). Disamping pengembangan kekuasaan territorial juga dibangun jaringan intelijen secara ekstra yaitu melalui Kopkamtib dan BAKIN. Kekuasaan teritorial dan peranan dwifungsi itu membentang mulai dari pusat sampai ke-jajaran desa. Boleh dikatakan bahwa kekuasaan teritorial itu menandingi kekuasaan birokrasi sipil dan dalam beberapa kasus bisa mengatasinya.

Geliat militer dalam perpolitikan tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Mentalitas umum tentara Indonesia sebelum maupun setelah kemerdekaan adalah peran langsungnya dalam perpolitikan. Harold Crouch mencatat, “dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan.”

Adapun dua arus gerakan militer di masa itu adalah: yang berpendirian netral dalam urusan politik, dan yang tidak sungkan-

sungkan untuk terlibat dalam perpolitikan. Pimpinan-pimpinan militer non-politis kebanyakan berasal dari kalangan kaum berpunya Indonesia yang lulus dari akademi kemiliteran di Belanda. Sementara yang kedua, yang menganggap bahwa militer harus secara langsung mempengaruhi jalannya pemerintahan, berasal dari divisi-divisi tentara lokal yang cenderung memiliki pengikut berdasarkan ideologi politik dan daerah divisi tersebut berasal.

Sejak Pemerintahan Orde Baru, keterlibatan militer dalam berbagai kehidupan non-militer telah merupakan sebuah keniscayaan. Baik melalui doktrin peran sosial politik ABRI maupun ketentuan perundangan yang mendasarinya, sampai ke implementasi strukturalnya, kehadiran ABRI dalam berbagai kehidupan telah menjadi tak terpisahkan dari perjalanan Republik ini. Dalam pemikiran William Liddle, pelembagaan Dwifungsi ABRI di era Soeharto merupakan bagian dari pelembagaan Piramida Orde Baru yang mencakup seorang Presiden dengan kekuasaan yang sangat dominan, angkatan bersenjata yang sangat aktif berpolitik, proses decision making yang berpusat pada birokrasi, dan pola hubungan state- society yang mengkombinasikan kooptasi responsivitas dengan represi. Fenomena tersebut kemudian menimbulkan keraguan masyarakat akan efektivitas konsep Dwifungsi ABRI.

Dekonstruksi dan kaji ulang terhadap konsep Dwifungsi ABRI merupakan kebutuhan politik yang mendesak disaat angin reformasi sedang berhembus. Ketika masyarakat mulai sepakat mendefinisikan reformasi sebagai redemokratisasi, muncul beberapa pertanyaan akan posisi ABRI dalam proses reformasi serta bagaiman seandainya ABRI mempertahankan status quo. Beberapa pemikiran kemudian muncul untuk melenyapkan militer dari panggung politik.

Kontroversi dari Dwifungsi ABRI timbul karena adanya ekses negatif di masyarakat seperti stabilitas menjadi tujuan, dinamika masyarakat menjadi terhambat, aspirasi akan pluralitas dikalahkan keseragaman dan monoloyalitas, sementara asas

desentralisasi melemah bersama menguatnya sentralisasi, sehingga demokrasi sulit dicapai karena adanya pelembagaan otoritarianisme.

Secara struktural, banyak pula dikalangan militer yang diposkan pada posisi yang sebelumnya dianggap domainnya orang sipil. Kaji ulang Dwifungsi ABRI banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa hal yang menyangkut meningkatnya stabilitas politik, menguatnya *civil society*, globalnya tuntutan demokratisasi serta diferensiasi dan profesionalisme, merupakan faktor bagi militer untuk re-thinking terhadap keterlibatannya dalam militer. Selain itu, kekerasan politik sebagai ekses dari praktek militeristik begitu mendominasi kehidupan politik rezim Orde Baru. Diawal orde Baru, korban-korban kekerasan dan penyiksaan adalah para tersangka G30S dan pendukung Soekarno, di era 70-an korban penyiksaan bergeser ke mahasiswa kritis, lalu 80-an korban bergeser ke kalangan tokoh islam kritis, dan memasuki era 90-an mahasiswa dan aktivis Pro Demokrasi selalu menjadi korban dari praktek politik yang militeristik. Pola-pola penyiksaan yang bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM tersebut terus berlangsung selama 32 tahun kekuasaan rezime Orde Baru.

Telah menjadi kepentingan kita semua bahwa peran politik ABRI dimasa mendatang bagaimanapun harus dihilangkan. Dalam konteks politik Indonesia menurut Harold Crouch, diperkirakan munculnya friksi atau perpecahan antar elite penguasa khususnya militer, merupakan faktor kunci untuk demokratisasi terlebih bila tiap kubu menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun perjuangan kearah demokratisasi dan penguatan *civil society* tidak dapat mengharapkan dari konflik antar elite ataupun *political will* dari penguasa, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dari generasi ke generasi.

Optimalisasi partisipasi politik rakyat serta lembaga-lembaga politik menjadi agenda terpenting dalam mendorong proses demokratisasi untuk meminimalisir peran politik militer.

Berbagai wacana politik yang kita pelajari hampir selalu mengajari kita bahwa dalam sistem politik idealnya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kekuasaan seimbang, dengan sesuatu kekuatan *check and balances* tanpa mengikutsertakan militer didalamnya sebagai kekuatan politik. Alhasil, dengan kekuatan dan mekanisme sedemikian tersebut diharapkan akan dapat menjamin bagi terwujudnya suatu pemerintahan (*state*) yang merefleksikan kemauan dan berorientasi pada kepentingan rakyat (*society*). Karena itu, merupakan kepentingan kita untuk mengajak semua kekuatan Pro Demokrasi untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai landasan perjuangan dalam menolak segala bentuk pemerintahan yang bersifat militeristik. Perkembangan arus demokratisasi yang begitu kuat ditengah proses reformasi saat ini, melahirkan pemikiran baru bahwa militer sebagai sebuah kekuatan politik sudah tidak diperlukan lagi.

d) Latihan

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* modul terkait politik militer, orientasi militer terhadap politik, kekuatan politik militer pada masa orde lama dan orde baru.
2. Hasil *review* bacaan modul dikembangkan dalam bentuk tulisan malah/jurnal kemudian dipaparkan secara berkelompok oleh mahasiswa.

e) Evaluasi Pembelajaran

Kemampuan mahasiswa dalam melakukan identifikasi dan menganalisis kualitas implementasi pelayanan publik.

1. Pemahaman terhadap hasil bacaan dan *review* terhadap modul.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil bacaan, *review* dan pengembangan hasil bacaan yang dilihat saat pemaparan.

f) Umpang Balik

3) Penutup

a) Rangkuman

Militer yang masuk ke dalam dunia politik didasari oleh banyak faktor pendukung baik internal maupun eksternal kelembagaan. Secara kultur yang dibangun dalam dunia militer memang menjadikan setiap perwira militer memiliki keunggulan yang dapat dikatakan melebihi kualitas sipil. Indoktrinasi yang dibangun dalam dunia militer juga memberikan semangat juang yang berbeda dibandingkan kalangan sipil. Faktor-faktor pendukung itu diantaranya adalah jaringan yang dibangun oleh setiap perwira cukup baik. Keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia sudah dimulai sejak masa Pemerintahan Orde Lama. Tidak berhenti sampai disitu, Orde baru menjadi puncak keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia yang ditandai dengan diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan Dwi Fungsi ABRI dan hadirnya Fraksi Abri di Parlemen. Keterlibatan militer dalam dunia politik di Indonesia tidak semerta-merta terjadi begitu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya ketidak puasan masyarakat terhadap pemimpin dengan latar belakang sipil. Meskipun keterlibatan militer dalam dunia politik mulai meredup pasca Reformasi melalui tuntutan untuk menghapuskan Dwi Fungsi ABRI, namun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan militer terus berlanjut yang ditandai dengan terpilihnya SBY yang merupakan mantan Jenderal TNI sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004-2014.

b) Petunjuk Evaluasi Pembelajaran

Hubungan antara politik dan militer di Indonesia telah memiliki sejarah yang rumit dan berubah seiring waktu. Berikut adalah beberapa poin penting yang mencerminkan hubungan antara politik dan militer di Indonesia:

- Era Kolonial: Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, militer memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan

mempertahankan kepentingan kolonial. Namun, gerakan nasionalis yang didorong oleh para intelektual, termasuk banyak mahasiswa dan aktivis politik, memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

- Kemerdekaan dan Era Awal Republik: Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, militer (terutama TNI, Tentara Nasional Indonesia) memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk serangan dari Belanda. Namun, terdapat ketegangan antara tokoh politik dan militer mengenai struktur pemerintahan dan peran militer dalam politik.
- Periode Demokrasi Liberal: Pada awal-awal era kemerdekaan, Indonesia mengalami periode demokrasi liberal dengan sistem multipartai dan parlemen yang aktif. Namun, stabilitas politik sering terganggu oleh konflik antara kelompok politik, termasuk di antara kelompok militer.
- Periode Orde Baru: Pada tahun 1965, terjadi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Sukarno dan membawa Soeharto ke tumpuk kekuasaan. Selama periode Orde Baru, militer memiliki pengaruh yang besar dalam politik dan pemerintahan, dikenal sebagai "dwifungsi" ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang mengizinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan.
- Reformasi Pasca-Soeharto: Pada tahun 1998, tekanan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat menyebabkan Soeharto mengundurkan diri dan memulai periode reformasi politik di Indonesia. Salah satu aspek utama dari reformasi ini adalah upaya untuk membatasi peran politik militer, memperkuat institusi sipil, dan memperkuat demokrasi.
- Pembatasan Peran Politik Militer: Reformasi pasca-Soeharto mencakup pemisahan antara militer dan politik serta reformasi institusi militer untuk lebih mengutamakan profesionalisme dan supremasi sipil. Ini termasuk pemisahan antara ABRI dan polisi menjadi dua institusi yang berbeda (TNI dan Polri).
- Peran Militer dalam Stabilitas Politik dan Keamanan: Meskipun peran politik militer telah berkurang, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan

keamanan nasional, terutama dalam menangani konflik di wilayah perbatasan dan dalam upaya penanggulangan bencana alam.

- Meskipun peran politik militer telah berkurang sejak reformasi, namun masih ada dinamika yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan di Indonesia. Pemisahan antara militer dan politik serta penguatan institusi sipil merupakan bagian penting dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

c) Daftar Istilah

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
<i>De Facto</i>	Berdasarkan kenyataan
Intervensi	Campur tangan dalam perselisihan antar dua pihak baik itu orang, golongan, negara dan sebagainya
KNIL	Tentara Kerajaan Hindia Belanda
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
Manuver	Gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan dalam perang
<i>Military Mind</i>	Pemikiran Militer yang kuat
Oposisi	Partai penentang dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan golongan yang berkuasa
Orientasi	Peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar
Parpol	Partai Politik
TNI	Tentara Nasional Indonesia

d) Referensi

Bhakti, Ikrar Nusa. (1999). *Tentara Mendamba Mitra: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Bhakti, Ikrar Nusa. (2001). *Militer dan Parlemen di Indonesia Dalam Panduan Parlemen Indonesia*. Jakarta: Yayasan API.
- Britton, Peter. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat*. Jakarta: LP3ES.
- Cholisin. (2002). *Militer dan Gerakan Prodemokrasi, Studi Analisis tentang Respons Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Crouch, Harold. (1999). *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fatah, Abdoel. (2005). *Demilitarisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKiS.
- Feith, Herbert, & Tim PSH, Terj. (1995). *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanafie, Haniah. (2007). Hand Out Mata Kuliah: *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Jakarta
- Huntington, Samuel. P. (2003). *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Penerjemah: Deasy Sinaga, Jakarta: Grasindo.
- Huntington, Samuel. P. (2003). *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, Yahya. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Perlmutter, Amos. (2000). *Militer dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perlmutter, Amos. (2002). *Militer dan Politik, Judul Asli: The Military and Politics and Modern Times*, Penerjemah: Sahat Simamora, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Said, Salim. (1991). *Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics: 1945-1949*. Singapura dan Jakarta: ISEAS dan Pustaka Sinar Harapan.
- Said, Salim. (2001). *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanit, Arbi. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singh, Bilveer. (1996). *Dwi Fungsi ABRI: Asal Usul, Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan*

- Pembangunan*. Robert Hariono Imam penerjemah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soebijono, dkk. (1995). *Dwi Fungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soebiyanto. (1976). *Catatan-catatan tentang Dwifungsi dan kekaryaan ABRI*. dalam Diktat Kursus Pembinaan Mental ABRI. Dephankam: Pusat pembinaan mental ABRI.
- Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Widiarto, Aan Eko, M., Ali Syafaat, & Herman Suryokumoro, (2007). *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-TRANS Publishing

MODUL 9

KEKUATAN POLITIK BARU: FEMINISME & *BUZZER*

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Mempelajari mengenai kekuatan politik di Indonesia, tidak terbatas pada kekuatan-kekuatan formal seperti partai politik, birokrasi, parlemen maupun partai politik, melainkan gerakan-gerakan yang lahir dari situasi sosial politik seperti Feminisme dan *Buzzer*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bachtiar Effendiy (Septyaningsih, 2004:171) yakni apakah kekuatan ini bersifat formal atau nonformal. Kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*. Dalam hal ini dapat di maksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya. Kehadiran gerakan Feminis maupun *Buzzer* dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Kekuatan politik berperan sebagai penopang system politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Gerakan feminism adalah untuk memberdayakan seluruh perempuan dalam mewujudkan hak penuh milik mereka, salah satunya dalam hal Politik. Begitupun dengan *Buzzer* yang tidak lain adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan, seperti opini, agenda, atau agenda melalui media sosial. Oleh karena itu maka pengetahuan mengenai Feminisme dan *Buzzer* menjadi penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa dalam mempelajari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Adapun capaian pembelajaran dari modul 9 ini adalah:

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
2. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri;
4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah;
5. Mahasiswa memahami nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem politik;
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai kekuatan-kekuatan politik di indonesia.
7. Mahasiswa mampu memahami realita kekuatan-kekuatan politik yang ada.
8. Mahasiswa mampu menganalisa realita politik berdasarkan teori yang terkait dengan kekuatan politik di Indonesia.

3) Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari modul 9 ini adalah Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan kembali tentang gerakan Feminisme dan *Buzzer* serta keberadaannya di Indonesia sebagai kekuatan politik.

4) Prasyarat Kompetensi (*Tidak ada*)

-

5) Kegunaan Modul 9

Kegunaan atau manfaat dari modul 9 ini adalah

membantu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kekuatan-kekuatan politik dari lembaga-lembaga non formal seperti gerakan Feminisme dan *Buzzer* serta keterlibatannya dalam proses politik di Indonesia.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Feminis dalam politik Indonesia, yang meliputi; Sejarah feminism, Pengertian feminism, Gerakan feminism di Indonesia, dan Keterlibatan perempuan dalam panggung politik Indonesia, dan;
2. *Buzzer* dan keterlibatannya dalam politik di Indonesia, yang meliputi; Definisi *buzzer* dan *buzzer* politik, Tugas dan fungsi *buzzer* politik, Perkembangan *buzzer* di Indonesia, dan *Buzzer* dalam kampanye politik di Indonesia.

b. Kegiatan Pembelajaran

1. Judul Kegiatan Pembelajaran 1

- a) Feminis dalam politik Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Sejarah feminism, Pengertian feminism, Gerakan feminism di Indonesia, dan Keterlibatan perempuan dalam panggung politik Indonesia.

c) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sejarah Feminisme

Sejarah tentang feminism dapat dilacak perjalanannya dengan faktor kelahirannya dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirnya gerakan feminism tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial, sosio kultural, dan sebagainya. Lahirnya gerakan feminism berawal dari

asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksplorasikan, tidak hanya itu gerakan ini muncul karena dalam sistem masyarakat patriarki (Gamble, 2004: 3-4) kaum laki-laki mendominasi di berbagai aspek dan adanya pensubordinasian perlakuan, perlakuan seperti ini yang menimbulkan perempuan berkumpul dan membuat aksi sehingga melahirkan gerakan feminism (Rabbani, 2011: 48-49).

Feminisme secara global terbagi atas tiga tahap, yaitu feminism gelombang pertama (*first wave feminism*) dari abad 18 sampai ke pra tahun 1960, feminism gelombang kedua (*second wave feminism*) setelah tahun 1960 dan feminism gelombang ketiga atau yang disebut dengan postfeminisme. Gerakan feminism pada gelombang pertama dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft yang berjudul *Vindication Rights of Woman*, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situ dia menekankan perlunya membuat perempuan berfikir rasional, hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Ia tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan dari wilayah domestik, dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih. Ia menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukannya mengandalkan kemampuan untuk memikat suami yang mapan (Gamble, 2004: 19).

Tahapan selanjutnya, dalam perdebatan hak-hak perempuan terjadi pada tahun 1860-an, yakni saat terjadi polemik antara John Ruskin dan John Stuart Mill. Mengenai perdebatan itu, Kate Millet berkomentar dalam analisisnya yang berjudul *sexual politics*: “Mill mengupas tentang realisme politik seksual, sedangkan Ruskin tentang aspek romantisme dan sisi mitologisnya yang positif.” Nyatanya, keduanya

membahas “pertanyaan tentang perempuan” dengan pendekatan yang sama-sama khas dan ganjil. Sikap mereka yang meskipun berlawanan, tetapi sama-sama menekankan perpecahan besar dari apa yang disebut dengan “victorian”. Victorian memikirkan mengenai hak-hak perempuan dalam masa kejayaan Victoria, serta karakter dasar dari figur-figur utama mereka yang tidak representatif (Gamble, 2004: 23).

Secara umum, tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminis, dan menjadi dekade paling penting pada abad ke-19 bagi perempuan era Victoria. Kedua kasus Caroline Norton, membantu meningkatkan perhatian yang memang sudah lama diberikan terhadap kedudukan sah seorang perempuan yang sudah menikah. Sementara itu, perkembangan jumlah perempuan lajang kelas menengah yang mencari kemandirian ekonomi sebagai alternatif dari pernikahan memunculkan perhatian terhadap pilihan pekerjaan mereka yang terbatas. Pada dekade selanjutnya, mulai ada pembentukan badan legislatif penting dan diadakan perubahan sosial, yang sebagian melalui jaringan personal, dan sebagian melalui ledakan krisis individual dan penemuan kebutuhan individual (Gamble, 2004: 27).

Perubahan sikap yang melatar belakangi perbaikan-perbaikan banyak dipengaruhi oleh komunitas yang disebut dengan lingkaran “*langham place*”. Komunitas ini terdiri dari para aktivis perempuan kelas menengah yang mendiskusikan dan mempublikasikan pandangan mereka tentang perempuan. Pekerjaan mereka lebih banyak dipusatkan untuk mempersiapkan perempuan agar mampu mencapai peran selain sebagai istri atau ibu. Selain itu, mereka juga cepat memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pelbagai masalah yang hendak ditanggulangi. Perempuan merasa sulit mendapatkan pekerjaan, selain dikarenakan sedikitnya lowongan juga karena pendidikan perempuan tidak memberikan persiapan yang baik untuk bekerja (Gamble,

2004: 28).

Gerakan feminism di Amerika dimulai menjelang konvensi Seneca Falls di New York, sebuah pertemuan yang dihadiri tiga ratus orang (termasuk di dalamnya empat puluh orang laki-laki) untuk menuntut penghentian seluruh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dengan tokoh utamanya adalah Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott. Cady Stanton menjadi tokoh feminis Amerika paling berpengaruh dalam kampanye untuk perubahan hukum perceraian, hak-hak kekayaan perempuan yang sudah menikah dan hak bersuara (Gamble, 2004: 29).

Gerakan feminism dalam bidang pendidikan terlihat pada tahun 1860-an dan 1870-an melalui usaha-usaha Emily Davies (1830-1922) dengan mendirikan sekolah perempuan di Hitchin pada tahun 1869 yang terletak di jalan menuju Cambridge. Kemudian menyusul Universitas Girton (1873) dan Newnham (1875) di Cambridge, dan Universitas Lady Margaret Hall (1878) dan Universitas Somerville (1879) di Oxford. Sekolah medis London School of Medicine for Women (Sekolah Farmasi London Untuk Perempuan) didirikan pada tahun 1874 oleh Sophia Jex Blake (Gamble, 2004: 30-31).

Dalam menggerakkan roda feminism pada gelombang pertama, pencapaian penting yang lain bagi perempuan adalah kesempatan yang baru dalam pekerjaan umum dan administrasi. Pekerjaan dalam bidang administrasi merupakan perluasan area yang penting pada tahun 1860-an, khususnya dalam pemerintahan seperti kantor pos, dewan sekolah dan hukum. Prestasi gerakan feminism yang lain adalah tentang hak pilih yang diperolehnya pada tahun 1918, namun pada saat itu, hak pilih ini hanya berlaku bagi perempuan yang berusia di atas tiga puluh tahun. Barulah pada tahun 1928 perempuan mempunyai hak pilih yang sama seperti laki-laki.

Setelah beberapa tahun lamanya feminism sempat

tenggelam, gerakan feminism pada gelombang dua dimulai dengan terbitnya buku “*The Feminine Mystique*” yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama National Organization for Woman (NOW) pada tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Friedan berhasil mendorong dikeluarkannya Equal Pay Right (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan Equal Right Act (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang.

Di tahun 1967 gerakan feminism membentuk *Student for a Democratic Society* (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok feminism radikal dengan membentuk *Women's Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan *Women's Lib*. *Women's Lib* mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya Miss America Pegeant di *Atlantic City* yang mereka anggap sebagai pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan. Gema pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia.

Pada tahun 1970 Juliet Mitchel mengatakan, di Universitas Ruskin kaum feminis merasa mempunyai satu tujuan dan sepaham tentang feminism yaitu “Pembebasan Perempuan”. Ada empat tujuan yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut yaitu: kesetaraan gaji, kesetaraan pendidikan dan kesempatan kerja, 24 jam perawatan anak, serta

kontrasepsi dan aborsi gratis sesuai tuntutan. Menurut Juliet Mitchel, di Amerika pada tahun 1971, *The Black Movement* (Gerakan Kulit Hitam) mungkin menjadi inspirasi terbesar bagi *Women's Liberation*. Lebih-lebih perempuan kulit hitam yang dikecewakan oleh gerakan seksisme *The Black Movement* pada tahun 1960-an, aktif dalam pembentukan kelompok feminism radikal yang pertama. Pada tahun 1969, Calestine Ware, mendirikan feminism radikal New York bersama dengan Shulamith Firestone dan Anne Koedt. Pada tahun 1970 A Historical and Critical Essay for Black Women (Sebuah Esai Histori dan Kritis untuk Perempuan Kulit Hitam) yang ditulis oleh Patricia Haden, Donna Middleton dan Patricia Robinson. Lesline Tanner menulis dengan judul *Voices from Women's Liberation*. Pada tahun yang sama, pemikiran Frances Beale Double Jeopardy diterbitkan dalam buku *Morgan Sisterhood is Powerful*. Buku ini mendeskripsikan tentang beban ganda mengenai ras dan gender yang dihadapi perempuan. Beale membedakan apa yang disebut sebagai perjuangan hidup mati untuk emansipasi total dan gerakan pembebasan perempuan kulit putih yang merupakan kelas menengah (Gamble, 2004: 38-39).

Kedudukan perempuan kaum lesbian pada tahun 1970-an menjadi salah satu yang juga diperjuangkan. Seperti perempuan kulit hitam, perempuan lesbi juga aktif dalam gerakan feminism radikal sejak awal gerakannya. Para feminis radikal menengarai adanya aspek patologis (abnormal) pada label lesbian dalam kebijakan seksual seluruh perempuan. Dalam *The Woman Identified Woman*, kelompok radikal lesbian menyatakan bahwa seorang lesbian merupakan wujud kemarahan perempuan yang memuncak hingga titik ledak. Sering dimulai pada usia yang sangat muda, seorang lesbian bertindak sesuai dengan dorongan alaminya untuk menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih bebas daripada masyarakatnya, mestinya mereka diberi kebebasan untuk itu

(Gamble, 2004: 40).

Pada feminism gelombang kedua ini banyak tokoh yang muncul dan menyampaikan pendapatnya dalam berbagai media, salah satunya adalah media tulisan. Media ini sebagai bentuk ekspresi bagi mereka dalam menyoroti kedudukan perempuan di dalam masyarakat yang cenderung masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di Prancis muncul istilah *l'écriture féminine* yang merupakan dari feminism kontemporer dan salah satu tokoh perempuan yang turut mempelopori *l'écriture féminine* di Prancis adalah Simone de Beauvoir, dengan karyanya yang berjudul *Le Deuxième Sexe*. Karya ini menandai pembaharuan dalam perkembangan feminism di Prancis pada pertengahan abad kedua puluh, yang didukung juga oleh munculnya gerakan-gerakan feminism di berbagai belahan Eropa, termasuk Prancis pada tahun 1960-an dan revolusi seksual yang terjadi di negara-negara Barat. Gerakan feminism gelombang dua ini banyak membahas persoalan perempuan seperti kondisi inferioritas dan ketertindasan perempuan di tengah masyarakat. Hal ini mengenai seksualitas dan kebebasan perempuan atas tubuhnya juga banyak dibahas dalam gelombang ini karena berkaitan dengan dominasi laki-laki atas perempuan.

Pada gelombang ketiga, istilah postfeminisme berasal dari dalam media pada awal tahun 1980-an, dan selalu cenderung digunakan dalam konteks ini sebagai tanda atas kebebasan dari belenggu-belenggu ideologis gerakan para feminis yang sudah ketinggalan zaman dan tak memiliki harapan. Dalam *The Concise Oxford Dictionary* edisi kesembilan, postfeminisme didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan gagasan-gagasan, yang mengabaikan atau menolak gagasan-gagasan feminism tahun 1960-an dan dekade-dekade berikutnya. Walaupun demikian, pada umumnya mereka yang sering dilabeli sebagai postfeminisme oleh media tidak menganggap diri sebagai bagian dari gerakan

anti feminis dalam bentuk apapun (Gamble, 2004: 54).

Banyak kritikus mendai lahirnya postfeminisme sekitar pertengahan 1980-an sampai seterusnya, Susan Faludi menegaskan bahwa sentimen postfeminisme muncul lebih awal daripada perkiraan tersebut, tidak pada media 1980-an tetapi pada pers 1920-an. Baginya, postfeminisme adalah sebuah reaksi keras terhadap dasar yang telah ditetapkan oleh feminism gelombang kedua. Menurutnya, postfeminisme merupakan *the backlash* (serangan balasan), dan kejayaannya terletak pada kemampuannya untuk mendefinisikan diri sebagai sebuah ironi, kritiknya yang semi intelek terhadap gerakan feminis, ketimbang sebagai respon permusuhan terbuka terhadapnya (Gamble, 2004: 55-56).

Menurut Ann Brook postfeminisme menggantikan dualisme laki-laki dan perempuan dengan perbedaan, persetujuan umum dengan keanekaragaman pendapat dan dengan begitu membangun sebuah perdebatan intelektual yang dinamis dan penuh semangat, membentuk isuisu dan iklim intelektual yang telah memberi ciri pada perpindahan dari modernisasi menuju postmodernisasi dalam dunia kontemporer. Analisisnya tidak menyebutkan penulis seperti Naomi Wolf, Katie Roiphe ataupun perempuan yang lain yang dikenal sebagai postfeminis media. Namun, ia menyertakan nama-nama seperti Julia Kristeva, Helena Cixous, Laura Mulvey dan Judith Butler sebagai teoritikus postfeminisme, dengan menyebutkan bahwa penulis-penulis seperti itu telah membantu perdebatan-perdebatan feminis dengan menyediakan sebuah daftar konseptual mengenai dekonstruksi perbedaan dan identitas (Gamble, 2004: 62).

Jumlah kelompok perempuan gelombang ketiga berkembang pesat di Amerika Serikat, termasuk *The Women's Action Coalition and Third Wave* (Koalisi Aksi Perempuan dan Gelombang Ketiga) yang didirikan oleh Rebecca Walker. Editor buku *The Third Wave Agenda*, Leslie Heywood dan

Jennifer Drake, mengemukakan perbedaan mendasar antara feminism gelombang kedua dan gelombang ketiga adalah bahwa feminism gelombang ketiga dengan lancar merasakan kontradisi. Oleh karena mereka dididik dalam persaingan struktur feminis, mereka menerima pluralisme sebagai takdir. Menurut Heywood dan Drake, kritik atas gerakan perempuan kulit putih yang diprakarsai oleh perempuan kulit hitam, membuat gelombang ketiga niscaya menerima konsep anak yang dihasilkan yakni tidak ada catatan penindasan yang benar bagi semua perempuan dalam segala situasi sepanjang masa. Terlebih hubungannya dengan aktivisme politis harus menjamin bahwa gelombang ketiga feminism tidak sekadar sebuah teori, tetapi juga sebuah pendekatan yang akan secara aktif bekerja melawan ketidakadilan sosial yang masih membentuk bagian dalam pengalaman sehari-hari banyak perempuan (Gamble, 2004: 65).

Pada gelombang ketiga, gerakan feminis ini memfokuskan sesuatu yang tidak terdapat pada tuntutan gelombang kedua. Gerakan ini masih melihat adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ras, etnik atau bangsa tertentu. Mereka menuntut keseragaman dalam mendapatkan hak antara orang kulit putih dan hitam, karena dalam sejarah, perempuan kulit hitam lebih menderita daripada perempuan kulit putih. Aktivis feminis pada gelombang ketiga sering mengkritik feminism pada gelombang kedua yang kurang memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi ras, etnik atau bangsa.

Pengertian Feminisme

Dalam mengartikan feminism, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut, hal ini disebabkan feminism tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal, karena itu definisi feminism selalu berubah-ubah sesuai dengan realita sosiokultural yang melatar

belakangnya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri.

Istilah feminism ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa latin femmina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa didunia. Dalam bahasa Perancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male (laki-laki) dan female (perempuan) dalam arti biologis (sex/jenis kelamin). Dalam hal ini istilah feminism terasa lebih dekat dengan feminin, se hingga tidak jarang feminism seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin (Nugroho, 2004:60).

Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan feminism memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan (Paramitha, 2002: 158) namun jika dilihat secara umum, feminism menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria

Wolf mengartikan feminism sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminism sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin (Sofia, 2009:13).

Menurut William Outwaite (2008:313) feminism didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini

mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria (patriarki), ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin (Outwaite, 2008; 313) Sedangkan Nicholas Abercrombie dkk. berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern, feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat Barat (Abercrombie, 2006:202).

Menurut Humm (2007: 157-158) feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak bagi perempuan yang menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi perempuan, dengan sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi perempuan. Selanjutnya Humm menyatakan bahwa feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku dari penindasan perempuan.

Dinyatakan oleh Ruthven (1985: 6) bahwa pemikiran dan gerakan feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui proyek (pemikiran dan gerakan) feminisme harus dihancurkan struktur budaya, seni, gereja, hukum, keluarga inti yang berdasarkan pada kekuasaan ayah dan negara, juga semua citra, institusi, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang tidak dihargai dan tidak tampak.

Seperti dikemukakan oleh Abrams (1981) bahwa feminisme sebagai aliran pemikiran dan gerakan berasal dari kelahiran era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama

kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada 1785. Menjelang abad 19 feminism me lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa mempejuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood (persaudaraan perempuan yang bersifat universal).

Tong dalam Wiyatmi (2012) mengemukakan bahwa feminism bukanlah sebuah pemikiran yang tunggal, melainkan memiliki berbagai ragam yang kemunculan dan perkembangannya sering kali saling mendukung, mengoreksi, dan menyangkal pemikiran feminism sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti memilih teori Tong untuk dijadikan teori karena teori Tong dapat mewakili semua konsep yang terdapat pada kedua novel yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian. Ada nya 8 konsep feminism yang dikemukakan oleh Tong itu yang paling banyak bisa peneliti temukan konsep feminism yang terdapat pada novel *The Hunger Games* dan *Novel Divergent*.

Tong (2006) mengemukakan adanya delapan ragam pemikiran feminism, yaitu:

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 dengan pelopor Mary Wollstonecraft yang membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman*. Dalam sejarah perkembangannya, feminisme liberal menurut Tong dapat dibedakan menjadi tiga varian, yaitu feminisme liberal klasik (libertarian), feminisme liberal kesejahteraan, dan feminisme liberal kontemporer. Dalam pembahasan mengenai hambatan sikap dan struktural yang menghalangi kemajuan perempuan feminisme liberal klasik yakin bahwa setelah hukum dan kebijakan yang diskriminatif dihilangkan, sejak itu

secara formal perempuan dimampukan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki.

Feminisme liberal yang berorientasi pada kesejahteraan menganggap bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya mengkompensasi perempuan untuk ketidakadilan di masa lalu, tetapi juga menghilangkan hambatan sosial ekonomi dan juga hambatan hukum bagi kemajuan perempuan kini. Oleh karena itu, Tong mengemukakan bahwa feminisme liberal kesejahteraan mengadvokasikan bahwa pelamar perempuan pada sekolah-sekolah atau pekerjaan harus dipilih atas pelamar laki-laki selama pelamar perempuan itu dapat melaksanakan pekerjaan secara layak. Feminisme liberal kontemporer berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pemberanakan untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum, maupun pasar.

b. Feminisme Radikal

Berbeda dengan feminisme liberal yang berjuang bagi pencapaian kesetaraan hak-hak perempuan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan personal, feminisme radikal yang berkembang dari partisipasi mereka dalam satu atau lebih gerakan sosial radikal di Amerika Serikat pada awal 1960-an, memiliki hasrat untuk memperbaiki kondisi perempuan. Feminisme radikal mendasarkan pada suatu tesis bahwa penindasan terhadap perempuan berakar pada ideologi patriarki sebagai tata nilai dan otoritas utama yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh karena itu,

perhatian utama feminism radikal adalah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan

c. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis dipengaruhi oleh ideologi kelas Karl Marx. Feminisme Marxis mengidentifikasi kelasisme sebagai penyebab opresi (penindasan) terhadap perempuan. Opresi terhadap perempuan tersebut bukanlah hasil tindakan sengaja darisatu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu. Oleh karena itu, tujuan dari feminism Marxis adalah mendeskripsikan basis material ketertundukan perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan status perempuan, serta menerapkan teori perempuan dan kelas pada peran keluarga.

d. Feminisme Psikoanalisis dan Gender

Tong menjelaskan bahwa feminism psikoanalisis dan gender mengemukakan gagasan bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psikis perempuan, terutama dalam cara berpikir perempuan. Dengan mendasarkan pada konsep Freud, seperti tahapan odipal dan kompleks oedipus, feminis psikoanalisis mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka. Pengalaman tersebut mengakibatkan bukan saja cara masyarakat memandang dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik dari femininitas.

Feminisme psikoanalisis berakar dari teori psikoanalisis Freud, terutama teori perkembangan seksual anak yang berhubungan dengan kompleks oedipus dan kartrasi. Menurut Freud (dalam Tong,

2006) maskulinitas dan femininitas adalah produk pendewasaan seksual. Jika anak laki-laki berkembang “secara normal,” mereka akan menjadi laki-laki yang akan menunjukkan sifat-sifat maskulin yang diharapkan, dan jika perempuan berkembang “secara normal” maka mereka akan menjadi perempuan dewasa yang menunjukkan sifat-sifat feminin. Menurut Freud, inferioritas perempuan terjadi karena kekurangan anak perempuan akan penis. Sebagai konsekuensi jangka panjang dari kecemburuan terhadap penis (penis envy) dan kompleks Oedipus yang dialaminya, maka menurut Freud (dalam Tong, 2006) perempuan menjadi narsistik, mengalami kekosongan, dan rasa malu.

Perempuan menjadi narsistik ketika ia mengalihkan tujuan seksualnya aktif menjadi pasif, yang termanifestasikan pada keinginan untuk lebih dicintai dari pada mencintai. Semakin cantik seorang anak perempuan, semakin tinggi harapannya untuk dicintai. Karena tidak memiliki penis, anak perempuan menjadi kosong, dan mengkompensasikannya pada penampilan fisiknya yang total. Dengan penampilan yang baik secara umum akan menutupi kekurangannya atas penis. Rasa malu dialami anak perempuan karena tanpa penis, dia melihat tubuhnya yang terkait (tersunat). Menurut feminisme gender, anak laki-laki dan perempuan tumbuh menjadi dewasa dengan nilai-nilai serta kebaikan gender yang khas, yaitu yang merefleksikan pentingnya keterpisahan pada kehidupan laki-laki dan pentingnya ketertarikan pada kehidupan perempuan dan berfungsi untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan

perempuan dalam masyarakat patriarkal (Tong, 2006).

e. Feminisme Eksistensialisme

Feminisme eksistensialisme adalah pemikiran feminisme yang dikembangkan oleh Simone de Beauvoir melalui buku karyanya *Second Sex* (2003). Dengan mendasarkan pada pandangan filsafat eksistensialisme Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai “laki-laki” sang Diri, sedangkan “perempuan” sang Liyan (*the other*). Jika Liyan adalah ancaman bagi Diri, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Oleh karena itu, menurut Beauvoir jika laki-laki ingin tetap bebas, maka ia harus mensubordinasi perempuan.

f. Feminisme Posmodernisme

Secara luas feminis posmodern seperti Helene Cixous, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva mengembangkan gagasan intelektualinya dari filsuf eksistensialis Simone de Beauvoir, dekonstruksionis Jacques Derrida, dan psikoanalisis Jacques Lacan. Seperti Beauvoir, ketiga feminis posmodern ini berfokus pada “ke Liyanan” perempuan. Seperti Derrida, ketiganya juga gemar menyerang gagasan umum mengenai kepenggarangan, identitas, dan Diri. Seperti Lacan, ketiganya mendedikasikan diri untuk menafsirkan kembali pemikiran tradisional Freud yang kemudian merubahkan tafsir-tafsir yang semula dianggap baku menjadi dewasa dengan nilai-nilai serta kebaikan gender yang khas, yaitu yang merefleksikan pentingnya keterpisahan pada kehidupan laki-laki dan pentingnya ketertarikan pada kehidupan perempuan dan berfungsi untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan dalam masyarakat patriarkal.

g. Feminisme Multikultural dan Global

Feminisme multikultural dan global berhubungan dengan pemikiran multikultural, yaitu suatu ideologi yang mendukung keberagaman. Sebagai pemikiran feminisme yang mendukung keberagaman, maka feminisme multikultural menyambut perayaan atas perbedaan dari para pemikir multikultural dan menyayangkan bahwa teori feminis sebelumnya yang seringkali gagal membedakan antara kondisi perempuan kulit putih, kelas menengah, heteroseksual, Kristen yang tinggal di Negara yang maju dan kaya, dengan kondisi yang sangat berbeda dari perempuan lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Feminisme multikultural melihat bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarki, tetapi ada keterhubungan masalah dengan ras, etnisitas, dan sebagainya. Sementara itu, dalam feminisme global bukan hanya ras dan etnisitas yang berhubungan dengan penindasan terhadap perempuan, tetapi juga hasil dari koloni-alisme dan dikotomi dunia pertama dan Dunia Ketiga.

h. Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah pemikiran feminism yang ingin memberi pemahaman adanya hubungan antara segala bentuk penindasan manusia dengan alam dan memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh ekosistem. Seperti dikemukakan oleh Tong karena perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam, maka ekofeminisme berpendapat ada hubungan simbolik dan linguistik antara feminis dan isu ekologi.

Gerakan Feminisme di Indonesia

Gerakan feminism di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan religius masyarakat. Will Durant dalam bukunya *“The Pleasure of Philoshopy”* mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol pada era globalisasi tahun 2000an adalah terjadinya perubahan status wanita.

Pandangan feminism di setiap era sangat tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminism di Indonesia pada saat kini adalah pandangan terhadap kondisi kerja berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri tekstil, petani, tenaga kerja wanita yang diekspor (TKW). Maraknya permasalahan tenaga kerja wanita tersebut, mencuat setelah era industrialisasi merambah daerah perkotaan. Situasi bertambah parah sejak dimulai era reformasi yang terjadi sejak Mei 1999, telah mengakibatkan multi krisis terutama krisis ekonomi yang telah memporak porandakan harapan dan cita-cita bangsa yang aman dan sejahtera. Matinya berbagai sektor ekonomi, terutama industri telah mengakibatkan pengangguran yang tinggi yakni 36 juta jiwa (th. 2000), muncul anak jalanan, meningkatnya kriminalitas. Diketahui bahwa rata-rata proporsi tenaga kerja wanita di sektor industri adalah 47,5%. Ini bukan beban yang kecil. Pengaruh yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi informasi serta globalisasi yang selain membawa kemaslahatan juga telah membawa kemudaratan.

Kondisi di atas, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai pergerakan feminism di Indonesia. Perjuangan mereka tidak semata berfokus kepada isue gender semata yang membela buruh wanita, bahkan kini telah mengarah kepada naluri keibuan sebagai pembela anak-anak , pembela kaum tak berpunya (tukang becak) yang dipelopori oleh Wardah Hafiz, demokrasi oleh Ratna Sarumpaet.

1. Gerakan Feminisme Pada Masa Kolonial

Di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka yang tampil membela hak rakyat. Perhatian pokok mereka tidak semata-mata membela kaumnya saja tapi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda seperti dilakukan oleh Cut Meutia dari Aceh, Roro Gusik di Jawa sebagai istri Untung Surapati, di Maluku Martha Tiahahu membantu Pattimura, di Sulawesi Selatan Emmy Saelan giat dalam perlawanan melawan Wolter Monginsidi.

Tahun 1879 ± 1904, sejarah feminism ketika zaman kolonial telah dipelopori oleh RA Kartini. Ia muncul akhir ke-20 (1879-1904) di mana ia diperlakukan dengan tidak adil oleh orang tuanya dengan “dipingit” tidak seperti saudara laki-lakinya yang disekolahkan di Universitas Leiden negeri Belanda. Ia merasa terhina oleh adanya perkawinan permaduan (poligami). Ia kemudian mempelopori dibukanya sekolah untuk mendidik wanita .Setelah itu lahirlah tokoh feminism di Jawa Barat yakni Dewi Sartika.

Tahun 1912, organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan dengan Organisasi Nasional pertama Boedi Oetomo (1908). Setelah Poetri Mardika berdiri, muncullah perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Wanita Utama. Selanjutnya Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum katolik, dan protestan. Demikian pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyiah ini

memiliki isue sentral agar perempuan mendapat pendidikan yang baik dan perbaikan kondisi poligini. Sedangkan organisasi perempuan kaum katolik dan protestan menyuarakan anti poligami.

Tahun 1920 muncullah Organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarakan peningkatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Disusul kemudian oleh lahirnya organisasi lainnya yang memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, menentang perkawinan anak-anak, permaduan serta perdagangan perempuan dan anak-anak.

Tahun 1928-1930 marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatoean Perempuan Indonesia (PPI) yang menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. PPI kemudian namanya diganti menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang menyuarakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Organisasi Istri Sedar (1930) masih tetap menyuarakan anti poligami dan perceraian. Organisasi perempuan berkembang pesat pada tahun 1930-an.

2. Masa Kependudukan Jepang

Organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar merupakan organisasi yang sebetulnya diperalat oleh pemerintah Jepang yang menyuarakan kecaman terhadap politik pemerintah kolonial Belanda, anti kapitalisme dan menyuarakan perlunya perbaikan nasib kaum perempuan proletar. Pada masa inipun telah dibentuk organisasi Fujinkai, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini

adalah semata-mata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.

3. Masa Penjajahan Belanda

1946-1949. Kembali Kongres Wanita Indonesia, menyuarakan upah yang sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia harus menyokong Indonesia Merdeka, bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya. Belanda dikalahkan pada tahun 1949.

4. Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

Tahun 1950 organisasi wanita berangsur-angsur hancur, disamping itu muncullah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. Organisasi ini tersebar di berbagai kegiatan masyarakat seperti warung, koperasi, koperasi simpan pinjam, petani, buruh pabrik, taman kanak-kanak yang diselenggarakan di pasar, perkebunan, kampung, Badan Penyuluhan Perkawinan, dan kursus-kursus dengan materi buku ajaran komunis. Organisasi ini menyuarakan : sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosek bagi kaum perempuan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami. Pada dasarnya organisasi ini menyokong kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI. Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh.

Tahun 1955 muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam

bentuk Balai-balai Perempuan, Bank-bank Perempuan, Surau Perempuan, Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

5. Masa Orde Baru

Pada era ini organisasi masa mengalami pengekangan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga 1970 terjadi pembersihan PKI. Satusatunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Pada tahun inilah hilang organisasi wanita yang bersifat independen, akan tetapi lahir beberapa organisasi besar seperti : Golkar, Dharma Wanita (istri PNS), Dharma Pertiwi (Istri yang suaminya bekerja di Angkatan Bersenjata) serta organisasi PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen, muncul organisasi perempuan istri pejabat yang bersifat semu. Kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami. Organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah baik politik maupun praktis, memperoleh berbagai kemudahan transportasi, kantor, keuangan dsb.

Akhirnya timbul suatu image dimana pemerintah menggambarkan menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Orientasi organisasi wanita ini antara lain (a) kesemuanya dipolitisir untuk kemenangan Golkar dan sebagai alat untuk menjaga agar tak ada orang/golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa, (b) menetang kecenderungan laki-laki melecehkan perempuan, (c) kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami, (d)

mendukung birokrasi militer. Sehingga wanita kurang berkiprah di dalam birokrasi dan pembangunan, selain itu hanya ada dua organisasi wanita yang boleh bergerak di perdesaan yaitu Aisyah dan PKK

6. Era Reformasi

Runtuhnya Orde Baru yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan berorganisasi, berpendapat dalam setiap aspek kelembagaan baik formal maupun non formal telah membuka pintu derasnya arus demokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi yang datang ditengah hiruk pikuknya globalisasi telah memunculkan berbagai problematika yang kompleks. Problematika yang mendasar dan paling dirasakan masyarakat banyak adalah keterpurukan ekonomi yang menciptakan beban berat yang membawa implikasi antara lain adalah tingginya angka pengangguran (36 juta jiwa) yang mengakibatkan munculnya anak jalanan/vandalisme dan kriminalitas, peningkatan biaya hidup, kecemburuan ekonomi yang mengakibatkan isu sara yang mengancurkan tatanan fisik dan moral masyarakat, krisis kepercayaan terhadap penguasa.

Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang membangkitkan kembali para reformis wanita seperti tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marginal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang

menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak, Ratna Sarumpaet yang memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi Teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela wanita dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh wanita Islam lainnya yang berkiprah dalam organisasi wanita.

Keterlibatan Perempuan Dalam Panggung Politik di Indonesia

Dalam praktiknya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Di Indonesia kita sering mengenal pemisahan kekuasaan dengan *Trias Political* yang mana pemisahan kekuasaan tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mencapai kekuasaan tersebut (khususnya eksekutif dan legislatif) harus melalui proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dalam dunia politik di Indonesia, kekuasaan *Trias Political* dikuasai oleh kaum laki-laki. Dominasi kaum laki-laki dalam politik Indonesia sudah kita kenal sejak presiden pertama sampai sekarang. Bahkan pada zaman kerajaan pun dipimpin mayoritas oleh kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan sering kita sebut dengan patriarki. Budaya patriarki secara tidak langsung sudah mengakar kuat di benak masyarakat Indonesia salah satunya dalam hal politik. Untuk mendapatkan hal politik, perempuan seringkali dilihat sebelah mata karena dianggap tidak mampu untuk bersaing dengan laki-laki.

Affirmative action bukanlah hal baru, kesadaran terhadap hak

perempuan terus dibangun dalam politik. Disamping hal tersebut yang harus dibangun maupun ditingkatkan seperti hak keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, representasi perempuan di kursi parlemen, peningkatan partisipasi politik, hingga peningkatan kepemimpinan perempuan dalam mengambil kebijakan harus terus ditingkatkan, sehingga kedepanya perempuan juga ikut berperan aktif, ikut menyuarakan aspirasinya untuk mewujudkan bangsa maupun di jajaran parlemen yang lebih baik.

Tindakan *affirmative* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi strategis seperti sosial-politik dalam masyarakat sebagai akibat dari diskriminasi. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi negative terhadap perempuan dalam politik praktis. Oleh karena itu, perempuan secara penuh diberi hak berpolitik.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik akan tetapi masih ada kesenjangan dalam segi keterwakilan dan partisipasi perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sedangkan pada era reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif- terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Demi meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif (Nurcahyo, 2016:25).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta. Akan tetapi, dengan perjuangan yang terus dilakukan untuk

mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mengandung afirmatif dan keberpihakan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Dalam peraturan tersebut, mengatur mengenai jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, dan kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi. Akan tetapi, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan UndangUndang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 sampai ke pemilu 2019 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif (Mulyono, 2010:1).

Namun, dengan berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah disangkut pautkan satu dengan lainnya. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para

perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier didunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk menggapai misinya dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.

Peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik, Saat ini perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun pada tahap selanjutnya perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30%.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf (e) menjelaskan bahwa: menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota.

Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar tergugah terlibat aktif dalam dunia politik yang telah dinaungi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik pada kaum parempuan (Priandi & Roisa, 2019: 108-109).

e) Latihan

1. Jelaskan terkait dengan sejarah feminism di Dunia dan kemunculannya di Indonesia?

2. Jelaskan pengertian dan ragam bentuk feminism yang berkembang di dunia?
3. Apakah gerakan feminism memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan politik di Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh kasus!

f) **Evaluasi Pembelajaran**

Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan dan menggunakan teori-teori feminism dalam menjelaskan fenomena dan relasinya dengan politik

g) **Umpulan Balik**

Mahasiswa mampu mengeleborasi teori feminism, sejumlah studi kasus dan relasinya sebagai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

2) Kegiatan Pembelajaran 2

- a) Keterlibatan *Buzzer* Dalam Politik Indonesia
- b) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir
Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Definisi *buzzer* dan *buzzer* politik, Tugas dan fungsi *buzzer* politik, Perkembangan *buzzer* di Indonesia, dan *Buzzer* dalam kampanye politik di Indonesia.

c) Uraian Contoh dan Ilustrasi

Definisi *Buzzer* dan *Buzzer* Politik

Buzzer berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm dan secara harfiah berarti alat yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian. Sedangkan *buzzer* dalam *Oxford Dictionaries*, diartikan sebagai “*An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling*” yakni perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Pengertian *buzzer* dalam media sosial menurut Arbie yakni

“*buzzer* dapat diartikan sebagai akun yang dapat membuat sebuah topic yang mempengaruhi banyak orang dikarenakan pengikut dari akun *buzzer* itu sendiri sangat banyak” (Juditha, 2019:96). Secara sederhana bisa diartikan pula bahwa *buzzer* itu adalah pengguna media sosial seperti biasa tetapi mempunyai pengaruh untuk bisa mengubah atau menarik opini orang lain agar tertarik dan setuju dengan apa yang dimaksud oleh *buzzer* itu.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dalam risetnya pada tahun 2017, mendefinisikan *buzzer* sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Jeff Staple seorang pengamat media sosial menjelaskan bahwa *buzzer* adalah seseorang yang didengarkan opininya, dipercayai, dan membuat orang lain bereaksi setelahnya. Secara sederhana, seorang *buzzer* media sosial adalah pengguna media sosial yang dapat memberikan pengaruh pada orang lain hanya melalui postingan yang ia tuliskan. Hal tersebut merupakan indentitas utama dari seorang *buzzer*, karena pada dasarnya *buzzer* harus mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain (Staple, 2023).

Buzzer berasal dari kata *buzz* yang berarti berdengung, dengungan, desasdesus, atau rumor. Sesuai dengan definisi tersebut, seorang *buzzer* memang bertugas untuk menyampaikan serangkaian atau sebagian informasi secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. *Buzzer* berarti alat yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian. Analogi di dunia twitter, *buzzer* berarti akun yang memiliki pengaruh besar, follower fanatik, tweet mereka sering di-retweet, aktif berinteraksi dengan follower dan yang pasti jumlah followernya banyak.

Dalam konteks politik di Indonesia *buzzer* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yakni (Arianto, 2020:14):

1) *Buzzer* Bayaran

Buzzer bayaran meski ada akan tetapi jumlahnya tidak

begitu banyak. Itupun lebih banyak berasal dari para blogger maupun warganet yang aktif di media sosial untuk membantu memperkuat suatu produk dan jasa yang dikategorikan sebagai *buzzer* bisnis.

2) *Buzzer* Relawan

Buzzer relawan tentu berasal dari para relawan politik yang memiliki tim siber. Hampir semua relawan politik di Indonesia memiliki tim siber di media sosial.

3) *Buzzer* Netral

Buzzer netral dalam konteks ini lebih bersifat tidak memihak apapun. Akan tetapi tetap ikut memperkuat suatu konten dan pesan agar menjadi sebuah opini publik. Sebut saja dalam kampanye anti golongan putih (golput) para *buzzer* dari golongan ini terus berupaya memperkuat atau memviralkan pesan tersebut agar bisa diketahui oleh seluruh warganet lainnya.

Dalam politik digital, *buzzer* dapat dikategorikan menjadi dua jenis (Arianto, 2016) yakni:

- a. Volunteers *Buzzer*, berasal dari netizen yang bersedia secara sukarela menjadi relawan politik digital. Tugas relawan digital adalah untuk menyebarkan informasi perihal calon yang didukung, maka secara otomatis para relawan ini kemudian menjadi *buzzer* politik. *Buzzer* ini mengedepankan semangat voluntarisme dalam melakukan *buzzer* sehingga mereka tidak menerima bayaran.
- b. Independent *Buzzer*, berasal dari para netizen yang memiliki sifat netral dan tidak memiliki keberpihakan apapun baik ideologi maupun program kerja sang calon. Berdasarkan sifat yang netral membuat sebagian besar rentan beralih profesi menjadi *buzzer* yang berwatak pragmatis mengakibatkan mereka bergerak sesuai dengan tuntutan para pembayar dan penyewa. Para *buzzer* ini seringkali mematok tarif sesuai dengan tingkat kesulitan

yang dihadapi dan banyaknya follower yang dimiliki. Biasanya *buzzer* independen ini direkrut oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan menjelang pemilu ataupun pilkada.

Selain dari kategori tersebut di atas, *Buzzer* juga memiliki karakteristiknya sendiri. Dari hasil riset yang dilakukan oleh CIPG pada tahun 2017, terdapat 4 karakteristik umum yang dimiliki oleh *buzzer* (Clara Esti dkk.,) yaitu:

- Persuasif
Salah satu karakteristik utama *buzzer* adalah keahlian mereka dalam merayu dan meyakinkan audiens. Mereka menggunakan bahasa yang menarik, emosional, dan meyakinkan untuk mempengaruhi pandangan dan opini orang lain. Kemampuan persuasif ini memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendukung produk, jasa, atau kampanye politik tertentu.
- Digerakkan motif tertentu (bayaran atau sukarela)
Buzzer dapat digerakkan oleh berbagai motif. Beberapa di antaranya mungkin bekerja atas dasar kesukarelaan karena keyakinan pribadi atau ideologi tertentu. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa *buzzer* bekerja atas bayaran dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan pengaruh mereka dalam menyebarkan pesan tertentu.
- Jaringan luas (punya akses ke informasi kunci)
Buzzer yang efektif memiliki jaringan luas di media sosial dan jejaring online. Mereka sering kali memiliki banyak pengikut dan memiliki akses ke informasi kunci atau perkembangan terkini yang dapat mereka manfaatkan untuk menyebarkan pesan dan informasi yang mereka ingin sampaikan.
- Punya kemampuan memproduksi konten
Buzzer memiliki kemampuan untuk menciptakan konten yang menarik dan relevan dengan audiensnya. Mereka

dapat menggunakan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, video, dan meme untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pandangan orang lain.

Selain itu, CIPG juga menguraikan empat karakter umum yang dimiliki oleh *buzzer* (Clara Esti dkk.,) antara lain: a) *Buzzer* harus memiliki jaringan luas yang memudahkan mengumpulkan informasiinformasi krusial. Pengikut dengan jumlah yang besar juga menjadi bagian dari karakter jaringan luas yang harus dimiliki. b) *Buzzer* memiliki kemampuan untuk melakukan perbincangan dengan khalayak di linimasa media sosial agar membuat pesan yang disampaikan menjadi persuasif dan dapat dipersonifikasi. c) Kemampuan produksi konten seperti pengetahuan jurnalistik dan pembingkaian atau pemilihan informasi adalah karakter ketiga *buzzer*. d) Motif, seorang *buzzer* bisa dibayar atau berdasarkan keputusan sukarela yang didorong oleh alasan ideologi maupun kepuasan.

Tugas dan Fungsi Buzzer Politik

Tugas *buzzer* tidak terbatas hanya untuk memposting sebuah tweet saja, tetapi juga menjalankan campaign atau rangkaian informasi lebih lanjut kepada para followers-nya. Jadi tugas dari seorang *buzzer* bisa menjadi layaknya brand ambassador, jadi seorang *buzzer* juga harus benar-benar mengerti apa yang ia sebarkan ke dunia maya. Umumnya sebuah akun bisa menjadi *buzzer* jika memiliki minimal jutaan followers dan paling tidak memiliki tiga karakter dasar yaitu, memiliki konten unik, relevan dan berguna, frekuensi *tweet* yang konsisten setiap hari dan kualitas interaksi yang tinggi (Juliadi, 2017:338).

Riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa pada awalnya *buzzer* media sosial dalam konteks politik digunakan untuk melawan kampanye hitam dan meningkatkan citra positif kandidat agar berpengaruh terhadap potensi keterpilihan. Dalam konteks politik *buzzer*

bermanfaat untuk membangun opini yang perlu dimenangkan, sehingga citra kandidat politik tersebut tidak tenggelam dengan fitnah.

Hal itu disebabkan *buzzer* memiliki kemampuan dalam mengamplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan. *Buzzer* biasanya memiliki jaringan luas misalnya punya akses ke informasi kunci, mampu menciptakan konten sesuai konteks, cakap menggunakan media sosial, persuasif, dan digerakkan motif tertentu baik bayaran maupun sukarela. Dengan demikian keterlibatan *buzzer* di Indonesia dalam peristiwa politik telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap *buzzer*. Sebab sejak saat itu, *buzzer* mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial (CIPG, 2019).

Selain peran di atas tersebut, *buzzer* juga memiliki peran atau fungsi sebagai berikut (Arianto, 2019:21); a) Membentuk dan memperkuat opini publik dalam ranah media sosial yakni dengan menempati trending topik di media sosial; b) Ikut membangun isu publik yang berasal dari investigasi individu maupun berasal dari *influencer* yang memiliki gagasan sama dengan isu tersebut; dan c) Menyebarluaskan suatu pesan dan konten semua platform media sosial sehingga semakin kuat dalam nalar warganet.

Perkembangan *Buzzer* di Indonesia

Kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang amat jelas adalah hadirnya internet serta perkembangan teknologi hingga memunculkan media sosial. Berdasarkan hasil survei tahun 2017 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 143,26 juta jiwa dari total 262 juta penduduk di Indonesia menggunakan internet dan sebesar 87,13% digunakan untuk mengakses media sosial (APJII, 2017).

Keberadaan media sosial diawali dengan munculnya

Facebook di tahun 2004 yang diikuti oleh *Twitter* di tahun 2006. Data dari kominfo.go.id menunjukkan bahwa pengguna Twitter di Indonesia mencapai angka 19,5 juta dari total 500 juta pengguna di seluruh dunia. (Kominfo, 2013). Pengguna *Twitter* dapat mengelompokkan kicauan menurut topik atau jenis dengan menggunakan tagar (hashtag) kata atau frasa yang diawali dengan tanda '#'. Sedangkan tanda '@', yang diikuti dengan nama pengguna, digunakan untuk mengirim atau membalas kicauan pada pengguna lain. Untuk memposting ulang kicauan pengguna lain dan membaginya pada pengikut sendiri, terdapat fitur *retweet*, yang dilambangkan dengan 'RT' (Abugaza, 2013).

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Evan Williams, dan Biz Stone. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di *Twitter*, 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif (Abugaza, 2013). Hadirnya media sosial, seperti *Twitter*, tentu tidak luput dari berbagai istilah yang kemudian muncul di media sosial seperti netizen, followers, influencer, hingga *buzzer*. *Buzzer* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm sedangkan dalam *Oxford Dictionaries*, *buzzer* diartikan sebagai 'An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling' yakni perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa *buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. Profesi *buzzer* memiliki dua kategori yakni, *buzzer* yang dilakukan secara sukarela dan *buzzer* sesuai permintaan. Biasanya *buzzer* sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres.

Dalam konteks komunikasi, kampanye merupakan segala kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang ditujukan untuk membujuk sejumlah besar khalayak. Di sini terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan, penting sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi (Loisa dan Setyanto, 2012).

Aktor-aktor politik mulai menggunakan jasa *buzzer* politik profesional untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di media sosial. Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita *hoax* dan *hatespeech* antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata ‘*buzzer*’ pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab *buzzer* politik profesional melalui media sosial.

Aktivitas seorang *buzzer* politik hingga diusulkan menjadi sebuah profesi terlarang. Artikel di Kompas.com menuliskan bahwa, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berjanji bahwa pemerintah akan berupaya melawan fitnah dan kebohongan yang ditebarkan para *buzzer* politik. Salah satunya dengan membentuk Badan Siber Nasional (Ihsanuddin & Bohang, 2017).

Buzzer Dalam Kampanye Politik di Indonesia

Dalam konteks komunikasi, kampanye merupakan segala kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang ditujukan untuk membujuk sejumlah besar khalayak. Di sini terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan, penting sekali untuk mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari

khalayak yang akan dipersuasi (Loisa & Setyanto, 2012). Aktor-aktor politik mulai menggunakan jasa *buzzer* politik profesional untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di media sosial.

Buzzer politik profesional di Indonesia terdiri dari *buzzer* relawan dan *buzzer* politik profesional yakni *buzzer* dengan imbalan tertentu. *Buzzer* politik di Indonesia memiliki proses perekrutan yang berbeda-beda. *Buzzer* politik profesional direkrut melalui proses open recruitment dan kemudian baru diminta untuk membuat akun-akun untuk menyebarkan pesan kampanye tertentu. Sedangkan proses perekrutan *buzzer* relawan diawali dengan proses seleksi terhadap timeline Twitter yang dilihat sesuai dengan kriteria pendukung pasangan calon.

Buzzer politik profesional di media sosial berperan untuk memperluas suatu informasi melalui aktivitas *retweet* terkait narasi dan hashtag harian hingga dapat dilihat oleh masyarakat dalam bentuk trending topic dan menjadi viral. Meskipun tidak sering dilakukan, namun terkadang *buzzer* politik profesional juga berperan untuk melakukan penyerangan melalui kritik terhadap pasangan calon atau aktor politik lain. Sedangkan, *buzzer* relawan politik di media sosial menyampaikan sebuah informasi di media sosial atas dasar inisiatif pribadi dilandaskan oleh kesamaan ideologi (Felicia & Loisa, 2018).

Gun Gun Heryanto mengidentifikasi perspektif komunikasi politik yang membagi empat tipologi. Pertama dissemanator yaitu menyebar informasi harian dengan pola berbagi dan terkoneksi satu sama lain tujuan agar ide, ajakan atau sikapnya diketahui dan bisa diikuti orang lain, kedua *pulicst*, biasanya membangun citra positif untuk tujuan popularitas dengan kontestasi politik seperti pemasaran politik melalui media sosial, ketiga *propagandist*, senantiasa mempraktikkan teknik-teknik propaganda guna kepentingan delegitimasi lawan sekaligus memperkuat legitimasi dirinya lewat internet, keempat *hactivist*, yaitu aktivitas utamanya adalah meretas dan membobol akun. Berdasarkan hal tersebut

maka *buzzer* sebagai komunikator politik merupakan propagandist profesional yang memiliki pola komunikasi terstruktur sesuai dengan momen yang dapat dipolitisasi dan menggiring opini publik. *Buzzer* politik profesional ini bekerja secara profesional yang memiliki jumlah pengikut media sosial yang lebih banyak, terorganisir, dan memiliki bayaran yang besar (Firdaus et all., 2012).

Dalam era media sosial, kampanye politik telah mengalami perubahan signifikan. Fenomena *buzzer* politik telah muncul sebagai aktor penting dalam menyebarluaskan pesan politik dan mempengaruhi opini publik. Artikel ilmiah ini membahas peran *buzzer* politik dalam kampanye politik, tantangan yang dihadapi, serta implikasi etika yang perlu diperhatikan. Melalui referensi dari berbagai sumber terpercaya, penulis menyajikan pandangan komprehensif tentang fenomena *buzzer* politik dalam proses kampanye politik.

Kampanye politik telah berubah secara dramatis seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial. *Buzzer* politik, sebagai komunikator aktif di platform digital, memainkan peran kunci dalam menyebarluaskan pesan politik dan mempengaruhi opini publik. Artikel ini akan membahas bagaimana *buzzer* politik berkontribusi dalam kampanye politik dan dampaknya dalam proses demokrasi. *Buzzer* politik adalah individu atau kelompok dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial, yang secara aktif menyebarluaskan pesan politik untuk mendukung calon atau partai tertentu. Peran mereka dalam kampanye politik meliputi (Lilleker, 2017):

- a. Menjangkau Audiens yang Lebih Luas: *Buzzer* politik memanfaatkan jaringan media sosial mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan *retweet*, *like*, dan *share*, pesan politik dapat dengan cepat menyebar di media sosial.
- b. Meningkatkan Visibilitas Pesan Politik: *Buzzer* politik menggunakan strategi kampanye viral untuk

- meningkatkan visibilitas pesan politik. Pesan tersebut menjadi trending *topic* di media sosial, sehingga menarik perhatian lebih banyak orang.
- c. Mempengaruhi Opini Publik: *Buzzer* politik dapat mempengaruhi opini publik melalui pesan-pesan yang mereka sebarkan. Mereka menciptakan narasi yang mendukung calon atau partai tertentu, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dan isu-isu terkait.

d) Rangkuman

Buzzer menjadi salah satu kekuatan politik di tengah perkembangan media sosial di Indonesia saat ini. *buzzer* dalam media sosial menurut Arbie yakni “*buzzer* dapat diartikan sebagai akun yang dapat membuat sebuah *topic* yang mempengaruhi banyak orang dikarenakan pengikut dari akun *buzzer* itu sendiri sangat banyak” (Juditha, 2019:96). Secara sederhana bisa diartikan pula bahwa *buzzer* itu adalah pengguna media sosial seperti biasa tetapi mempunyai pengaruh untuk bisa mengubah atau menarik opini orang lain agar tertarik dan setuju dengan apa yang dimaksud oleh *buzzer* itu. Dalam politik digital, *buzzer* dapat dikategorikan menjadi dua jenis (Arianto, 2016) yakni Volunteers *Buzzer*, dan Independent *Buzzer*. *Buzzer* pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa *buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. *Buzzer* politik profesional di Indonesia terdiri dari *buzzer* relawan dan *buzzer* politik profesional yakni *buzzer* dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, seringkali pada kontestasi Pemilu pada semua tingkatan, para peserta Pemilu memanfaatkan kuatan *Buzzer* untuk meraup suara masyarakat khususnya pengguna media sosial.

e) Latihan

1. Mahasiswa melakukan membaca dan melakukan *review* modul terkait Buzzer dan keterlibatannya dalam politik di Indonesia.
2. Hasil *review* bacaan modul akan dikembangkan dalam bentuk materi yang akan disampaikan secara berkelompok.

f) Evaluasi Pembelajaran

1. Pemahaman terhadap hasil bacaan dan *review* terhadap modul sembilan ini.
2. Ketepatan dalam menjelaskan hasil *review* dan pemahaman terhadap bacaan yang dilihat saat mahasiswa melakukan paparan.

g) Umpang Balik

3) Penutup

a) Rangkuman

Feminisme secara global terbagi atas tiga tahap, yaitu feminism gelombang pertama (*first wave feminism*) dari abad 18 sampai ke pra tahun 1960, feminism gelombang kedua (*second wave feminism*) setelah tahun 1960 dan feminism gelombang ketiga atau yang disebut dengan postfeminisme. Menurut William Outwaite (2008:313) feminism didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Gerakan feminism di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan religius masyarakat. Will Durant dalam bukunya “*The Pleasure of Philoshopy*” mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol pada era globalisasi tahun 2000an adalah terjadinya perubahan status wanita. Gerakan Feminis di Indonesia terus berkembang sejak masa colonial, pasca kemerdekaan sampai dengan reformasi.

Dalam kontek politik, puncak tertinggi dari gerakan Feminis adalah menghantarkan Wanita untuk memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki di Parlemen melalui kebijakan *Affirmative action*. Selain Feminisme, Buzzer menjadi salah satu kekuatan politik di tengah perkembangan media sosial di Indonesia saat ini. *buzzer* dalam media sosial menurut Arbie yakni “*buzzer* dapat diartikan sebagai akun yang dapat membuat sebuah topic yang mempengaruhi banyak orang dikarenakan pengikut dari akun *buzzer* itu sendiri sangat banyak” (Juditha, 2019:96). Secara sederhana bisa diartikan pula bahwa *buzzer* itu adalah pengguna media sosial seperti biasa tetapi mempunyai pengaruh untuk bisa mengubah atau menarik opini orang lain agar tertarik dan setuju dengan apa yang dimaksud oleh *buzzer* itu. Dalam politik digital, *buzzer* dapat dikategorikan menjadi dua jenis (Arianto, 2016) yakni *Volunteers Buzzer, dan Independent Buzzer*. *Buzzer* pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa *buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor politik. *Buzzer* politik profesional di Indonesia terdiri dari *buzzer* relawan dan *buzzer* politik profesional yakni *buzzer* dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, seringkali pada kontestasi Pemilu pada semua tingkatan, para peserta Pemilu memanfaatkan kuatan *Buzzer* untuk meraup suara masyarakat khususnya pengguna media sosial.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1

1. Pengaruh feminism dalam politik di Indonesia telah berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak dan pengaruh feminism dalam politik di Indonesia:
 - Peningkatan Kesadaran Gender: Gerakan feminis telah membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender di Indonesia. Hal ini telah mempengaruhi diskursus politik, dengan semakin banyaknya pembicaraan tentang

kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan isu-isu yang mempengaruhi perempuan di tingkat nasional dan lokal.

- Partisipasi Perempuan dalam Politik: Feminisme telah mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Meskipun masih ada tantangan, seperti stereotip gender dan diskriminasi, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik, baik sebagai anggota parlemen, pemimpin partai politik, atau aktivis politik.
- Pendukung Kebijakan Pro-Perempuan: Gerakan feminis telah memengaruhi pembentukan kebijakan pro-perempuan di Indonesia. Beberapa kebijakan penting telah diadopsi, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak.
- Penyadaran atas Isu-Isu Perempuan di Masyarakat: Feminisme telah membantu menyoroti isu-isu yang mempengaruhi perempuan di Indonesia, termasuk kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi, dan hak-hak perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
- Pengaruh dalam Gerakan Sosial dan Masyarakat Sipil: Gerakan feminis juga memiliki dampak dalam gerakan sosial dan masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi dan kelompok-kelompok feminis aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, melawan diskriminasi gender, dan mempromosikan kesetaraan di berbagai bidang.
- Pelembagaan Kementerian dan Badan yang Berfokus pada Perempuan: Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mendirikan lembaga-lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA).
- Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, pengaruh feminism dalam politik di Indonesia terus berkembang, mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua jenis kelamin. Peran feminism

di Indonesia menjadi penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kegiatan Pembelajaran 2

2. Di Indonesia, "buzzer politik" merujuk kepada individu atau kelompok yang menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik terhadap isu-isu politik, kandidat politik, atau partai politik tertentu. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang buzzer politik di Indonesia:
 - Media Sosial sebagai Alat Kampanye Politik: Dengan perkembangan media sosial, buzzer politik telah menjadi elemen penting dalam kampanye politik di Indonesia. Mereka menggunakan platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan pesan, mempromosikan kandidat, menyerang lawan politik, atau mempengaruhi opini publik.
 - Peran dalam Pemilihan Umum: Buzzer politik sering kali aktif selama periode pemilihan umum, mendukung kandidat tertentu atau memperjuangkan agenda politik tertentu. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi persepsi publik dan memobilisasi dukungan politik.
 - Bayaran atau Kepentingan Tertentu: Beberapa buzzer politik dapat beroperasi atas dasar bayaran atau dengan motivasi ideologis tertentu. Mereka bisa dibayar oleh partai politik, kandidat, atau kelompok tertentu untuk mempromosikan pesan atau narasi tertentu.
 - Kritik atas Keaslian dan Transparansi: Buzzer politik sering kali mendapat kritik karena kurangnya keaslian dan transparansi dalam menyampaikan pesan mereka. Beberapa di antaranya menggunakan akun palsu atau menyebarkan informasi palsu (hoaks) untuk mencapai tujuan politik tertentu.
 - Dampak terhadap Demokrasi: Peran buzzer politik dalam politik Indonesia telah menjadi topik perdebatan. Beberapa menganggapnya sebagai sarana untuk memberikan suara kepada orang-orang yang tidak terdengar dalam politik mainstream, sementara yang lain mengkhawatirkan bahwa aktivitas buzzer politik dapat mengganggu proses demokrasi dan menyebarkan disinformasi.
 - Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah Indonesia telah mencoba

untuk mengatur dan mengawasi aktivitas buzzer politik melalui undang-undang dan peraturan terkait dengan media sosial dan kampanye politik. Namun, implementasi dan penegakan regulasi tersebut masih menjadi tantangan.

- Secara keseluruhan, buzzer politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia, terutama dalam era digital di mana media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan politik. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang disajikan oleh buzzer politik, serta untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses politik secara keseluruhan.

c) Daftar Istilah

<i>Affirmative action</i>	Kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama
<i>Buzzer</i>	Akun yang dapat membuat sebuah topic yang mempengaruhi banyak orang
<i>Feminisme</i>	Femmina/ Perempuan
<i>Gender</i>	Konsep mendasar yang menunjukkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sosiokultural
<i>Hatespeech</i>	Kebencian
<i>Hoax</i>	Berita bohong
<i>Ideologi</i>	Seperangkat keyakinan atau filosofi yang berisi ide, budaya dan pola hidup tertentu
<i>Kampanye</i>	Suatu bentuk tindakan sosial dengan tujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan
<i>Representatif</i>	Perwakilan
<i>Sosiokultural</i>	Hubungan antara aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat
<i>Trias Political</i>	Pemisahan kekuasaan antar eksekutif,

d) Referensi

- Abercrombie, Nicholas dkk. (2006). *Kamus Sosiologi*, terj. Desi Noviyani dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abugaza, Anwar. (2013). *Social Media Politica: Gerak Massa Tanpa Lembaga*. Tangerang: PT Tali Writing & Publishing House.
- Anih Rabbani. (2011). *Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arianto, Bambang. (2019). Kontestasi Buzzer Politik dalam Mengawal APBD DKI Jakarta, *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 5(1), Hal. 21.
- Arianto, Bambang. (2020). Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, Hal. 14.
- Arianto, Bambang. *Buzzer Politik dan Informasi Hoax*, (Harian Kedaulatan Rakyat, 28 November 2016.
- Felicia, & Riris Loisa. (2018). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter, *Jurnal Ilmiah Koneksi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 2(2), Desember 2018.
- Firdaus, Indrianti Azhar, et al. (2012). Gaduh Buzzer Politik di Era Jokowi. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), Hal. 22
- Humm, Maggie. (2007). *Ensiklopedia Feminisme*, Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ihsanuddin, & Fatimah Kartini Bohang. (2017). “Buzzer” Politik Diusulkan Jadi Profesi Terlarang di Indonesia. *Jurnal Kominfo*.
- Juditha, Christiany. (2019). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), 94-109.
- Juliadi, Rismi. (2017). Pembangunan Identitas Buzzer di Media Sosial (Studi Deskriptif Identitas Buzzer di Twitter), *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Kemanusiaan*, 5(1), Hal. 338.
- Klara Esti, M. Rinaldi Camil, & Natasha H. Attamimi. (2017). Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia.

- <https://cipg.or.id/id/publication/buzzer-2/>
- Kominfo. (2013). *Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*. 7 November 2013, diunduh tanggal 12 Februari 2024.
- Lilleker, D., Jackson, N. A., & Thorsen, E. (Eds.), *Media, Voters and the Campaign*. Poole, UK: Centre for the Study of Journalism, Culture and Community, (Bournemouth University: UK Election Analysis 2017).
- Loisa, R., & Setyanto, Y. (2012). *Mencari Bentuk Kampanye Politik Khas Indonesia: Pencitraan Berbasis Dimensi Budaya*. <http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites>.
- Mulyono, Ignatius. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 Februari 2010.
- Nugroho, Hastanti Widj. (2004). *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Nurcahyo, Abraham. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, *Jurnal Agastya*, Vol 6 No. 1, hlm 25.
- Outwaite, William. (2008). *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo. Jakarta: Prenada Media Group.
- Paramitha, Anggie Natalia. (2002). *Unsur Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Priandi, Rizky, & Kholis Roisah. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), hlm 108-109.
- Sarah Gamble. (2004). *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalasutra. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sofia, Adib. (2009). *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme: Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Staple, Jeff. Apa Itu Twitter Buzzer? Peluang Penghasilan Aktivis Media Sosial. (05 Juli 2023), <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-twitter-buzzer-peluang-penghasilan>
- Tong, Rosemarie Putnam. (2006). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro).

Yogyakarta: Jalasutra.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Wiyatmi. (2012). *Kritik Sastra Feminis, Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

DAFTAR LAMPIRAN BMP

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah

JUDUL MAKALAH ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat)

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah (*judul sub bab*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi:

- a) Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- b) Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- c) Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- d) Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- e) Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.
- f) Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-

data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat *Alternative* penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

b. Rumusan Masalah (*judul sub bab*)

Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian masalah tersebut.

c. Pertanyaan Kritis (*judul sub bab*)

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada padakesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB III PEMBAHASAN

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek

analisis anda" "Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan (*judul sub bab*)

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kritis pada bab I.

B. Rekomendasi (*judul sub bab*)

Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah atau memperbaharui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit: nama penerbit.*

Contoh:

- A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote: (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan: Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010: 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan: Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.¹

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau
Bodynote Itu Yang AkanMenjadi Isi Dari Daftar
Pustaka Dalam Makalah Anda.

¹ L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22.(Contoh Footnote)

Lampiran II: Struktur Penulisan Paper atau Artikel

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold)

A. Latar Belakang Masalah (*kapital di awal kata, dan bold*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi:

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi ataupun temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.
- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang andal dan teakuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat *Alternative* penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Tinjauan Teoritis (*kapital di awal kata, dan bold*)

"Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote makajangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers," Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang andagunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang masalah.

C. ANALISIS (*kapital di awal kata, dan bold*)

"Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda" "Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II".

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

D. KESIMPULAN (*kapital di awal kata, dan bold*)

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik)*.

Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit: nama penerbit.

Contoh:

A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control*(Terj). Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote: (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style): Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010: 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.²

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang AkanMenjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

²L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010.
Hal. 22.(Contoh Footnote)

BIOGRAFI PENULIS



Indah Novitasari yang memiliki nama kecil “Ovit” lahir di Jakarta, 05 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh antara lain adalah Strata-1 Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia, Strata 2 *Asymmetric Warfare* di Universitas Pertahanan, serta sedang dalam tahap penyelesaian Strata 2 Ilmu Politik dengan kosentrasi ekonomi politik dan psikologi

politik di Universitas Nasional. Sebelum memutuskan mengabdi sebagai tenaga pendidik, penulis meniti karier sebagai asisten pribadi anggota Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014-2019, yang kemudian mengantarkan penulis untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut. Setelah menyelesaikan studi jenjang magister, penulis juga dilibatkan dalam sejumlah penelitian bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak tahun 2015 hingga 2017, begitu juga dengan penelitian Indeks Pembangunan Hukum Indonesia (IPHN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM pada tahun 2017. Sejumlah publikasi ilmiah penulis antara lain, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia (2015), Babak Baru Rejim Keamanan Siber di Asia tenggara menyongsong ASEAN Connectivity 2025 (2015), Analisis Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape dalam Pemilukada Sebagai Implikasi Konflik tanah di Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 (2019), Pendidikan Politik bagi Generasi Milenial di SMA Global Prestasi, Kalimalang, Bekasi Barat (2019), Gerakan Filantropi Sebagai Upaya Pembentukan opini Publik : Studi Kemunculan Platform Donasi Digital www.kitabisa.com (2020), Implikasi Pendirian Badan

Siber Nasional dan Sandir Negara (BSSN) terhadap peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Indonesia Menyongsong Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (2018), Fenomena Botoh pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri (2020). Saat ini penulis merupakan dosen di program studi IlmuPolitik, Fisipol, Universitas Kristen Indonesia. Bidang kajian yang menjadi keahlian penulis antara lain: konflik dan konsensus politik, ekonomi politik, politik keamanan, politik luar negeri, psikologi politik serta interpretasi dan pengolahan *big data* politik.

BIOGRAFI PENULIS



Gaston Otto Malindir atau yang sering disapa dengan Gaston, lahir di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pada tanggal 15 Maret tahun 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Strata-2 (S2) pada Program Studi Pascasarjana Ilmu

Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, dan saat ini sedang menempuh Strata-3 (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI). Keseriusan penulis dalam dunia pendidikan sudah ditunjukkan sejak mengenyam pendidikan Strata-1 (S1) dengan berhasil lulus tepat waktu selama 4 tahun dan berhasil meraih predikat kelulusan “Dengan Pujian”. Dua tahun pasca lulus dari jenjang Strata-1 (S1) tepatnya pada tahun 2021 penulis memutuskan untuk melanjutkan studi Strata-2 (S2) yang mampu diselesaikan dalam jenjang waktu 18 bulan dan menjadi lulusan tercepat pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran pada tahun 2022. Tepat satu bulan setelah menyelesaikan Strata-2 (S2) di tahun 2022, penulis mulai meniti karir sebagai Dosen (tidak tetap) di salah universitas yang ada di Jawa Barat sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata-3 (S3) pada tahun 2023. Sejumlah publikasi ilmiah penulis pada beberapa jurnal terakreditasi Sinta 2, 3 dan 4 antara lain; *The Effectiveness of Salaman Application-Based Service Innovations for Homeless Beggars in Bandung City* (2022), *Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Arjasari Kecamatan Lewisari Kabupaten*

Tasik (2022), *Evaluation of Halal Tourism Development Strategy in West Nusa Tenggara Province (Study At Tourism Departmen)* (2023). Penulis juga aktif (menulis) sejak masih mengenyam pendidikan Strata-1 (S1) sampai hari ini di beberapa media online seperti *The Columnist*, Omong-Omong.com, Pintar Politik, Bangka Pos, Kompasiana, dan Pikiran Rakyat, dengan menyoroti berbagai fenomena politik yang terjadi baik ditingkat lokal maupun nasional. Saat ini penulis merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Bidang kajian yang menjadi keahlian penulis antara lain: Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Politik Lokal, Kepartaian, dan Kepemiluan.